

**AKTUALISASI LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM
BAGI SISWA MINORITAS MUSLIM DI DENPASAR BALI**

DISERTASI



Oleh
Alaika M. Bagus Kurnia PS
NIM: F03119006

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023

PERNYATAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Alaika M. Bagus Kurnia PS

NIM : F03119006

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 November 2022

Saya yang Menandatangani,



SCDDA/139932632
Alaika M. Bagus Kurnia PS

PERSETUJUAN PROMOTOR

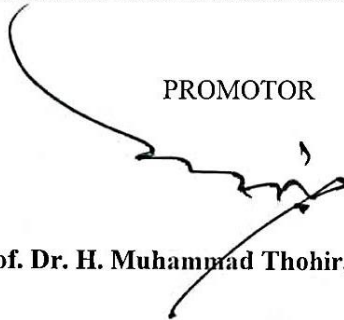
Disertasi Berjudul
**Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim di Denpasar
Bali** yang ditulis oleh **Alaika M. Bagus Kurnia PS** ini disetujui pada tanggal 28
November 2022

Oleh:
PROMOTOR



Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf, M. Ag

PROMOTOR



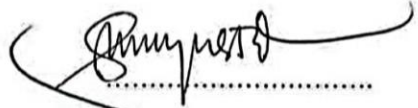
Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S. Ag., M. Pd

PENGESAHAN TIM PENGUJI NASKAH DISERTASI

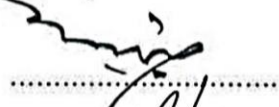
Disertasi berjudul, " Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim di Denpasar, Bali" yang ditulis oleh Alaika M. Bagus Kurnia PS ini telah diuji Verifikasi naskah pada tanggal 15 Desember 2022.

Tim Penguji:

Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf, M. Ag (Ketua/ Penguji)



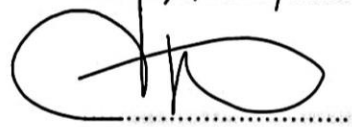
Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S. Ag., M. Pd (Sekretaris/ Penguji)



Dr. M. Yunus Abu Bakar, M. Ag. (Penguji)



Drs. H. Nur Kholis, M. Ed.Admin., Ph.D. (Penguji)



Dr. Nadlir M. Pd (Penguji)



Dr. Taufiq, M. Pd.I (Penguji)



Surabaya, 22 Desember 2022

Ketua



Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf, M. Ag

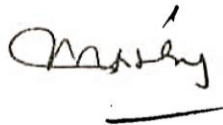
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Disertasi berjudul “Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim Denpasar, Bali” yang ditulis oleh Alaika M. Bagus Kurnia PS ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Tertutup pada tanggal 5 Januari 2023.

Tim Penguji:

1. Prof. H. Masdar Hilmy, S. Ag., M.A., P.h.D. (Ketua Penguji)
2. Prof. Dr. Kusaeri, M.Pd. (Sekretaris Penguji)
3. Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf, M. Ag. (Promotor/Penguji)
4. Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S. Ag, M. Pd (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A (Penguji Utama)
6. Drs. H. Nur Kholis, M. Ed.Admin, Ph.D. (Penguji)
7. Dr. Nadlir, M. Pd.I. (Penguji)

Surabaya, 30 Januari 2023
Ketua



Prof. H. Masdar Hilmy, S. Ag., M.A., P.h.D.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul, "Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim Denpasar, Bali" yang ditulis oleh Alaika M. Bagus Kurnia PS ini telah diuji dalam ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 16 Februari 2023.

Tim Penguji:

1. Prof. H. Masdar Hilmy, S. Ag., M.A., P.h.D. (Ketua Penguji)
2. Prof. Dr. Kusaeri, M. Pd. (Sekretaris Penguji)
3. Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf, M. Ag. (Promotor/ Penguji)
4. Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S. Ag., M. Pd (Promotor/ Penguji)
5. Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A (Penguji Utama)
6. Drs. H. Nur Kholis, M. Ed.Admin., P.h.D. (Penguji)
7. Dr. Nadlir, M. Pd.I (Penguji)

Handwritten signatures of the seven members of the examination committee, corresponding to the list on the left.

Surabaya, 12 April 2023



Prof. H. Masdar Hilmy, S. Ag., M.A., P.h.D.

DAFTAR TRANSKRIPSI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut:¹

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	-	ط	ʔ
ب	B	ظ	ʒ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (*mad*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf seperti ā, ī, dan ū (ﺀ, ٲ, dan ٴ). Bunyi hidupdobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”, seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbū’ah* dan berfungsi sebagai *ṣifah* (*modifier*) atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”.

¹ Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal Disertasi dan Disertasi* (Surabaya: UINSA Press, 2018), 16.

ABSTRAK

Judul	: Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim di Denpasar Bali
Penulis	: Alaika M. Bagus Kurnia PS
Promotor	: 1. Prof. Abd. Rachman Assegaf, M. Ag 2. Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S. Ag., M. Ag
Kata Kunci	: Layanan, Pendidikan Islam, Siswa, Minoritas

Keberadaan minoritas sering dihadapkan pada minimnya dukungan dalam beragama. Mereka hidup dengan penuh ketidaknyamanan apabila prasyarat infrastruktur sosial tidak dapat diorkestrasi secara baik. Dalam konteks Bali, khususnya siswa minoritas muslim di SMA/ SMK baik negeri maupun swasta, siswa tersebut kurang mendapatkan layanan (Pendidikan Islam) dengan baik.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi aktualisasi layanan pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim, mendeskripsikan praktik layanan pendidikan Islam bagi siswa muslim minoritas hingga model yang dipakai untuk mewujudkan layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas dengan lokus di SMA/ SMK Denpasar Bali. Adapun penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan pada penelitian ini menggunakan fenomenologi. Lokus penelitian berada di SMA negeri 2 Denpasar, SMA Negeri 7 Denpasar, SMK Negeri 1 Denpasar dan SMK Negeri 2 Denpasar. Juga demikian beberapa data didapatkan melalui 3 orang dari unsur kedinasan, 4 kepala sekolah, 3 guru PAI, 8 perwakilan siswa sebagai bahan FGD, dan 1 wakil kepala urusan kurikulum. Sehingga ada 8 orang yang menjadi objek pengambilan data penelitian. Adapun data utama, peneliti mendapatkan dari unsur guru PAI, kemudian siswa, dan yang terakhir adalah pemegang kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah dan pimpinan sekolah. Kemudian sumber data didapat melalui wawancara terbuka kepada Kabid Pendis Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Kasi Pendis Kemenag Kota Denpasar, Para Kepala Sekolah di 4 objek sekolah, 3 guru PAI di objek sekolah, dan 1 waka urusan kurikulum di SMA Negeri 2 Denpasar. Sedangkan Observasi dilakukan di SMK Negeri 2 Denpasar, dan FGD dilaksanakan oleh Guru PAI dan perwakilan siswa muslim. Juga demikian wawancara tertutup melalui angket disebarakan secara acak kepada siswa muslim melalui google form.

Hasil penelitian disertasi ini *Pertama*, aktualisasi layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di Denpasar Bali tercermin dari ketersediaan guru, layanan sarana pra sarana, layanan administrasi, layanan waktu, dan layanan kurikulum. Ketersediaan guru PAI di provinsi Bali sangat minim. *Kedua*, praktik layanan pendidikan Islam kepada siswa muslim di SMK/SMA di Denpasar tercermin dalam dua hal; praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan praktik pembiasaan kegiatan keagamaan. *Ketiga*, Model layanan pendidikan Islam dalam penelitian ini adalah layanan mandiri (self service). Dalam konteks Bali, para guru lebih banyak melakukan eksplorasi mandiri guna menggali potensi peserta didik. Secara teoretik, penelitian ini juga menguatkan basis tiga teori yang ada bahwa tidak selamanya minoritas hanya mengekor pada mayoritas. Temuan kami justru minoritas Muslim di lingkungan sekolah Denpasar, Bali dapat menjadi agen inovasi dan perubahan sosial bagi ikatan masyarakat, sehingga model pelayanan pendidikan Islam pada setting minoritas dapat dikatakan sebagai model pelayanan kaktus sebagaimana kerangka tersebut dijelaskan pada implikasi teori.

ABSTRACT

Title	: Actualization of Islamic Religious Education Services for Muslim Minority Students in Denpasar, Bali
Author	: Alaika M. Bagus Kurnia PS
Dissertation	: 1. Prof. Abd. Rachman Assegaf, M. Ag
Supervisor	: 2. Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S. Ag., M. Ag
Keywords	: Services, PAI, Students, Minorities

The existence of minorities is often faced with a lack of support in religion. They live with great discomfort when the prerequisites for social infrastructure cannot be orchestrated properly. In the context of Bali, Muslim minority students of public and private senior high school/vocational schools do not get good services (Islamic education).

This study aims to explore the actualization of Islamic education services for Muslim minority students, describe the practice of Islamic education services for minority Muslim students to the models used to realize Islamic education services for minority students with a focus on senior high school/vocational school in Denpasar Bali. This research is qualitative. This research also uses a phenomenology approach. The locus of research was located at State Senior High School 2 Denpasar, State Senior High School 7 Denpasar, State Vocational High School 1 Denpasar, and State Vocational High School 2 Denpasar. Likewise, some data were obtained from 3 people from the official department, 4 school principals, 3 Islamic education teachers, 8 students from FGD representatives, and 1 deputy head of curriculum affairs. Accordingly, there are 8 participants in this study. As for the main data, the researchers obtained it from the PAI teachers, then students, and finally the policy holders, in this case the government and school leaders. The data were obtained through open interviews with the Head of Islamic Education Regional Office of the Ministry of Religion of Bali Province, the Head of Islamic Education Section of the Ministry of Religion of Denpasar City, Principals of 4 school objects, 3 Islamic education teachers, and 1 deputy for curriculum affairs at State Senior High School 2 Denpasar. While the observation was carried out at State Vocational High School 2 Denpasar, and the FGD was carried out by PAI teachers and representatives of Muslim students. Likewise, closed interviews through questionnaires were distributed randomly to Muslim students via the Google form.

The results of this dissertation research are: First, the actualization of Islamic Education services for Muslim minority students in Denpasar, Bali is reflected in the availability of teachers, infrastructure services, administrative services, time services, and curriculum services. The province of Bali has a lack of Islamic education teachers. Second, the practice of Islamic education services to Muslim students at high school/vocational school in Denpasar is reflected in two things; learning practices performed by teachers and the practice of habituation of religious activities. Third, the Islamic education service model in this study is self-service. In the Balinese context, teachers do more independent exploration to explore the potential of students. Theoretically, this research also strengthens the basis of the three existing theories that the minority does not always just follow the majority. Our findings are that the Muslim minority in the Denpasar, Bali school environment can become agents of innovation and social change for community ties, so that the model of Islamic education services in minority settings can be said to be a model of cactus service as the framework explained in the theoretical implications.

مستخلص

الموضوع : تطبيق خدمات التربية الدينية الإسلامية لطلاب الإسلامية الأقلية دينباسار ، بالي

الباحث : عليك محمد باكوس كرنبا . ف. س

المشرف : الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السقاف الماجستير و الأستاذ الدكتور محمد طاهر الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية : خدمات، تعليم ديني إسلامي، طلاب، أقليات

غالبًا ما يواجه وجود الأقليات نقصًا في الدعم الديني. إنهم يعيشون مع عدم ارتياح كبير عندما لا يمكن تنسيق المتطلبات الأساسية للبنية التحتية الاجتماعية بشكل صحيح. في سياق بالي ، وخاصة طلاب الأقليات المسلمة في مدرسة الثانوية / مدرسة التخصص، العام والخاص ، لا يحصل هؤلاء الطلاب على خدمات جيدة (التعليم الإسلامي). تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف تفعيل خدمات التعليم الإسلامي لطلاب الأقليات المسلمة ، ووصف ممارسة خدمات التعليم الإسلامي لطلاب الأقليات المسلمة إلى النماذج المستخدمة لتحقيق خدمات التعليم الإسلامي لطلاب الأقليات مع التركيز على مدرسة الثانوية / مدرسة التخصص في دينباسار أما هذا البحث فهو بحث نوعي. بينما يستخدم النهج في هذه الدراسة الظواهر. كان موقع البحث في مدرسة الثانوية الحكومية السابعة دينباسار و مدرسة الثانوية الحكومية الثانية دينباسار و مدرسة التخصص الثانية دينباسار وبالمثل ، تم الحصول على بعض البيانات من ثلاثة أشخاص من القسم الرسمي ، و أربعة مديري مدارس ، و ثلاثة مدرسين تابعين لمنظمة تربية الدين الإسلامي ، و ثمانية ممثلين عن الطلاب كمواضيع مجموعات التركيز ، ونائب رئيس شؤون المناهج. بحيث أصبح هناك ثمانية أشخاص موضوع البحث. ثم تم الحصول على مصادر البيانات من خلال المقابلات المفتوحة مع رئيس المكتب الإقليمي للتربية الإسلامية بوزارة الأديان في مقاطعة بالي ، ورئيس قسم التربية الإسلامية بوزارة الأديان في مدينة دينباسار ، ومدرء في أربعة كائنات مدرسية ، و ثلاثة مدرسين في تربية الدين الإسلامي في الكائنات المدرسية ، ونائب رئيس شؤون المناهج في مدرسة الثانوية الحكومية الثانية دينباسار . بينما تم تنفيذ الملاحظة في مدرسة التخصص الحكومية ، ونفذ مجموعات التركيز من قبل معلمي تربية الدين الإسلامي وممثلي الطلاب المسلمين. وبالمثل ، تم توزيع المقابلات المغلقة من خلال الاستبيانات بشكل عشوائي على الطلاب المسلمين عبر نموذج.

نتائج بحث الأطروحة هي: أولاً ، ينعكس تفعيل خدمات التعليم الإسلامي لطلاب الأقليات المسلمة في دينباسار ، بالي في توافر المعلمين ، وخدمات البنية التحتية ، والخدمات الإدارية ، وخدمات الوقت ، وخدمات المناهج الدراسية. توافر معلمي تربية الدين الإسلامي في مقاطعة بالي ضئيل. ثانيًا ، تنعكس ممارسة خدمات التعليم الإسلامي للطلاب المسلمين في مدرسة الثانوية / مدرسة التخصص في دينباسار في أمرين ؛ ممارسات التعلم التي يقوم بها المعلمون وممارسة التعود على الأنشطة الدينية. ثالثًا ، نموذج خدمة التربية الإسلامية في هذه الدراسة هو الخدمة الذاتية. في السياق البالي ، يقوم المعلمون بمزيد من الاستكشاف المستقل لاستكشاف إمكانات الطلاب. من الناحية النظرية ، يعزز هذا البحث أيضاً أساس النظريات الثلاث الموجودة بأن الأقلية لا تتبع دائماً الأغلبية فقط. ما توصلنا إليه هو بالتحديد أن الأقلية المسلمة البالية في هذه الحالة يمكن للطلاب والمعلمين المسلمين أن يصحبوا وكلاء للابتكار والتغيير الاجتماعي للروابط المجتمعية إذا اقترحوا أفكارًا بديلة ومبتكرة. يمكنهم حتى خلق صراع اجتماعي من خلال اقتراح مقترحات بديلة لتصورات المجتمع الراسخ.

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah dan tidak henti-hentinya al-Faqir Alaika M. Bagus Kurnia PS selalu bersyukur pada-Nya atas nikmat, rahmat dan *ma'ūnah* sehingga penyusunan disertasi ini bisa terselesaikan dengan lancar, meskipun masih perlu banyak koreksi. Disertasi sebagai tugas akhir dari studi doktoral sehingga sangat dilakukan secara profesional, teliti, sistematis dan maksimal. Disertasi ini mengangkat judul: “Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim di Denpasar Bali.”

Demikian juga salawat dan salam teruntuk sang motivator unggul, panutan seluruh manusia, yaitu *Imāmunā wa Ajdādunā Sayyidinā* Muhammad Saw, yang telah mencurahkan energi syafaat dan *maḥabbah* bagi penulis, sehingga bisa menyelesaikan tulisan disertasi ini.

Disertasi ini sebagai bahan kajian referensi atau khazanah bagi civitas akademika, para pelaku pendidikan Islam baik dari pemangku kebijakan, kepala sekolah, guru, hingga wali murid. Karena disertasi ini menjelaskan mengenai sistem layanan pendidikan Islam, praktik layanan pendidikan Islam hingga layanan pendidikan Islam di lingkungan sekolah khususnya SMA/ SMK Negeri yang berbasis umum di lingkungan wilayah mayoritas nonmuslim atau Hindu.

Penelitian disertasi ini juga memiliki lokus penelitian di Denpasar, Bali. Sebagai alasan kuat karena secara angka, jumlah penduduk muslim tidak terlalu sedikit, dan menduduki peringkat kedua terbanyak setelah Hindu. Sehingga secara ideal, mereka perlu mendapatkan pelayanan keagamaan yang layak khususnya di bidang pendidikan. Juga perlu diketahui, apakah pelayanan pendidikan Islam ketika dipraktikkan di sekolah, apakah juga sama dengan atau bahkan lebih minim dari pelayanan pendidikan agama kristen atau katolik yang diterapkan di Jawa Timur, yang skala kuantitas mereka terbanyak nomor dua. Sehingga para pembaca atau peneliti akan mengetahui mengenai setting pelayanan pendidikan Islam.

Atas terselesaikannya tugas akhir dari perjalanan studi doktor ini, telah banyak pihak yang mendukung, membantu, dan memotivasi dalam menyelesaikan studi doktoral ini, sehingga penulis menyampaikan ucapan beribu-ribu terimakasih kepada semua pihak, di antaranya:

1. Prof. H. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Prof. Dr. Kusaeri, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Doktor PAI Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Dr. Hj. Hanun Asrohah, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Doktoral PAI Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2018-2022, yang menjadi memotivasi penulis agar melanjutkan studi S-3 dan alhamdulillah ini adalah berkat bimbingan dan kesabarannya penulis hingga menyelesaikan naskah disertasi ini.
5. Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf selaku promotor utama. Dengan doa dan kesabaran beliau dalam membimbing, al-Faqir mengucapkan *jazākumullāh khairān katsirā*.
6. Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S. Ag., M. Pd., berkat beliau, yang selalu sabar dan ikhlas mengingatkan akan progress naskah disertasi ini, sehingga hari ini adalah sebuah buah tangan darinya, dan hal ini tidak akan pernah penulis lupakan.
7. Kakek tercinta, alm. Abuya Mas Muhammad Fathoni bin Ibrahim Basyaiban dan KH. Syuhada' bin Dali. Semoga arwah kedua kakek penulis selalu mendapatkan nikmat kubur hingga kelak di akhirat dikumpulkan bersama kami sekeluarga.
8. Nenek tercinta, Ibu Nyai Hj. Ainur Rohmah binti Jalaluddin dan Hj. Kartini binti H. Abd. Mannan. yang tidak pernah putus untuk mendoakan penulis.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Abi Agus Fahmi Basyaiban dan Ibunda Tutik Zahrotul Amaliyah, Disertasi ini dipersembahkan dan disematkan untuk kedua orang tuaku, karena motivasi, lika-liku perjalanan pembuatan disertasi ini tidak luput dari tenaga, biaya, pikiran dan doa yang tidak pernah terputus oleh beliau berdua.
10. Adek-adekku tercinta, Syarifah Nanda Rizki Amaliyah Basyaiban dan Sayyid Alaina Ahmad Wildan Saifullah Basyaiban, motivasi secara tidak langsung,

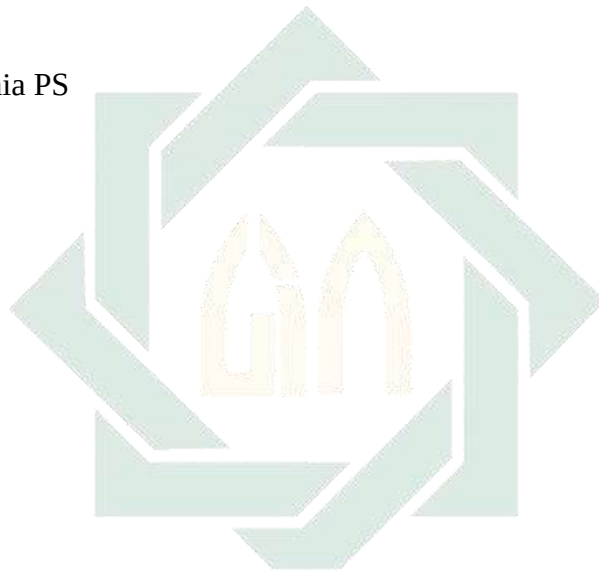
sindiran ketika melakukan kontak dengan penulis, merupakan sebagai cambuk semangat untuk menyelesaikannya.

11. Kepada Cik La, Cik Mo, Cik Adit, Cik Ipa, Ami Husein, Ami Rul, Ami Agus, Om Aan, Ami Inas, Ami Zakki, Ami Nizar, Cik Nina, Cik Atik, dan seluruh keluarga penulis terdekat. Semuanya adalah semangat penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
12. Kedua putriku, Shakeena Hamida Basyaiban dan Shakila Hamida Basyaiban. Sedikit tulisan ini seakan memberikan motivasi dalam pendidikan baginya.
13. Terkhusus keponakan tercinta, alm. Ali Muhammad Husain. Semoga kelak dapat menolong kita sekeluarga di akhirat.
14. Teman-teman seperjuangan kelas 708 program doctoral UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya bunyai Masykurotin, Mas Muvid, Nelud, Gus fihris, Abah Narto, Mas Zaini, Pak Fathur, Pak Ali Ridho, Lora Kholis, Bu Laila, Bu Halima, Bu Hanik, Pak Nasar, Abah Suyadi, Abah Soleh, Pak Takwil. Semuanya adalah panutan dan dapat memacu penulis untuk menuntaskan disertasi ini.
15. Segenap civitas akademika Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya, khususnya teman-teman dosen program studi S-1 Ilmu Gizi.
16. Segenap Tim supporting penulis, crew CV. Global Aksara Pers, khususnya Sahabat dunia akhirat Dr. Muhamad Basyrul Muvid, Mas Senata, Mbak Septiananda, Mbak Ilil yang secara langsung selalu penulis ganggu aktivitasnya. Juga sekalian Ami Ahmad Nizar yang membantu penulis untuk mentashih abstrak bahasa arab.
17. Para guru tercintaku yang selalu penulis doakan, alm. KH. Muhammad Bashori Alwi Murtadho, Ust. Mas Hasan Nu'aim, Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, Habib Hasan bin Abdullah Assegaf, Abah H. Abdurrahman, alm. Ust. H. Masykur Idris. Semoga

Selanjutnya, penulis sadar dan yakin bahwa dalam penulisan dan penyusunan hasil disertasi banyak kekurangan, sehingga penulis secara terbuka sangat mengharapkan masukan, kritikan dan saran yang mendukung demi kesempurnaan dan kebaikan pada naskah ini selanjutnya.

Surabaya, 27 Januari 2023

Alaika M. Bagus Kurnia PS



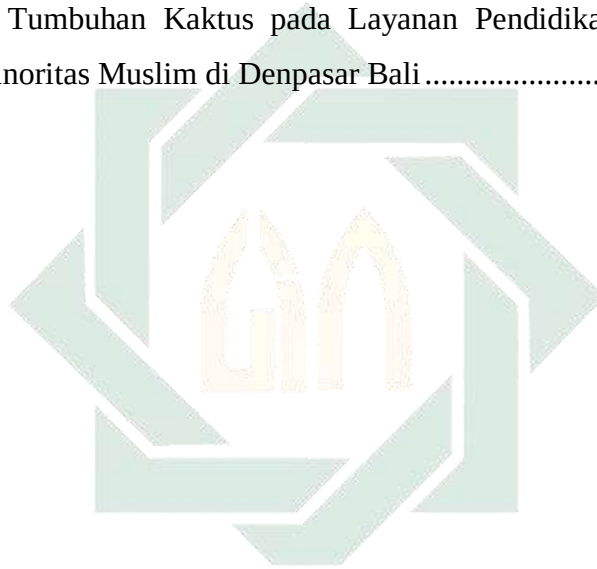
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	ii
Persetujuan Promotor	iii
Pengesahan Tim Penguji Naskah Disertasi	iv
Pengesahan Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup	v
Daftar Transliterasi	vi
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xv
Daftar Gambar	xx
Daftar Tabel.....	xxi
Daftar Grafik.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Signifikansi Teori.....	15
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Kerangka Teoritik	21
H. Metode Penelitian.....	31
I. Sistematika Pembahasan	44
BAB II LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF	
PENGARUH MINORITAS, KONTAK DAN KONSTRUKSI SOSIAL	45
A. Layanan Pendidikan Islam	45
1. Konsep Layanan Pendidikan Islam	45
2. Dimensi Layanan Pendidikan Islam.....	50
3. Aspek Layanan Pendidikan Islam	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kalender Akademik Pendidikan Bali 2019.....	120
Gambar 4.1 Skema Sistem Pelayanan Pendidikan Islam di SMA/ SMK Negeri Denpasar	193
Gambar 5.1 Aktualisasi Layanan Terpadu Pendidikan Islam di Denpasar, Bali ..	253
Gambar 5.2 Analogi Tumbuhan Kaktus pada Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim di Denpasar Bali	256



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

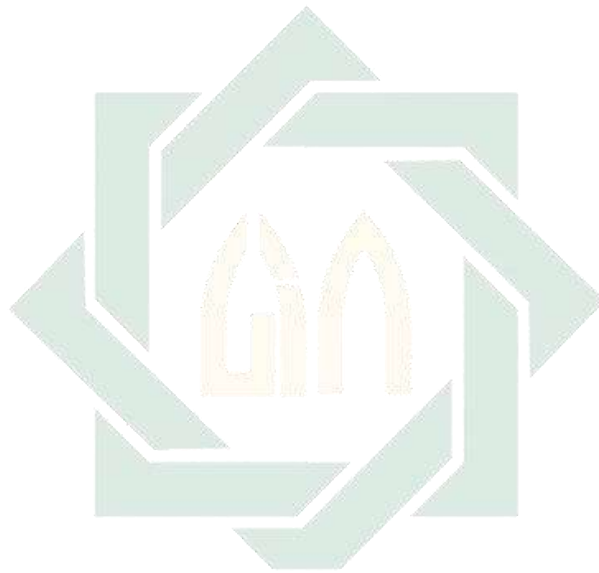
Tabel 3.1 Data Siswa SMA berdasarkan Agama	118
Tabel 3.2 Data Siswa SMK berdasarkan Agama	118
Tabel 3.3. Jadwal KBM PAI SMK 1 Denpasar	125
Tabel 3.4. Database Guru PAI SMA/ SMK Denpasar, Bali Tahun 2022	129
Tabel 4.1 Regulasi Pelayanan PAI di SMA/ SMK Negeri Denpasar	194
Tabel 4.2 Praktik Layanan Pendidikan Islam Di SMA/ SMK Negeri Denpasar, Bali	215



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Guru PAI SMA/SMK berdasarkan status pegawai	132
Grafik 3.2. Kualifikasi Guru PAI SMA/SMK di Denpasar	133
Grafik 4.1 Guru PAI berdasarkan status pegawai.....	204
Grafik 4.2. Kualifikasi Guru PAI SMA/SMK di Denpasar	205



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 13.000 pulau, 1.331 suku, 652 bahasa daerah, 819 karya budaya dan 6 agama terdapat di Indonesia¹. Dengan modal keberagaman yang sangat kaya, Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk entitas sosial yang multikultural, termasuk dalam hal suku-bangsa, budaya dan agama atau kepercayaan. Umat Islam merupakan mayoritas diantara pemeluk agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.² Indonesia telah lama digambarkan sebagai negara dengan sejarah keragaman dan toleransi yang baik. Namun bukan berarti beberapa masalah tidak ada, begitu pula masalah sosial, agama, budaya dan politik.³

Dalam konteks Bali, relasi antara komunitas Hindu dan muslim di Bali telah terekam secara apik dalam lintasan sejarah yang panjang. Sebagai sebuah hubungan antar manusia, ia kadang-kadang menjadi suatu kekuatan bagi keduanya, tetapi sisi lain, sebagai pengikut agama yang berbeda, ia menjadi suatu tantangan. Tantangan tersebut adalah bagaimana komunitas Muslim di Bali bisa menghormati tradisi keagamaan Hindu dan bagaimana pula komunitas Hindu menghormati komunitas Muslim. Penganut Hindu yang mayoritas (sekira 93 persen dari total jumlah penduduk Bali), acapkali

¹ Ahmad Umar et al., "Does Opportunity to Learn Explain the Math Score Gap between Madrasah and Non-Madrasah Students in Indonesia?," *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 41, no. 3 (September 30, 2022): 792–805.

² Kompas Cyber Media, "Menag Sebut Mayoritas Muslim Indonesia Setuju dengan Pancasila," *KOMPAS.com*, last modified March 13, 2021, accessed October 8, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/11584391/menag-sebut-mayoritas-muslim-indonesia-setuju-dengan-pancasila>.

³ Beberapa persolan yang menjangkiti Indonesia di antaranya kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan sosial, intoleransi beragama, dan terkikisnya budaya lokal. Lihat Mochamad Syawie, "Kemiskinan dan kesenjangan sosial." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 16.3 (2011): 213-219; M. Enoch Markum, "Pengentasan kemiskinan dan pendekatan psikologi sosial." *Jurnal Ilmiah Psikologi* 1.1 (2009): 1-12.

Pada era pasca Reformasi, pasca tahun 1998, tatkala implementasi demokratisasi dan transparansi pada seluruh bidang menyebabkan munculnya politik identitas (*the rise of identity politics*) – yang semakin ekstensif.¹¹ Selain keragaman suku dan agama tersebut, masyarakat Indonesia juga beragam dari aspek latar belakang sosial-ekonomi, dan budaya. Berbagai keragaman ini ternyata menimbulkan dikotomi antara mayoritas dan minoritas. Kritik kepada dua istilah tersebut terkadang acap kali mengacu pada “angka statistik” yang rentan dipolitisasi dalam konteks berbangsa dan bernegara.¹² Penggunaan kedua term ini, dalam kesempatan yang lain, justru kontraproduktif dengan realitas masyarakat yang beragam. Bahkan, istilah mayoritas-minoritas dituduh sebagai *biang keladi* atas segregasi sosial dalam dinamika masyarakat.¹³

Secara terminologi, kata minoritas dipahami sebagai jumlah penduduk yang lebih kecil dibanding jumlah penduduk mayoritas di tingkat Nasional. Minoritas, dalam hal ini, tidak juga berarti secara kuantitas adalah terkecil atau termarginalkan dalam suatu lingkungan dan tidak diuntungkan dalam mata

¹² Ahmad Najib Burhani, *Agama, Kultur (In)Toleransi, Dan Dilema Minoritas Di Indonesia*, *LIPI PRESS*, 2020, accessed October 8, 2021, <https://e-service.lipipress.lipi.go.id/press/catalog/book/235>; Syamsul Arifin et al., "Minority Muslims and Freedom of Religion: Learning from Australian Muslimsâ€™ Experiences," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (2019).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dalam suatu negara di mana populasi itu terdiri dari berbagai etnis, agama, atau bahasa yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan meski hanya secara informal, negara berusaha untuk melestarikan budaya, tradisi, agama, dan bahasa minoritas adalah mereka yang mengalami diskriminasi, meskipun jumlahnya besar. Dalam konteks ini, Pancasila dan fundamental dengan kerangka hukum yang ada, bahwa tidak ada kerangka hukum untuk melindungi minoritas. Indonesia memuat serangkaian perlindungan terhadap diskriminasi dan perlindungan terhadap diskriminasi. Hal ini tidak berarti sampai diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, di, untuk memahami kerangka hukum bagi minoritas. Hal ini melibatkan hak-hak yang dinyatakan secara

dalam suatu negara di mana populasi itu terdiri dari berbagai etnis, agama, atau bahasa yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan meski hanya secara informal, negara berusaha untuk melestarikan budaya, tradisi, agama, dan bahasa minoritas adalah mereka yang mengalami diskriminasi, meskipun jumlahnya besar. Dalam konteks ini, Pancasila dan fundamental dengan kerangka hukum yang ada, bahwa tidak ada kerangka hukum untuk melindungi minoritas. Indonesia memuat serangkaian perlindungan terhadap diskriminasi dan perlindungan terhadap diskriminasi. Hal ini tidak berarti sampai diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, di, untuk memahami kerangka hukum bagi minoritas. Hal ini melibatkan hak-hak yang dinyatakan secara

¹⁸ "Indonesian Legal Discourse on Minorities: An Interview with Tim Lindsey," *Https://Crcs.Ugm.Ac.Id*, n.d., accessed October 8, 2021, <https://crcs.ugm.ac.id/indonesian-legal-discourse-on-minorities-an-interview-with-tim-lindsey/>.

Dalam konteks nasional, UUD 1945 menjamin perlindungan HAM bagi para anggota kelompok minoritas. Secara kolektif, agama/keyakinan yang tertuang dalam tradisi yang mereka anut dan hak-hak tradisional nya diakui dan dihormati (Pasal 18B ayat 2). Demikian pula secara individual mereka dilindungi dan diakui sebagai warga negara dan sebagai penduduk Indonesia (Pasal 26). Pengakuan atas hak kewarganegaraan ini, berimplikasi pada keharusan bagi negara untuk menjamin berbagai macam hak-hak asasi mereka sebagai hak-hak konstitusional (BAB IX). Jaminan atas hak kelompok minoritas juga sudah tertera dalam UUD 45 pasal 28A hingga J. Secara khusus yang terkait dengan perlindungan hak minoritas terdapat pada 28A, 28C (ayat 2), 28E (ayat 2), dan 28I (ayat 2,3). Jaminan ini kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.¹⁹ Salah satu Undang-Undang yang mengatur hak minoritas adalah UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU ini menjamin secara rinci berbagai hak-hak asasi warga negara, meskipun hak-hak minoritas tidak secara jelas dielaborasi.

Sejalan dengan keyakinan baru reformasi, berbagai konvensi internasional tentang HAM diratifikasi oleh Indonesia termasuk 2 kovenan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Melalui ratifikasi ini, Indonesia secara resmi menjadi Negara Pihak yang terikat pada mekanisme pelaporan pada Komite Kerja pada masing-masing Kovenan atau Konvensi. Pemerintah Indonesia juga wajib melaporkan kemajuan upaya perlindungan dalam Tinjauan Universal Berkala (Universal Periodic Review) di Dewan HAM PBB.²¹

Dalam praktisnya, konsep kelompok minoritas juga dipahami dengan berbagai cara oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah. Kementerian Sosial, misalnya, memberikan definisi kelompok minoritas sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Seperti yang termaktub dalam Permensos No. 8 tahun 2012 menyebut, “[...] kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian. Kriteria kelompok minoritas sebagai berikut: a) gangguan keberfungsian sosial; b) diskriminasi; c) marginalisasi; dan d) berperilaku seks menyimpang.”²²

Dalam konteks Bali, undang-undang tentang perlindungan minoritas sebetulnya sudah ada meski tidak secara implisit, misalnya, Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah

²¹ Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 18.

²² Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal*.

Kemudian, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, yang salah satu isinya adalah PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.²⁵ Selanjutnya, PPDB berasaskan lima hal, salah satunya adalah non diskriminatif. Diskriminatif yang dimaksud adalah persyaratan warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi dapat mengikuti proses pendaftaran sebagai calon peserta didik baru tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial. Hal ini juga dimunculkan kemungkinan prosentase siswa muslim yang masuk baik dari siswa muslim Bali asli atau siswa muslim pendatang sebagaimana data terlampir di bawah ini.

²⁵ Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Bab II tentang Tujuan dan Azas, Pasal 2.

DATA SISWA SMA BERDASARKAN AGAMA

No	PROVINSI	AGAMA														JUMLAH
		ISLAM		KRISTEN		KATHOLIK		HINDU		BUDHA		KONG HU CHU		LAINNYA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kec. Denpasar Barat	422	507	244	255	138	141	1049	1115	77	76	0	2	0	0	4026
2	Kec. Denpasar Selatan	315	298	200	270	62	65	2029	2166	57	72	1	0	4	6	5545
3	Kec. Denpasar Timur	139	175	23	21	13	14	695	743	5	6	0	1	5	4	1844
4	Kec. Denpasar Utara	231	268	98	108	55	50	3022	3344	28	48	4	2	1	0	7259
	JUMLAH	1107	1248	565	654	268	270	6795	7368	167	202	5	5	10	10	18619

DATA SISWA SMK BERDASARKAN AGAMA

No	PROVINSI	AGAMA														JUMLAH
		ISLAM		KRISTEN		KATOLIK		HINDU		BUDHA		KONG HU CHU		LAINNYA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kec. Denpasar Barat	315	521	45	62	25	17	508	741	5	5	0	0	0	0	2244
2	Kec. Denpasar Selatan	736	466	181	149	65	56	1980	1971	79	36	1	1	1	1	5722
3	Kec. Denpasar Timur	379	326	68	57	26	26	3653	2829	14	13	0	1	0	0	7392
4	Kec. Denpasar Utara	909	560	109	61	53	30	2996	1976	24	6	0	0	0	0	6724
	JUMLAH	2339	1873	403	329	169	129	9137	7517	122	60	1	2	1	0	22082

Sumber: data Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Provinsi Bali, 2022

Dengan demikian, keberpihakan sekaligus komitmen negara dan pemerintah untuk menjamin hak-hak minoritas tidak perlu diragukan lagi, meskipun harus diakui dalam tataran implementasinya masih ditemui beberapa kendala, seperti ketidakadilan sosial. Raihani telah meriset tentang masalah ini di lingkungan sekolah yang berbeda dan menemukan bahwa tidak setiap siswa diperlakukan sama.²⁶ Misalnya, siswa dari agama minoritas mengalami diskriminasi dalam “mengakses” agamanya dan “dibiarkan begitu saja” praktik keagamaannya di sekolah. Dalam studi yang lain, Sri Mulyani, misalnya, menjelaskan bahwa sejarah hubungan Tionghoa dengan penduduk Aceh mengalami pasang surut. Hubungan tersebut terbentuk dan berubah dalam lingkup ruang dan durasi tertentu seiring dengan bentuk dialektika komunitas Tionghoa sebagai minoritas dan penduduk muslim Aceh sebagai mayoritas.²⁷ Selanjutnya, Warsah, meneliti bagaimana relasi antara keluarga minoritas Muslim dengan non-Muslim di Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo Yogyakarta, serta motivasi keberagaman agama pada keluarga muslim.

²⁶ Raihani Raihani, *Creating Multicultural Citizens: A Portrayal of Contemporary Indonesian Education* (Routledengane, 2014); Lyn Parker and Chang-Yau Hoon, 'Secularity, Religion and the Possibilities for Religious Citizenship', *Asian Journal of Social Science* 41, no. 2 (2013): 150–74.

²⁷ Eka Srimulyani et al., “Diasporic Chinese Community in Post-Conflict Aceh: Socio-Cultural Identities, and Social Relations with Acehnese Muslim Majority,” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 395–420.

Beberapa studi di atas menunjukkan betapa keberadaan minoritas selalu dihadapkan pada kondisi yang perlu mendapatkan dukungan dari dalam komunitasnya itu sendiri. Mereka hidup dengan penuh ketidaknyamanan apabila prasyarat infrastruktur sosial tidak dapat terokestrasi secara baik. Mengutip Raihani, jika prasyarat infrastruktur sosial tidak dikelola dengan baik, maka konsekuensi nya adalah terjadi *social injustice* (ketidakadilan sosial).²⁹ Ketidakadilan itu, menurut Raihani, terjadi hampir di semua lapisan sektor, baik sektor pendidikan, sosial-budaya, keagamaan, maupun politik.

Dalam pada itu, istilah aktualisasi sendiri – mengikuti bahasa Hendrik De Smet – secara tradisional dilihat sebagai proses berikut analisis ulang

²⁹ Raihani, 'A Model of Islamic Teacher Education For Social Justice in Indonesia', 165.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam konteks ini, asumsi yang hendak penulis kembangkan adalah layanan pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di Bali tidak sepenuhnya teraktualisasi secara baik dan berkeadilan sosial (*social justice*). Maksud dari redaksi “tidak sepenuhnya teraktualisasi secara baik” adalah kurang memenuhi standar kelayakan dalam pengajaran dan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, misalnya standar kurikulum, penilaian, sumber daya manusia (tenaga pengajar), sarana pra sarana maupun output yang dihasilkan serta keadilan sosial.

Guna memperkuat asumsi penulis, kami menyajikan kasus menarik

³³ Raihani, "Education for multicultural citizens in Indonesia: Policies and practices." *Compare: A Journal of Comparative and International Education* 48.6 (2018): 992-1009.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana keberlangsungan layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di Denpasar, Bali. Untuk memperkuat data di atas, penulis mengambil lokus penelitian di beberapa sekolah menengah atas atau kejuruan di Denpasar, Bali serta mewawancarai beberapa siswa minoritas muslim, orang tua atau wali murid siswa, guru PAI, kepala sekolah dan *stakeholders* terkait sebagai bagian integral dalam penelitian ini.

³⁶ Indriana Kartini, "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", 34.

Pertama, lembaga pendidikan, dalam hal ini SMA/ SMK baik negeri maupun swasta yang berada di Denpasar. Rasionalias keterpilihan SMA/ SMK ini didasari pada kemampuan berpikir kritis peserta didik yang menurut hemat penulis sudah bisa berpikir kritis dan berdialog maupun berdiskusi bersama.

Ketiga, layanan yang disediakan oleh sekolah menyangkut kurikulum, tenaga pengajar, sarana pra sarana maupun proses pembelajarannya itu sendiri. Dalam studi pendahuluan, penulis mengamati di SMA/ SMK Denpasar Bali lebih mengaksentuasikan mata pelajaran umum dan pembiasaan religius agama Hindu ketimbang Islam. Memang secara demografis, dominasi masyarakat Hindu menjadi *elan vital* dalam kultur Bali sehingga jika dominasi ini terus berlangsung dan kurang “ramah” dengan minoritas, misalnya, siswa minoritas muslim di Bali, maka akan mempengaruhi cara pandang peserta didik dalam melihat realitas keberagamaan dan pembelajaran yang seperti itu. Dalam konteks ini, keluar dari agama Islam dan seruan *jihad bil anarkis* menjadi tidak terelakkan. Tentu hal ini bukan keinginan kita bersama. Oleh karena itu, dengan adanya layanan Pendidikan Islam yang bermutu, para siswa minoritas muslim di Bali akan lebih terjaga akidah nya serta nilai-nilai agama Islam

Keempat, problematika layanan Pendidikan Islam baik dari aspek internal maupun eksternal. Beberapa temuan mengenai problematika layanan dari sisi internal di antaranya seperti kuantitas dan kualitas guru, kesadaran siswa, dan dukungan dari pihak terkait (stake holder). Secara kuantitas, siswa minoritas muslim Bali termasuk jumlah terbanyak kedua setelah Hindu. Jumlah ini setidaknya peneliti ambil dari data statistik Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kemudian secara kualitas, masih memerlukan kompetensi tambahan, baik secara pengetahuan maupun relas, termasuk kesadaran siswa. Temuan berikutnya adalah beberapa problem penghambat dan menurunkan daya kepercayaan pimpinan dan elemen sekolah lainnya yaitu kesalahan secara pribadi yang dilakukan oleh beberapa siswa muslim, baik melanggar peraturan sekolah, juga yang berhubungan dengan akhlak. Di samping itu, kurangnya komunikasi dan kerjasama dari stake holder.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini meliputi beberapa hal di antaranya, (1) pandangan akademik terkait aktivitas pembelajaran PAI di SMA/ SMK baik negeri maupun swasta di Denpasar, Bali sehingga peneliti mendapati beberapa faktor pendukung maupun penghambat sebagai bagian

[illegible]

pendidikan di SMA/ SMK baik negeri maupun swasta, sekaligus relasi antara guru dengan wali murid, kepala sekolah dengan wali murid, dan sebagainya, di bagian daripada batasan dalam penelitian ini.

h

ada latar belakang di atas, maka penulis akan menggali ke dalam tiga hal, yaitu

istimewanya aktualisasi layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

aktifitas layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

model layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

pendidikan di SMA/ SMK baik negeri maupun swasta, sekaligus relasi antara guru dengan wali murid, kepala sekolah dengan wali murid, dan sebagainya, di bagian daripada batasan dalam penelitian ini.

h

ada latar belakang di atas, maka penulis akan menggali ke dalam tiga hal, yaitu

istimewanya aktualisasi layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

aktifitas layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

model layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

- pendidikan di SMA/ SMK baik negeri maupun swasta, sekaligus relasi antara guru dengan wali murid, kepala sekolah dengan wali murid, dan sebagainya, di bagian daripada batasan dalam penelitian ini.
- h
- ada latar belakang di atas, maka penulis akan menggali ke dalam tiga hal, yaitu
- istimewanya aktualisasi layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?
- aktifitas layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?
- model layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

pendidikan di SMA/ SMK baik negeri maupun swasta, sekaligus relasi antara guru dengan wali murid, kepala sekolah dengan wali murid, dan sebagainya, di bagian daripada batasan dalam penelitian ini.

h

ada latar belakang di atas, maka penulis akan menggali ke dalam tiga hal, yaitu

istimewanya aktualisasi layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

aktifitas layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

model layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

pendidikan di SMA/ SMK baik negeri maupun swasta, sekaligus relasi antara guru dengan wali murid, kepala sekolah dengan wali murid, dan sebagainya, di bagian daripada batasan dalam penelitian ini.

h

ada latar belakang di atas, maka penulis akan menggali ke dalam tiga hal, yaitu

istimewanya aktualisasi layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

aktifitas layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

model layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

- pendidikan di SMA/ SMK baik negeri maupun swasta, sekaligus relasi antara guru dengan wali murid, kepala sekolah dengan wali murid, dan sebagainya, di bagian daripada batasan dalam penelitian ini.
- h
- ada latar belakang di atas, maka penulis akan menggali ke dalam tiga hal, yaitu
- istimewanya aktualisasi layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?
- aktifitas layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?
- model layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim di Denpasar Bali?

F. Penelitian Terdahulu

- cara praksis, hasil penelitian ini dapat menjadi “referensi” bagi pemerintah daerah dan seluruh instansi pendidikan untuk tidak hanya “mengindahkan” atau “mengistimewakan”

F. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana dalam tradisi penelitian (*research tradition*), penelitian terdahulu (*literatur review*) tentang penelitian yang relevan penting untuk disajikan guna menghindari kesamaan (*similarity*) sehingga menemukan distingsi penelitian. Berikut hasil pelacakan peneliti.

Kunawi Basyir (2014), dalam disertasinya yang berjudul *Harmoni Sosial Keagamaan Masyarakat Multikultural: Studi tentang Konstruksi Sosial*

Kerukunan Umat Beragama Islam-Hindu di Denpasar Bali,³⁷ memaparkan bahwa corak keberagamaan masyarakat multikultural di Denpasar berlangsung secara inklusif. Mereka saling guyub ruku, bahu-membahu dan ber dialektika satu sama lain baik dalam ranah ekonomi, agama, sosial-budaya, politik maupun pendidikan. Lebih dari itu, peran pemerintah daerah dan lembaga sosial-kemasyarakatan juga saling menopang satu sama lain dalam rangka menjaga dan melindungi kultur Bali yang bernafaskan Hindu guna mewujudkan corak kehidupan keberagamaan yang harmonis.

Brigitta Hauser-Schäublin dan David D. Harnish (2014), dalam *book chapter*-nya yang berjudul *Introduction: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok*,³⁸ menjelaskan bahwa konfigurasi sosial baru terkadang membawa keberkahan tersendiri bagi masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, seperti Muslim lokal dan nasional datang ke Bali untuk berziarah ke situs Wali Pitu dan imigran saling berkumpul bersama baik individu maupun kelompok, kemudian menegosiasikan peluang baru untuk harmoni atau kerjasama ataupun dominasi/diskriminasi. Karenanya, identifikasi diri maupun orang lain (melalui kategori agama atau etnis) merupakan kunci untuk memahami status sosial dan politik di era abad ke-21.

Indriana Kartini (2017), dalam artikelnya yang berjudul *Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali*³⁹, menjelaskan bahwa keberadaan Muslim Bali telah memperkaya diskursus masyarakat Islam-Hindu di Bali. Penulis mengambil lokus tempat di Bali, di antaranya Denpasar, Badung, Buleleng, Jembrana, Gianyar, Tabanan, Bangli, Karangasem dan Klungkung.

³⁷ Kunawi Basyir, *Harmoni Sosial Keagamaan Masyarakat Multikultural: Studi Tentang Konstruksi Sosial Kerukunan Umat Beragama Islam-Hindu Di Denpasar Bali* (Disertasi - Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

³⁸ Brigitta Hauser-Schäublin and David D Harnish, “Introduction: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok,” in *Between Harmony and Discrimination: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok* (Brill, 2014), 1–32.

³⁹ Indriana Kartini, “Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim Di Bali,” *Masyarakat Indonesia* 37, no. 2 (2017): 115–145.

Muhammad Fahmi (2019), dalam disertasinya yang berjudul *Pendidikan multikultural sebagai strategi adaptasi Pesantren Bali Bina Insani di daerah minoritas muslim Tabanan Bali*,⁴⁰ menjelaskan bahwa Pesantren BBI mendesain sistem pendidikannya dengan desain pendidikan multikultural sebagai strategi adaptasi di daerah minoritas Muslim. Detailnya, pendidikan multikultural di Pesantren BBI dijawabantahkan dengan mengambil beberapa guru non-muslim untuk mengajar di Pesantren BBI. Secara praksis, pendidikan multikultural yang diaplikasikan di Pesantren BBI bertujuan untuk mengembangkan kerukunan, mengedepankan nilai toleransi, menerima dan menghargai perbedaan dan keragaman. Selain itu, sebagai instrumen strategi untuk beradaptasi di tengah lingkungan masyarakat yang beragam.

⁴⁰ Muhammad Fahmi, *Pendidikan Multikultural Sebagai Strategi Adaptasi Pesantren Bali Bina Insani Di Daerah Minoritas Muslim Tabanan Bali* (Disertasi - Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

umat Islam. Hal ini ditunjukkan dengan melibatkan mereka (baca: muslim) dalam tradisi lokal Bali bahkan dengan adaptasi ritual mereka. Meskipun begitu, umat Islam yang mana sebagai minoritas di sana, mereka memahami posisi mereka sehingga penting baginya untuk menjaga dan menghormati kultur Bali sebagai budaya dominan. Kekayaan tradisi lokal inilah yang menunjukkan potret kerukunan umat beragama di Indonesia.

Fajri Zulia Ramdhani, Busro Busro, dan Abdul Wasik (2020), dalam artikelnya yang berjudul *The Hindu-Muslim Interdependence: A Study of Balinese Local Wisdom*,⁴² memaparkan bahwa sejatinya komunitas Muslim di daerah mayoritas Hindu di Bali sudah ada sejak abad ke-15. Sejak saat itu, saling ketergantungan antara dua komunitas agama menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemunculan Islam di Bali terjadi ketika Dalem Ketut Ngelesir (1380-1460) mengunjungi Majapahit pada saat konferensi kerajaan vasal pada awal 1380 dan membawa 40 pengawal Muslim. Periode ini juga menandai awal hubungan Hindu-Muslim di Bali dengan Klungkung sebagai daerah pertama dengan komunitas Muslim. Kemudian, hubungan antara Hindu dan Muslim dipertahankan dalam empat periode berturut-turut: kerajaan, penjajahan, pasca-kemerdekaan, dan sekarang. Di antara kearifan lokal yang mempengaruhi saling ketergantungan dan integrasi antara dua umat beragama adalah megibung, ngejot, dan kegiatan keagamaan seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW., Nyepi, odalan, takbiran, dan Idul Fitri.

Raihani (2020) dalam artikelnya berjudul *A Model of Islamic Teacher Education for Social Justice in Indonesia: A Critical Pedagogy Perspective*. Ia mengusulkan model penyiapan guru dalam konteks pendidikan Islam dengan menggunakan perspektif pedagogi kritis. Selain itu, menurutnya reformasi pendidikan harus dimulai dari komponen pendidikan yang sangat vital, yaitu

⁴² Fajri Zulia Ramdhani, Busro Busro, and Abdul Wasik, “The Hindu-Muslim Interdependence: A Study of Balinese Local Wisdom,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28, no. 2 (2020): 195–218.

Sulanam (2021), dalam disertasinya yang berjudul *Interaksi minoritas-mayoritas di sekolah: studi terhadap proses adaptasi, negosiasi, dan pembentukan identitas siswa minoritas dalam ekosistem sosial pendidikan*,⁴⁴ menjelaskan bahwa disertasi ini mengkaji model interaksi mahasiswa agama minoritas dalam adaptasi nya dengan mahasiswa mayoritas agama. Ia juga mengeksplorasi cara-cara di mana mereka melakukan negosiasi dan membentuk identitas. Temuan Sulanan menunjukkan bahwa adaptasi berlangsung di kelas melalui pertanyaan tentang isu-isu agama selama pengenalan pribadi; melalui sharing dan tukar menukar ilmu dan pemahaman agama pada waktu istirahat dan waktu senggang. Adaptasi dilakukan melalui identifikasi perbedaan antara siswa minoritas dan mayoritas. Kemudian, negosiasi dilakukan secara bertahap dengan menggunakan proses pembiasaan pada tindakan keagamaan simbolik; Negosiasi juga ditampilkan sebagai pendekatan *win-win solution* yang ditunjukkan dengan tindakan 'saling' serta interaksi terbuka dalam pertemuan virtual. Terakhir, identitas siswa minoritas di sekolah dibangun melalui nilai-nilai bawaan yang ditunjukkan oleh nama; melalui simbol-simbol yang diwakili oleh aksesoris yang dikenakan oleh siswa minoritas, dan melalui ekspresi keagamaan yang ditunjukkan oleh ekspresi verbal pada perayaan keagamaan.

⁴⁴ Sulanam Sulanam, *Interaksi Minoritas-Mayoritas Di Sekolah: Studi Terhadap Proses Adaptasi, Negosiasi, Dan Pembentukan Identitas Siswa Minoritas Dalam Ekosistem Sosial Pendidikan* (Disertasi - Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Communities: The Practice of "Menyama-Braya" in Contemporary Bali,⁴⁵ menunjukkan bahwa interaksi sosial antara Muslim Bugis dan Hindu di Bali telah lama dikenal harmonis. Interaksi ini dapat menjadi *role model* bagi interaksi keagamaan di Indonesia. Penulis mengambil lokus tempat di Desa Serangan, Kepaon, Tuban, Suwung, Tanjung Benoa, dan Angantiga, Bali. Hasilnya adalah kehidupan sosial yang harmonis dan sukses tidak lepas dari adopsi budaya menyama-braya, yang memadukan sikap solidaritas dan toleransi. Praktek sistem budaya menyama-braya telah dipertahankan secara turun temurun melalui berbagai metode, seperti sosialisasi, ritual, penggunaan simbol yang sama, dan lembaga pendidikan formal.

Dari paparan *literatur review* di atas belum mengambil ceruk penelitian yang spesifik terkait aktualisasi pendidikan Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri di Denpasar Bali. Studi di atas secara umum mengulas dialektika hubungan komunitas Hindu Bali dengan minoritas Muslim di Bali, seperti yang ditunjukkan I Gusti Pt Bagus Suka Arjawa, dan Zulkifli, Brigitta Hauser-Schäublin dan David D. Harnish. Dalam hal ini, peneliti mengkaji tentang Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam bagi Siswa Minoritas Muslim di Denpasar Bali sekaligus melengkapi kajian di atas. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aktualisasi layanan Pendidikan Islam dengan asumsi layanan Pendidikan Islam di Denpasar Bali kurang terorganisir secara sistematis dan masih sporadis. Menilik dari penelitian terdahulu, penulis berpandangan penting kiranya untuk memotret dan mendeskripsikan bagaimana layanan Pendidikan Islam khususnya bagi Siswa Minoritas Muslim di Bali agar menjadi role model dalam pengembangan layanan Pendidikan Islam di siswa-siswa minoritas muslim lainnya di seluruh Indonesia.

⁴⁵ I Gst Pt Bagus Suka Arjawa and Zulkifli Zulkifli, "The Social Integration of Hindu and Muslim Communities: The Practice of" Menyama-Braya" in Contemporary Bali," *Studia Islamika* 28, no. 1 (2021): 149–178.

G. Kerangka Teoritik

Sebagai media untuk mengilhami dan menjadikan kaca analisis, penelitian ini menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini antara lain teori pengaruh minoritas, teori kontak, dan konstruksi sosial.

Pertama, teori pengaruh minoritas (*minority influence*). Penelitian tentang pengaruh sosial sampai tahun 1970-an terutama berkaitan dengan pengaruh mayoritas.⁴⁶ Serge Moscovici (1976, 1980, 1985), merupakan tokoh yang paling menonjol dalam penelitian pengaruh minoritas, mengemukakan bahwa pengaruh mayoritas bukanlah satu-satunya proses pengaruh dalam kehidupan sosial.⁴⁷ Minoritas tidak hanya menjadi target tetapi juga sumber pengaruh dalam situasi kelompok. Perubahan sosial, seperti yang telah diamati dalam sejarah (lihat contoh Galileo, Darwin, Freud, atau gerakan hak-hak sosial), seringkali merupakan hasil dari pertanyaan minoritas tentang norma-norma dan menghadapi apa yang diterima begitu saja.⁴⁸

Meski demikian, minoritas dapat menjadi agen inovasi dan perubahan sosial bagi ikatan masyarakat jika mengajukan ide-ide alternatif dan orisinal. Mereka, bahkan, dapat menciptakan konflik sosial (*social conflict*) dengan mengajukan proposisi alternatif terhadap persepsi masyarakat yang *established*. Minoritas biasanya merupakan kelompok kecil yang mempertanyakan norma-norma sosial. Ikatan minoritas mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku orang dengan menjadi konsisten dan fleksibel dalam negosiasi mereka dengan anggota mayoritas. Pengaruh mereka acapkali laten (yaitu, terbukti pada tindakan tertunda, tidak langsung, dan privasi) *ketimbang* konkrit. Mereka mempengaruhi jumlah, dan kualitas, pemrosesan

⁴⁶ Allen, V. L. (1965). Situational factors in conformity. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 2, pp. 133–175). New York: Academic Press; Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgements. In H. Guetzhaw (Ed.), *Groups, Leadership, and Men* (pp. 177–190). Pittsburgh, PA: Carnegie Press.

⁴⁷ Gardikiotis, Antonis. "Minority influence." *Social and personality psychology compass* 5.9 (2011): 679-693.

⁴⁸ Gardikiotis, "Minority influence" : 679-693.

Dengan demikian, mengikuti Serge Moscovici, bahwa setiap teori tentang mekanisme pengaruh minoritas harus mempertimbangkan dua fakta berikut. *Pertama*, seperti yang telah dijelaskan di muka, pengaruh minoritas tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan satu jenis kekuasaan (atau ketergantungan) atau lainnya, karena alasan yang kuat bahwa minoritas tidak memilikinya.⁴⁹ Dalam konteks penelitian ini, muslim minoritas di Bali setidaknya kurang memiliki sarana kontrol atau alat kekuasaan yang memadai, dan mereka tidak memiliki sumber daya sosial yang memungkinkan mereka untuk memaksakan pandangan mereka, selain membuat mereka diketahui (dan mereka biasanya hanya memiliki akses terbatas atau tidak sama sekali ke media informasi). Oleh karena itu, penjelasan yang menjelaskan pengaruh mayoritas tidak dapat diterapkan dalam konteks ini.

⁵⁰ Moscovici, Serge Ed, Angelica Ed Mucchi-Faina, and Anne Ed Maass. *Minority influence*. Nelson-Hall Publishers, 1994. 46.

Lalu apa sumber pengaruh minoritas, jika itu bukan satu atau jenis lain dari kekuasaan atau ketergantungan, atau tanda pembedaan sosial, atau daya tarik dari isi proposisi minoritas seperti itu? Proses pengaruh minoritas bergantung pada satu-satunya sumber daya minoritas, sumber daya batin—tindakannya sendiri. Oleh karena itu, penjelasan untuk pengaruh minoritas harus dicari dalam perilakunya (dalam arti luas, termasuk tindakannya, ekspresi sikap dan pendapat, pidato, petunjuk nonverbal, dan lain sebagainya). Lebih khusus lagi dalam gaya perilakunya, yang merupakan semacam struktur formal di mana perilaku yang berbeda yang ditampilkan minoritas dalam berbagai kesempatan dan situasi diatur. Gaya perilaku adalah retorikanya yang

⁵⁴ Heisenberg, W. Across the frontiers.

nic consistency)).⁵⁵

eks penelitian ini, teori pengaruh minoritas digunakan. Dimana sistem dan praktik layanan pendidikan Islam di Denpasar Bali. Sebenarnya, jika ditilik secara kuantitatif, Bali dapat dikatakan mayoritas kedua setelah Hindu. Minoritas lekat pada Muslim Bali. Kami meneliti asasi layanan Pendidikan Islam di Bali bertumpu pada stakeholders. Guru PAI memiliki sumber daya intelektual untuk mengoptimalkan layanan Pendidikan Islam. Ringkasnya, praktiks. Sedangkan, stakeholders berada di domain kognitif.

ran.

swa muslim di Bali adalah minoritas, ia dapat memanfaatkan sosial bagi ikatan masyarakat jika mengajukan

nic consistency)).⁵⁵

eks penelitian ini, teori pengaruh minoritas digunakan. Dimana sistem dan praktik layanan pendidikan Islam di Denpasar Bali. Sebenarnya, jika ditilik secara kuantitatif, Bali dapat dikatakan mayoritas kedua setelah Hindu. Minoritas lekat pada Muslim Bali. Kami meneliti asasi layanan Pendidikan Islam di Bali bertumpu pada stakeholders. Guru PAI memiliki sumber daya intelektual untuk mengoptimalkan layanan Pendidikan Islam. Ringkasnya, praktiks. Sedangkan, stakeholders berada di domain kognitif.

ran.

swa muslim di Bali adalah minoritas, ia dapat memanfaatkan sosial bagi ikatan masyarakat jika mengajukan

nic consistency)).⁵⁵

eks penelitian ini, teori pengaruh minoritas digunakan. Dimana sistem dan praktik layanan pendidikan Islam di Denpasar Bali. Sebenarnya, jika ditilik secara kuantitatif, Bali dapat dikatakan mayoritas kedua setelah Hindu. Minoritas lekat pada Muslim Bali. Kami meneliti asasi layanan Pendidikan Islam di Bali bertumpu pada stakeholders. Guru PAI memiliki sumber daya intelektual untuk mengoptimalkan layanan Pendidikan Islam. Ringkasnya, praktiks. Sedangkan, stakeholders berada di domain kognitif.

ran.

swa muslim di Bali adalah minoritas, ia dapat memanfaatkan sosial bagi ikatan masyarakat jika mengajukan

nic consistency)).⁵⁵

eks penelitian ini, teori pengaruh minoritas digunakan. Dimana sistem dan praktik layanan pendidikan Islam di Denpasar Bali. Sebenarnya, jika ditilik secara kuantitatif, Bali dapat dikatakan mayoritas kedua setelah Hindu. Minoritas lekat pada Muslim Bali. Kami meneliti asasi layanan Pendidikan Islam di Bali bertumpu pada stakeholders. Guru PAI memiliki sumber daya intelektual untuk mengoptimalkan layanan Pendidikan Islam. Ringkasnya, praktiks. Sedangkan, stakeholders berada di domain kognitif.

ran.

swa muslim di Bali adalah minoritas, ia dapat memanfaatkan sosial bagi ikatan masyarakat jika mengajukan

Teori kedua, adalah teori kontak. Teori kontak merupakan salah satu teori klasik yang berfungsi menjelaskan fenomena relasi antar kelompok, terutama yang terkait dengan konflik antar kelompok. Teori ini pertama kali diintrodusir oleh Gordon Allport pada tahun 1954 di tengah banjirnya aksi rasialis dan konflik antar kelompok etnis yang mendera Amerika Serikat.⁵⁶ Melalui teori ini, Allport menawarkan sebuah gagasan yang kemudian menjadi salah satu konsep terpenting dalam psikologi sosial khususnya tentang relasi antarkelompok.⁵⁷ Menurutny, salah satu cara mengurangi aksi rasialis dan konflik antar etnis adalah dengan menginputkan beberapa kelompok yang berbeda (mungkin satu, dua orang) untuk terlibat dalam kontak. Dengan melibatkan mereka, maka prasangka yang menjadi sumber utama aksi rasialis dan semacamnya dapat diminalimisir – bahkan direduksi hingga titik nihil.

Teori kontak sendiri telah banyak digunakan dalam penelitian yang mendiskusikan fenomena relasi antar kelompok, tidak terkecuali dalam penelitian ini. Secara umum, konsep dasar teori ini adalah bagaimana mereduksi atau meminimalisir prasangka dan diskriminasi antar kelompok dengan cara melibatkan kelompok yang berbeda berpartisipasi aktif di dalamnya.⁵⁸ Asumsinya, jikalau individu terlibat di dalamnya maka akan terjadi kontak dan interaksi sehingga gradasi prasangka yang mulanya tinggi menjadi berkurang, yang pada gilirannya akan terbina sebuah jalinan yang positif – atau dalam bahasa Durkheim, kohesi sosial.

⁵⁷ Zuma, Buhle. "Contact theory and the concept of prejudice: Metaphysical and moral explorations and an epistemological question." *Theory & Psychology* 24.1 (2014): 40-57; Afandi, Ichlas Nanang, Faturochman Faturochman, and Rahmat Hidayat. "Teori Kontak: Konsep dan Perkembangannya." *Buletin Psikologi* 29.2 (2021): 178-186.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Teori ini, juga meyakini bahwa masuknya unsur-unsur individu yang berbeda ke dalam sebuah kontak tertentu akan meningkatkan kualitas relasi di antara mereka.⁵⁹ Kemudian, kontak antar kelompok yang berjaln kelindan disebut dengan *intergrup contact theory* atau *intergroup contact hyphotesis* yang proposisinya bahwa peningkatan kontak antar dua kelompok yang berlainan identias sosial akan mengubah persepsi masing-masing yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya kurang akrab menjadi akrab, dan seterusnya.⁶⁰

Dalam konteks penelitian ini, teori kontak akan meng-*capture* bagaimana praktik layanan pendidikan Islam di SMA/ SMK Negeri Denpasar Bali. Sebab hampir dapat dipastikan siswa muslim dengan siswa Hindu berbaur bersama dan menjalin interaksi yang harmonis di antara keduanya. Setidaknya dalam amatan kami, mereka saling bekerja sama untuk menyukseskan kegiatan keagamaan, meskipun di kalangan sebagian elit pemegang kebijakan masih diselimuti momok intoleransi.

Teori ketiga, adalah konstruksi sosial-nya Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Berger dan Luckmann memperkenalkan istilah konstruksi sosial (*social construction*) ke dalam ilmu-ilmu sosial dan dipengaruhi oleh karya Alfred Schütz. Konsep sentral mereka adalah bahwa orang-orang dan kelompok-kelompok yang berinteraksi dalam suatu sistem sosial menciptakan, dari waktu ke waktu, konsep-konsep atau representasi mental dari tindakan masing-masing, dan bahwa konsep ini kemudian menjadi habitus dalam peran timbal balik yang dimainkan oleh para aktor dalam hubungannya satu sama lain. Ketika peran-peran ini tersedia bagi anggota masyarakat lainnya untuk

⁵⁹ Pettigrew, Thomas F., and Linda R. Tropp. "A meta-analytic test of intergroup contact theory." *Journal of personality and social psychology* 90.5 (2006): 75; Laursen, Finn. *Eu enlargement*. Bruxelles, Belgium, Peter Lang Verlag, 2013.

⁶⁰ Laursen, Finn. Eu enlargement. Bruxelles, Belgium, Peter Lang Verlag, 2013; Afandi, Ichlas Nanang, Faturachman Faturachman, and Rahmat Hidayat. "Teori Kontak: Konsep dan Perkembangannya." *Buletin Psikologi* 29.2 (2021): 178-186; Al Ramiah, Ananthi, and Miles Hewstone. "Intergroup contact as a tool for reducing, resolving, and preventing intergroup conflict: Evidence, limitations, and potential." *American Psychologist* 68.7 (2013): 527.

ngan intersubjektivitas di mana mengacu pada
dalam konteks ini.⁶² *“Compared to the reality of
appear as finite provinces of meaning, enclaves
marked by circumscribed meanings and
bandingkan dengan realitas kehidupan sehari-
tul sebagai domain makna yang terbatas, ru-
nggi yang ditandai oleh makna-makna terbatas
u berbeda dengan realitas lain, seperti mimpi
n agama atau mistik, dunia artistik dan i*

ngan intersubjektivitas di mana mengacu pada
dalam konteks ini.⁶² *“Compared to the reality of
appear as finite provinces of meaning, enclaves
marked by circumscribed meanings and
bandingkan dengan realitas kehidupan sehari-
tul sebagai domain makna yang terbatas, ru-
nggi yang ditandai oleh makna-makna terbatas
u berbeda dengan realitas lain, seperti mimpi
n agama atau mistik, dunia artistik dan i*

ngan intersubjektivitas di mana mengacu pada
dalam konteks ini.⁶² *“Compared to the reality of
appear as finite provinces of meaning, enclaves
marked by circumscribed meanings and
bandingkan dengan realitas kehidupan sehari-
tul sebagai domain makna yang terbatas, ru-
nggi yang ditandai oleh makna-makna terbatas
u berbeda dengan realitas lain, seperti mimpi
n agama atau mistik, dunia artistik dan i*

ngan intersubjektivitas di mana mengacu pada
dalam konteks ini.⁶² *“Compared to the reality of
appear as finite provinces of meaning, enclaves
marked by circumscribed meanings and
bandingkan dengan realitas kehidupan sehari-
tul sebagai domain makna yang terbatas, ru-
nggi yang ditandai oleh makna-makna terbatas
u berbeda dengan realitas lain, seperti mimpi
n agama atau mistik, dunia artistik dan i*

ngan intersubjektivitas di mana mengacu pada
dalam konteks ini.⁶² *“Compared to the reality of
appear as finite provinces of meaning, enclaves
marked by circumscribed meanings and
bandingkan dengan realitas kehidupan sehari-
tul sebagai domain makna yang terbatas, ru-
nggi yang ditandai oleh makna-makna terbatas
u berbeda dengan realitas lain, seperti mimpi
n agama atau mistik, dunia artistik dan i*

stok pengetahuan yang memberikan panduan yang diperlukan guna menjalani kehidupan mereka dan menafsirkan realitas sosial mereka”.

Dalam konteks ini, mengikuti Berger, fenomena praktik layanan pendidikan Islam di SMA/ SMK Negeri Denpasar Bali adalah realitas sosial yang memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi objektif dan subjektif. Dalam artian, masyarakat yang tidak terlibat dalam praktik pembelajaran di kelas adalah mereka yang berada di luar diri manusia sebagai kenyataan objektif (*objective reality*). Sedangkan individu dalam hal ini siswa dan guru sebagai pelaku, dipandang sebagai kenyataan subjektif dalam masyarakat (*subjective reality*). Dengan kata lain, manusia adalah pencipta realitas sosial itu sendiri yang melalui serangkaian proses eksternalisasi (*externalized*), objektivasi dan kemudian institusionalisasi.

Eksternalisasi merupakan penyesuaian diri dengan sosial-budaya sebagai produk manusia di mana penyesuaian itu akan membentuk individu yang mencerminkan realitas subjektif melalui proses internalisasi.⁶³ Konsekuensinya, guna memahami realitas sosial perlu mengoneksikan realitas objektif dan subjektif yang mana Berger menyebutnya dengan proses institusionalisasi atau realitas sosial itu perlu dilembagakan dalam masyarakat. Termasuk realitas sosial dalam penelitian ini adalah adanya layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di SMA/SMK di Denpasar, Bali yang berjalan secara sporadis, meski kerukunan antar umat beragama terjalin dengan harmonis.

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, menyebutkan bahwa individu merupakan aktor aktif yang membentuk realitas sosial yang objektif melalui dialektik yang berjalan secara simultan dalam proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.⁶⁴ Teori ini mengindikasikan bahwa terdapat proses menarik

⁶³ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 78.

⁶⁴ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 5; Nurul Himatil 'Ula and Senata Adi Prasetai, 'Performative Analysis of Rajah Syekh Subakir In Tawing Village, Trenggalek Perspective Of Living Qur'an', *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 2 (29 July 2020): 313–30, <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2102-04>.

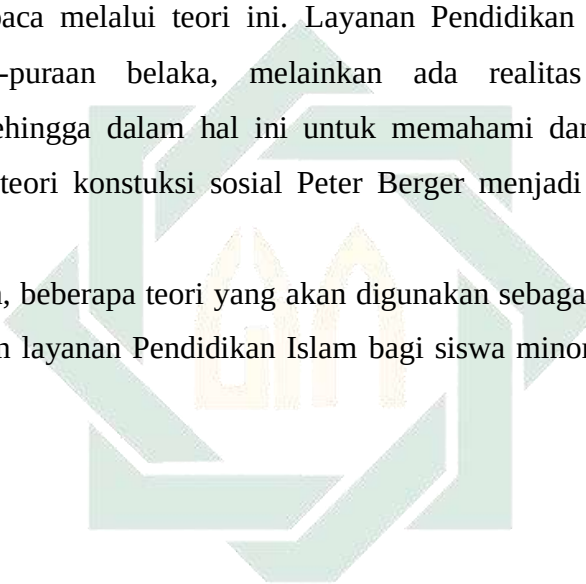
Pemahaman akan realitas yang dianggap objektif pun terkonfigurasi, melalui proses eksternalisasi dan objektifikasi individu menjadi bagian dari produk sosial, sehingga dapat dikatakan, setiap individu memiliki pengetahuan dan identitas sosial sesuai dengan peran institusional yang terbentuk atau yang diperankannya. Eksternalisasi adalah ekspresi diri manusia ke luar baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk pengaktualisasian diri untuk menunjukkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia (*society is a human product*).⁶⁵

Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.
 Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.
 Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

⁶⁷ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

Dalam hal ini, proses internalisasi dilakukan salah satunya melalui pelebagaan atau institusionalisasi. Seperangkat nilai dan pengetahuan dalam proses ini menjadi *guidance* (pedoman) dalam melakukan pemaknaan terhadap tindakan di mana tindakan itu adalah bagian inheren sehingga apa yang disebut sebagai kesadaran (*awareness*), sesungguhnya adalah apa yang terefleksi dari tindakan. Layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di Bali salah satunya dapat dibaca melalui teori ini. Layanan Pendidikan Islam tersebut bukanlah kepura-puraan belaka, melainkan ada realitas sosial yang melingkupinya, sehingga dalam hal ini untuk memahami dan menganalisis layanan tersebut, teori konstuksi sosial Peter Berger menjadi pilihan dalam penelitian ini.

Demikianlah, beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di Bali.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Bagi para antropolog sosial, melakukan penelitian lapangan di lokasi lain merupakan hal yang menantang dan termasuk *rites de passage*.⁶⁸ Pada mulanya penelitian lapangan (*field research*) di beberapa masyarakat lain dipandang sebagai cobaan, atau sebuah tes/ uji coba di mana para antropolog harus terlibat.⁶⁹ Lebih jauh, Fried menuliskan,

Kerja lapangan tetap menjadi pusat dalam antropologi budaya. Data awal tidak berasal dari laboratorium tetapi dari budaya yang berjalan secara natural. Seorang antropolog turun ke lapangan untuk hidup dalam budaya lain. Dia menetap di tengah lingkungan yang tidak dikenalnya dan, jika dia berhasil, statusnya perlahan berubah dari orang asing yang canggung

⁶⁹ Robert G Burgess, *In the Field: An Introduction to Field Research* (Routledengane, 2002).

Peneliti juga melakukan penelitian partisipatif dan mencoba menelusuri pada beberapa sekolah yang menjadi lokus penelitian sehingga peneliti memotret lokasi sekolah, program kegiatan sekolah, kurikulum sekolah, melakukan wawancara kepada sumber primer di Sekolah, dan melakukan observasi proses pembelajaran di Sekolah hingga pembiasaan di SMA Negeri 2, SMA Negeri 7, SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 yang ada di lingkungan kota Denpasar. Dari keterangan tersebut, inilah yang dimaksud peneliti sebagai penelitian lapangan.

on Herbert Fried, *Cultural Anthropology*, vol. 2 (Crowell, 1968).

Surani, “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Klinik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA” (Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Denpasar, February 16, 2022).

⁷¹ Ninik Surani, "Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA" (Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Denpasar, February 16, 2022).

Selain itu, peneliti merasa perlu menentukan samplingnya dan memastikan bahwa sampling atau informan tersebut dapat memenuhi kebutuhan data penelitian.⁷² Juga, melalui pengumpulan data dari latar alamiah (*natural setting*) dengan memosisikan diri peneliti sebagai instrumen kunci (*key instrument*).⁷³

Lebih jauh, penelitian kualitatif dapat diaplikasikan dalam beragam tema, di antaranya untuk memotret sejarah perkembangan baik fenomena tertentu, agen dalam suatu masyarakat, tokoh, berdirinya suatu kelompok dan sebagainya sehingga probabilitas itu dapat dilacak melalui desain penelitian kualitatif melalui dokumentasi, wawancara mendalam (*dept interview*) baik kepada sumber primer maupun sekunder, observasi dan *focus group discussion*.

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga dasar mengatribusikan teori, yakni pendekatan fenomenologi, interaksi simbolik, dan ethnomethodology.⁷⁴ Jenis penelitian kualitatif mensyaratkan peneliti untuk menjadi partisipan sekaligus “pembaca” aktif terhadap objek yang diteliti.

⁷⁴ Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 65.

Harapannya, agar peneliti mampu mengurai “benang kusut” suatu fenomena atau gejala di lapangan baik secara struktural, fungsional maupun kultural.⁷⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi ini berguna untuk mengungkap, menyibak, mengeksplor, dan menginterpretasikan setiap makna dari fenomena sosial berikut hubungannya dengan lingkungan sekitar dalam konteks tertentu. Dalam bahasa yang lain, penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian kualitatif berkacamata fenomenologi.⁷⁶

Sebagai metode keilmuan, fenomenologi dapat mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya tanpa memanipulasi data di dalamnya. Dalam konteks ini, peneliti mencoba memahami praktik layanan pendidikan Islam di SMAN Denpasar Bali sesuai perspektif mereka. Peneliti mengesampingkan terlebih dahulu pemahaman subjektif tentang agama, adat, dan ilmu pengetahuan agar pengetahuan dan kebenaran yang ditemukan benar-benar objektif. Lebih lanjut, metode ini memandang objek kajiannya sebagai sesuatu yang utuh dan tidak terpisah dengan objek lain. Artinya, pendekatan ini menekankan pada pendekatan yang holistik dan tidak parsial sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu objek.

Fenomenologi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada kesamaan pengalaman hidup dalam kelompok tertentu.⁷⁷ Biasanya, wawancara dilakukan dengan sekelompok individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang suatu peristiwa, situasi, atau pengalaman. Ada dua hal yang menjadi karakteristik fenomenologi.

Pertama, fenomenologi bermakna metode untuk memahami teologi orang lain dalam perspektif netralitas dan menggunakan preferensi orang

⁷⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 203.

⁷⁶ Sue Hamilton et al., "Phenomenology in Practice: Towards a Methodology for a 'Subjective' Approach," *European Journal of Archaeology* 9, no. 1 (2006): 31–71.

⁷⁷ Thomas Groenewald, "A Phenomenological Research Design Illustrated," *International journal of qualitative methods* 3, no. 1 (2004): 42–55.

3. Data, Sumber Data dan Pemilihan Informan

1) Sumber Primer

⁷⁸ Irma Novayani, “Pendekatan Studi Islam: Pendekatan Fenomenologi Dalam Kajian Islam,” *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2019): 44–58.

[illegible]

Selanjutnya, peran guru PAI dalam dan mengajar PAI di sekolah tersebut kan bimbingan di luar sekolah. Berikut respon peserta didik yang beragama Pendidikan Islam yang ada di sekolah wali murid dan komite sekolah.

Selanjutnya, peran guru PAI dalam dan mengajar PAI di sekolah tersebut kan bimbingan di luar sekolah. Berikut respon peserta didik yang beragama Pendidikan Islam yang ada di sekolah wali murid dan komite sekolah.

Selanjutnya, peran guru PAI dalam dan mengajar PAI di sekolah tersebut kan bimbingan di luar sekolah. Berikut respon peserta didik yang beragama Pendidikan Islam yang ada di sekolah wali murid dan komite sekolah.

Selanjutnya, peran guru PAI dalam dan mengajar PAI di sekolah tersebut kan bimbingan di luar sekolah. Berikut respon peserta didik yang beragama Pendidikan Islam yang ada di sekolah wali murid dan komite sekolah.

Selanjutnya, peran guru PAI dalam dan mengajar PAI di sekolah tersebut kan bimbingan di luar sekolah. Berikut ana respon peserta didik yang beragama Pendidikan Islam yang ada di sekolah wali murid dan komite sekolah.

Selanjutnya, peran guru PAI dalam dan mengajar PAI di sekolah tersebut kan bimbingan di luar sekolah. Berikut respon peserta didik yang beragama Pendidikan Islam yang ada di sekolah wali murid dan komite sekolah.

Selanjutnya, peran guru PAI dalam dan mengajar PAI di sekolah tersebut kan bimbingan di luar sekolah. Berikut respon peserta didik yang beragama Pendidikan Islam yang ada di sekolah wali murid dan komite sekolah.

...mikian secara fakta, pada mulanya peneliti juga SMA Negeri 4 Denpasar, namun terjadi kendala mendapatkan respon yang baik oleh guru PAI yang memutuskan untuk memindahkan lokus penelitian ke Denpasar.

...saran pemilihan SMA adalah karena tingkat berpikir bisa menjangkau untuk berpikir kritis (critical) berbeda dengan anak usia sekolah dasar (SD) maupun pertama (SM). Dalam konteks kurikulum 2013, kemampuan kritis mutlak diperlukan guna mengarahkan peserta didik menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan mengkomunikasikannya dengan baik.

...berpikir kritis ini, dalam konteks penelitian ini, peneliti untuk mendiskusikan bagaimana

...mikian secara fakta, pada mulanya peneliti juga SMA Negeri 4 Denpasar, namun terjadi kendala mendapatkan respon yang baik oleh guru PAI yang memutuskan untuk memindahkan lokus penelitian ke SMA Negeri 4 Denpasar.

...saran pemilihan SMA adalah karena tingkat berpikir yang bisa menjangkau untuk berpikir kritis (critical thinking) berbeda dengan anak usia sekolah dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SM). Dalam konteks kurikulum 2013, kemampuan berpikir kritis mutlak diperlukan guna mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan mengomunikasikannya dengan baik.

...berpikir kritis ini, dalam konteks penelitian ini, peneliti untuk mendiskusikan bagaimana

...mikian secara fakta, pada mulanya peneliti juga SMA Negeri 4 Denpasar, namun terjadi kendala mendapatkan respon yang baik oleh guru PAI yang memutuskan untuk memindahkan lokus penelitian ke Denpasar.

...saran pemilihan SMA adalah karena tingkat berpikir bisa menjangkau untuk berpikir kritis (critical) berbeda dengan anak usia sekolah dasar (SD) maupun pertama (SM). Dalam konteks kurikulum 2013, kemampuan kritis mutlak diperlukan guna mengarahkan peserta didik menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan menggunakannya dengan baik.

...berpikir kritis ini, dalam konteks penelitian ini, peneliti untuk mendiskusikan bagaimana

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini merupakan standar sedur dalam melakukan pengumpulan data hingga kondensasi data, hingga instrumen yang dibutuhkan dalam melakukan analisis data dapat lankan, sebagai berikut,

a. Observasi

Peneliti melakukan langkah observasi yang pertama, adalah melakukan Focus Group Discussion yang mendatangkan keempat guru

⁸² Bambang Supomo and Nur Indriyanto, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009).

PAI yang menjadi lokus penelitian dan dua perwakilan siswa muslim di empat sekolah.

b. Wawancara (*Interview*)

Penelitian ini menggunakan dua teknik wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.⁸³ *Pertama*, wawancara terstruktur, adalah wawancara yang disusun secara sistematis dan terencana. Dalam artian, instrumen pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan telah disusun secara rapi. Adapun objek wawancara ini yang dilakukan peneliti kepada Kabid PAI Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Kabid PAI Kantor Kemenag Kota Denpasar, Kepala Sekolah terkait, satu Waka Kurikulum di SMA Negeri 2 Denpasar dan SMA Negeri 7 Denpasar dan empat guru PAI yang ada di lokus penelitian.⁸⁴

Kedua, wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang tidak dilakukan sesuai jadwal. Artinya, wawancara ini bersifat fleksibel dan sesuai kebutuhan, kapanpun dan di manapun bisa dilakukan wawancara kepada informan. Sebagaimana yang telah dilakukan peneliti dengan mengundang beberapa peserta didik muslim dan guru PAI, kemudian secara spontan melangsungkan pertanyaan acak dengan model semi FGD. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara tertutup dengan menggunakan kuesioner pertanyaan dan jawaban secara tertulis sebagai bahan perbandingan untuk keabsahannya dengan mengirimkan *google form* kepada guru PAI dan semua peserta didik muslim secara acak pada jenjang SMA/ SMK seluruh Denpasar, serta menggunakan wawancara terbuka, yaitu terlibat secara langsung melakukan dialog dengan sumber data, hal ini kepada guru PAI, bagian kurikulum, hingga kepala sekolah dan tenaga kependidikan sekolah.

⁸³ Imami Nur Rachmawati, “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara,” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40.

⁸⁴ Alaika M. Bagus Kurnia PS, "Observasi Penelitian di beberapa SMAN Denpasar, February 18-26, 2022.

5. Teknik Analisis Data

a. Kondensasi data, merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan temuan empirik lainnya. Kondensasi

⁸⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd (California: SAGE Publications, 2014), 31.

yang diperoleh selama penelitian. Konde dalam penelitian ini adalah statistik jumlah guru muslim Bali, wawancara terhadap guru, siswa, *holders* terkait.

ta dilakukan dalam bentuk uraian naratif singl *d mapping* atau hubungan antar kategori, sehingga bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas. uti statistik jumlah guru dan siswa minoritas mu terhadap guru, siswa, wali siswa dan *stakeholders* n dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat an berubah tatkala ditemukan bukti k an perubahan pada kesimpulan. Tetapi jika k upi dengan data atau bukti terkait yang valid dan

- yang diperoleh selama penelitian. Konde dalam penelitian ini adalah statistik jumlah guru muslim Bali, wawancara terhadap guru, siswa, *holders* terkait.
- ta dilakukan dalam bentuk uraian naratif singl *d mapping* atau hubungan antar kategori, sehingga bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas. uti statistik jumlah guru dan siswa minoritas mu terhadap guru, siswa, wali siswa dan *stakeholders* n dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat an berubah tatkala ditemukan bukti k an perubahan pada kesimpulan. Tetapi jika k upi dengan data atau bukti terkait yang valid dan

yang diperoleh selama penelitian. Konde dalam penelitian ini adalah statistik jumlah guru muslim Bali, wawancara terhadap guru, siswa, *stakeholders* terkait.

data dilakukan dalam bentuk uraian naratif singk *cross mapping* atau hubungan antar kategori, sehingga bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas. Data statistik jumlah guru dan siswa minoritas muslim terhadap guru, siswa, wali siswa dan *stakeholders* dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah tatkala ditemukan bukti yang mendukung perubahan pada kesimpulan. Tetapi jika kontradiksi dengan data atau bukti terkait yang valid dan

yang diperoleh selama penelitian. Konde dalam penelitian ini adalah statistik jumlah guru muslim Bali, wawancara terhadap guru, siswa, *stakeholders* terkait.

data dilakukan dalam bentuk uraian naratif singk *cross mapping* atau hubungan antar kategori, sehingga bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas. Data statistik jumlah guru dan siswa minoritas muslim terhadap guru, siswa, wali siswa dan *stakeholders* dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah tatkala ditemukan bukti yang mendukung perubahan pada kesimpulan. Tetapi jika kontradiksi dengan data atau bukti terkait yang valid dan

yang diperoleh selama penelitian. Konde dalam penelitian ini adalah statistik jumlah guru muslim Bali, wawancara terhadap guru, siswa, *holders* terkait.

ta dilakukan dalam bentuk uraian naratif singl *d mapping* atau hubungan antar kategori, sehingga bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas. uti statistik jumlah guru dan siswa minoritas mu terhadap guru, siswa, wali siswa dan *stakeholders* n dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat an berubah tatkala ditemukan bukti k an perubahan pada kesimpulan. Tetapi jika k upi dengan data atau bukti terkait yang valid dan

bergantungan. Maksudnya adalah, pelaksanaan
masi dan kondisi peneliti dan juga yang diteliti
dalam hal ini manusia yang menjadi in
(*dependability*) mengacu pada konsistensi da
an dan sejauh mana prosedur penelitian didoku
seseorang di luar penelitian untuk mengikuti,
proses penelitian.⁹¹
confirmability, yaitu melakukan keabsahan
m penelitian kualitatif, kepastian ini harus dil
diperoleh sebagai sumber primer; sumber das
n kesimpulan, temuan adalah data-data
Confirmability adalah mengukur sejauh ma
at dikonfirmasi oleh peneliti lain. Konfirm

bergantungan. Maksudnya adalah, pelaksanaan
masi dan kondisi peneliti dan juga yang diteliti
dalam hal ini manusia yang menjadi in
(*dependability*) mengacu pada konsistensi da
an dan sejauh mana prosedur penelitian didoku
seseorang di luar penelitian untuk mengikuti,
proses penelitian.⁹¹
confirmability, yaitu melakukan keabsahan
m penelitian kualitatif, kepastian ini harus dil
diperoleh sebagai sumber primer; sumber das
n kesimpulan, temuan adalah data-data
Confirmability adalah mengukur sejauh ma
at dikonfirmasi oleh peneliti lain. Konfirm

bergantungan. Maksudnya adalah, pelaksanaan
masi dan kondisi peneliti dan juga yang diteliti
dalam hal ini manusia yang menjadi in
(*dependability*) mengacu pada konsistensi da
an dan sejauh mana prosedur penelitian didoku
seseorang di luar penelitian untuk mengikuti,
proses penelitian.⁹¹
confirmability, yaitu melakukan keabsahan
m penelitian kualitatif, kepastian ini harus dil
diperoleh sebagai sumber primer; sumber das
n kesimpulan, temuan adalah data-data
Confirmability adalah mengukur sejauh ma
at dikonfirmasi oleh peneliti lain. Konfirm

⁹³ Moser, Albine, and Irene Korstjens. "Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis." *European journal of general practice* 24.1 (2018): 9-18.

I. Sistematika Pembahasan

Peneliti memberikan gambaran rencana penelitian disertasi menjadi lima bab, meliputi bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua adalah kajian teori terkait layanan pendidikan Islam dalam perspektif pengaruh minoritas, kontak dan konstruksi sosial pada sub bab besarnya

Bab ketiga menerangkan tentang penyajian data yang menjelaskan tentang gambaran umum layanan pendidikan, profil sekolah, potret sistem layanan pendidikan Islam dan potret praktik layanan pendidikan Islam.

Bab keempat merupakan analisis data yang memuat terkait sistem layanan pendidikan Islam, Praktik Layanan pendidikan Islam, dan model layanan pendidikan Islam. Bab kelima sebagai penutup dibahas secara detail mengenai kesimpulan, implikasi teori dan praktik, rekomendasi dan keterbatasan studi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF PENGARUH MINORITAS, KONTAK DAN KONSTRUKSI SOSIAL

A. Layanan Pendidikan Islam

1. Konsep Layanan Pendidikan Islam

Pendidikan sebagai salah satu sektor pelayanan publik pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik guna mengefektifkan amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara baik di dalam maupun di luar negeri berhak memperoleh akses dan pelayanan terbaik dari pendidikan.¹ Layanan pendidikan sebagai salah satu *core society* sangat bermanfaat pada upaya peningkatan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima. Layanan pendidikan merupakan jasa yang diberikan oleh pihak penyedia jasa atau sekolah kepada siswa. Kualitas layanan pendidikan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi dan ekspektasi siswa terhadap layanan pendidikan yang benar-benar mereka peroleh selama proses pendidikan yang di tempuh di sekolah.²

Layanan sendiri diartikan sebagai *any primary or complementary activity that does not directly produce a physical product - that is, the non-goods part of the transaction between buyer (customer) and seller (provider)* atau kegiatan utama atau pelengkap yang secara tidak langsung menghasilkan fisik produk, yaitu benda-barang bagian dari transaksi antara pembeli (*customer*) dan penjual (penyedia).³ Dalam arti layanan ini lebih menekankan pada bentuk fisik benda berwujud. Dengan kata lain, layanan

¹ Suprpto, Suprpto. "Layanan Pendidikan Islam Bagi Anak-Anak Buruh Migran Indonesia Di Kota Kinabalu Sabah Malaysia." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2017): 423-424.

² Yulista, Yulista, and Kusumantoro Kusumantoro. "Kualitas Layanan Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Batang (Tahun Ajaran 2014/2015)." *Economic Education Analysis Journal* 4.1 (2015).

³ Prasad, Sameer, and Sunil Babbar. "International operations management research." *Journal of operations management* 18.2 (2000): 209-247.

adalah produk yang tidak berwujud yang ditawarkan untuk memuaskan pelanggan.

Dalam konteks keorganisasian, baik berplat merah atau hitam, layanan ini sangat penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas serta kepuasan pelanggan. Terlebih sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan harus berperan aktif untuk senantiasa berinovasi dan berkreasi agar tidak ketinggalan zaman dan memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman. Dalam hal ini, mutu menjadi suatu keniscayaan. Dalam konteks pendidikan, salah satu cerminan mutu adalah ditunjang dengan adanya sarana pra sarana yang memadai, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan profesional, moralitas dan integritas yang tinggi, penggunaan teknologi mutakhir, kualitas pengajaran yang *up to date* dan tidak monoton, dan semua yang berkaitan dengan upgrading dalam konteks peningkatan mutu pendidikan.

Organisasi-organisasi yang menganggap serius pencapaian mutu, memahami bahwa sebagian besar rahasia mutu berakar dari mendengar dan merespon secara simpatik terhadap kebutuhan dan keinginan para pelanggan dan klien. Meraih mutu melibatkan keharusan melakukan segala hal dengan baik, dan sebuah institusi harus memposisikan pelanggan secara tepat dan proporsional agar mutu tersebut bisa dicapai.⁴

Dalam sebuah ayat, Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu

⁴ Ali Mudhofir, *Pendidik profesional: konsep, strategi, dan aplikasinya dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Ayat di atas bermakna bahwa setiap muslim berkewajiban untuk memberikan kualitas pelayanan (*quality service*) kepada orang lain. Dalam ayat yang lain disebutkan “Jawablah salam saudaramu dengan sepadan, atau lebih baik dari pemberian salamnya”. Dari sini, dapat dipahami bahwa memberikan pelayanan terbaik dari apa yang dimiliki adalah bagian daripada iman. Dengan demikian konsep memberikan pelayanan yang terbaik merupakan konsep Islam yang akan membawa kebaikan bagi umat Islam tersendiri.

Atas dasar ayat di atas, kemudian memunculkan teori pelayanan prima. Sejatinya, pelayanan prima merupakan terjemahan dari *excellent service*. Secara etimologi, *excellent service* berarti pelayanan yang sangat baik, atau pelayanan yang terbaik.⁶ Pelayanan prima dikembangkan berdasarkan konsep A3, yaitu *Attitude* (sikap), *Attention* (perhatian), dan *Action* (tindakan).⁷ Ketiga konsep ini yang pada gilirannya akan melahirkan kepuasan *customer* (pelanggan) untuk datang kembali.

Di samping itu, menurut Daryanto dan Ismanto, pelayanan prima berdasarkan: (1) Sikap (*attitude*) merupakan pemberian pelayanan kepada para pelanggan dengan fokus pada perbaikan sikap terkait pelayanan prima seperti pelayanan dengan penampilan serasi, berpikiran positif, dan saling menghargai; (2) Perhatian (*attention*) mencakup tiga prinsip pokok yaitu mendengarkan dan memahami secara sungguh – sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan mendengar perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh pada para pelanggan. Dan (3) tindakan

⁶ Atep Adya Barata, *Dasar-dasar pelayanan prima*. Elex Media Komputindo, 2003; lihat juga Nurmah Semil, *Pelayanan prima instansi pemerintah: kajian kritis pada sistem pelayanan publik di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

⁷ Ismanto Setyobudi Daryanto, *Konsumen dan pelayanan prima* (Yogyakarta: Gava Media, 2014).

(*action*) terdiri dari mencatat pesanan pelanggan, mencatat kebutuhan pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan pelanggan, mewujudkan kebutuhan pelanggan, serta menyatakan terimakasih dengan harapan pelanggan akan kembali untuk melakukan suatu pembelian.⁸

Pertama, pelayanan prima berlandaskan *attitude* (sikap). Pelayanan ini mencakup tiga prinsip; melayani pelanggan berdasarkan *performance* (penampilan), berpikiran positif (*positive thinking*), dan berpikiran rasional dengan prinsip apresiasi. *Kedua*, pelayanan prima atas dasar *attention* (perhatian). Tidak jauh berbeda dengan yang pertama, jenis kedua ini berdasar tiga prinsip yang meliputi; mendengarkan dan memahami kebutuhan para pelanggan, mengamati dan mengapresiasi perilaku para pelanggan serta mencurahkan perhatian penuh kepadanya. Dan *ketiga*, pelayanan prima berdasarkan tindakan (*action*) meliputi lima prinsip: mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali.⁹

Dalam konteks ini, tidak dapat dimungkiri, berbicara pelayanan tentu berkelindan dengan jasa. Persoalan jasa ini tidaklah sesederhana yang dibayangkan dan dipikirkan. Sebab, jasa merupakan sesuatu fenomena yang rumit (*complicated*). Kata jasa mempunyai banyak arti dan ruang lingkup, dari pengertian yang paling sederhana sampai yang paling rumit, yaitu hanya berupa pelayanan dari seseorang kepada orang lain, mulai dari pelayanan yang diberikan oleh manusia, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat, yang hanya bisa dirasakan sampai kepada fasilitas-fasilitas pendukung yang harus tersedia dalam penjualan jasa dan benda-

⁸ Lihat Daryanto, Ismanto Setyobudi. "Konsumen dan pelayanan prima." *Cetakan I. Yogyakarta: Gava Media* (2014): 120.

⁹ Lihat Daryanto, Ismanto Setyobudi. "Konsumen dan pelayanan prima." *Cetakan I. Yogyakarta: Gava Media* (2014): 120.

Sebagai perbandingan, layanan menurut William J. Stanton adalah *service are those separately identifiable, essentially, intangible activities that provide want satisfaction and that are not necessarily tied to the sale of a product or another service. To produce a service may or may not require the use of tangible goods.*¹¹ Jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah tidak berwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak.

Berdasarkan paparan di muka, layanan pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau aktifitas yang berkaitan dengan pendidikan yang menitikberatkan pada kebutuhan dan kepuasan pada pelanggan pendidikan. Jika realitasnya lebih dari yang diekspetasikan, maka layanan tersebut dapat disebut bermutu atau berkualitas. Dan jika sebaliknya, maka kualitas pendidikan tersebut jauh dari istilah memadai, jikalau sama antara realita dengan harapan, maka layanan tersebut memuaskan.

Kementerian Agama sebagai leading sector yang menggawangi Pendidikan Islam telah membuat sejumlah kebijakan dan program unggulan untuk meningkatkan kualitas dan mutu PAI agar senada dengan tantangan zaman. Dalam sambutannya Direktur PAI, Amrullah, menyampaikan target kinerja 2022 antara lain penguatan program mandatori dan program unggulan Direktorat Pendidikan Islam, yaitu:¹² (1) Penguatan moderasi beragama; (2) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; (3) Peningkatan kualitas penilaian pendidikan; (4)

¹¹ Verma, Harsh V. *Services marketing: Text and cases*, 2/e. Pearson Education India, 2011, 26.

¹² Kanwil Kemenag DIY, “Enam Program Unggulan Direktorat PAI Kemenag RI”, dalam <https://diy.kemenag.go.id/21426-enam-program-unggulan-direktorat-pai-kemenag-ri.html>, diakses 15 November 2022.

Peningkatan kualitas pendidikan profesi; (5) Pemenuhan distribusi tenaga pendidik; dan (6) Penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti.

Sebagai perbandingan, program unggulan kemenag tahun 2022-2024 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Layanan Pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Kementerian Agama RI di bidang program pendidikan Islam yaitu: tahun 2010-2014, yaitu menetapkan 5 kebijakan yakni : (1) peningkatan kualitas kehidupan beragama; (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (3) peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; (4) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan (5) perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pencapaian tujuan program Pendidikan Islam di bidang pendidikan agama di sekolah dilakukan melalui Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Islam pada sekolah adalah: 1) Tersedianya layanan Pendidikan Islam pada sekolah, 2) Meningkatnya mutu layanan Pendidikan Islam pada sekolah, dan 3) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama peserta didik.

2. Dimensi Layanan Pendidikan Islam

Kualitas layanan (*service quality*) adalah ukuran bagaimana sekolah memberikan layanannya dibandingkan dengan harapan pelanggannya. Pelanggan (dalam hal ini, siswa, orang tua dan masyarakat) membeli layanan sebagai respons terhadap kebutuhan spesifik. Mereka secara sadar atau tidak sadar memiliki standar dan harapan tertentu tentang bagaimana penyampaian layanan sekolah memenuhi kebutuhan tersebut. Sekolah dengan kualitas layanan yang tinggi menawarkan layanan yang sesuai atau melebihi harapan pelanggannya.

a. *Reliability* (keandalan)

b. *Tangiblity* (aset fisik)

Aset fisik ini meliputi tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi, dan lain-lain yang dapat dan harus ada dalam proses jasa. Penilaian terhadap dimensi ini dapat diperluas dalam bentuk hubungan dengan konsumen lain pengguna jasa. Bukti fisik berupa gedung, ruangan, fasilitas dan sarana parkir serta peralatan penunjang lainnya untuk memberikan pelayanan jasa yang memadai, aman dan nyaman.

[illegible]

an kualitas layanan yang tinggi selalu merespon secepat mungkin yang seringkali dapat memuaskan perusahaan pada kepuasan pelanggan. Menunggu tanpa alasan yang jelas, menyebabkan dalam kualitas jasa, kecuali apabila kesalahan bisa menjadi sesuatu yang berkesan yang menyenangkan.

an kualitas layanan yang tinggi selalu merespon secepat mungkin yang seringkali dapat memuaskan perusahaan pada kepuasan pelanggan. Menunggu tanpa alasan yang jelas, menyebabkan dalam kualitas jasa, kecuali apabila kesalahan bisa menjadi sesuatu yang berkesan yang menyenangkan.

an kualitas layanan yang tinggi selalu merespon secepat mungkin yang seringkali dapat memuaskan perusahaan pada kepuasan pelanggan. Menunggu tanpa alasan yang jelas, menyebabkan dalam kualitas jasa, kecuali apabila kesalahan bisa menjadi sesuatu yang berkesan yang menyenangkan.

an kualitas layanan yang tinggi selalu merespon secepat mungkin yang seringkali dapat memuaskan perusahaan pada kepuasan pelanggan. Menunggu tanpa alasan yang jelas, menyebabkan dalam kualitas jasa, kecuali apabila kesalahan bisa menjadi sesuatu yang berkesan yang menyenangkan.

an kualitas layanan yang tinggi selalu merespon secepat mungkin yang seringkali dapat memuaskan perusahaan pada kepuasan pelanggan. Menunggu tanpa alasan yang jelas, menyebabkan dalam kualitas jasa, kecuali apabila kesalahan bisa menjadi sesuatu yang berkesan yang menyenangkan.

e. *Empathy*

Dimensi empathy ini terdapat unsur-unsur lainnya yang terkait, yaitu sebagai berikut: a) *Acces* (akses), kemudian memanfaatkan dan memperoleh layanan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. b) *Communication* (komunikasi), kemampuan dalam komunikasi untuk penyampaian pesan, dan informasi kepada pelanggannya melalui berbagai media komunikasi, yaitu personal kontak, media publikasi/promosi, telepon, korespondensi, dan internet. c) *Understanding the customer* (pemahaman terhadap pelanggan), kemampuan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan serta mampu menangani keluhan para pelanggannya.

[illegible]

c. Layanan Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS)

Layanan ini menjadi aspek keempat dalam pemenuhan kepuasan layanan terhadap orang tua. Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39, Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.¹⁷ Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Faktor layanan pada Aspek Kompetensi Lulusan memiliki nilai kepuasan yang paling rendah namun dapat dijadikan sekolah sebagai bahan acuan untuk dapat memperbaiki tingkat pelayanan yang diberikan. Faktor layanan ini diantaranya: sikap peserta didik di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, penambahan pengetahuan peserta didik dalam bidang akademik, non akademik, serta keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk meningkatkan kualitas layanan aspek kompetensi lulusan dapat dilakukan dengan

¹⁷ Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Prasarana dan Prasarana

Prasarana pendidikan adalah semua peralatan, bahan dan perlengkapan non fisik yang secara langsung digunakan dalam proses belajar di sekolah. Prasarana pendidikan menurut (Tanjung, 2019: 10) Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar bergerak maupun tidak bergerak agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Undang-undang No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Prasarana dan Prasarana

Prasarana pendidikan adalah semua peralatan, bahan dan perlengkapan non fisik yang secara langsung digunakan dalam proses belajar di sekolah. Prasarana pendidikan menurut (Tanjung, 2019: 10) Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar bergerak maupun tidak bergerak agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. (UU No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan)

Prasarana dan Prasarana pendidikan adalah semua peralatan, bahan dan non fisik yang secara langsung digunakan di sekolah. Prasarana pendidikan menurut (Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar bergerak maupun tidak bergerak agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Prasarana dan Prasarana pendidikan adalah semua peralatan, bahan dan non fisik yang secara langsung digunakan di sekolah. Prasarana pendidikan menurut (Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar bergerak maupun tidak bergerak agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Prasarana dan Prasarana pendidikan adalah semua peralatan, bahan dan non fisik yang secara langsung digunakan di sekolah. Prasarana pendidikan menurut (Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar bergerak maupun tidak bergerak agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (UU No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Prasarana dan Prasarana pendidikan adalah semua peralatan, bahan dan non fisik yang secara langsung digunakan di sekolah. Prasarana pendidikan menurut (Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar bergerak maupun tidak bergerak agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

faktor inilah yang menjadi penentu
m dari suatu lembaga pendidikan. Faktore
NP. SNP tersebut terdiri atas 8 standar
lulusan, Standar Isi, Standar Proses Sta
idikan, Standar sarana dan Prasarana, S
ayaan, dan Standar Penilaian. Sekola
g memberikan pelayanan pada pelan
lah dengan baik sesuai SNP yang ada.

Memengaruhi Kualitas Layanan Pendidikan
meningkatkan tingkat kualitas layanan
tentu adalah kepuasan pelanggan

faktor inilah yang menjadi penentu
m dari suatu lembaga pendidikan. Faktore
NP. SNP tersebut terdiri atas 8 standar
lulusan, Standar Isi, Standar Proses Sta
idikan, Standar sarana dan Prasarana, S
ayaan, dan Standar Penilaian. Sekola
g memberikan pelayanan pada pelan
lah dengan baik sesuai SNP yang ada.

Memengaruhi Kualitas Layanan Pendidikan
meningkatkan tingkat kualitas layanan
tentu adalah kepuasan pelanggan

faktor inilah yang menjadi penentu dari suatu lembaga pendidikan. Faktor SNP. SNP tersebut terdiri atas 8 standar lulusan, Standar Isi, Standar Proses Standar Pendidikan, Standar sarana dan Prasarana, Standar Pelayanan, dan Standar Penilaian. Sekolah harus memberikan pelayanan pada pelanggan dengan baik sesuai SNP yang ada.

faktor inilah yang menjadi penentu
m dari suatu lembaga pendidikan. Faktore
NP. SNP tersebut terdiri atas 8 standar
lulusan, Standar Isi, Standar Proses Sta
idikan, Standar sarana dan Prasarana, S
ayaan, dan Standar Penilaian. Sekola
g memberikan pelayanan pada pelan
lah dengan baik sesuai SNP yang ada.

Memengaruhi Kualitas Layanan Pendidikan
meningkatkan tingkat kualitas layanan
tentu adalah kepuasan pelanggan

faktor inilah yang menjadi penentu
dari suatu lembaga pendidikan. Faktor
NP. SNP tersebut terdiri atas 8 standar
lulusan, Standar Isi, Standar Proses Sta
didikan, Standar sarana dan Prasarana, S
ayaan, dan Standar Penilaian. Sekola
g memberikan pelayanan pada pelan
lah dengan baik sesuai SNP yang ada.

Memengaruhi Kualitas Layanan Pendidikan
meningkatkan tingkat kualitas layanan
tentu adalah kepuasan pelanggan.

faktor inilah yang menjadi penentu dari suatu lembaga pendidikan. Faktor SNP. SNP tersebut terdiri atas 8 standar lulusan, Standar Isi, Standar Proses Standar Pendidikan, Standar sarana dan Prasarana, Standar Pelayan, dan Standar Penilaian. Sekolah memberikan pelayanan pada pelanggan dengan baik sesuai SNP yang ada.

meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan ini meliputi segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, tak terkecuali PAI. Layanan Pendidikan Islam tidak boleh hanya begitu-begitu saja, akan tetapi harus ditopang dengan Sumber Daya Manusia (SDM), atau resources di sekolah tersebut agar pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik berkembang dengan baik sesuai fitrahnya.

Ketiga, Emosional Pelanggan atau chemistry. Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk atau jasa dengan merek tertentu, sehingga membuatnya mengalami tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk atau jasa, tetapi nilai sosial atau *self-esteem* yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merk tertentu. Para peserta didik, wali peserta didik dan masyarakat merasa akan diapresiasi dan dihargai ketika mereka tidak hanya sekadar mendapatkan layanan terbaik yang bersifat tangible, melainkan keramahtamahan dan kesantunan dari pihak penyedia jasa (baca; sekolah). Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah selaku penyedia jasa.

Keempat, harga produk atau jasa. Tidak dapat dipungkiri, harga jasa yang ditawarkan oleh pihak sekolah menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini tidak boleh luput dari pihak penyedia jasa. Sekolah yang mempunyai kualitas yang sama dengan produk lain, misalnya, tetapi ditetapkan pada harga yang lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Jadi, pelanggan tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk/jasa (pengorbanannya semakin kecil), cenderung puas terhadap produk/ jasa. Penyedia jasa harus berhasil membangun komitmen bersama seluruh stakeholder untuk pencapaian visi dalam perbaikan layanan guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang termasuk di dalamnya adalah memperbaiki cara berfikir, perilaku, kemampuan, dan pengetahuan yang ada.

uk memastikan kualitas penyampaian layanan pendidikan kepada pengguna; (f) Supervisi suportif rutin: ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pendidikan. Agar sup

bidikan Bisnis), kualitas pendidikan (*Quality of Edu*

an yang mendefinisikan pengembangan k
reshi lebih lanjut menyoroti bahwa untu
ghadapi masalah dalam mengem
mengidentifikasi komponen pendidikan
nisikan kualitas, penulis bermaksud s
memfasilitasi siswa untuk menyerap p
pengguna dan dalam lingkungan yang

an yang mendefinisikan pengembangan k
reshi lebih lanjut menyoroti bahwa untu
ghadapi masalah dalam mengem
mengidentifikasi komponen pendidikan
nisikan kualitas, penulis bermaksud s
memfasilitasi siswa untuk menyerap p
pengguna dan dalam lingkungan yang

an yang mendefinisikan pengembangan k
reshi lebih lanjut menyoroti bahwa untu
ghadapi masalah dalam mengem
mengidentifikasi komponen pendidikan
nisikan kualitas, penulis bermaksud s
memfasilitasi siswa untuk menyerap p
pengguna dan dalam lingkungan yang

an yang mendefinisikan pengembangan k
reshi lebih lanjut menyoroti bahwa untu
ghadapi masalah dalam mengem
mengidentifikasi komponen pendidikan
nisikan kualitas, penulis bermaksud s
memfasilitasi siswa untuk menyerap p
pengguna dan dalam lingkungan yang

an yang mendefinisikan pengembangan k
reshi lebih lanjut menyoroti bahwa untu
ghadapi masalah dalam mengem
a mengidentifikasi komponen pendidikan
nisikan kualitas, penulis bermaksud s
memfasilitasi siswa untuk menyerap p
n pengguna dan dalam lingkungan yang

an Pendidikan Islam dalam Konteks

dan Rasio Luasan Pendidikan

an yang mendefinisikan pengembangan k
reshi lebih lanjut menyoroti bahwa untu
ghadapi masalah dalam mengem
a mengidentifikasi komponen pendidikan
nisikan kualitas, penulis bermaksud s
memfasilitasi siswa untuk menyerap p
n pengguna dan dalam lingkungan yang

an Pendidikan Islam dalam Konteks

Ita dan Rania Luman Pendidikan

an yang mendefinisikan pengembangan k
reshi lebih lanjut menyoroti bahwa untu
ghadapi masalah dalam mengem
mengidentifikasi komponen pendidikan
nisikan kualitas, penulis bermaksud s
memfasilitasi siswa untuk menyerap p
pengguna dan dalam lingkungan yang

Edward Sagarin, dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, *The Other Minorities*, menyarankan dimasukkannya kolektivitas yang dibedakan berdasarkan penyimpangan, kecacatan, dan viktimisasi. Saat ini istilah tersebut semakin banyak digunakan dalam bahasa populer untuk merujuk pada individu. Konotasi politik sebelumnya yang menekankan hubungan kekuasaan dikaburkan karena individu yang mengaku telah menjadi korban diperlakukan sebagai “minoritas”.²⁴ Istilah “minoritas” diartikan sebagai bagian dari penduduk yang beberapa ciri-cirinya berbeda dan umumnya mendapat perlakuan berbeda.²⁵ Beberapa ciri-ciri yang berbeda tersebut bisa berupa bentuk fisik, seperti warna kulit dan bahasa.²⁶ Menurut Theodorson, “minoritas adalah kelompok yang diakui berdasarkan ras, agama atau etnis, yang menderita kerugian akibat prasangka (prejudice) atau biasa dikenal dengan istilah diskriminasi”.²⁷

Dalam novel *The Outcast*, Madasari menulis bagaimana mayoritas memiliki persepsi negatif dan bagaimana mereka melakukan berbagai tindakan diskriminasi terhadap minoritas, khususnya diskriminasi terhadap pemeluk agama tertentu.²⁸ Publikasi *The Other Minorities* pada tahun 1971,

²³ Lihat Helen Mayer Hacker, "Women as a minority group." *Social forces* (1951): 60-69.

²⁵ Rizkika Agustin, Kasuwi Saiban, and Mufarrihul Hazin, "Problematika Pendidikan Islam di Daerah Minoritas Muslim." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21.02 (2021): 153-160.

²⁶ Barton Meyers, "Minority group: An ideological formulation." *Social Problems* 32.1 (1984): 1-15.

²⁷ George A. Theodorson, "Minority peoples in the Union of Burma." *Journal of Southeast Asian History* 5.1 (1964): 1-16.

²⁸ Okky Madasari, *The Outcast* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Dalam konteks ini, minoritas dimaksudkan sebagai: *pertama*, secara numerik jumlahnya lebih kecil dari sisa populasi lainnya dalam suatu negara. *Kedua*, posisinya tidak dominan dalam konteks negara. *Ketiga*, adanya perbedaan etnik, agama, dan budaya dengan populasi lainnya. Dan *keempat*, memiliki solidaritas agama, bahasa, tradisi, budaya, dan kepentingan untuk meraih persamaan di muka umum dengan populasi di luarnya.³⁰

²⁹ Lihat Edward, Sagarin, ed. *The Other Minorities: Nonethnic Collectivities Conceptualized as Minority Groups* (Ginn, 1971).

³⁰ A Solikhin, "Islam, Negara, dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas", *Journal of Governance*, 1(2) (2016).

³¹ Al-Usaury, *Sejarah Islam* (terjemahan Samson Rohman. Akbar Media, 2013).

Dalam konteks ini, paradigma layanan Pendidikan Islam, salah satunya harus tercermin dalam muatan kurikulum. Kurikulum PAI di wilayah minoritas harus lebih mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang notabene sebagai minoritas. Tidak hanya itu, dukungan dan peran penting pemerintah daerah terkait ikut menunjang keberhasilan pemerataan layanan Pendidikan Islam di seluruh daerah, tak terkecuali daerah minoritas seperti halnya Bali. Setidaknya ada enam layanan Pendidikan Islam pada aspek kurikulum di daerah minoritas sebagai berikut.

Pertama, Fleksibilitas. Fleksibilitas menitikberatkan pada pengembangan materi dan metodologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana mendapatkan pilihan yang tepat agar terjadi komunikasi yang baik antara guru dan siswa, sehingga materi yang diberikan benar benar dapat ditangkap dan dipahami. Oleh sebab itu, guru harus memperhatikan keberadaan siswa dari segi kecerdasan, kemampuan dan pengetahuan yang telah dikuasainya, kemudian membuat pilihan bahan belajar dan metode-metode pembelajaran yang tepat dan sesuai.

Kedua, berorientasi pada tujuan, Kegiatan belajar mengajar harus berorientasi pada tujuan. Pemilihan kegiatan-kegiatan dan pengalaman belajar didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat. Oleh Karena itu, sebelum menentukan waktu dan bahan pelajaran terlebih dahulu ditetapkan tujuan yang harus dicapai oleh siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran.

Ketiga, efektifitas dan efisiensi. Struktur kurikulum PAI di wilayah minoritas pada dasarnya merupakan kebutuhan yang harus dirancang sedemikian rupa agar menghasilkan kualitas pembelajaran yang efektif dan

³² Indriana Kartini, "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 115-145.

Keempat, kontinuitas. Kurikulum PAI dikembangkan dengan pendekatan hubungan hirarki fungsional yang menghubungkan antar jenjang dan tingkatan. Oleh sebab itu, perencanaan kegiatan belajar mengajar harus dibuat secara optimal dan sistematis, sehingga kemungkinan terjadinya proses peningkatan, perluasan serta pengalaman yang terus berkembang dari suatu pokok bahasan mata pelajaran.

³³ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 5.

[illegible]

ji umat Islam. Bahkan dalam ajaran Islam dinyat
us dijalani oleh setiap orang selama masa hidup
nia “education for all” yang ditetapkan UN
rinsip pembelajaran seumur hidup. Oleh sebab
di Madrasah Diniyah Takmiliyah, selain dapat
dan pengalaman keilmuan kepada siswa,
sebagai pendorong utama bagi tumbuhnya
ti dan untuk semua lapisan masyarakat. Deng
pusat pendidikan yang membuka akses pend
luasannya dan berlangsung seumur hidup.

Layanan Pendidikan Islam dalam Konteks M
ita ketahui bahwa negara Indonesia adalah neg
g majemuk, artinya masyarakat yang tersusun a

ji umat Islam. Bahkan dalam ajaran Islam dinyat
us dijalani oleh setiap orang selama masa hidup
nia “education for all” yang ditetapkan UN
rinsip pembelajaran seumur hidup. Oleh sebab
di Madrasah Diniyah Takmiliyah, selain dapat
dan pengalaman keilmuan kepada siswa,
sebagai pendorong utama bagi tumbuhnya
ti dan untuk semua lapisan masyarakat. Denga
pusat pendidikan yang membuka akses pend
luasannya dan berlangsung seumur hidup.

Layanan Pendidikan Islam dalam Konteks M
ita ketahui bahwa negara Indonesia adalah neg
g majemuk, artinya masyarakat yang tersusun a

ji umat Islam. Bahkan dalam ajaran Islam dinyat
us dijalani oleh setiap orang selama masa hidup
nia “education for all” yang ditetapkan UN
rinsip pembelajaran seumur hidup. Oleh sebab
di Madrasah Diniyah Takmiliyah, selain dapat
dan pengalaman keilmuan kepada siswa,
sebagai pendorong utama bagi tumbuhnya
ti dan untuk semua lapisan masyarakat. Denga
pusat pendidikan yang membuka akses pend
luasannya dan berlangsung seumur hidup.

Layanan Pendidikan Islam dalam Konteks M
ita ketahui bahwa negara Indonesia adalah neg
g majemuk, artinya masyarakat yang tersusun a

ji umat Islam. Bahkan dalam ajaran Islam dinyat
us dijalani oleh setiap orang selama masa hidup
nia “education for all” yang ditetapkan UN
rinsip pembelajaran seumur hidup. Oleh sebab
di Madrasah Diniyah Takmiliyah, selain dapat
dan pengalaman keilmuan kepada siswa,
sebagai pendorong utama bagi tumbuhnya
ti dan untuk semua lapisan masyarakat. Deng
pusat pendidikan yang membuka akses pend
luasannya dan berlangsung seumur hidup.

Layanan Pendidikan Islam dalam Konteks M
ita ketahui bahwa negara Indonesia adalah neg
g majemuk, artinya masyarakat yang tersusun a

Lebih spesifik dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan Islam di daerah Muslim minoritas, tentu juga ditemui berbagai permasalahan. Misalnya tidak adanya tempat ibadah muslim di sekolah, pada saat pelaksanaan shalat jumat, dalam beberapa kasus, kami mendapati siswa muslim tidak diberi kesempatan untuk shalat karena proses pembelajaran masih berlangsung. Bahkan ruang kelas khusus bagi siswa untuk mata pelajaran Pendidikan Islam juga tidak tersedia. Meski tidak semuanya mendapat perlakuan yang seperti itu, namun mayoritas dari sekolah yang kami teliti setidaknya mengonfirmasi adanya celah pendiskriminasian terhadap siswa muslim. Selanjutnya masalah terbesar dalam mengoptimalkan pembelajaran PAI yaitu kurangnya atau bahkan tidak adanya guru PAI di beberapa sekolah³⁶, ada juga yang merangkap di banyak sekolah sehingga kualitas pembelajaran tidak efektif. Bahkan di suatu sekolah daerah minoritas Muslim ditemukan guru Pendidikan Islam yang bukan Muslim.

as dari berbagai permasalahan yang menjerat mere
 penelitian tentang pergulatan Pendidikan Islam yang
 n penelitian tersebut, ditemukan bahwa para guru

tin, Rizkika, Kasuwi Saiban, and Mufarrihul Hazin. "Problematika Pendidikan Islam di Minoritas Muslim." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21.02 (2021): 156.

usmayani. The Potrait of PAI and Budi Pekerti's Learning in Public School on Earth *y. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1) (2019).

³⁶ R Rusmayani. The Portrait of PAI and Budi Pekerti's Learning in Public School on Earth Minority. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1) (2019).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berbagai sekolah untuk mengejar target. Akibatnya, banyak sekolah-sekolah yang tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan problematika layanan Pendidikan Islam. Menurut Umardi Azra berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya otonomi atau desentralisasi pendidikan Islam. Menurut Umardi Azra, desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan mutu layanan Pendidikan Islam, termasuk madrasah. Menurut Umardi Azra, hal ini terjadi karena desentralisasi pendidikan Islam pada lembaga – lembaga pendidikan Islam term

berbagai sekolah untuk mengejar target. Akibatnya, banyak sekolah-sekolah yang tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan problematika layanan Pendidikan Islam. Menurut Muzardi Azra berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya otonomi atau desentralisasi pendidikan Islam. Menurut Muzardi Azra, desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Islam, termasuk madrasah. Menurut Muzardi Azra, hal ini terjadi karena desentralisasi pendidikan Islam di lembaga – lembaga pendidikan Islam term

berbagai sekolah untuk mengejar target. Akibatnya, banyak sekolah-sekolah yang tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan problematika layanan Pendidikan Islam. Menurut Umardi Azra berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya otonomi atau desentralisasi pendidikan Islam. Menurut Umardi Azra, desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan mutu layanan Pendidikan Islam, termasuk madrasah. Menurut Umardi Azra, hal ini terjadi karena desentralisasi pendidikan Islam pada lembaga – lembaga pendidikan Islam term

berbagai sekolah untuk mengejar target. Akibatnya, banyak sekolah-sekolah yang tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan problematika layanan Pendidikan Islam. Menurut Umardi Azra berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya otonomi atau desentralisasi pendidikan Islam. Menurut Umardi Azra, desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan mutu layanan Pendidikan Islam, termasuk madrasah. Menurut Umardi Azra, hal ini terjadi karena desentralisasi pendidikan Islam pada lembaga – lembaga pendidikan Islam term

Keinginan Bali untuk mengatur perda-perda yang bernuansa “syariat” Hindu mulai diberlakukan,⁴² walaupun demikian perda-perda tersebut tetap memberikan peluang pada agama-agama lain untuk hidup berdampingan, karena kultur ini merupakan kultur yang telah dibangun Bali sejak adanya kerajaan-kerajaan kecil di Bali seperti kerajaan Waturenggong di Klungkung dan Kerajaan Badung di Denpasar.⁴³ Pada masa-masa kerajaan inilah istilah menyama braya (aku adalah engkau, dan engkau adalah aku) dipopulerkan. Namun karena adanya modernisasi dan hegemoni politik Orde Baru, tradisi tersebut sedikit demi sedikit tidak begitu menonjol pada masyarakat Bali. Dengan demikian, salah satu “Ajeg Bali” yang harus diangkat kembali adalah “menyama braya”.

⁴² Menurut Peraturan Daerah No. 3 tahun 1991, secara umum jenis pariwisata dalam pengembangannya didasarkan pada kebudayaan Bali yang bernafaskan agama Hindu dengan menjaga keselarasan hubungan antar-pariwisata dan masyarakat serta kebudayaannya. Demikian juga Gubernur Bali I Made Mangku Pastika berkali-kali mengungkapkan bahwa dengan adat, budaya, dan agama yang satu, yaitu agama Hindu adalah modal dasar untuk mewujudkan keamanan berlandaskan adat, budaya, dan agama. Lihat juga Basyir, "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali", 1-27.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Budaya *menyama braya* merupakan salah satu budaya yang meneguhkan toleransi antarumat beragama di Kota Denpasar Bali. Konsep kunci yang dipegang teguh oleh umat Hindu sebagai pedoman dalam meneguhkan kerukunan antarumat beragama adalah “Tat Twam Asi” dan “Yama Niyama Brata”.⁴⁴ “Tat Twam Asi” yang berarti aku adalah engkau, sedanglam “Yama Niyama Brata” yang berarti engkau adalah aku. Menurut masyarakat Bali, apabila kita menyayangi dan mengasihi diri sendiri, maka kita harus berkata dan berbuat kepada orang lain sebagaimana berbuat pada diri kita sendiri. Apabila prinsip-prinsip ini bisa kita jalankan, maka kedamaian hidup di dunia ini akan bisa diwujudkan. Melalui penerapan konsep tersebut, lahirlah beberapa konsep operasional dalam kebudayaan Bali seperti ngupoin, mapitulun,⁴⁵ mejenukkan,⁴⁶ ngejot,⁴⁷ dan lain-lain. Semua itu merupakan salah satu bentuk jalinan kerukunan antarumat beragama di Denpasar Bali.

Komunitas keturunan Muslim Bugis di Denpasar dan Kabupaten Badung di Bali telah mempraktekkan *menyama-braya* (persaudaraan) dengan rekan-rekan mereka yang beragama Hindu. Hal ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka dan memastikan bahwa perbedaan agama tidak menjadi titik ketegangan. *Menyama-braya* mengharuskan

⁴⁴ Arjawa, I. G. P., and Bagus Suka. "The Social Integration of Hindu and Muslim Communities: The Practice of *menyama-Brava* in Contemporary Bali." *Studia Islamika* 28.1 (2021): 149-178.

⁴⁵ Ngupoin, mapitulung adalah membantu tetangga, teman, dan kerabat dalam hal persiapan upacara. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Denpasar seperti ketika akan diadakan upacara-upacara baik pernikahan, upacara adat maupun upacara yang lain umat Islam dan Hindu saling membaur untuk membantu menyukseskan acara yang akan dilaksanakan, mulai dari keamanan sampai pada masalah perlengkapan. Sedangkan perbedaan antara ngupoin dengan mapitulung adalah kalau ngupoin biasanya digunakan dalam hal orang yang punya hajatan. Sedangkan mapitulung digunakan ketika akan mengadakan upacara keagamaan. Lihat Basyir, Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2013): 16-17.

⁴⁶ Majenukan artinya ikut menyuksekkan acara, baik acara hajatan maupun acaraacara ritual keagamaan yang ada di Bali. Lihat Basyir, Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2013): 16-17.

⁴⁷ Ngejot adalah membagikan makanan (daging) kepada tetangga dan kerabat terdekat yang ada di sekitarnya. Tradisi ini biasanya dijalankan menjelang hari Raya Nyepi bagi umat Hindu, dan menjelang hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam. Lihat Basyir, Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2013): 16-17.

Sejatinya kultur Bali tidak mendiskriminasikan kelompok atau golongan tertentu, hanya saja memang diakui tradisi Ajeg Bali cukup bisa dijadikan “tameng” bagi warga Bali yang tidak menyukai golongan tertentu tumbuh subur di Bali. Terlebih pasca tragedi Bom Bali 1 dan 2 yang merusak citra Islam sebagai agama pembawa pesan damai. Di sinilah tantangan dan sekaligus hambatan yang harus menjadi perhatian bersama para stakeholders terkait layanan Pendidikan Islam di daerah minoritas muslim, layaknya Bali.

1. Layanan Pendidikan Islam dalam Perspektif Pengaruh Minoritas

⁴⁸ Arjawa, I. G. P., and Bagus Suka. "The Social Integration of Hindu and Muslim Communities: The Practice of *menyama-Braya* in Contemporary Bali." *Studia Islamika* 28.1 (2021): 149-178.

⁴⁹ Allen, V. L. (1965). Situational factors in conformity. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 2, pp. 133–175). New York: Academic Press; Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. In H. Guetzhaw (Ed.), *Groups, Leadership, and Men* (pp. 177–190). Pittsburgh, PA: Carnegie Press.

Meski demikian, minoritas dapat menjadi agen inovasi dan perubahan sosial bagi ikatan masyarakat jika mengajukan ide-ide alternatif dan orisinal. Mereka, bahkan, dapat menciptakan konflik sosial (*social conflict*) dengan mengajukan proposisi alternatif terhadap persepsi masyarakat yang *established*. Minoritas biasanya merupakan kelompok kecil yang mempertanyakan norma-norma sosial. Ikatan minoritas mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku orang dengan menjadi konsisten dan fleksibel dalam negosiasi mereka dengan anggota mayoritas.⁵² Pengaruh mereka acapkali laten (yaitu, terbukti pada tindakan tertunda, tidak langsung, dan privasi) *ketimbang* konkrit. Mereka mempengaruhi jumlah, dan kualitas, pemrosesan kognitif pesan mereka (dipicu oleh tuntutan elaborasi yang berbeda dari situasi pengaruh).

Mengikuti Serge Moscovici, bahwa setiap teori tentang mekanisme pengaruh minoritas harus mempertimbangkan dua fakta berikut. *Pertama*, seperti yang telah dijelaskan di muka, pengaruh minoritas tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan satu jenis kekuasaan (atau ketergantungan)

⁵¹ Gardikiotis, "Minority influence", 679-693' Studi Anne Maass menunjukkan bahwa orang cenderung mengalah pada mayoritas di depan umum (kepatuhan publik dalam paradigma konformitas), sementara menerima posisi minoritas secara pribadi (penerimaan pribadi dalam paradigma pengaruh minoritas). Lihat Maass, Anne, and Russell D. Clark. "Hidden impact of minorities: Fifteen years of minority influence research." *Psychological Bulletin* 95.3 (1984): 428.

⁵² *Minority is a group of people of the same race, culture, or religion who live in a place where most of the people around them are of different race, culture, or religion.* Lihat Stephen Bullons, et. all (eds.), *Collins Build Learner's Dictionary* (London: Harper Collins Publishers, 1996), 698; Ahmad Imam Mawardi, *FIQH MINORITAS Fiqh Al-Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 42.

Fakta kedua yang harus diperhatikan adalah kita terbiasa berpikir bahwa sumber pengaruh berhutang pengaruhnya justru pada fakta bahwa ia dihormati, disukai, dan kompeten, dan seterusnya. Namun, pada mulanya minoritas tidak memiliki citra sosial yang positif. Ia dipandang menyimpang, tidak kompeten, tidak masuk akal, tidak menarik, dan tidak kreatif, apalagi memiliki kuasa (*power*).⁵⁴ Minoritas berakar dalam konteks ketegangan dan konflik sosial, dan seluruh kompleksitas konteks normatif ini harus diperhitungkan untuk menjelaskan pengaruh mereka.⁵⁵ Hanya setelah proses sosial yang mengarah pada peningkatan hambatan terhadapnya dan pemaksaan (sampai batas tertentu atau lainnya) inovasinya, minoritas akan mencapai titik di mana ia bahkan dapat dilihat sebagai menarik.

Moscovici, Serge Ed, Angelica Ed Mucchi-Faina, and Anne Ed Maass. *Minority influence*. Oxford: Basil Blackwell Publishers, 1994. 46.

Moscovici, Serge Ed, Angelica Ed Mucchi-Faina, and Anne Ed Maass.

Turnley, G., & Papastamou, S. L'influence du social dan l'influence sociale. In S. Moscovici, G. Turner, & E. Van Avermaet, *Perspectives on minority influence*. Cambridge: Cambridge University Press-L.E.P.S., 1983.

Moscovici, Serge Ed, Angelica Ed Mucchi-Faina, and Anne Ed Maass. *Minority influence*. Oxford: Basil Blackwell Publishers, 1994. 46.

⁵⁶ Moscovici, Serge Ed, Angelica Ed Mucchi-Faina, and Anne Ed Maass. *Minority influence*. Nelson-Hall Publishers, 1994. 46.

menggunakan sarana persuasi untuk menegaskan diri mereka sendiri. Para ilmuwan yang mengajukannya berada dalam situasi minoritas, seperti yang disaksikan oleh Heisenberg salah satu pencipta mekanika kuantum:⁵⁷ “Maka, secara keseluruhan, adalah mungkin untuk menyimpulkan dalam retrospeksi bahwa pada abad ini telah terjadi dua revolusi besar dalam ilmu pengetahuan kita, yang telah menggeser dasar-dasar fisika dan dengan demikian mengubah seluruh bangunan subjek. Kita sekarang harus bertanya bagaimana perubahan radikal seperti itu terjadi, atau untuk menempatkannya dalam istilah yang lebih sosiologis, meskipun juga cukup menyesatkan bagaimana sekelompok kecil fisikawan mampu membatasi yang lain untuk perubahan ini dalam struktur ilmu pengetahuan dan pikiran? Tak perlu dikatakan bahwa yang lain pada awalnya menolak perubahan, dan terikat untuk melakukannya.”⁵⁸

Bukti konkrit dari minoritas yang mempengaruhi mayoritas adalah gerakan hak pilih di tahun-tahun awal abad ke-20.⁵⁹ Sekelompok hak pilih yang relatif kecil berargumen kuat untuk pandangan yang awalnya tidak populer bahwa perempuan harus diizinkan untuk memilih. Kerja keras para pemilih, dikombinasikan dengan keadilan kasus mereka, akhirnya membuat mayoritas menerima pandangan mereka. Studi konformitas melibatkan kelompok minoritas yang menyesuaikan diri dengan mayoritas. Moscovici (1976, 1980) berpendapat di sepanjang garis yang berbeda. Ia mengklaim bahwa Asch (1951) dan yang lainnya terlalu menekankan gagasan bahwa mayoritas dalam suatu kelompok memiliki pengaruh besar terhadap minoritas. Menurutnya, minoritas juga bisa mempengaruhi mayoritas.⁶⁰

Sebenarnya Asch setuju dengan Moscovici. Ia juga merasa bahwa pengaruh minoritas memang terjadi, dan berpotensi menjadi masalah yang

⁵⁷ Heisenberg, W. *Across the frontiers*. New York: Harper Torchbooks, 1975, 157.

⁵⁸ Heisenberg, W. *Across the frontiers*. New York: Harper Torchbooks, 1975, 157.

⁵⁹ Moscovici, Serge, and Gabriel Mugny. "Minority influence." *Basic group processes*. Springer, New York, NY, 1983. 41-64.

⁶⁰ Larsen, Knud S. "The Asch conformity experiment: Replication and transhistorical comparison." *Journal of Social Behavior and Personality* 5.4 (1990): 163.

Pertama, Gaya perilaku (behavioral style). Terdiri dari 4 komponen: (1) Konsistensi: Minoritas harus konsisten dalam berpendapat, (2) Keyakinan akan kebenaran ide dan pandangan yang mereka presentasikan, (3) Tampak tidak memihak, (4) Menolak tekanan sosial dan pelecehan (*resisting social pressure and abuse*). Moscovici (1969) menyatakan bahwa aspek yang paling penting dari gaya perilaku adalah konsistensi dengan orang yang memegang posisi mereka.⁶⁴ Konsisten dan tidak berubah dalam suatu pandangan akan lebih mempengaruhi mayoritas daripada jika minoritas tidak konsisten dan berubah-ubah pikirannya. Moscovici (1969) menyelidiki gaya perilaku (konsisten / tidak konsisten) pada pengaruh minoritas dalam studi biru-hijaunya. Dia menunjukkan bahwa minoritas yang konsisten lebih berhasil daripada minoritas yang tidak konsisten dalam mengubah pandangan mayoritas.⁶⁵

⁶⁴ Moscovici, Serge, Elisabeth Lage, and Martine Naffrechoux. "Influence of a consistent minority on the responses of a majority in a color perception task." *Sociometry* (1969): 365-380; Moscovici, Serge, and Claude Faucheux. "Social influence, conformity bias, and the study of active minorities." *Advances in experimental social psychology*. Vol. 6. Academic Press, 1972. 149-202.

⁶⁵ Moscovici, Serge, Elisabeth Lage, and Martine Naffrechoux. "Influence of a consistent minority on the responses of a majority in a color perception task", 365-380.

Untuk mengubah pandangan mayoritas, minoritas harus mengajukan posisi yang jelas dan harus mempertahankan dan mengadvokasi posisinya secara konsisten. Dalam konteks ini, terdapat dua bentuk konsistensi yang dapat dirujuk oleh kelompok minoritas, yaitu (1) Konsistensi Diakronis (*diachronic Consistency*)– yaitu konsistensi dari waktu ke waktu – mayoritas mendukung senjatanya, tidak mengubah pandangannya, (2) konsistensi sinkronis (*synchronic consistency* – yaitu konsistensi antara anggotanya – semua anggota setuju dan saling mendukung.⁶⁷

Kedua, Gaya Berpikir (*style of thinking*). Gaya berpikir kelompok minoritas tidak boleh dianggap remeh. Mengikuti teori pengaruh minoritas, bahwa mereka dapat menjadi agen inovasi dalam memainkan setiap keputusan yang ada. Bahkan, mereka mampu memantik konflik sosial jika kelompok mayoritas berani mengusik dan mempersulitnya hingga pada taraf dan gradasi tertentu.⁶⁸

Smith, misalnya, menjelaskan bahwa minoritas dapat mendominasi gaya berpikir dan meneguhkan argumentasi mereka secara saintifik guna mempengaruhi mayoritas.⁶⁹ Jika minoritas bisa mendapatkan dominasi untuk mendiskusikan dan memperdebatkan argumen yang diajukan minoritas, kemungkinan pengaruh mereka akan lebih kuat.⁷⁰

⁶⁷ Moscovici, Serge, and Gabriel Mugny. "Minority influence", 41-64.

⁶⁹ Smith, Christine M., R. Scott Tindale, and Bernard L. Dugoni. "Minority and majority influence in freely interacting groups: Qualitative versus quantitative differences." *British Journal of Social Psychology* 35.1 (1996): 137-149.

⁷⁰ Nemeth, Charlan, and John Rogers. "Dissent and the search for information." *British Journal of Social Psychology* 35.1 (1996): 67-76.

Ketiga, Fleksibilitas dan Kompromi. Sejumlah peneliti mempertanyakan apakah konsistensi saja cukup bagi minoritas untuk mempengaruhi mayoritas.⁷¹ Mereka berpendapat bahwa kuncinya adalah bagaimana mayoritas menafsirkan konsistensi. Jika minoritas yang konsisten dilihat sebagai tidak fleksibel, kaku, tanpa kompromi dan dogmatis, mereka tidak akan mengubah pandangan mayoritas. Namun, jika mereka tampak fleksibel dan berkompromi, mereka cenderung dianggap tidak terlalu ekstrem, lebih moderat, kooperatif, dan masuk akal. Akibatnya, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengubah pandangan mayoritas jika mereka memiliki fleksibilitas dan kompromi dalam gradasi tertentu sejauh menyangkut aspirasi mereka.⁷² Beberapa peneliti, Nemeth, misalnya, telah melangkah lebih jauh dan menyarankan bahwa bukan hanya penampilan fleksibilitas dan kompromi yang penting tetapi fleksibilitas dan kompromi yang sebenarnya.⁷³

Keempat, Identifikasi. Orang cenderung mengidentifikasi diri dengan orang yang mereka lihat mirip dengan diri mereka sendiri. Misalnya, pria cenderung mengidentifikasi diri dengan pria, orang Asia dengan orang Asia, remaja dengan remaja, dan sebagainya. Jika mayoritas mengidentifikasi diri dengan minoritas, maka mereka cenderung menganggap serius pandangan minoritas dan mengubah pandangan mereka sendiri sejalan dengan pandangan minoritas. Sebagai contoh, satu penelitian menunjukkan bahwa minoritas gay, misalnya, yang memperdebatkan hak-hak gay

⁷¹ De Vries, Nanne K., et al. "Majority and minority influence: A dual role interpretation." *European review of social psychology* 7.1 (1996): 145-172; Nemeth, Charlan J., et al. "The liberating role of conflict in group creativity: A study in two countries." *European journal of social psychology* 34.4 (2004): 365-374; Perez, Juan A., Stamos Papastamou, and Gabriel Mugny. "'Zeitgeist' and minority influence—where is the causality: A comment on Clark (1990)." *European Journal of Social Psychology* 25.6 (1995): 703-710.

⁷² Mugny, Gabriel, and Stamos Papastamou. "When rigidity does not fail: Individualization and psychologization as resistances to the diffusion of minority innovations." *European Journal of Social Psychology* 10.1 (1980): 43-61.

⁷³ Peterson, Randall S., and Charlan J. Nemeth. "Focus versus flexibility majority and minority influence can both improve performance." *Personality and Social Psychology Bulletin* 22.1 (1996): 14-27.

Dari paparan di atas, sebagian besar penelitian tentang topik ini mengaitkan pengaruh minoritas dengan perubahan sosial dan inovasi. Minoritas telah dianggap sebagai penantang stabilitas sosial, dan dinamika mereka telah dipertimbangkan dalam kaitannya dengan mekanisme di mana perubahan sosial terjadi dan norma-norma yang mapan dimodifikasi dan berkembang dalam masyarakat manusia. Dalam penelitian ini, kami mencoba memperluas sudut pandang tersebut dengan argumen bahwa itu hanya mewakili satu sisi dari bahasan yang jauh lebih kompleks. Kami mempertimbangkan kondisi di mana minoritas menghasilkan perubahan sosial serta kondisi di mana mereka, sebaliknya, cenderung mempertahankan *status quo*. Lebih dari itu, kami menggunakan pendekatan integratif yang berbeda - yaitu, identitas sosial, dominasi sosial, dan sistem pembenaran - mungkin berkontribusi untuk memperluas kerangka teoritis pengaruh minoritas.

Teori kedua, yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontak. Teori Kontak merupakan salah satu teori klasik yang berfungsi menjelaskan fenomena relasi antar kelompok, terutama yang terkait dengan konflik antar kelompok. Teori ini pertama kali diintrodusir oleh Gordon Allport pada tahun 1954 di tengah banjirnya aksi rasialis dan konflik antar

⁷⁵ Clark III, Russell D., and Anne Maass. "Social categorization in minority influence: The case of homosexuality", 347-364.

tidak sendiri telah banyak digunakan dalam pene-
fenomena relasi antar kelompok, tidak terkec-
Secara umum, konsep dasar teori ini adalah
meminimalisir prasangka dan diskriminasi antar
melibatkan kelompok yang berbeda berpartisipasi
umsinya, jikalau individu terlibat di dalamnya
dan interaksi sehingga gradasi prasangka yan
berkurang, yang pada gilirannya akan terbina seb
atau dalam bahasa Durkheim –, kohesi sosial. Teo
ra masuknya unsur-unsur individu yang berbeda
tertentu akan meningkatkan kualitas relasi
udian, kontak antar kelompok yang berjaln kelin

tak sendiri telah banyak digunakan dalam pene-
 fenomena relasi antar kelompok, tidak terkec-
 Secara umum, konsep dasar teori ini adalah
 meminimalisir prasangka dan diskriminasi antar
 melibatkan kelompok yang berbeda berpartisipasi
 umsinya, jikalau individu terlibat di dalamnya
 dan interaksi sehingga gradasi prasangka yan
 berkurang, yang pada gilirannya akan terbina seb
 tau dalam bahasa Durkheim –, kohesi sosial. Teo
 ra masuknya unsur-unsur individu yang berbeda
 tertentu akan meningkatkan kualitas relasi
 udian, kontak antar kelompok yang berjaln kelin

tak sendiri telah banyak digunakan dalam pene-
 fenomena relasi antar kelompok, tidak terkec-
 Secara umum, konsep dasar teori ini adalah
 meminimalisir prasangka dan diskriminasi antar
 melibatkan kelompok yang berbeda berpartisipasi
 umsi, jikalau individu terlibat di dalamnya
 dan interaksi sehingga gradasi prasangka yan
 berkurang, yang pada gilirannya akan terbina seb
 tau dalam bahasa Durkheim –, kohesi sosial. Teo
 ra masuknya unsur-unsur individu yang berbeda
 tertentu akan meningkatkan kualitas relasi
 udian, kontak antar kelompok yang berjaln kelin

tak sendiri telah banyak digunakan dalam pene-
 fenomena relasi antar kelompok, tidak terkec-
 Secara umum, konsep dasar teori ini adalah
 meminimalisir prasangka dan diskriminasi antar
 melibatkan kelompok yang berbeda berpartisipasi
 umsi, jikalau individu terlibat di dalamnya
 dan interaksi sehingga gradasi prasangka yan
 berkurang, yang pada gilirannya akan terbina seb
 tau dalam bahasa Durkheim –, kohesi sosial. Teo
 ra masuknya unsur-unsur individu yang berbeda
 tertentu akan meningkatkan kualitas relasi
 udian, kontak antar kelompok yang berjaln kelin

tak sendiri telah banyak digunakan dalam pene-
 fenomena relasi antar kelompok, tidak terkec-
 Secara umum, konsep dasar teori ini adalah
 meminimalisir prasangka dan diskriminasi antar
 melibatkan kelompok yang berbeda berpartisipasi
 umsi, jikalau individu terlibat di dalamnya
 dan interaksi sehingga gradasi prasangka yan
 berkurang, yang pada gilirannya akan terbina seb
 tau dalam bahasa Durkheim –, kohesi sosial. Teo
 ra masuknya unsur-unsur individu yang berbeda
 tertentu akan meningkatkan kualitas relasi
 udian, kontak antar kelompok yang berjaln kelin

tak sendiri telah banyak digunakan dalam pene-
 fenomena relasi antar kelompok, tidak terkec-
 Secara umum, konsep dasar teori ini adalah
 meminimalisir prasangka dan diskriminasi antar
 melibatkan kelompok yang berbeda berpartisipasi
 umsinya, jikalau individu terlibat di dalamnya
 dan interaksi sehingga gradasi prasangka yan
 berkurang, yang pada gilirannya akan terbina seb
 tau dalam bahasa Durkheim –, kohesi sosial. Teo
 ra masuknya unsur-unsur individu yang berbeda
 tertentu akan meningkatkan kualitas relasi
 udian, kontak antar kelompok yang berjaln kelin

Menurut Allport, ada empat ciri positif dari situasi kontak yaitu (a) status yang sama di antara kelompok-kelompok (*equal status between the groups*), (b) tujuan bersama (*common goals*), (c) kerja sama antarkelompok (*intergroup cooperation*), dan (d) dukungan otoritas, hukum, atau kustom (*the support of authorities, law, or custom*).⁸¹

Pertama, status kelompok yang setara dalam situasi tertentu (*equal group status in the situation*). Status kelompok yang setara dalam situasi status yang sama seringkali sulit untuk didefinisikan dan para peneliti menggunakan istilah tersebut dengan cara yang berbeda.⁸² Yang terpenting adalah bahwa kedua kelompok merasakan status yang setara (*equal status*) dalam situasi tersebut.⁸³ Beberapa peneliti menekankan bahwa kelompok harus memiliki status yang sama dalam situasi kontak.⁸⁴ Namun, penelitian menunjukkan bahwa status yang setara dalam situasi tersebut efektif dalam mempromosikan sikap antarkelompok yang positif (*positive intergroup*

⁸¹ Dovidio, John F., Peter Glick, and Laurie A. Rudman, eds. *On the nature of prejudice: Fifty years after Allport*. John Wiley & Sons, 2008, 264-266.

⁸³ ohn, E. G. (1982). Expectation states and interracial interaction in school settings. *Annual Review of Sociology*, 8, 209–35; Riordan, C. & Ruggiero, J. (1980). Producing equal-status interracial interaction: A replication. *Social Psychology Quarterly*, 43, 131–6; Robinson, J. W. & Preston, J. D. (1976). Equal status contact and modification of racial prejudice: A reexamination of the contact hypothesis. *Social Forces*, 54, 911–24; Dovidio, John F., Peter Glick, and Laurie A. Rudman, eds. *On the nature of prejudice: Fifty years after Allport*, 265.

⁸⁴ Brewer, M. B. & Kramer, R. M. (1985). The psychology of intergroup attitudes and behavior. *Annual Review of Psychology*, 36, 219–43; Foster, D. & Finchilescu, G. (1986). Contact in a “non-contact” society: The case of South Africa. In M. Hewstone & R. Brown (eds.), *Contact and conflict in intergroup encounters* (pp. 119–36). Oxford: Blackwell.

Kedua, tujuan bersama (common goals). Kontak yang efektif biasanya melibatkan upaya aktif menuju tujuan yang di-sharing-kan oleh kelompok. Tim sepakbola atau tim olahraga beregu, misalnya, menjadi bukti untuk itu.⁸⁶ Dalam upaya untuk menang, tim yang terdiri dari anggota kelompok yang berbeda harus bekerja sama dan saling mengandalkan untuk mencapai tujuan bersama.⁸⁷ Pertimbangan ini mengarah pada karakteristik ketiga dari kontak antarkelompok yang efektif.

Ketiga, kerjasama antar kelompok (*Intergroup cooperation*). Pencapaian tujuan bersama harus menjadi upaya yang saling bergantung berdasarkan kerjasama *ketimbang* kontestasi. Sherif mendemonstrasikan prinsip ini dalam studi lapangan *Robbers' Cave* mereka yang terkenal.⁸⁸ Para peneliti ini dengan cerdas merancang penghalang untuk tujuan bersama sebagaimana piknik terencana yang hanya bisa diatasi dengan kerja sama kedua kelompok. Kerjasama antar kelompok yang kemudian berlangsung mendorong berkembangnya hubungan positif antar kelompok.⁸⁹ Kerjasama antar kelompok di sekolah memberikan lebih banyak bukti.⁹⁰ Dipandu oleh

⁸⁶ Patchen, M. (1982). Black-white contact in schools. West Lafayette, IN: Purdue University Press; Chu, D. & Griffey, D. (1985). The contact theory of racial integration: The case of sport. *Sociology of Sport Journal*, 2, 323-33.

⁸⁷ Dovidio, John F., Peter Glick, and Laurie A. Rudman, eds. *On the nature of prejudice: Fifty years after Allport*, 265.

⁸⁸ Sherif, M., Harvey, O. J., White, B. J., Hood, W. R., & Sherif, C. W. (1961). *Intergroup conflict and cooperation: The Robbers Cave experiment*. Norman, OK: University of Oklahoma Book Exchange.

⁸⁹ Dovidio, John F., Peter Glick, and Laurie A. Rudman, eds. *On the nature of prejudice: Fifty years after Allport*. 265.

⁹⁰ Brewer, M. B. & Miller, N. (1984). Beyond the contact hypothesis: Theoretical perspectives on desegregation. In N. Miller & M. B. Brewer (eds.), *Groups in contact: The psychology of desegregation* (pp. 281–302). Orlando: Academic Press; Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Maruyama, G. (1984). Goal interdependence and interpersonal-personal attraction in heterogeneous classrooms: A meta-analysis. In N. Miller & M. B. Brewer (eds.), *Groups in contact: The*

nya, manifestasi teori kontak sosial telah m
uma masyarakat Bali pasca bom Bali 1 dan 2 sert
masyarakat Hindu Bali dengan kelompok muslim
yang disebut Durkheim sebagai kohesi sosi

on (pp. 187–212). Orlando: Academic Press; Trust, tension, or tolerance? New York: Teachers Learning, New York: Longman.

5. (1997). The jigsaw classroom: Building cooperation Wesley Longman; Stephan, W. G. & Steprejudice. In S. Oskamp (ed.), Reducing prejudice Erblaum; Dovidio, John F., Peter Glick, and Larv years after Allport, 265.

on (pp. 187–212). Orlando: Academic Press; Trust, tension, or tolerance? New York: Teachers Learning, New York: Longman.

5. (1997). The jigsaw classroom: Building cooperation Wesley Longman; Stephan, W. G. & Steprejudice. In S. Oskamp (ed.), Reducing prejudice Erblaum; Dovidio, John F., Peter Glick, and Larv years after Allport, 265.

on (pp. 187–212). Orlando: Academic Press; Trust, tension, or tolerance? New York: Teachers Learning, New York: Longman.

5. (1997). The jigsaw classroom: Building cooperation Wesley Longman; Stephan, W. G. & Steprejudice. In S. Oskamp (ed.), Reducing prejudice Erblaum; Dovidio, John F., Peter Glick, and Larv years after Allport, 265.

on (pp. 187–212). Orlando: Academic Press; Trust, tension, or tolerance? New York: Teachers Learning, New York: Longman.

5. (1997). The jigsaw classroom: Building cooperation Wesley Longman; Stephan, W. G. & Steprejudice. In S. Oskamp (ed.), Reducing prejudice Erblaum; Dovidio, John F., Peter Glick, and Larv years after Allport, 265.

on (pp. 187–212). Orlando: Academic Press; Trust, tension, or tolerance? New York: Teachers Learning, New York: Longman.

5. (1997). The jigsaw classroom: Building cooperation Wesley Longman; Stephan, W. G. & Steprejudice. In S. Oskamp (ed.), Reducing prejudice; Erblbaum; Dovidio, John F., Peter Glick, and Larv years after Allport, 265.

on (pp. 187–212). Orlando: Academic Press; Trust, tension, or tolerance? New York: Teachers Learning, New York: Longman.

5. (1997). The jigsaw classroom: Building cooperation Wesley Longman; Stephan, W. G. & Steprejudice. In S. Oskamp (ed.), Reducing prejudice Erblaum; Dovidio, John F., Peter Glick, and Larv years after Allport, 265.

on (pp. 187–212). Orlando: Academic Press; Trust, tension, or tolerance? New York: Teachers Learning, New York: Longman.

5. (1997). The jigsaw classroom: Building cooperation Wesley Longman; Stephan, W. G. & Steprejudice. In S. Oskamp (ed.), Reducing prejudice; Erblbaum; Dovidio, John F., Peter Glick, and Larv years after Allport, 265.

Menggabungkan prinsip-prinsip ini, formulasi Allport telah memandu penelitian tentang kontak antarkelompok (*intergroup contact*) selama setengah abad terakhir. Dan minat pada potensi kontak antarkelompok untuk mengurangi prasangka terus tumbuh selama bertahun-tahun. Para peneliti telah mengejar studi tentang kontak antarkelompok menggunakan berbagai pendekatan penelitian, termasuk studi lapangan, misalnya, Deutsch & Collins,¹⁰¹ dan lain sebagainya. Memang, literatur penelitian tentang kontak antarkelompok telah berkembang secara substansial selama setengah

¹⁰¹ Deutsch, M. & Collins, M. (1951). *Interracial housing: A psychological evaluation of a social experiment*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Ringkasnya, teori kontak sosial mengatakan bahwa orang-orang hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan kesepakatan yang menetapkan aturan moral dan politik perilaku. Beberapa orang percaya bahwa jika kita hidup sesuai dengan kontrak sosial, kita dapat hidup secara moral dengan pilihan kita sendiri dan bukan karena makhluk ilahi membutuhkannya. Seperti penjelasan di muka, tidak hanya bagi masyarakat dunia, teori sosial kontak telah berhasil membawa masyarakat Indonesia menuju corak keragaman yang harmonis dan multikultural, selain kultur Indonesia yang mendukung atmosfir harmonis, inklusif dan toleransi. Di Bali, misalnya, manifestasi teori kontak sosial telah membantu memulihkan trauma masyarakat Bali pasca bom Bali 1 dan 2 serta berhasil merekonsiliasi masyarakat Hindu Bali dengan kelompok muslim sehingga kembali apa yang disebut Durkheim sebagai kohesi sosia (*social cohesion*).¹⁰²

Teori kelima, adalah konstruksi sosial-nya Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Berger dan Luckmann memperkenalkan istilah konstruksi sosial (*social construction*) ke dalam ilmu-ilmu sosial dan dipengaruhi oleh karya Alfred Schütz. Konsep sentral mereka adalah bahwa orang-orang dan kelompok-kelompok yang berinteraksi dalam suatu sistem

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk dapat melihat sejauh mana realitas sosial, Berger dan Luckmann mencirikannya dengan intersubjektivitas di mana mengacu pada koeksistensi berbagai realitas dalam konteks ini.¹⁰⁴ *“Compared to the reality of everyday life, other realities appear as finite provinces of meaning, enclaves within the paramount reality marked by circumscribed meanings and modes of experience”* (Dibandingkan dengan realitas kehidupan sehari-hari, realitas-realitas lain muncul sebagai domain makna yang terbatas, ruang-ruang di dalam realitas tertinggi yang ditandai oleh makna-makna terbatas dan cara-cara pengalaman).

er L Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (Penguin Uk, 1991), 45.
er and Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 122.

¹⁰⁴ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 122.

Dalam konteks ini, Berger memandang bahwa realitas sosial memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi objektif dan subjektif. Dalam artian, masyarakat adalah mereka yang berada di luar diri manusia sebagai kenyataan objektif (*objective reality*), sedangkan individu dipandang sebagai kenyataan subjektif dalam masyarakat (*subjective reality*). Dengan kata lain, manusia adalah pencipta realitas sosial itu sendiri yang melalui serangkaian proses eksternalisasi (*externalized*), objektivasi dan kemudian institusionalisasi. Eksternalisasi merupakan penyesuaian diri dengan sosial-budaya sebagai produk manusia di mana penyesuaian itu akan membentuk individu yang mencerminkan realitas subjektif melalui proses internalisasi.¹⁰⁵ Konsekuensinya, guna memahami realitas sosial perlu mengoneksikan realitas objektif dan subjektif yang mana Berger menyebutnya dengan proses institusionalisasi atau realitas sosial itu perlu dilembagakan dalam masyarakat. Termasuk realitas sosial dalam penelitian ini adalah adanya layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di SMA/SMK di Denpasar, Bali yang berjalan secara sporadis, meski kerukunan antar umat beragama terjalin dengan harmonis.

¹⁰⁵ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 78.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

proses menarik keluar (*externalized*), sehingga seakan-akan hal tersebut berada di luar (objektif). Proses ini dilanjutkan dengan proses penarikan kembali ke dalam (*internalized*), sehingga sesuatu yang berada di luar seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subjektif. Pemahaman akan realitas yang dianggap objektif pun terkonfigurasi, melalui proses eksternalisasi dan objektifikasi individu menjadi bagian dari produk sosial, sehingga dapat dikatakan, setiap individu memiliki pengetahuan dan identitas sosial sesuai dengan peran institusional yang terbentuk atau yang diperankannya. Eksternalisasi adalah ekspresi diri manusia ke luar baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk pengaktualisasian diri untuk menunjukkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia (*society is a human product*).¹⁰⁷

Tahap kedua dari teori konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) adalah objektivasi. Ia didefinisikan sebagai hasil dari proses eksternalisasi yang berupa realitas objektif. Apa yang diekspresikan oleh manusia lantas menjadi credo yang berdiri sendiri. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*society is an objective reality*) atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.¹⁰⁸ Tahap ketiga adalah internalisasi. Internalisasi adalah penyerapan kembali realitas objektif ke dalam kesadaran subjektif manusia. Melalui internalisasi, manusia beradaptasi terhadap perubahan yang dilakukannya sendiri. Masyarakat kini berfungsi sebagai pelaku performatif bagi kesadaran

Of Living Qur'an', *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 2 (29 July 2020): 313–30, <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2102-04>.

¹⁰⁷ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

¹⁰⁸ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

Dalam hal ini, proses internalisasi dilakukan salah satunya melalui pelebagaan atau institusionalisasi. Seperangkat nilai dan pengetahuan dalam proses ini menjadi *guidance* (pedoman) dalam melakukan pemaknaan terhadap tindakan di mana tindakan itu adalah bagian inheren sehingga apa yang disebut sebagai kesadaran (*awareness*), sesungguhnya adalah apa yang terefleksi dari tindakan. Layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di Bali salah satunya dapat dibaca melalui teori ini. Layanan Pendidikan Islam tersebut bukanlah kepura-puraan belaka, melainkan ada realitas sosial yang melingkupinya, sehingga dalam hal ini untuk memahami dan menganalisis layanan tersebut, teori konstruksi sosial Peter Berger menjadi pilihan dalam penelitian ini.

itas Muslim di Denpasar

ta serta kearifan lokalnya yang khas. Kearifan lokal dijadikan landasan untuk memperkuat pelaksanaan yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter.

¹¹⁰ Arjawa, I. Gst Pt Bagus Suka, and Zulkifli Zulkifli. "The Social Integration of Hindu and Muslim Communities: The Practice of" *Menyama-Braya*" in Contemporary Bali." *Studia Islamika* 28.1 (2021): 149-178.

kompleksitas situasi sosial dan meminimalisir perbedaan melalui praktik kehidupan sosial.¹¹¹ Menyama-braya, misalnya, salah satu bentuk kearifan lokal Bali yang bersifat kohesif sejauh ini bisa merukunkan sesama warga Bali yang sangat multikultural.¹¹² Jenis kehidupan sosial ini tidak terjadi sesekali; sebaliknya, hal tersebut sudah mendarah daging.

Namun sebelum itu semua, secara historis telah melalui serangkaian ujian dan trial and error yang panjang dan berliku. Pasca-reformasi, misalnya, tata relasi hubungan kekuasaan yang sentralistik luluh lantak. Di era Orde Baru dengan kekuasaannya yang hampir otoriter hancur dalam tataran simbol kekuasaan sentralistik. Kekuasaan akhirnya menyebar dalam institusi-institusi negara di tingkat provinsi, kabupaten, kelurahan, dan juga tingkat desa. Terlebih, ketika terjadi tragedi bom meledak di Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002, gelombang kesedihan melanda kehidupan masyarakat Bali. Pemboman oleh ekstremis Muslim menghancurkan perdamaian itu dalam banyak hal yang tidak semuanya ter-*capture* oleh orang luar (*outsider*). Bom tersebut berdampak pada berbagai lapisan masyarakat Bali, mulai dari keuangan dan politik hingga agama, pendidikan, budaya dan filosofis. Bagi masyarakat Bali seolah-olah keseimbangan yang halus dan harmonis antara yang baik dan yang jahat telah dihancurkan.¹¹³

Dalam cara orang Bali melihat alam semesta, kebaikan dan kejahatan selalu hidup berdampingan. Di seluruh seni, agama, dan filsafat Bali, selalu ada referensi tentang gagasan keseimbangan alam semesta yang mengakui

¹¹¹ Condorelli, Rosalia. "Cultural differentiation and social integration in complex modern societies reflections on cultural diversity management strategies from a sociological point of view." *Sociology Mind* 8.4 (2018): 261; Arjawa, I. Gst Pt Bagus Suka, and Zulkifli Zulkifli. "The Social Integration of Hindu and Muslim Communities: The Practice of" *Menyama-Braya*" in *Contemporary Bali*." *Studia Islamika* 28.1 (2021): 149.

¹¹² Jati, Wasisto Raharjo. 2013. “Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Koniik Keagamaan.” Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 21(2): 397; Suryawan, I Nyoman. 2016. “Adaptasi Etnik Bugis Mempertahankan Eksistensinya Dalam Era Globalisasi Di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Selatan.” Seminar Nasional Riset Inovatif 4: 562–72; Suryawan, Nyoman. 2017. “Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Integrasi Antara Etnik Bali dan Etnik Bugis di Desa Petang, Badung, Bali.” Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) 7(1): 17–32.

¹¹³ Rubin, Leon, and I. Nyoman Sedana. *Performance in Bali*. Routledge, 2007, 1.

terjadi dan kejahatan menguat di dunia, A
 banyak kebaikan untuk mendapatkan
 kebaikan, upacara kuil dan kewajiban keagam
 ditingkatkan sebagai tanggapan.¹¹⁴
 beberapa orang Bali terpelajar terhadap situasi baru
 buku Leon Rubin dan I Nyoman Sedana yakni ‘
 Bali’, yang diterbitkan pada tahun 1993. Disini
 hanya menyoroti perkembangan utama dalam
 Rubin dan Nyoman ingin menunjukkan bal
 pada kenyataannya, adalah varian lokal dari Hinc
 orang Bali untuk menggarisbawahi bahwa ti
 pulau lain di Indonesia, mereka bukanlah pengan
 agama dunia yang sama kedudukannya deng
 kata lain pejabat pemerintah kebanyakan M

terjadi dan kejahatan menguat di dunia, A
bihi banyak kebaikan untuk mendapatkan
n kebaikan, upacara kuil dan kewajiban keagam
ditingkatkan sebagai tanggapan.¹¹⁴
berapa orang Bali terpelajar terhadap situasi baru
buku Leon Rubin dan I Nyoman Sedana yakni ‘
Bali’’, yang diterbitkan pada tahun 1993. Disini
dana hanya menyoroti perkembangan utama dalam
a Rubin dan Nyoman ingin menunjukkan bal
pada kenyataannya, adalah varian lokal dari Hinc
n orang Bali untuk menggarisbawahi bahwa ti
pulau lain di Indonesia, mereka bukanlah pengan
i agama dunia yang sama kedudukannya dengan
kata lain pejabat pemerintah kebanyakan M

terjadi dan kejahatan menguat di dunia, A
bihi banyak kebaikan untuk mendapatkan
n kebaikan, upacara kuil dan kewajiban keagam
ditingkatkan sebagai tanggapan.¹¹⁴
berapa orang Bali terpelajar terhadap situasi baru
buku Leon Rubin dan I Nyoman Sedana yakni ‘
Bali’’, yang diterbitkan pada tahun 1993. Disini
dana hanya menyoroti perkembangan utama dalam
a Rubin dan Nyoman ingin menunjukkan bal
pada kenyataannya, adalah varian lokal dari Hinc
n orang Bali untuk menggarisbawahi bahwa ti
pulau lain di Indonesia, mereka bukanlah pengan
i agama dunia yang sama kedudukannya dengan
kata lain pejabat pemerintah kebanyakan M

adalah satu, tanpa sedetik pun). Orang Bali berhasil membujuk pemerintah pusat tentang hal ini pada tahun 1958.¹¹⁵

Respon penting kedua adalah bahwa beberapa pemikir besar Bali modern mulai lebih menekankan aspek emosional dan mistik dari keyakinan mereka. Mereka menganggap bahwa agama tradisional mereka terlalu ritualistik. Dalam hal ini beberapa dari mereka terinspirasi oleh para pemikir Hindu India seperti Mahatma Gandhi (1869-1948), Sivananda (1887-1963) dan Sathya SaiBaba (lahir 1926). Ilmu pengetahuan dan teknologi modern diterima dengan cara yang sangat positif. Ini telah memberikan pengaruh besar pada pandangan realitas umat Hindu Bali modern. Dalam hubungan ini mereka memiliki pendahulu dalam pemikir India terkenal seperti Vivekananda (1863-1902), Gandhi, Sivananda dan Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975), yang idenya merupakan inspirasi besar bagi mereka.¹¹⁶

Secara konseptual-teoritis, momen adaptasi diri komunitas Muslim (dan agama-agama lain) dan Hindu di Denpasar memperlihatkan jika kedua (termasuk beberapa) komunitas tersebut beririsan dengan tradisi keagamaan masing-masing. Momentum semacam ini, bagi umat Hind merujuk pada kitab suci Veda dan Bhagawadgita, yaitu pada Reg Veda X, 191: 2,¹¹⁷ Reg Veda X, 191: 4.¹¹⁸ Sedangkan bagi umat Islam, kitab suci al-Qur'an menjadi dasar rujukan kerukunan antar umat beragama seperti yang termaktub dalam QS. al-Hujurât [49]: 13 dan QS. al-Kâfirîn [109]: 6.¹¹⁹

¹¹⁵ Rubin, Leon, and I. Nyoman Sedana. *Performance in Bali*. Routledge, 2007, 1-2.

¹¹⁶ Rubin, Leon, and I. Nyoman Sedana. *Performance in Bali*. Routledge, 2007, 1-2.

¹¹⁷ Ayat tersebut berbunyi, "Berkumpul-kumpulilah, bermusyawarahlah satu sama lain, satukanlah semua pikiranmu, Dewa pada zaman dulu senantiasa dapat bersatu." Departemen Agama RI, *Bhagawadgita* (Jakarta: Bimas Hindu, 1988), 135; Basyir, Kunawi. "Membangun kerukunan antarumat beragama berbasis budaya lokal Menyama Braya di Denpasar Bali." *Religio Jurnal Studi Agama-agama* 6.2 (2016): 189.

118 Ayat tersebut berbunyi, “Samakanlah tujuanmu, samakanlah hatimu, samakanlah pikiranmu, semoga kau hidup bahagia bersama mereka”. Lihat Departemen Agama RI, *Bhagawadgita*, 147; Basyir, Kunawi. “Membangun kerukunan antarumat beragama berbasis budaya lokal Menyama Brava di Denpasar Bali”, 189.

¹¹⁹ Basyir, Kunawi. "Membangun kerukunan antarumat beragama berbasis budaya lokal Menyama Braya di Denpasar Bali", 189.

us dibangun kembali berdasarkan kultur Hindu.¹²³

ks demikian, Bali mulai membuat aturan desa Hindu sentris,¹²⁴ meskipun perda ang pada agama-agama lain untuk h

kan salah satu desa tradisional yang namanya ung Gede Raka, “Antara Desa Adat dan <https://www.kompas.com/news/2019/01/29/67424/Antara-Desa-Adat-dan->

Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di D

us dibangun kembali berdasarkan kultur Hindu.¹²³

Setelah demikian, Bali mulai membuat aturan yang bersifat sentris,¹²⁴ meskipun perda yang ada pada agama-agama lain untuk h

kan salah satu desa tradisional yang namanya Gede Raka, “Antara Desa Adat dan news/2019/01/29/67424/Antara-Desa-Adat-dan-

Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di D

us dibangun kembali berdasarkan kultur Hindu.¹²³

ks demikian, Bali mulai membuat aturan desa Hindu sentris,¹²⁴ meskipun perda ang pada agama-agama lain untuk h

kan salah satu desa tradisional yang namanya ung Gede Raka, “Antara Desa Adat dan news/2019/01/29/67424/Antara-Desa-Adat-dan-

Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di D

us dibangun kembali berdasarkan kultur Hindu.¹²³

Setelah demikian, Bali mulai membuat aturan yang bersifat sentris,¹²⁴ meskipun perda yang ada pada agama-agama lain untuk h

kan salah satu desa tradisional yang namanya Gede Raka, “Antara Desa Adat dan news/2019/01/29/67424/Antara-Desa-Adat-dan-

Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di D

us dibangun kembali berdasarkan kultur Hindu.¹²³

ks demikian, Bali mulai membuat aturan desa Hindu sentris,¹²⁴ meskipun perda ang pada agama-agama lain untuk h

kan salah satu desa tradisional yang namanya ung Gede Raka, “Antara Desa Adat dan news/2019/01/29/67424/Antara-Desa-Adat-dan-

Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di D

us dibangun kembali berdasarkan kultur Hindu.¹²³

Setelah demikian, Bali mulai membuat aturan yang bersifat sentris,¹²⁴ meskipun perbedaan yang ada pada agama-agama lain untuk hal yang sama.

Salah satu desa tradisional yang namanya Gede Raka, “Antara Desa Adat dan Desa Agama”
<https://www.kompas.com/berita/read/2019/01/29/67424/Antara-Desa-Adat-dan-Desa-Agama?mhq=Desa%20Adat&mhk=Desa%20Agama>

Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Desa

us dibangun kembali berdasarkan kultur Hindu.¹²³

Setelah demikian, Bali mulai membuat aturan yang bersifat sentris,¹²⁴ meskipun perda yang dibuat mengacu pada agama-agama lain untuk harmonisasi.

Salah satu contoh perda yang dibuat adalah Peraturan Desa No. 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Desa Tradisional yang namanya Gede Raka, “Antara Desa Adat dan Desa Baru” (Desa Adat dan Desa Baru).
<https://peraturan.balitri.go.id/pengunduhan/peraturan/pengumuman/2019/01/29/67424/Antara-Desa-Adat-dan-Desa-Baru>

Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di I

sebab kultur ini sejatinya telah dibangun Bali sejak adanya kerajaan-kerajaan kecil di Bali seperti kerajaan Waturenggong di Klungkung dan Kerajaan Badung di Denpasar.¹²⁵ Pada masa-masa kerajaan inilah istilah *menyama braya* (aku adalah engkau, dan engkau adalah aku) bergema dan populer. Namun karena adanya arus modernisasi dan hegemoni politik Orde Baru, tradisi tersebut perlahan-lahan tidak begitu menonjol pada masyarakat Bali.

Denpasar, selaku ibukota Bali, terkhusus Kampung Wanasari atau Kampung Jawa,¹²⁶ orang-orang Islam dari Jawa telah bermukim sejak abad ke-19, dipelopori oleh seseorang bernama Iskandar di mana makamnya masih ada hingga sekarang. Demikian halnya dengan orang-orang India dari Gujarat juga bermukim di kampung tersebut. Pada awal abad ke-20, orang-orang di luar Bali mulai berdatangan seperti masyarakat Jawa, Madura, Sunda dan Sasak yang bermukim di Kampung Jawa karena faktor ekonomi.¹²⁷ Kampung Jawa ini dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang dihuni oleh Muslim dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bugis, Sumbawa dan suku-suku lainnya.¹²⁸

Jean-Francois Guermonprez, sebagaimana dikutip Kartini mengungkapkan bahwa entitas Hindu Bali (*the Javanized Hindu-Balinese*) dikonstruksi oleh orang-orang Barat dalam upaya mencari "little India"

¹²⁵ Pada masa berdirinya kerajaan-kerajaan Nusantara, kerajaan Badung sedang mengalami konflik dengan kerajaan Mengwi. Kerajaan Badung memperoleh bantuan keamanan (tentara Muslim dari kerajaan Bugis), dan kerajaan Badung berhasil memukul mundur kerajaan Mengwi. Fenomena ini merupakan salah satu cikal-bakal Muslim di Kepaon Kota Denpasar. Lihat dalam “Umat Islam Sudah Datang ke Bali semenjak Abad ke-15 M”, Bali Pos, 2 Desember 2001; Basyir, Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2013): 16.

¹²⁶ Pada tahun 1960-an, Kampung Jawa namanya diganti oleh Camat pada waktu I Gusti Ngurah Sumarma, untuk menghindari kesan kesukuan menjadi Kampung Wanasari. Lihat Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 115-145.

¹²⁷ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 127.

¹²⁸ Segara, I. Nyoman Yoga. "Kampung Sindu: Jejak Islam dan Situs Kerukunan di Keramas, Gianyar, Bali." *Jurnal Lektur Keagamaan* 16.2 (2018): 315-346.

Jikalau kita telusuri historisitas sejak masa pra-kolonial, akan kita dapati interaksi antara Muslim dengan Hindu Bali. Sebagaimana diungkapkan Hauser-Schäublin yang dikutip Kartini bahwa apa yang terlihat dan tampak mengemuka saat ini sebagai dua agama berbeda, dua kultur berbeda dan dua identitas serta etnisitas berbeda, sesungguhnya di masa lampau dipersepsikan bukan sebagai entitas berbeda melainkan sebagai varian dalam praktik ritual yang berlainan dari satu desa ke desa lain dan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.¹³² Sumber awal di era kolonial menyebutkan bahwa apa yang kini disebut “etnisitas”, bukanlah sebuah isu atau wacana di antara masyarakat Bali. Bloemen Waanders, misalnya, seperti yang dikutip Kartini, menyebutkan kesulitan yang ia hadapi tatkala melakukan sensus karena para penguasa dan

¹³² Hauser-Schäublin, Brigitta. "Bali Aga" and Islam: Ethnicity, Ritual Practice, and "Old-Balinese" as an Anthropological Construct." *Indonesia* 77 (2004): 36; Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", 127.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Muslim telah bermukim di Bali berabad lamanya dan hidup damai berdampingan dengan masyarakat Hindu. Dialektika dan dinamika mayoritas-minoritas kelompok religius tersebut diwarnai dalam bingkai mutualisme. Realitas sosial demikian ini telah merambah pada berbagai sektor, seperti kebudayaan, pendidikan, perekonomian, politik, pertanian, arsitektur, dan pengobatan tradisional yang berkelindan sejak masa kerajaan silam.¹³⁴

Di bidang kebudayaan, kerjasama antara umat Hindu dan Muslim dapat ditelusuri pada akhir abad ke-19 di Jembrana yang ditandai dengan *seka* (perkumpulan) tari dan nyanyi di bawah pimpinan Pan Nyoling.¹³⁵ Pan Nyoling diketahui sebagai seorang tokoh Islam yang disegani di desa Mertasari yang masih menggunakan nama Bali. Para anggota perkumpulan ini tidak hanya terdiri dari orang-orang Bali Hindu, namun juga orang-orang Islam yang melakukan pertunjukan keliling di desa-desa sekitarnya.¹³⁶ Mengikuti Kartini, demikian halnya dengan istilah-istilah perkawinan yang menggunakan istilah Hindu setempat, seperti “*kedungluh*”¹³⁷, “*morong*”,¹³⁸ “*makedeng ngad*”,¹³⁹ dan

¹³⁴ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 128.

¹³⁶ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali.".

¹³⁸ Istilah ini digunakan apabila perkawinan berlangsung antara dua keluarga, di mana keluarga yang satu memberi laki-laki saja, keluarga yang lain memberi perempuan saja. Lihat Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", 131.

[illegible]

Kemudian, pada bidang keagamaan – sebagaimana penuturan Kartini –, terdapat Pelinggih Ratu Mekah pada salah satu pura di kawasan Kubutambahan (Pura Kerta Negara Loka) dan kawasan Kuta. Kemudian dikenal juga istilah nyelam dalam sajian orang-orang Hindu, serta istilah *nyama selam* (saudara Islam) dalam hubungan-hubungan sosial di Bali.¹⁴² Juga, di Buleleng terdapat pura yang sangat besar yang mana di atas pura tersebut ada dua tempat raja. Di tempat tersebut tertulis raja Mekkah dan Madinah yang hingga saat ini umat Islam tidak dibenarkan membuat upacara di sana. Ada pula sebuah tempat pemujaan di sana yang disucikan, tetapi dalam upacaranya Al-Quran diletakkan begitu saja di depan pemujaan dan disucikan oleh umat Hindu.¹⁴³

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa keharmonisan dan kedamaian yang terjalin erat di antara masyarakat Hindu Bali dengan Muslim tidak menimbulkan gesekan sosial yang berarti. Gesekan (baca: problematika) sosial tersebut sebenarnya bukanlah hal baru di masa kerajaan-kerajaan Bali dan berlangsung hingga sekarang. Pada tahun 1855, misalnya, kehidupan harmonis tersebut sempat terusik di era pemerintahan I Gusti Ngurah Paekan yang mendiskriminasi orang Islam. Padahal, masyarakat Muslim memiliki andil – untuk enggan mengatakan “saham – besar menjadikan I Gusti Ngurah

141 Dalam tradisi masyarakat Bali Hindu, sebutan anak kelima kembali ke sebutan anak pertama (Wayan), sementara dalam masyarakat Bali Muslim di Pegayaman, sebutan anak kelima tetap menggunakan sebutan urutan terakhir (Ketut). Murtadho, Muhamad. "WISATA RELIGI DI BALI." *Dialog* 38.1 (2015): 13-28; Temaja, Gede Bagus Wisnu Bayu, and Gede Bagus Wisnu Bayu. "Sistem Penamaan Orang Bali." *Dalam Jurnal Humanika* 24.2 (2017); Bandana, I. G. W. S. "Sistem Nama Orang Bali: Kajian Struktur dan Makna." *Aksara* 27.1 (2015): 1-11.

¹⁴³ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 131-132.

Beberapa persoalan tersebut di antaranya dalam hal sulitnya pembangunan masjid dan tanah pemakaman. Dalam pengamatan Kartini, kendala ini antara lain disebabkan oleh penetrasi paradigma Hindu “*Tri Hita Karana*”¹⁴⁵ yang menimbulkan potensi konflik asimetris, terutama konsep *palemahan* yang dalam pemahaman Hindu adalah hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Sebenarnya secara konseptual *Tri Hita Karana* adalah baik karena menjunjung tinggi keseimbangan alam, manusia dan Tuhan. Namun, tidak sedikit pula dalam pemaknaannya seringkali dijadikan sebagai justifikasi atau dalih untuk melegalkan dan melegitimasi warga Hindu dalam penggunaan tanah adat. Persoalan ini dapat dijumpai di beberapa wilayah Bali, seperti Denpasar, Badung, Buleleng, dan Jembrana.¹⁴⁶ Namun demikian, persoalan ini dapat dipecahkan atau cenderung lebih mudah diselesaikan ketika berada di daerah pemukiman baru meski tanpa ijin lebih dahulu. Sebagai solusinya, masyarakat Muslim melakukan berbagai pendekatan kepada tokoh Bali agar mereka dapat membangun atau memanfaatkan bangunan sebagai tempat ibadah (masjid).¹⁴⁷

Persoalan tersebut ternyata tidak berhenti pada aspek tem

¹⁴⁵ Tri Hita Karana yang memuat tiga unsur yaitu parhyangan, pawongan, dan palemahan merupakan tema penelitian yang menarik, baik dari segi teologi, sosiologi, antropologi, maupun ekologi. Hal ini mendefinisikan bahwa dalam sejarah pemikiran manusia berkembang tiga tema besar yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini, yaitu alam, Tuhan, dan manusia. Misalnya, prinsip alam, prinsip moral dan prinsip agama banyak mewarnai teori-teori sosial, antara klasik, modern, dan kontemporer. Lihat Peters, Jan Hendrik. *Tri Hita Karana*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2013; Roth, Dik, dan Gede Sedana. "Reframing Tri Hita Karana: Dari 'Budaya Bali' Menjadi Politik." *Jurnal Antropologi Asia Pasifik* 16.2 (2015): 157-175; Sukarma, I. Wayan. "Tri Hita Karana theoretical basic of moral Hindu." *International journal of linguistics, literature and culture* 2.3 (2016): 102-116.

¹⁴⁷ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 135.

...pakraman (desa adat) yang me
...Hindu.¹⁴⁸ Dalam kasus ini terja
...n desa adat. Di satu sisi warga Mu
...d dari kelurahan setempat, namun
...itu, merasa tidak memberikan izin
...merasa berhak untuk membongk
...tan dengan masyarakat adat, masj
...Sementara masyarakat Muslim di J
...tidak menemukan kesulitan berarti
...h mereka yang cukup besar dan m
...kehidupan bermasyarakat.¹⁵⁰

sampai-sampai lembaga pendidikan
sani (BBI) Tabanan Bali agar tet
harus mengakomodasi pengajar
da pendidikan multikultural di E
BI, sebagaimana dijelaskan Fahr

¹⁴⁹ Kartini, Indriana. "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali." *Masyarakat Indonesia* 37.2 (2017): 136.

¹⁵¹ Fahmi, Muhammad, M. Ridlwan Nasir, and Masdar Hilmy. "Islamic education in a minority setting: the translation of multicultural education at a local pesantren in Bali, Indonesia." *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 15.2 (2020): 345-364; Fahmi, Muhammad. Pendidikan multikultural sebagai strategi adaptasi Pesantren Bali Bina Insani di daerah minoritas muslim Tabanan Bali. Diertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

harus mendapat izin untuk melaksanakan sholat Jum'at. Tanpa izin, muncul dilema lainnya karena pada jam sholat Jum'at yang harus diikuti oleh siswa. Namun di sekolah Loloan tidak ada masalah karena bagi siswa yang pulang jam 12, sementara siswa yang sholat Jum'at.¹⁵⁴

Di semua itu, harus diakui bahwa komposisi masyarakat tradisional dan multikultural merupakan modalitas keberagaman yang akan membawa sebuah transformasi fenomena seperti itu terjadi di kampung Jawa. Di kampung Jawa, sebagian besar penduduknya berasal dari suku Jawa, Jawa, serta suku Makasar dan Bugis yang hidup di tengah-tengah komunitas

harus mendapat izin untuk melaksanakan sholat Jum'at. Tanpa izin, muncul dilema lainnya karena pada jam sholat Jum'at yang harus diikuti oleh siswa. Namun di sekolah Loloan tidak ada masalah karena bagi siswa yang pulang jam 12, sementara siswa yang sholat Jum'at.¹⁵⁴

Di semua itu, harus diakui bahwa komposisi masyarakat tradisional dan multikultural merupakan modalitas keberagaman yang akan membawa sebuah transformasi fenomena seperti itu terjadi di kampung Jawa. Di kampung Jawa, sebagian besar penduduknya berasal dari suku Jawa, Jawa, serta suku Makasar dan Bugis yang hidup di tengah-tengah komunitas

harus mendapat izin untuk melaksanakan shalat. Tanpa izin, muncul dilema lainnya karena pada jam shalat yang harus diikuti oleh siswa. Namun di sekolah Loloan tidak ada masalah karena bagi siswa yang pulang jam 12, sementara siswa yang melaksanakan shalat Jum'at.¹⁵⁴

Di semua itu, harus diakui bahwa komposisi masyarakat tradisional dan multikultural merupakan modal keberagaman yang akan membawa sebuah transformasi fenomena seperti itu terjadi di kampung Jawa yang sebagian besar penduduknya berasal dari kampung Jawa, serta suku Makasar dan Bugis yang hidup di tengah-tengah komunitas

harus mendapat izin untuk melaksanakan sholat Jum'at. Tanpa izin, muncul dilema lainnya karena pada jam sholat Jum'at yang harus diikuti oleh siswa. Namun di sekolah Loloan tidak ada masalah karena bagi siswa yang pulang jam 12, sementara siswa yang berangkat jam 7.30 sholat Jum'at.¹⁵⁴

Di semua itu, harus diakui bahwa komposisi masyarakat di Loloan dan sekitarnya yang multikultural dan multikultural merupakan modal sosial yang penting untuk keberagaman yang akan membawa sebuah transformasi. Fenomena seperti itu terjadi di kampung Jawa di Kabupaten Bantaeng yang sebagian besar penduduknya berasal dari berbagai kampung Jawa, serta suku Makasar dan Bugis. Loloan yang hidup di tengah-tengah komunitas

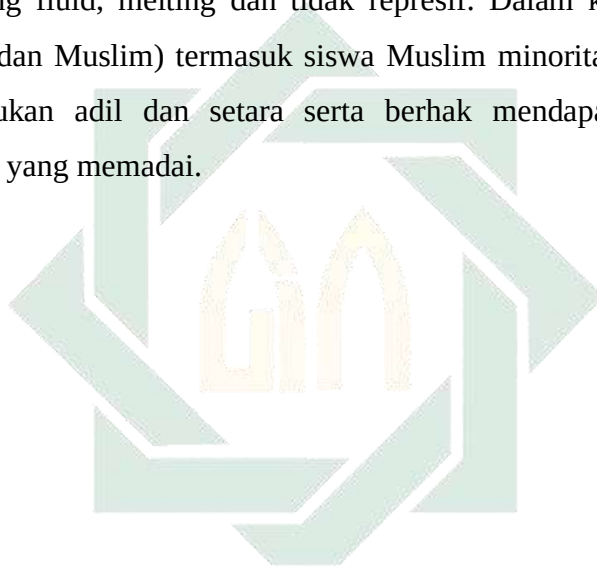
harus mendapat izin untuk melaksanakan shalat. Tanpa izin, muncul dilema lainnya karena pada jam shalat yang harus diikuti oleh siswa. Namun di sekolah Loloan tidak ada masalah karena bagi siswa yang pulang jam 12, sementara siswa yang melaksanakan shalat Jum'at.¹⁵⁴

Di semua itu, harus diakui bahwa komposisi masyarakat tradisional dan multikultural merupakan modal keberagaman yang akan membawa sebuah transformasi fenomena seperti itu terjadi di kampung Jawa yang sebagian besar penduduknya berasal dari kampung Jawa, serta suku Makasar dan Bugis yang hidup di tengah-tengah komunitas

harus mendapat izin untuk melaksanakan shalat. Tanpa izin, muncul dilema lainnya karena pada jam shalat yang harus diikuti oleh siswa. Namun di sekolah Loloan tidak ada masalah karena bagi siswa yang pulang jam 12, sementara siswa yang melaksanakan shalat Jum'at.¹⁵⁴

Di semua itu, harus diakui bahwa komposisi masyarakat tradisional dan multikultural merupakan modal keberagaman yang akan membawa sebuah transformasi fenomena seperti itu terjadi di kampung Jawa yang sebagian besar penduduknya berasal dari kampung Jawa, serta suku Makasar dan Bugis yang hidup di tengah-tengah komunitas

daerah lain di Indonesia. Kondisi harmonis tersebut terjadi karena antar pemeluk agama memiliki kesadaran toleransi dan paradigma multikulturisme yang meniscayakan pemahaman bahwa elemen-elemen sosial-budaya bangsa harus bersifat inklusif dan berani berdialog satu sama lain.¹⁵⁶ Bahkan, masyarakat harus membiarkan elemen-elemen sosial-budaya saling berdialektika, dialog bahkan “bertikai dan berkontestasi” di tingkat epistemologis yang fluid, melting dan tidak represif. Dalam konteks inilah, eksistensi Islam (dan Muslim) termasuk siswa Muslim minoritas di Bali bisa mendapat perlakuan adil dan setara serta berhak mendapatkan layanan Pendidikan Islam yang memadai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵⁶ Masdar Hilmy, *Islam Profetik: Substansiasi Nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 194.

BAB III

POTRET LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM DI SMA/ SMK NEGERI DENPASAR, BALI

A. Gambaran Umum Layanan Pendidikan Islam di Lingkungan SMA/ SMK Denpasar, Bali

1. Profil SMA/ SMK Negeri di Denpasar, Bali

Terdapat sekitar 75 SMA/ SMK di Denpasar baik negeri maupun swasta,¹ penulis mencoba melakukan penelitian mengenai layanan Pendidikan Islam di SMA/ SMK Negeri sebagaimana pada bab I mengenai penelusuran serta pengungkapan mengenai praktik hingga model pelayanan Pendidikan Islam baik dari sisi guru, peserta didik, kurikulum, bahan ajar, administrasi pembelajaran (perencanaan pembelajaran), evaluasi pembelajaran, pendampingan pembiasaan keagamaan Islam pada peserta didik, hingga pengadaan inventaris penunjang PAI di SMA/ SMK.

Sebagaimana rencana peneliti yang mulanya mengambil 4 sekolah SMA Negeri yang bertempat secara geografis dari Denpasar Utara, Timur, Selatan dan Barat, yaitu SMA Negeri 4 di Denpasar Barat, SMA Negeri 8 di Denpasar Utara, SMA Negeri 3 di Denpasar Timur, dan SMA 6 PGRI di Denpasar Selatan. Namun ketika peneliti berada di Bali pada tanggal 15 Pebruari 2022, peneliti direkomendasikan langsung oleh Kepala Bidang Pendidikan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali untuk menuju Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada saat menemuinya, penulis direkomendasikan di beberapa sekolah yang antara lain adalah sebagai berikut.

¹ Kemendikbud, "Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Provinsi: Prov. Bali", dalam <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=220000&level=1>, diakses 2 April 2022.

2 Denpasar dan SMEA Negeri Denpasar, dengan perbandingan lokal tiga bagian untuk SMAN 2 dan dua bagian untuk SMEAN. Selama beberapa tahun gedung barn itu masih terasa memadai tetapi kemudian gedung itu tidak mampu menampung ledakan jumlah siswa. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bekerjasama dengan Persatuan Orang Tua Murid membeli gedung bekas sekolah milik Yayasan Panti Yasa yang berlokasi di Jalan Kamboja, di sebelah utara SMA Negeri 1. Transaksi pembelian itu berlangsung tahun 1972. Dengan penambahan gedung yang terdiri dari 5 ruangan belajar itu berarti SMA Negeri 2 Denpasar memiliki dua lokasi belajar, masing-masing di Jalan Kartini dan Jalan Kamboja.⁴

Pada tahun 1976 turun sebuah kebijaksanaan dari Kanwil Depdikbud Provinsi Bali, yaitu memindahkan SMA Negeri 2 ke lokasi baru bertempat di Jalan Waturenggong, Panjer. Lokasi yang dimaksud adalah gedung tempat Pembinaan Keterampilan (TPK) yang dibangun tahun 1973 dan tidak berfungsi lagi. Untuk sementara jumlah kelas yang dipindahkan ke tempat baru itu hanya lima kelas. Dengan demikian sejak tahun 1976 itu SMA Negeri 2 Denpasar memiliki 3 lokasi belajar. Dapat dibayangkan betapa tidak efektifnya keadaan seperti itu. Baru dalam tahun 1978 rencana Kanwil Depdikbud Provinsi Bali untuk menjadikan SMA Negeri 2 Denpasar sebagai SMA satu lokasi, mulai terwujud.

Di era serba disrupsi ini, SMAN 2 Denpasar berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada peserta didik yang tercermin dalam formulasi motto, visi, dan misi hingga tujuan dari berdirinya sekolah tersebut. Motto sekolah ini adalah Vidyaya

4 SMAN 2 Denpasar, “Profil Sekolah”, dalam [https://www.sman2-](https://www.sman2-denpasar.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53)
denpasar.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53, diakses 27
Maret 2022.

Adapun visi dan misi dari SMA Negeri 2 Denpasar ialah terwujudnya *output* dan *out come* yang berwawasan budaya. Sementara misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan serta memberdayakannya sehingga memenuhi standar nasional pendidikan.
2. Menanamkan kedisiplinan dalam segala aspek kehidupan melalui budaya bersih, tertib, dan etos kerja yang dilandasi sikap tulus ikhlas, gotong royong, kekeluargaan, serta rasa memiliki.
3. Menanamkan dan menumbuhkembangkan sikap apresiatif terhadap nilai-nilai seni budaya dengan memelihara dan mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*).
4. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dengan memberdayakan seluruh komponen sekolah.
5. Melaksanakan pengembangan inovasi pendidikan untuk menunjang tumbuh kembangnya profesionalisme.

Dari visi dan misi tersebut, sekolah tersebut bertujuan untuk terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan *output* yang memuaskan dan tersedianya sarana dan prasarana KBM yang memadai, sehingga memiliki daya dukung yang optimal terhadap terlaksananya KBM yang efektif dan efisien. Sampai saat ini, SMA Negeri 2 Denpasar

⁵ SMAN 2 Denpasar, “Profil Sekolah”.

Lebih dari itu, SMA Negeri 2 Denpasar (Resman Denpasar) memiliki keunggulan dalam (1) Pelaksanaan keimanan, ketakwaan dan harmonisasi antar warga sekolah, (2) Bidang akademik dan non-akademik, (3) Kompetisi lokal, nasional, dan Internasional, (4) Kepramukaan dan kegiatan sosial, dan (5) Kepedulian terhadap lingkungan.⁶ Tidak berhenti di situ, SMAN 2 Denpasar juga memiliki Wawasan yang disebut “Wiyata Mandala” (lingkungan pendidikan), yaitu sebuah wawasan tentang pentingnya sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga tidak boleh digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan di luar tujuan pendidikan.⁷

Dalam hal ini, pimpinan sekolah yakni kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan dalam lingkungan sekolahnya dan harus berdasarkan pancasila yang bertujuan guna meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.⁸

Dalam kerangka Wiyata Mandala ini, antara guru dan orang tua murid harus ada saling pengertian dan kerja sama yang baik untuk mengemban tugas pendidikan. Lebih dari itu, para guru di dalam maupun di luar lingkungan sekolah harus senantiasa menjunjung

7 SMAN 2 Denpasar, “Profil Sekolah”, dalam https://www.sman2-denpasar.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=106, diakses 27 Maret 2022.

8 SMAN 2 Denpasar, “Profil Sekolah”, dalam https://www.sman2-denpasar.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=106, diakses 27 Maret 2022.

SMA Negeri 7 Denpasar

Sekolah kedua yang peneliti paparkan pada profil S sebagai objek penelitian ini adalah sekolah yang ter Denpasar utara, yaitu SMA Negeri 7 Denpasar. Adapun berdirinya SMA Negeri 7, SMA Negeri 7 Denpasar sekolah alih fungsi dari SPG Negeri 7 Denpasar menjadi S pada tahun pelajaran 1989/1990, yang berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indone 0342/V/1989 tertanggal 5 Juni 1989. Lembaga ini merupa Negeri tertua di Denpasar yang saat awal bernama S Denpasar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 39/SK/B/III, tanggal 1 September 1959.

Sekolah kedua yang peneliti paparkan pada profil S sebagai objek penelitian ini adalah sekolah yang ter Denpasar utara, yaitu SMA Negeri 7 Denpasar. Adapun berdirinya SMA Negeri 7, SMA Negeri 7 Denpasar sekolah alih fungsi dari SPG Negeri 7 Denpasar menjadi S pada tahun pelajaran 1989/1990, yang berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indone 0342/V/1989 tertanggal 5 Juni 1989. Lembaga ini merupa Negeri tertua di Denpasar yang saat awal bernama S Denpar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 39/SK/B/III, tanggal 1 September 1959.

Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas 1,6 hektar dan bangunan 2934,98 m² dan terletak di Jl. Kamboja No.9, D. Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80

2 Denpasar, “Profil Sekolah”, dalam https://index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=106,

AN 7 Denpasar, “Sejarah Sekolah”, https://www.diknas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=106, diakses 27 Maret 2022

2 Denpasar, “Profil Sekolah”, dalam https://index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=106,
AN 7 Denpasar, “Sejarah Sekolah”,
an7denpasar.sch.id/page/read/47/sejarah.html, diakses 27 Maret 2022

10 SMAN 7 Denpasar, “Sejarah Sekolah”, dalam <https://www.sman7denpasar.sch.id/page/read/47/sejarah.html>, diakses 27 Maret 2022

Migasa Mawredya, yang bermakna, “makin berumur, makin perkasa dan makin berkembang”. Sedangkan visi dari SMA Negeri 7 Denpasar adalah, Unggul akademik-Nonakademik, berkarakter, Peduli lingkungan, Menguasai teknologi informasi.

1. Mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif.
2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.
3. Meningkatkan keikutsertaan dalam lomba-lomba akademik nonakademik.
4. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan aman.
5. Mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler.
6. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Membudayakan 7S (Senyum, Salam, Sederhana, Sehat, Santun, Simpati, Semangat).
8. Meningkatkan pembinaan, pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan aman.
5. Mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler.
6. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Membudayakan 7S (Senyum, Salam, Sederhana, Sehat, Santun, Simpati, Semangat).
8. Meningkatkan pembinaan, pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- AN 7 Denpasar, “Sejarah Sekolah”, dalam an7denpasar.sch.id/page/read/47/sejarah.html, diakses 27 Maret 2022.
- AN 7 Denpasar, “Sejarah Sekolah”, dalam an7denpasar.sch.id/page/read/47/sejarah.html, diakses 27 Maret 2022. Disarikan interview dengan kepala sekolah SMAN 7 Denpasar, Cokorda Gede Anom Wiratmaja,

12 SMAN 7 Denpasar, “Sejarah Sekolah”, dalam <https://www.sman7denpasar.sch.id/page/read/47/sejarah.html>, diakses 27 Maret 2022. Disarikan berdasarkan interview dengan kepala sekolah SMAN 7 Denpasar, Cokorda Gede Anom Wiratmaja, S.Pd., M.Pd.

- c. SMK Negeri 1 Denpasar**

Sekolah yang dipimpin oleh I Ketut Suparsa ini memiliki beberapa kompetensi keahlian, antara lain Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, Bisnis Konstruksi dan Properti, Teknik Audio Video, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Pendinginan dan Tata Udara, Teknik Pemesinan, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Teknik Komputer dan Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Multimedia.¹⁵

¹³ Humas SMK Negeri 1 Global Denpasar, “Sejarah SMK Negeri 1 Global Denpasar” (Humas SMK Negeri 1 Global Denpasar, Pebruari 2022).

¹⁴ Syarif Tayeb, “SK Penetapan SMK Negeri 1 Denpasar” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, September 1962).

¹⁵ Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Denpasar, “Profil SMK Negeri 1 Denpasar” (Program Keahlian dan Kompetensi, Pebruari 2022).

sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang menghasilkan sumber daya manusia yang berstandar internasional, berwawasan budaya dan berakhlak mulia.¹⁶

Sedangkan misi dari SMK Negeri 1 ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme lembaga pendidikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan di daerah bali
2. Melaksanakan sistem pendidikan yang fleksibel dan efektif
3. Menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan pada masyarakat berbasis keunggulan lokal dan bermutu
4. Menciptakan sekolah sebagai pusat budaya dan *agent of change*
5. Melaksanakan system manajemen yang berstandar internasional
6. Menyiapkan Lulusan yang mampu Bekerja, Melanjutkan, Wirausaha (BMW)

Adapun tujuan diselenggarakannya pendidikan pada sekolah kejuruan ini antara lain adalah:¹⁷

1. Meningkatkan mutu lulusan sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industry (*demand driven*)
2. Meningkatkan mutu sumber daya manusia baik secara kompetensi maupun kualifikasi
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan
4. Meningkatkan kegiatan-kegiatan sekolah dalam mendukung keunggulan budaya lokal menuju global secara nasional maupun internasional
5. Mewujudkan pengelolaan sekolah secara terbuka dan partisipatif

¹⁶ SMKN 1 Denpasar, “Visi Misi Sekolah”, dalam <https://www.smkn1denpasar.sch.id/visimisi>, diakses 27 Maret 2022.

¹⁷ SMKN 1 Denpasar, “Visi Misi Sekolah”, dalam <https://www.smkn1denpasar.sch.id/visimisi>, diakses 27 Maret 2022.

6. Mewujudkan akuntabilitas sekolah yang sesuai dengan tata kelola sekolah yang baik (*good governance*).

Sekolah menengah kejuruan yang terakhir ditulis oleh peneliti adalah destinasi terakhir penulis ketika melakukan penelitian. Sekolah yang dipimpin oleh I Dewa Bagus Ketut Wartawan merupakan sekolah menengah kejuruan yang berada di wilayah Denpasar selatan, yang beralamatkan di Jl. Pendidikan No. 28 Denpasar.

Sedangkan sejarah dari SMK Negeri 2 Denpasar ini bermula dari Riwayat singkat berdirinya SMK NEGERI 2 DENPASAR dapat diungkapkan dari pembicaraan Ida Bagus Made Dirga Kepala SMA/SMEA GPP Denpasar dengan I Gusti Lanang Oka Kepala Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi yang waktu itu menjabat Sekretaris Kanwil Dep. P dan K Provinsi Bali pada bulan April 1965 yang antara lain menyatakan, “Apakah tidak mungkin di Denpasar didirikan SMEA Negeri mengingat Denpasar selain sebagai Ibu Kota Provinsi juga merupakan pusat perekonomian di Bali?”. Oleh Kepala IDPKE dijawab sebagai berikut,” di Denpasar patut didirikan SMEA

Negeri, asal dapat dibentuk Panitia Pendirian SMEA Negeri yang representatif'.¹⁹

Atas dasar itulah maka Ida Bagus Made Dirga menghubungi Bupati Badung, Ketua DPR Badung, Kepala PU Provinsi Bali, Sedahan Agung, Pimpinan BRI, Pengusaha Koperasi, tokoh-tokoh pendidikan dan sebagainya. Dalam pertemuan tersebut lalu mendapat tanggapan positif sehingga oleh Bupati Badung dikeluarkan surat tanggal 30-8-1965 No. 001/27/65 cepat untuk mengundang tokoh-tokoh tersebut diatas agar datang pada tanggal 1 September 1965 pukul 09.00 di ruangan DPRGR Kabupaten Badung guna pembentukan panitia pendirian SMEA Negeri Denpasar. Setelah diadakan pertukaran pikiran secara mendalam maka terbentuklah panitia pendirian SMEA Negeri Denpasar sebagai berikut: 1) Ketua: Made Mendra dari IDPKE Provinsi Bali 2) wakil Ketua Made Suda Pimpinan SMEP Negero Denpasar 3) Sekretaris: Ida Bagus Made Dirga Pimpinan SMA/SMEA GPP Denpasar 4) Wakil Sekretaris: Made Sukadana Kepala IPR Kabupaten Badung 5) Bendahara: Made Gobleg Kepala PS Denpasar 6) Pembantu-pembantu: I Ng. Niekeler Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri, I Made Geria Direktorat Koperasi Dati II Badung.²⁰

Untuk mempercepat penegerian SMEA Negeri Denpasar, maka Kepala IDPKE dianjurkan agar Panitia datang sendiri ke Jakarta dengan biaya sendiri. Atas anjuran tersebut berangkatlah Ida Bagus Made Dirga ke Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1965 dengan biaya Rp80.000,- uang lama yang dipungut dari masing-masing anak Rp. 1000. Perjuangan di Jakarta pada saat itu bertepatan dengan tragedy 30 S PKI. Sehingga pada saat itu pula, SMEA Negeri Denpasar dapat

¹⁹ SMKN 2 Denpasar, “Sejarah Sekolah” dalam <https://smkn2dps.sch.id/index.php/en/profil-sekolah/smkn-2-denpasar/sejarah-sekolah>, diakses 2 April 2022.

²⁰ SMKN 2 Denpasar, "Sejarah Sekolah" dalam <https://smkn2dps.sch.id/index.php/en/profil-sekolah/smkn-2-denpasar/sejarah-sekolah>, diakses 2 April 2022.

Sedangkan visi SMK Negeri 2 adalah menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri, berakhlak mulia serta peka terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:²¹

1. Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan/kompetensi sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri (DU/DI).
3. Menumbuhkembangkan semangat jiwa wirausaha mandiri dan mampu bersaing di Dunia Usaha/Industri (DU/DI).
4. Menumbuhkembangkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam berfikir, berkata dan bertindak.
5. Membangun budaya sekolah yang peduli terhadap usaha pelestarian lingkungan dan budaya yang berkelanjutan, berlandaskan Tri Hita Karana.
6. Mengembangkan kedisiplinan yang dinamis dan partisipatif untuk mewujudkan kondisi lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman dan lestari (Bersari).
7. Mengelola lingkungan dan sampah menjadi sumber ekonomi kreatif.
8. Memanfaatkan biopori, drainase dan sumur resapan dalam upaya pencegahan genangan air.
9. Menerapkan manajemen pengelolaan sekolah berlandaskan sistem manajemen mutu (ISO).

²¹ SMKN 2 Denpasar, “Visi Misi”, dalam <https://smkn2dps.sch.id/index.php/en/profil-sekolah/smkn-2-denpasar/visi-misi>, diakses 27 Maret 2022.

1. Lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi sehingga bisa diserap di dunia usaha/industri (DU/DI).
2. Peserta didik dibekali IPTEK sehingga dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Peserta didik mampu memilih karier, berkompetensi dan mengembangkan sikap wirausaha mandiri.
4. Lulusan yang kompeten, berakhlak mulia dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

- Di samping itu, SMKN 2 Denpasar melengkapi beberapa program keahlian yang ditawarkan antara lain; Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Bisnis Daring dan Pemasaran, Perbankan dan Keuangan Mikro, dan usaha perjalanan wisata.²³

Tidak berhenti di situ, SMKN 2 Denpasar telah menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan sekolah di antaranya²⁴ adalah (1) Bank Sekolah Ekonomi (BSE). Bank ini merupakan tempat praktik siswa akuntansi dan perbankan. Melalui bank BSE siswa dapat melayani jasa keuangan dengan kegiatan menabung dan simpan pinjam keuangan di lingkungan internal sekolah. Berikutnya adalah (2) Koperasi Sekolah, adalah tempat siswa manajemen pemasaran praktik. Koperasi sekolah menjual barang-barang kebutuhan siswa dan guru. Kemudian, (3) Satya Wisata, merupakan unit produksi atau tempat praktik bagi siswa usaha perjalanan wisata. Dan keempat adalah Lab Komputer, yaitu sarana yang dibutuhkan semua siswa di

²³ SMK Negeri 1 Denpasar, “Profil SMK Negeri 1 Denpasar,” 2.

²⁴ Selengkapnya bisa dilihat pada SMKN 2 Denpasar, “Fasilitas sekolah”, dalam <https://smkn2dps.sch.id/index.php/en/profil-sekolah/smkn-2-denpasar/fasilitas-sekolah?start=4>, diakses 2 April 2022.

dan 397 guru di Denpasar Utara. rincian jumlah guru SMA ya orang; Guru yang beragama K sebanyak 46 orang; guru agama peragama budha sebanyak 8 oran el tersebut, terdapat agama l ayak 2 orang laki-laki. Dari data ngenai jumlah guru SMA berda di Denpasar.

ngantar Penyampaian Data Guru Dan Siswa
SMK Kota Denpasar, Bali” (Dinas Pendidikan
2022).

orang; Guru yang beragama Kristen sebanyak 46 orang; guru agama Islam sebanyak 46 orang; guru agama peragama budha sebanyak 8 orang. Di sekolah tersebut, terdapat agama lain sebanyak 2 orang laki-laki. Dari data tersebut mengenai jumlah guru SMA beragama di Denpasar.

ngantar Penyampaian Data Guru Dan Siswa
SMK Kota Denpasar, Bali” (Dinas Pendidikan
2022).

Demikian juga rincian jumlah guru berdasarkan agama antara lain sebagai berikut; (1) Guru yang beragama Islam berjumlah 27 berjenis kelamin laki-laki dan 40 berjenis kelamin perempuan. Sehingga total 67 guru yang beragama Islam. (2) guru yang beragama Kristen berjumlah 37 guru, dengan rincian 10 laki-laki dan 27 perempuan. (3) Sedangkan guru yang beragama Katholik sebanyak 7 orang. Dengan rincian 5 laki-laki dan 2 perempuan. (4) Demikian juga dengan guru yang beragama Hindu sebanyak 1.065 orang dengan rincian 437 laki-laki dan 628 perempuan. (5) yang beragama Hindu terhitung 1 guru perempuan.²⁸

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, jumlah peserta didik SMA lebih sedikit dari peserta didik SMK. Dengan bilangan, 18.674 peserta didik yang sedang duduk di bangku SMA, dan 22.082 peserta didik yang sedang duduk di bangku SMK. Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh Jagra²⁹ yang menyatakan kebutuhan SMK lebih banyak, dan membuka kuota kompetensi ahli (baca: jurusan) lebih banyak daripada SMA yang identik dengan jurusan IPA dan IPS saja.

²⁹ Jagra, “Wawancara dengan Pak Jagra di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali” (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, February 18, 2022).

Apabila dinarasikan lebih detail berdasarkan agama yang dianutnya, peneliti menemukan detail angka peserta didik baik pada jenjang SMA maupun SMK. SMA di Denpasar menjelaskan sebagai berikut: (1) peserta didik yang beragama Islam sebesar 2.355 peserta didik. Dengan rincian 1.107 laki-laki dan 1.248 perempuan. (2) peserta didik yang beragama Kristen sebanyak 1.219 dengan rincian 565 peserta didik laki-laki dan 654 peserta didik perempuan. (3) demikian juga bagi peserta didik Katholik yang berjumlah 538 peserta didik dengan rincian 268 laki-laki dan 270 perempuan. (4) Sedangkan peserta didik yang beragama Hindu sebesar 14.163 peserta didik dengan rincian 6.795 laki-laki dan 7.368 perempuan. (5) Untuk peserta didik yang beragama Budha sebanyak 369 peserta. Dengan rincian 167 laki-laki dan 202 perempuan. (6) di SMA juga memiliki peserta didik yang beragama Konghucu dengan rincian 10 peserta didik, masing-masing 5 laki-laki dan 5 perempuan. Serta 20 peserta didik yang beragama lain-lain dengan jumlah 20 peserta didik, masing-masing 10 laki-laki dan 10 perempuan.³¹

Sedangkan rincian peserta didik yang sedang belajar di bangku SMK di Denpasar memiliki rincian sebagai berikut; (1) peserta didik

³¹ Jayawibawa, "Surat Pengantar Penyampaian Data Guru Dan Siswa Berdasarkan Agama Jenjang SMA Dan SMK Di SMA/ SMK Kota Denpasar, Bali", 3.

yang beragama Islam memiliki jumlah 4.212 peserta didik dengan rincian 2.339 peserta didik laki-laki dan 1.873 perempuan. (2) sedangkan peserta didik yang beragama Kristen berjumlah 732 peserta didik dengan rincian 403 laki-laki dan 329 perempuan. (3) sedangkan Katolik berjumlah 298 peserta didik, dengan rincian, 169 laki-laki dan 129 perempuan. (4) Bagi peserta didik yang memeluk agama Hindu berjumlah 16.654 peserta didik, dengan rincian 9.137 peserta didik laki-laki dan 7.517 peserta didik perempuan. (5) Sedangkan peserta didik yang beragama Budha berjumlah 182 peserta didik, dengan rincian 122 laki-laki dan 60 perempuan. (6) dan Konghucu hanya berjumlah 3 orang dengan rincian 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Serta (7) terdapat keterangan lain-lain 1 peserta didik laki-laki saja.³²

Tabel 3.1 Data Siswa SMA berdasarkan Agama

No	PROVINSI	AGAMA														JUMLAH
		ISLAM		KRISTEN		KATHOLIK		HINDU		BUDHA		KONG HU CHU		LAINNYA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kec. Denpasar Barat	422	507	244	255	138	141	1049	1115	77	76	0	2	0	0	4021
2	Kec. Denpasar Selatan	315	298	200	270	62	65	2029	2166	57	72	1	0	4	6	5544
3	Kec. Denpasar Timur	139	175	23	21	13	14	695	743	5	6	0	1	5	4	1844
4	Kec. Denpasar Utara	231	268	98	108	55	50	3022	3344	28	48	4	2	1	0	7251
	JUMLAH	1107	1248	565	654	268	270	6795	7368	167	202	5	5	10	10	18671

Tabel 3.2 Data Siswa SMK berdasarkan Agama

No	PROVINSI	AGAMA														JUMLAH				
		KRISTEN				KATHOLIK				HINDU				BUDHA			KONG HU CHU		LAINNYA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P		
1	Kec. Denpasar Barat	315	521	45	62	25	17	508	741	5	5	0	0	0	0	0	0	2244		
2	Kec. Denpasar Selatan	736	466	181	149	65	56	1980	1971	79	36	1	1	1	1	0	0	5722		
3	Kec. Denpasar Timur	379	326	68	57	26	26	3653	2829	14	13	0	1	0	1	0	0	7392		
4	Kec. Denpasar Utara	909	560	109	61	53	30	2996	1976	24	6	0	0	0	0	0	0	6724		
	JUMLAH	2339	1873	403	329	169	129	9137	7517	122	60	1	2	1	0	0	0	22082		

2. Kelengkapan Administrasi Pembelajaran PAI di SMA/ SMK Negeri di Denpasar, Bali

Pembelajaran tidak akan dianggap sukses ketika tidak disokong dengan beberapa perangkat kurikulum sehingga penting bagi kepala

³² Jayawibawa, "Surat Pengantar Penyampaian Data Guru Dan Siswa Berdasarkan Agama Jenjang SMA Dan SMK Di SMA/ SMK Kota Denpasar, Bali", 3.

ajaran juga dianggap penting pada proses belajar mengajar (KBM). Sehingga dalam proses belajar mengajar yang diadopsi oleh Kemendiknas (Desentralisasi) akan disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing (otonomi daerah). Terdapat beberapa evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai hasil aktivitas pembelajarannya. Evaluasi, pengembangan evaluasi

ajaran juga dianggap penting pada proses pembelajaran oleh guru (KBM). Sehingga dalam proses pembelajaran yang dianut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing (otonomi daerah). Terdapat beberapa evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai hasil aktivitas pembelajarannya. Salah satunya adalah evaluasi, pengembangan evaluasi

ajaran juga dianggap penting pada proses belajar mengajar (KBM). Sehingga dalam proses belajar mengajar yang diadopsi oleh Kemendiknas (Desentralisasi) akan disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing (otonomi daerah). Terdapat beberapa evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai hasil aktivitas pembelajarannya. Evaluasi, pengembangan evaluasi

ajaran juga dianggap penting pada proses belajar mengajar (KBM). Sehingga dalam proses belajar mengajar yang diadopsi oleh Kemendiknas (Desentralisasi) akan disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing (otonomi daerah). Terdapat beberapa evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai hasil aktivitas pembelajarannya. Evaluasi, pengembangan evaluasi

ajaran juga dianggap penting pada proses pembelajaran oleh guru (KBM). Sehingga dalam proses pembelajaran yang dianut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing (otonomi daerah). Terdapat beberapa evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai hasil aktivitas pembelajarannya. Salah satunya adalah evaluasi, pengembangan evaluasi

SEMESTER GENJIL	BULAN	TANGGAL																															HARI MASUK					JUMLAH						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sn n	Sls	Rib	Kms	Jml	Efek	HB					
	JULI	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	M	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	M	MPLS					SBT	M	LK	LK	LK	LK	LK	SBT	M	LK	LK	LK	1	1	1	1	1	5	0					
	AGUSTUS	LK	LK	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	LU	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	4	4	4	4	4	20	20				
	SEPTEMBER	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	5	4	4	4	4	21	21			
	OCTOBER	HE	HE	HE	HE	SBT	M	UTS	UTS	UTS	UTS	HE	PR	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	4	5	5	5	4	23	18			
	NOPEMBER	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	LU	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	4	4	4	4	4	20	20		
	DESEMBER	M	UAS	UAS	UAS	UAS	HE	LK	M	UAS	UAS	LK	RMC	RMC	SBT	M	RP	VL	VL	VL	PR	SBT	M	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	M	LAS	LAS	3	3	2	3	3	14	0				
	JUMLAH HARI SEMESTER GENJIL TAHUN 2019																																				21	21	20	21	20	103	79	
SEMESTER GENAP	BULAN	TANGGAL																															HARI MASUK					JUMLAH						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Snr s	Sls	Rib	Kms	Jml	Efek	HB					
	JANUARI	LAS	LAS	LAS	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	LK	LK	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	4	4	4	3	3	18	18			
	PEBRUARI	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	LK	LK	LK	LK	LK	SBT	M	LK	LK	LK	LK	LK	LK	2	2	2	2	2	10	10						
	MARET	M	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	UTS	UTS	UTS	UTS	HE	SBT	M	LK	LK	LK	LK	HE	HE	SBT	M	HE	HE	4	4	3	4	4	13	13				
	APRIL	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	LU	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE		4	4	5	4	3	20	20				
	MEI	LU	SBT	M	HE	HE	HE	LU	HE	SBT	M	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	HE	LU	HE	M	LU	UAS	UAS	UAS	UAS	SBT	M	3	3	3	1	3	13	13				
	JUNI	LU	UAS	UAS	RMC	RMC	SBT	M	RP	VP	VL	VL	VL	PR	SBT	M	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	M	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	M	LAS	LAS	1	2	2	2	2	9	0					
	JUMLAH HARI SEMESTER GENAP TAHUN 2020																																				18	19	19	16	17	83	80	
	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI BELAJAR SEMESTER GENJIL DAN GENAP																																											132

Gambar 3.1. Kalender Akademik Pendidikan Bali 2019

Berikut narasi dari hasil pengambilan dokumentasi kalender akademik yang bersumber dari keempat sekolah sebagai lokus penelitian kami, SMA Negeri 2 Denpasar dan SMK Negeri 2 Denpasar yang hanya memberikan kalender Pendidikan.³⁴

Peneliti menemukan dua libur khusus yang diagendakan oleh sekolah, pada bulan Februari dan bulan Juli-Agustus. Pada keterangan kalender pendidikan hanya tertulis libur khusus. Ketika kami menanyakan kepada guru PAI masing-masing, dan mencoba mengkonfirmasi kepada waka kurikulum dari SMA Negeri 2 Denpasar dan Kepala Bagian Tata Usaha SMK Negeri 2 Denpasar, ternyata libur khusus yang dilaksanakan selama 2 minggu itu adalah libur khusus hari raya galungan, hari raya kuningan.³⁵

³⁴ I Nengah Siarta, “Dokumentasi Perangkat Pembelajaran SMA Negeri 2 Denpasar” (SMA Negeri 2 Denpasar, February 21, 2022). Lihat juga di lampiran Bagian TU SMK Negeri 2 Denpasar, “Dokumentasi Perangkat Pembelajaran SMK Negeri 2 Denpasar” (SMK Negeri 2 Denpasar, February 22, 2022).

³⁵ Alaika M. Bagus Kurnia PS, “FGD Dengan Syamsuddin Dan I Nengah Mardana Di Ruang Tata Usaha SMA Negeri Denpasar” (Wawancara Penelitian Disertasi 2022, Pebruari 2022). Juga konfirmasi wawancara dengan Ni Ketut Sri Lastini, “Wawancara Dengan Kabag TU SMK Negeri 2 Denpasar” (SMK Negeri 2 Denpasar, February 22, 2022).

Selain itu, kami juga menemukan liburan akhir semester, dan liburan pertengahan semester. Liburan pertengahan semester hanya berlaku selama satu pekan (satu minggu), dan kemudian liburan akhir semester berlaku selama dua pekan (dua minggu). Juga demikian libur umum nasional berlaku sebagaimana biasanya. Namun, disini peneliti juga menemukan libur akhir tahun pelajaran juga dibedakan dengan libur akhir semester. Meskipun secara tujuannya adalah sama. Sehingga libur akhir semester dilaksanakan selama satu bulan.

Demikian juga pelaksanaan penilaian tengah semester (disebut PTS) dan penilaian akhir semester (disebut PAS). Ketika penilaian tengah semester, di SMK Negeri 2 Denpasar, pelaksanaannya hanya berlaku empat hari (4 hari). Berbeda dengan PAS yang berlaku selama satu pekan.³⁶ Berbeda dengan SMA Negeri 2 Denpasar, ia memberlakukan PTS selama satu pekan, PAS selama 2 pekan,³⁷ sehingga dapat disimpulkan, di SMK Negeri 2 Denpasar mendapati pekan efektif pada semester gasal 103 hari. Sedangkan pada semester genap sebanyak 89 hari. Begitupula dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Peneliti menghitung pekan efektif sebanyak 16 pekan pada masing-masing semester.

Hal ini berbeda dengan kalender pendidikan yang ditampilkan pada saat musim covid-19, yang pada saat itu dilaksanakan secara

³⁷ Siarta, "Dokumentasi Perangkat Pembelajaran SMA Negeri 2 Denpasar."

aktif belajarnya lebih banyak daripada yang non-efektifnya. Sehingga dapat ditinjau dari keadaan yang dianut oleh mayoritas di Bali

Plan dan Program Semester
Pembelajaran (RPP) d

perencanaan pembelajaran. Merencanakan kegiatan belajar materi yang akan disampaikan hingga penilaian. Semua pembelajaran.³⁸

kuantitas guru PAI di E
g tergabung dalam wad
(MP) PAI.³⁹ Hal ini jug
administrasi pembelajaran,
pembelajaran, seperti RPP, Pro
ra guru PAI di Denpa
nyusunan perencanaan p
AI yang murni menyusu

enyusunan yang dijadikan
PAI bermula dari ketua I
ni. Hal ini sebagaimana

³⁸ Rudi Ahmad Suryadi and Aguslani Mushlih, *Desain Dan Perencanaan Pembelajaran* (Deepublish, 2019).

³⁹ Ninik Surani et al., "Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajara) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar" (FGD MGMP PAI Kota Denpasar, February 17, 2022).

Jadi dalam hal ini peneliti berkesimpulan bahwasannya perangkat pembelajaran dimulai dari Program Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP disusun oleh satu orang, dan dipakai untuk semua SMA/SMK Negeri di Kota Denpasar. Sebagaimana Zaini juga menyebutkan, "Benar, saya yang menyusun semua perangkat pembelajaran PAI, dan itu adalah gambaran dari musyawarah kami".⁴²

Tidak berhenti di situ, permasalahan ketidakproduktifitasnya guru PAI juga melalui penurunan M. Zaini, karena keterbatasan SDM, dan rata-rata guru PAI SMA/ SMK Negeri tidak hanya mengajar di satu tempat. Mereka sangat mobile (baca: berpindah-pindah) dan mengajar PAI lintas sekolah bahkan lintas kabupaten selain Denpasar. Hal ini disebabkan begitu minimnya ketersediaan SDM guru PAI di Bali. Hal ini juga disampaikan ketika peneliti menghadiri FGD MGMP PAI di kantor kementerian agama kota Denpasar.⁴³

Proses pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang aktif, efektif dan pembelajaran yang kreatif adalah dambaan dari berbagai guru

⁴¹ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

⁴³ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

Berdasarkan realitas di lapangan, kami mendapati dua sekolah yang menyelenggarakan KBM PAI di dalam jam efektif, yakni SMAN 2 Denpasar dan SMKN 2 Denpasar. Sementara dua sekolah lainnya dilaksanakan di luar jam KBM. Kedua sekolah tersebut (SMAN 2 Denpasar dan SMKN 2 Denpasar) dilaksanakan pada saat jam efektif pembelajaran. Sebagaimana penuturan M. Zaini,” kami alhamdulillah mendapatkan tempat kelas dan dilaksanakan pada saat jam efektif, termasuk juga fasilitas kelas tersedia, dan memadai”.⁴⁴ Zaini juga menambahkan,” terdapat lima kelas kosong dan bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pembelajaran dengan fasilitas pembelajaran yang tersedia secara lengkap”.⁴⁵

Demikian halnya, Syamsuddin dalam kesempatan FGD dengan waka kurikulum, ia menuturkan bahwasanya proses pembelajaran PAI disediakan di satu tempat kelas, kemudian ia diberi jam pembelajaran pada saat jam efektif.⁴⁶

Namun berbeda apa yang dialami oleh SMA Negeri 7 Denpasar, SMK Negeri 1 Denpasar dan SMA Negeri 4 Denpasar. Aktivitas pembelajaran dilaksanakan di luar jam efektif sekolah. Seperti terlampir pada jadwal pembelajaran SMK Negeri 1 Denpasar yang dituturkan oleh Margiyanto, "benar, kami melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI selepas pulang sekolah, kemudian kami melaksanakannya di ruang *business center*".⁴⁷

Hal serupa juga dilaksanakan oleh Margiyanto di SMA Negeri 7 Denpasar. Hal yang sama juga dituturkan oleh Nurkholis dalam

⁴⁵ Kurnia PS, "Wawancara Dengan M. Zaini Di Musholla SMK Negeri 2 Denpasar."

⁴⁷ Margiyanto Margiyanto, “Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar” (MGMP Guru PAI Denpasar, February 17, 2022)

kesempatan FGD MGMP PAI Denpasar, "Ya memang sulit keadaannya apabila kita melaksanakan KBM di dalam jam efektif".⁴⁸

sekolah.⁵¹ Meski demikian, kami dapat menarik benang merah bahwa KBM PAI di keempat sekolah tersebut dapat berjalan efektif apabila mendapat dukungan dan fasilitas dari pimpinan sekolah yang berwenang. Adapun guru PAI tersebut hanya berusaha menjalankan pekerjaannya sebagai pendidik dan hanya bisa mengusulkan namun keputusan tetap berada pada *stakeholders* terkait

4. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat ukur kesuksesan dalam pembelajaran dalam satu mata pelajaran⁵², sehingga pada sub bab ini, peneliti menemukan sedikit sekali data mengenai bagaimana layanan evaluasi pembelajaran PAI di SMA/ SMK Negeri di kota Denpasar. Peneliti hanya menemukan ungkapan dari M. Zaini selaku guru senior PAI di Denpasar, bahwasannya naskah ujian seperti PTS (Penilaian Tengah Semester) dan PAS (Penilaian Akhir Semester) berasal dari MGMP PAI SMA/ SMK Provinsi Bali, sehingga para guru tinggal menggunakan dan tanpa menyusun naskah.⁵³ Berbeda dengan Penilaian Harian (PH), yang mana guru PAI melakukan penyusunan naskah soal secara mandiri. Sebagaimana penuturan Nur Kholis, "iya, kami menyusun naskah soal penilaian harian saja secara mandiri. Baik soal tersebut berbentuk pilihan ganda, atau hanya essay".⁵⁴

Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan Margiyanto ketika melakukan evaluasi di SMA Negeri 7 Denpasar. Ia lebih menekankan

⁵¹ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.

⁵² Tatang Hidayat dan Abas Asyafah, “Konsep Dasar Evaluasi Dan Implikasinya Dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Islam Di Sekolah,” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2019): 159–181.

⁵³ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

⁵⁴ Surani et al., "Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.

Terakhir, sebagaimana yang disambungkan oleh M. Zaini pada kesempatan lainnya, M. Zaini juga menuturkan bagaimana skema evaluasi ketika saat pandemi covid-19. Ia menegaskan, acapkali soal evaluasi menggunakan aplikasi *google form* sehingga para peserta didik menggunakan format evaluasi *google form*. Hal ini ternyata juga tidak hanya dimanfaatkan oleh Zaini secara sepihak, ternyata soal evaluasi seperti ETS di semester ini juga dijadikan rujukan soal ETS bagi guru PAI yang mengampu di SMA/ SMK Negeri lain. Sebagaimana penuturan Margiyanto, ia membenarkan hal tersebut, "Siapa yang sempat menyusunnya, maka akan kami jadikan rujukan dan bisa juga kita tidak repot-repot menyusun naskah evaluasi, terutama ETS pada semester ini".⁵⁶

dasarnya layanan Pendidikan Islam bagi siswa secara

⁵⁵ Margiyanto Margiyanto, “Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar” (MGMP Guru PAI Denpasar, February 17, 2022).

⁵⁷ Mujianto Solichin, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi," *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): 148–178.

Begitupun kebijakan Pendidikan Islam juga diutarakan yang tergantung pada tempat dan daerahnya. Akan berbeda kebijakan Pendidikan Islam diutarakan pada daerah mayoritas dan minoritas.⁵⁸ Masyarakat muslim yang berada pada posisi mayoritas, mereka akan diuntungkan dan secara menyeluruh akan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Meskipun terkadang masih terdapat beberapa evaluasi. Pun demikian dengan mereka yang ada pada lingkungan minoritas, yang pastinya asumsi penulis mula-mula berekspektasi terhadap tidak maksimalnya dalam pelayanan Pendidikan Islam.

Paparan data pada kesempatan ini, penulis melaksanakan pengambilan data melalui teknik wawancara kepada Kepala Bidang Pendidikan Islam di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, yaitu Mahmudi, dan Kepala Seksi Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, yaitu Ninik Surani. Berikut hasil wawancara dan paparan data yang dikemas oleh peneliti:

6. Pengadaan Guru Pendidikan Islam SMA/ SMK Negeri di Denpasar, Bali

Menjadi hal yang maklum ketika pengadaan sumber daya manusia atau guru PAI SMA/ SMK pada saat ini adalah menjadi urusan kementerian Agama. Karena pembinaan guru PAI baik dari sekolah umum⁵⁹ maupun madrasah⁶⁰ bermuara pada payung kementerian Agama Republik Indonesia, secara rinci pelaksana pengadaan SDM nya di bawah payung Kantor Wilayah (Kanwil) provinsi hingga kantor kementerian Agama Kota/ Kabupaten. Berbeda dengan penanganan perguruan tinggi

⁵⁸ Jejen Musfah, *Analisis Kebijakan Pendidikan Mengurai Krisis Karakter Bangsa* (Jakarta: Prenada Media, 2018); Fadly Mart Gultom, *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

⁵⁹ Dalam Hal Ini Disebut Dengan Tingkatan SD Untuk Sekolah Dasar, SMP Untuk Sekolah Menengah Pertama Dan SMA/ SMK Yaitu Sekolah Menengah Atas Atau Sekolah Menengah Kejuruan,” n.d.

⁶⁰ Dalam Hal Ini Disebut MI Yang Juga Disebut Madrasah Ibtidaiyah, Mts Disebut Madrasah Tsanawiyah Dan MA Disebut Madrasah Aliyah,” n.d.

Mahmudi, selaku kepala bidang (disebut: Kabid) menyebutkan terkait jumlah guru di kota Denpasar perkiraan 480 guru yang menyebar di semua jenjang.⁶¹ Hal ini juga ditambahkan secara rigid melalui data yang diberikan oleh Ninik, dari 66 SMA/ SMK Umum, tidak semua guru PAI di kota Denpasar terdata secara lengkap pada *database* daftar guru PAI SMA/ SMK yang dikelola oleh Kementerian Agama Kota Denpasar.⁶² Dari data yang penulis kumpulkan, terdapat 11 daftar guru PAI SMA/ SMK Umum, sehingga dapat dipastikan jumlah guru yang terdaftar dan ber-homebase sebagai guru SMA/ SMK terdapat 11 dan 55 guru belum terlacak pada *database*.

No	Nama	Jenis Kelamin	Kualifikasi	Status Pegawai	Nama Sekolah
1	Hamid	L	Magister/ S2	Non PNS	SMKN 3 Denpasar
2	Moh Zaini, S.Pd.I., M.Pd.I	L	Magister/ S2	PNS	SMKN 2 Denpasar
3	Syamsuddin, S.Pd.I	L	Sarjana/ S1	PNS	SMAN 2 Denpasar
4	Margiyanto, M. Pd.I	L	Magister/ S2	Non PNS	SMKN 1 Denpasar
5	Umi Istiana	P	Sarjana/ S1	Non PNS	SMKS Teknologi Wira Bhakti

⁶¹ Mahmudi, “Wawancara Dengan Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Pkl. 10. 00 Sampai 12.00 WITA Di Kantor Kepala Bidang Pendidikan Islam Kemenag Provinsi Bali,” February 16, 2022.

⁶² Pusat Data Denpasar Kota, “Identitas Sekolah SMA/ SMK Di Wilayah Kota Denpasar,” 2021.

L	Sarjana/ S1	Non PM
L	-	Non PM
L	Sarjana/ S1	Non PM
L	Magister/ S2	Non PM
L	Sarjana/ S1	Non PM

di kota Denpasar, hanya terdapat 11 guru PAI saja. Hal ini menerangkan, ada juga sekolah yang sudah mengusulkan guru PAI pada kita, seperti sekolah yang me-

⁶³ Surani, “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA.”

Ditinjau dari Status Pegawai dan Kualifikasi Akademik

(guru swasta/ Guru Tidak Tetap (GTT)).

SMK yang tersebar di kota Denpasar.⁶⁸

Dalam artian, mereka bukan dari lulusan Pendidikan Islam, namun mereka

Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA.”

Denpasar, February 16, 2022).

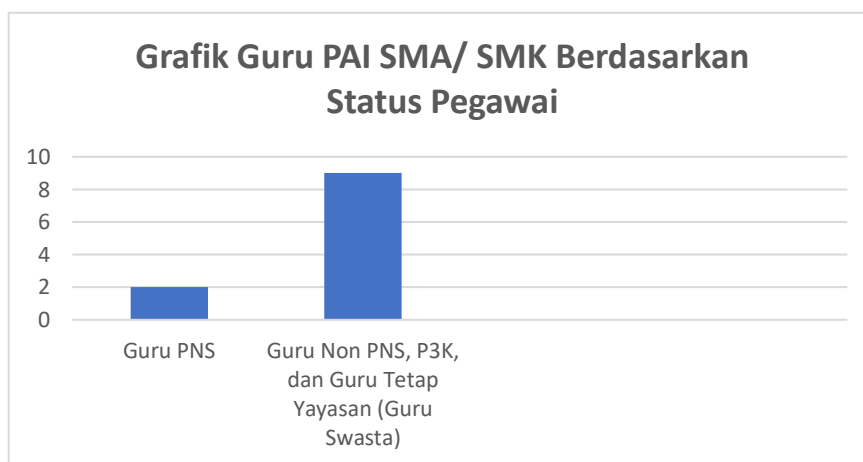
Provinsi Bali.”

⁶⁷ Pendidikan Islam, “Data Guru PAI.”

⁶⁸ Alaika M. Bagus Kurnia PS, “Wawancara Data Statistik Guru PAI SMA/ SMK Bersama H. M. Zaini, M. Pd.” (Telephone by Whatsapp, February 22, 2022).

⁶⁹ Surani, “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA.”

memiliki kompetensi bidang keagamaan.⁷⁰ Demikian pula, terdapat juga guru PNS yang berasal dari Kemenag, dan juga ada guru PAI yang diangkat PNS langsung dari Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Bali, sehingga pada saat itu peneliti masih perlu menelusuri data PNS guru PAI yang masuk dalam struktur kepegawaian Diknas Provinsi Bali.⁷¹ Sebagaimana grafik data sebagai berikut:



Grafik 3.1. Guru PAI SMA/SMK berdasarkan status pegawai

Pada grafik 1.1 diatas jenis guru PAI PNS atau Non PNS yang terdaftar oleh Kementerian Agama Kota Denpasar. Data tersebut belum juga ditampilkan bagaimana guru PAI yang berafiliasi dengan Diknas Provinsi Bali.

Selain itu, ada satu data guru yang tidak disebutkan kualifikasi akademiknya.⁷² Sebagai prediksi, guru tersebut belum memenuhi kualifikasi akademik atau hanya sebagai praktisi agama yang berasal dari tokoh agama Islam setempat sehingga dapat juga digambarkan grafiknya sebagai berikut:

⁷⁰ Surani, “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA.”

⁷¹ Surani, “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA.”

⁷² Pendidikan Islam, "Data Guru PAI."



8. Regulasi Gaji dan Tunjangan Kinerja Guru Pendidikan Islam SMA/ SMK Negeri di Denpasar, Bali

Sebagaimana anak sub bab di atas, penulis menemukan data awal yang berasal dari Kabid Pendidikan Islam, yaitu Mahmudi. Dalam hal ini, Mahmudi membenarkan bahwa selama ini tunjangan kinerja (tukin) guru PAI SMA/ SMK berada di bawah naungan Kementerian Agama. Namun pelaksanaan teknis pencairan adalah SMA/ SMK itu sendiri.⁷³ Ada

⁷³ Surani, “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA.”

beberapa persoalan didalam kesejahteraan guru PAI, Ninik menjelaskan sebagai berikut⁷⁴.

Pertama mengenai gaji guru. Sudah menjadi hak guru PNS mendapatkan gaji pokok secara berkala, karena sudah merupakan kewajiban dan anggaran negara secara rutin. Berbeda dengan guru PAI Non PNS atau honorer, terdapat sebuah fakta menarik yang diceritakan oleh Ninik tentang pengadaan Guru PAI bahwa masih ditemukan penggajian guru PAI berasal dari subsidi orang tua wali murid, bukan dari sekolah ia mengajar.⁷⁵ Demikian juga, pada sekolah SMAN/ SMKN yang membutuhkan guru PAI honorer, namun sistem penggajiannya bersumber dari Kementerian Agama.

Kedua, tunjangan kinerja/ sertifikasi guru, secara normatif tiap rombongan belajar yang diampu oleh guru PAI, sebanyak 15 peserta didik. Namun pada praktiknya masih ada di dalam satu rombongan belajar yang kurang dari 15 peserta didik, karena keadaan jumlah peserta didik yang beragama Islam lebih sedikit *ketimbang* peserta didik yang beragama Hindu. Maka regulasi yang dikeluarkan oleh Ninik adalah boleh untuk mendapatkan unit sekolah dari luar Satminkal agar memenuhi kuota rombongan belajar hingga 90 peserta didik.

C. Potret Praktik Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim Denpasar Bali

1. Layanan Kegiatan Keagamaan Bagi Siswa SMA/ SMK Negeri di Denpasar/ Bali

Pada kesempatan ini, peneliti mengadakan pertemuan (baca: FGD) dengan sebagian guru SMA/ SMK Negeri di Bali, baik yang berstatus

⁷⁴ Surani, “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA.”

⁷⁵ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

”Kami pernah mengirimkan delegasi dari peserta didik, antusiasnya luar biasa ketika sekolah mengetahui mereka mendapatkan prestasi juara. Misalnya juara 2 Olimpiade Halal tingkat Nasional, dan bahkan pernah berprestasi pada olimpiade PAI tingkat Nasional. Ia juga menambahkan, bahwasanya pejabat sekolah bersama pimpinan MUI Provinsi Bali di depan warga sekolah memberikan apresiasi yang sangat luar dengan mendokumentasikan penghargaanannya”.

ggi dari pendidikan dan nilai-nilai masyarakat
 , yang biasa disebut dengan ‘*menyame braye*’ atau hi
 aan⁷⁷ Hal ini juga dikuatkan oleh kepala sekolah ”B

Demikian pula, mengenai acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di setiap tahunnya ditandai dengan tanggal merah, ada beberapa

⁷⁷ I. Ketut Sunarya, "The Concept of Rwa Bhineda Kriya on the Island of Bali towards Jagadhita,," *Wacana Seni Journal of Arts Discourse* 19 (2020): 47–60.

⁷⁸ Kokorda Gede Anom Wiratmaja, "Wawancara Dengan Kepala SMA Negeri 7 Denpasar" (Ruang Kepala SMA Negeri 7 Denpasar, February 21, 2022).

gajian kepada para guru dan karyawan. Setelah selesai, kegiatan sholat Jum'at di Aula SMAN 7 Denpasar tahun 2018 (sebelum pandemi) akanlah sholat jumat secara berjamaah. Kepala sekolah mengizinkan beragama Islam merupakan yang diutamakan. Namun pasca diberlakukannya Covid-19, aktivitas sholat Jum'at belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, di SMKN 1 Denpasar, SMKN 2 Denpasar mengadakan sholat Jum'at di luar sekolah. SMKN 1 Denpasar, SMKN 2 Denpasar, SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Denpasar mengadakan sholat Jum'at di luar sekolah.

gajian kepada para guru dan karyawan. Setelah selesai, kegiatan sholat Jum'at di Aula SMAN 7 Denpasar tahun 2018 (sebelum pandemi) akanlah sholat jumat secara berjamaah. Kepala sekolah mengizinkan beragama Islam merupakan yang diutamakan. Namun pasca diberlakukannya Covid-19, aktivitas sholat Jum'at belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, di SMKN 1 Denpasar, SMKN 2 Denpasar mengadakan sholat Jum'at di luar sekolah. SMKN 1 Denpasar, SMKN 2 Denpasar, SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Denpasar mengadakan sholat Jum'at di luar sekolah.

gajian kepada para guru dan karyawan. Setelah selesai, kegiatan sholat Jum'at di Aula SMAN 7 Denpasar tahun 2018 (sebelum pandemi) akanlah sholat jumat secara berjamaah. Kepala sekolah mengizinkan beragama Islam merupakan yang diutamakan. Namun pasca diberlakukannya Covid-19, aktivitas sholat Jum'at belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, di SMKN 1 Denpasar, SMKN 2 Denpasar mengadakan sholat Jum'at di luar sekolah. SMKN 1 Denpasar, SMKN 2 Denpasar, SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Denpasar mengadakan sholat Jum'at di luar sekolah.

gajian kepada para guru dan karyawan. Setelah selesai, kegiatan sholat Jum'at di Aula SMAN 7 Denpasar tahun 2018 (sebelum pandemi) akanlah sholat jumat secara berjamaah. Kepala sekolah mengizinkan beragama Islam merupakan yang diutamakan. Namun pasca diberlakukannya Covid-19, aktivitas sholat Jum'at belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, di SMKN 1 Denpasar, SMKN 2 Denpasar mengadakan sholat Jum'at di luar sekolah. SMKN 1 Denpasar, SMKN 2 Denpasar, SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Denpasar mengadakan sholat Jum'at di luar sekolah.

Hal ini tentu menjadi problem tersendiri terkait tata tertib atau peraturan sekolah karena menyangkut pertanggungjawaban karakter peserta didik. Sebab tidak sedikit peserta didik yang menyalahgunakan kelonggaran ibadahnya pada saat sholat jum'at. M. Zaini dalam kesempatan ini menuturkan, “sekolah dengan saya selaku guru agama juga bertanggungjawab untuk melakukan tindakan dan hukuman (*punishment*) bagi mereka yang melanggar ketentuan sekolah, khususnya menyalahgunakan izin sholat Jum'at”. Ia juga menambahkan, ”karena ketika hari Jum'at bentuk kegiatan kami juga selalu mendapatkan jadwal khutbah diluar, otomatis tidak memiliki kuasa untuk melakukan pendampingan dan pengarahan. Maka biasanya kami meminta bantuan dari pengurus Rohis yang ada di sekolah tersebut”.⁸¹

PS, “FGD Dengan Syamsuddin Dan I Nengah Mardana Di Ruang Tata Usaha SMA Denpasar.”

PS, “FGD Dengan Syamsuddin Dan I Nengah Mardana Di Ruang Tata Usaha SMA Denpasar.”

Zaini, “Wawancara Dengan Haji Moh. Zaini Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Kantor Kementrian Agama Kota Denpasar” (Wawancara, February 17, 2022)

⁸² Moh Zaini, “Wawancara Dengan Haji Moh. Zaini Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar” (Wawancara, February 17, 2022)

Tidak berhenti di situ, Zaini mencoba melakukan sebuah terobosan dengan memanfaatkan jabatan kedinasannya dalam lingkup Kementerian Agama, yaitu dengan posisinya sebagai ASN. Terobosan tersebut ialah Ia mencoba mengajak kepada para peserta didik untuk melakukan anjangsana dari Masjid atau Musholla di daerah Denpasar dan sekitarnya.⁸³ Deskripsi kegiatannya pun cukup sederhana, mereka secara kolektif berkumpul dan berangkat menuju masjid atau musholla yang dituju dalam keadaan ber-wudlu, tiba di lokasi langsung menuju masjid atau musholla dengan memulai aktivitasnya dengan sholat dhuha berjama'ah. Selepas sholat jum'at berjamaah dilanjutkan dengan tadarrus al-Qur'an dan ditutup dengan kultum yang disampaikan langsung oleh Moh. Zaini selaku guru PAI.⁸⁴

Selain itu, peneliti juga mendapatkan dokumentasi mengenai aktivitas doa bersama menjelang ujian akhir sekolah bagi peserta didik yang beragama Islam di SMK Negeri 2 Denpasar dari Zaini. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan secara rutin. Dan bahkan aktivitas pergantian pengurus Rohis setiap tahunnya meskipun dilaksanakan secara daring.

Semua bentuk kegiatan bulanan, hingga mingguan yang diakomodasi oleh Rohis di SMK Negeri 2 Denpasar, dilaksanakan di luar sekolah. Berikut juga mengenai kegiatan pergantian pengurus rohis, di SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 7 yang dibina langsung oleh Margiyanto, mereka melakukan pembaruan pengurus juga sekaligus melakukan pemilihan ketua Rohis terbaru secara daring (menggunakan google form). Demikian juga M. Zaini di SMK Negeri 2 melaksanakan program pelantikan pengurus baru dengan menggunakan aplikasi zoom meeting.

Berbeda dengan SMA Negeri 2 yang dibina oleh Syamsuddin. Semenjak kegiatan sekolah dilaksanakan secara online, maka aktivitas

⁸³ Moh Zaini, “Wawancara Dengan Haji Moh. Zaini Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar” (Wawancara, February 17, 2022).

⁸⁴ Moh Zaini, "Wawancara Dengan Haji Moh. Zaini Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar."

Termasuk juga, kegiatan sosial baik yang dilakukan secara rutin tahunan atau bulanan. Beberapa sekolah di Denpasar, misalnya, juga melakukan santunan bagi anak yatim atau piyatu. Terkadang kegiatan sosial ini juga untuk teman sebayanya yang beragama Islam untuk disantuni. Hal tersebut dinyatakan oleh Zaini, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan secara kontinu hingga saat ini. Jikalau pada saat 10 Muharram, ia mengajak seluruh peserta didik muslim untuk menggalang dana dan melakukan santunan kepada yatim piatu.⁸⁶

Denpasar sebagian besar, para warga muslim dari besar keagamaan.

⁸⁶ Kurnia PS, "Wawancara Dengan M. Zaini Di Musholla SMK Negeri 2 Denpasar."

pada tanggal merahnya dengan konsep yang sama.⁸⁸ Hal ini ditegaskan kembali oleh Athalla,” Kami juga melaksanakan PHBI seperti Maulid Nabi, namun kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat hari libur dengan meminjam salah satu ruangan di sekolah”.⁸⁹

Ringkasnya, Margiyanto – dan beberapa guru PAI yang lain – melakukan hal tersebut mengambil kekosongan lingkungan sekolah di hari libur agar tidak berbenturan dengan kegiatan rutin sekolah di luar tanggal tersebut. Demikian juga peneliti mendapatkan temuan terkait kegiatan Idul Adha. Mereka melaksanakan sholat ‘Id berjama’ah di Aula sekolah, kemudian dengan sistem subsidi warga muslim di sekolah tersebut membeli hewan Qurban selama 1 tahun (dihitung sejak Zulhijjah tahun sebelumnya).

Berbekal iuran peserta didik, guru dan peserta didik, mereka kemudian membeli hewan kurban dan menyerahkannya kepada komite sekolah, dalam hal ini adalah orang tua wali murid yang beragama Islam. Mereka bersama-sama menyembelih, mengelola daging qurban dan dimasak. Kemudian di hari berikutnya, masakan tersebut diserahkan kepada sekolah dan warga sekolah atau para guru diajak untuk makan bersama. Sebagaimana penjelasan Margiyanto, "Hal tersebut benar-benar murni dari inisiatif kami bersama peserta didik yang tergabung dalam kepengurusan rohis".⁹⁰ Demikian juga dilaksanakan oleh beberapa sekolah lain yang dikunjungi sebagai objek penelitian, seperti SMK Negeri 2 dan SMA Negeri 2 juga melakukan hal yang sama.

⁸⁸ Athalla, “Wawancara Dengan Peserta Didik SMKN 1 Denpasar Pkl. 09.30 WITA Di Halaman Utama Sekolah” (Sie Kerohanian Islam SMKN 1 Denpasar, February 18, 2022). Athalla menyebutkan, “Sempat kita bikin Maulid Nabi Muhammad Saw ketika sebelum pandemi covid-19, kita mendatangkan 700 undangan, baik dari dalam juga mengundang peserta didik muslim lainnya”.

⁸⁹ Athalla, “Wawancara Dengan Peserta Didik SMKN 1 Denpasar Pkl. 09.30 WITA Di Halaman Utama Sekolah”.

⁹⁰ Margiyanto, "Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar."

menyelesaikan administrasi perijinan di satuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.⁹⁴

Pada tahap pertama, peneliti melakukan observasi dan wawancara di lingkungan SMKN 1 Denpasar. Selama kegiatan observasi dan wawancara didampingi oleh Margiyanto selaku guru PAI, sehingga peneliti menemukan beberapa dokumentasi sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. Dengan didampingi Margiyanto, ia mengajak peneliti untuk melihat bagaimana kondisi tempat wudhu untuk keperluan sholat dan pembiasaan keagamaan di dalam sekolah. Margiyanto selaku guru PAI menerangkan, sebelumnya kondisi wudhu tersebut tidak seperti ini. Hanya ada satu saluran air saja sehingga ketika waktu istirahat, para peserta didik mengalami *crowded* (baca: antri) yang lama antara satu peserta didik dengan yang lain sehingga sempat ada komplain dari salah satu guru kepada Margiyanto secara langsung. Atas komplain tersebut, Margiyanto meneruskannya kepada wakil kepala sarana dan prasarana agar mendapatkan perhatian dan renovasi tempat wudhu yang cukup layak agar tepat pada tahun 2019 (sebelum pandemi covid-19), sudah menjadi tempat wudhu yang cukup layak, dengan 4 saluran air.

Selain itu, penunjang pembiasaan keagamaan tersebut juga didukung oleh pengadaan tempat sholat atau musholla yang berada di antara dua kelas, terdapat lorong sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan sholat, kajian dan ibadah lainnya.⁹⁵ Sebagaimana pernyataan Margiyanto, “kita wajib mensyukuri dengan jumlah kuantitas komunitas muslim di sekolah ini yang sangat banyak nomor dua setelah Hindu, namun kita sudah diberikan tempat ibadah yang seperti ini”.⁹⁶

⁹⁴ Alaika M. Bagus Kurnia PS, “Administrasi Penelitian Disertasi Pada Tanggal 15-17 Februari 2022” (Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, February 15, 2022).

⁹⁵ Alaika M. Bagus Kurnia PS, “Observasi Penelitian Di SMKN 1 Denpasar” (SMK Negeri 1 Denpasar, February 18, 2022).

⁹⁶ Margiyanto, “Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar.”

ongon belajar (rombel). Tiap satu rombel terdapat
tergabung dalam satu kelas. Kebetulan pen
pak depan kelas yang digunakan untuk pelaksana
ruang Students Business Center (SBC) m
ang kelas berkapasitas besar sehingga dapat m
yang lebih banyak. Sebagai penjelasan detailny
jelaskan pada sub bab selanjutnya. Pada kesen
mengunjungi SMA Negeri 7 Denpasar. Di sa
ruah fasilitas beribadah dan satu ruang untuk KB
rang juga dipergunakan untuk aktivitas shalat
perjamaah.

ongon belajar (rombel). Tiap satu rombel terdapat
tergabung dalam satu kelas. Kebetulan pen
pak depan kelas yang digunakan untuk pelaksana
ruang Students Business Center (SBC) m
ang kelas berkapasitas besar sehingga dapat m
yang lebih banyak. Sebagai penjelasan detailny
jelaskan pada sub bab selanjutnya. Pada kesen
mengunjungi SMA Negeri 7 Denpasar. Di sa
ruah fasilitas beribadah dan satu ruang untuk KB
rang juga dipergunakan untuk aktivitas shalat
perjamaah.

ongon belajar (rombel). Tiap satu rombel terdapat
tergabung dalam satu kelas. Kebetulan pen
pak depan kelas yang digunakan untuk pelaksana
ruang Students Business Center (SBC) m
ang kelas berkapasitas besar sehingga dapat m
yang lebih banyak. Sebagai penjelasan detailny
jelaskan pada sub bab selanjutnya. Pada kesen
mengunjungi SMA Negeri 7 Denpasar. Di sa
ruah fasilitas beribadah dan satu ruang untuk KB
rang juga dipergunakan untuk aktivitas shalat
perjamaah.

ongon belajar (rombel). Tiap satu rombel terdapat
tergabung dalam satu kelas. Kebetulan pen
pak depan kelas yang digunakan untuk pelaksana
ruang Students Business Center (SBC) m
ang kelas berkapasitas besar sehingga dapat m
yang lebih banyak. Sebagai penjelasan detailny
jelaskan pada sub bab selanjutnya. Pada kesen
mengunjungi SMA Negeri 7 Denpasar. Di sa
ruah fasilitas beribadah dan satu ruang untuk KB
rang juga dipergunakan untuk aktivitas shalat
perjamaah.

ongon belajar (rombel). Tiap satu rombel terdapat
tergabung dalam satu kelas. Kebetulan pen
pak depan kelas yang digunakan untuk pelaksana
ruang Students Business Center (SBC) m
ang kelas berkapasitas besar sehingga dapat m
yang lebih banyak. Sebagai penjelasan detailny
jelaskan pada sub bab selanjutnya. Pada kesen
mengunjungi SMA Negeri 7 Denpasar. Di sa
ruah fasilitas beribadah dan satu ruang untuk KB
rang juga dipergunakan untuk aktivitas shalat
perjamaah.

ongon belajar (rombel). Tiap satu rombel terdapat
tergabung dalam satu kelas. Kebetulan pen
pak depan kelas yang digunakan untuk pelaksana
ruang Students Business Center (SBC) m
ang kelas berkapasitas besar sehingga dapat m
yang lebih banyak. Sebagai penjelasan detailny
jelaskan pada sub bab selanjutnya. Pada kesen
mengunjungi SMA Negeri 7 Denpasar. Di sa
ruah fasilitas beribadah dan satu ruang untuk KB
rang juga dipergunakan untuk aktivitas shalat
perjamaah.

l di atas merupakan inventaris peribadatan yang
egeri 2 Denpasar, meskipun tempat wudhu terdapat
yang bisa digunakan, namun inventaris yang ada
yang cukup lama untuk sarana dan prasarana ibadah.
. Selanjutnya adalah musholla SMK Negeri 1
di berikut:

Untuk kebutuhan kegiatan pembelajaran PA
al dari iuran dan atau infaq dari peserta didik
disimpan dengan rapi di dalam musholla tersebut.
N 2 Denpasar berada pada lantai 1.⁹⁹ Karena
a yang hendak menunaikan sholat, mereka harus
i mengungkapkan, guru dan karyawan di SMA
anyak 11 orang yang mana mereka ada

l di atas merupakan inventaris peribadatan yang
egeri 2 Denpasar, meskipun tempat wudhu terdapat
yang bisa digunakan, namun inventaris yang ada
yang cukup lama untuk sarana dan prasarana ibadah.
. Selanjutnya adalah musholla SMK Negeri 1
di berikut:

Untuk kebutuhan kegiatan pembelajaran PA
al dari iuran dan atau infaq dari peserta didik
disimpan dengan rapi di dalam musholla tersebut.
N 2 Denpasar berada pada lantai 1.⁹⁹ Karena
a yang hendak menunaikan sholat, mereka harus
i mengungkapkan, guru dan karyawan di SMA
anyak 11 orang yang mana mereka ada

di atas merupakan inventaris peribadatan yang ada di SMK Negeri 2 Denpasar, meskipun tempat wudhu tersebut sudah ada yang bisa digunakan, namun inventaris yang ada sudah cukup lama untuk sarana dan prasarana ibadah. Selanjutnya adalah musholla SMK Negeri 2 Denpasar berikut:

Musholla yang digunakan untuk kebutuhan kegiatan pembelajaran PAI di SMK Negeri 2 Denpasar berasal dari iuran dan atau infaq dari peserta didik. Musholla tersebut disimpan dengan rapi di dalam musholla tersendiri. Musholla N 2 Denpasar berada pada lantai 1.⁹⁹ Karena jumlah siswa yang hendak menunaikan sholat, mereka harus menunggu untuk mengungkapkan, guru dan karyawan di SMK Negeri 2 Denpasar banyak 11 orang yang mana mereka ada

di atas merupakan inventaris peribadatan yang ada di SMK Negeri 2 Denpasar, meskipun tempat wudhu tersedia namun yang bisa digunakan, namun inventaris yang ada sudah cukup lama untuk sarana dan prasarana ibadah. Selanjutnya adalah musholla SMK Negeri 2 Denpasar berikut:

Untuk kebutuhan kegiatan pembelajaran PAW di SMK Negeri 2 Denpasar al dari iuran dan atau infaq dari peserta didik yang disimpan dengan rapi di dalam musholla tersebut. SMK N 2 Denpasar berada pada lantai 1.⁹⁹ Karena jumlah siswa yang hendak menunaikan sholat, mereka harus menunggu untuk mengungkapkan, guru dan karyawan di SMK Negeri 2 Denpasar banyak 11 orang yang mana mereka ada

di atas merupakan inventaris peribadatan yang ada di SMK Negeri 2 Denpasar, meskipun tempat wudhu tersedia namun yang bisa digunakan, namun inventaris yang ada sudah cukup lama untuk sarana dan prasarana ibadah. Selanjutnya adalah musholla SMK Negeri 2 Denpasar berikut:

di atas merupakan inventaris peribadatan yang ada di SMK Negeri 2 Denpasar, meskipun tempat wudhu tersebut sudah ada yang bisa digunakan, namun inventaris yang ada sudah cukup lama untuk sarana dan prasarana ibadah. Selanjutnya adalah musholla SMK Negeri 2 Denpasar berikut:

Musholla yang digunakan untuk kebutuhan kegiatan pembelajaran PAI di SMK Negeri 2 Denpasar berasal dari iuran dan atau infaq dari peserta didik. Musholla tersebut disimpan dengan rapi di dalam musholla tersendiri. Musholla di SMN 2 Denpasar berada pada lantai 1.⁹⁹ Karena Musholla adalah tempat yang hendak menunaikan sholat, mereka harus menjaga kebersihan dan mengungkapkannya, guru dan karyawan di SMN 2 Denpasar banyak 11 orang yang mana mereka ada

di atas merupakan inventaris peribadatan yang ada di SMN 2 Denpasar, meskipun tempat wudhu terdapat di SMN 2 Denpasar yang bisa digunakan, namun inventaris yang ada di SMN 2 Denpasar yang cukup lama untuk sarana dan prasarana ibadah. Selanjutnya adalah musholla SMK Negeri 2 Denpasar berikut:

Terakhir adalah evaluasi. Dalam evaluasi pembelajaran, acuan yang diperhatikan secara khusus antara lain, keterpaduan, koherensi, logis, serta akuntabilitas.¹⁰³ Dari beberapa acuan khusus tersebut, bagi para pendidik menyiapkan ketiga kerangka pembelajaran mulai dari perencanaan, proses hingga evaluasi. Sebagaimana deskripsi dimana guru PAI SMA/ SMK di Denpasar melakukan pelayanan proses pembelajaran PAI sebagai berikut;

Deskripsi aktivitas pembelajaran PAI di SMA/ SMK

¹⁰² Ligia Fernanda Espinosa Cevallos and Sandy T. Soto, "EFL Classroom Management," *MEXTESOL Journal* 44, no. 2 (2020): 1–11.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di sisi lain, terkait pelaksanaan pembelajaran, terdapat sekolah yang tetap melaksanakan kegiatan PBM dengan menempatkan jam mata pelajaran PAI didalam jam efektif. Moh. Zaini, misalnya, selaku guru PAI di lingkungan SMKN 2 Denpasar menambahkan, bahwasanya ia mengajar jam mata pelajaran PAI pada jam efektif. Karena kondisi sekolah tersebut masih tersedia kelas kosong untuk ditempati sebagai perpindahan kelas PAI (*moving class system*). Namun ada juga yang melaksanakan kelas pembelajaran PAI di luar jam efektif sekolah. Hal senada juga dialami Margiyanto di SMA Negeri 7 Denpasar, dan Nur Kholis yang juga mengampu di SMA Negeri 4 Denpasar.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Margiyanto, “Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar.” Hal tersebut juga terjadi pada Nur Kholis, “Wawancara Dengan Nurkholis Sebagai Guru PAI Di SMA Negeri 4 Denpasar” (SMA Negeri 4 Denpasar, February 22, 2022).

4. Layanan Peribadatan di SMA/ SMK Negeri Denpasar

Pertama, agenda program sekolah, mereka mengungkapkan mengenai agenda mingguan yang secara fakta dinyatakan mengenai kesempatan

¹¹⁰ Mohammad Attaran, "Moral Education, Habituation, and Divine Assistance in View of Ghazali," *Journal of Research on Christian Education* 24, no. 1 (2015): 43–51; Lihat juga Suyatno et al., "Strategy of Values Education in the Indonesian Education System," *International Journal of Instruction* 12, no. 1 (January 2019): 607–624.

...asi kembali bagaimana jarak antara sekolah dengan...
...ali menjelaskan bahwasannya radius antara sekolah...
...1 km ke arah utara, kemudian 2 km ke arah kampu...
...halnya yang dilakukan oleh beberapa sekolah yan...
...an kami sebagai perwakilan beberapa SMA/ SMK...
...ali. Sebagaimana SMK Negeri 2 Denpas...
...lika-liku pembelajaran dan pendampingan keagam...
...Pada saat sholat Jum'at, peserta didik me...
...ang luas. Sebab pukul 12.00 WITA juga adalah jan...
...istirahat tersebut hingga 15 menit sejak pukul 12.0...
...ya, peserta didik akan terlambat dalam hitung...
...nit) pasca istirahat.¹¹³

...asi kembali bagaimana jarak antara sekolah dengan...
...ali menjelaskan bahwasannya radius antara sekolah...
...1 km ke arah utara, kemudian 2 km ke arah kampu...
...halnya yang dilakukan oleh beberapa sekolah yan...
...an kami sebagai perwakilan beberapa SMA/ SMK...
...ali. Sebagaimana SMK Negeri 2 Denpas...
...lika-liku pembelajaran dan pendampingan keagam...
...Pada saat sholat Jum'at, peserta didik me...
...ang luas. Sebab pukul 12.00 WITA juga adalah jan...
...istirahat tersebut hingga 15 menit sejak pukul 12.0...
...ya, peserta didik akan terlambat dalam hitung...
...nit) pasca istirahat.¹¹³

...asi kembali bagaimana jarak antara sekolah dengan ...
...ali menjelaskan bahwasannya radius antara sekolah ...
...1 km ke arah utara, kemudian 2 km ke arah kampu ...
...halnya yang dilakukan oleh beberapa sekolah yan ...
...an kami sebagai perwakilan beberapa SMA/ SMK ...
...ali. Sebagaimana SMK Negeri 2 Denpas ...
...lika-liku pembelajaran dan pendampingan keagam ...
...Pada saat sholat Jum'at, peserta didik me ...
...ang luas. Sebab pukul 12.00 WITA juga adalah jan ...
...istirahat tersebut hingga 15 menit sejak pukul 12.0 ...
...ya, peserta didik akan terlambat dalam hitung ...
...nit) pasca istirahat.¹¹³

¹¹¹ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajara) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

¹¹² “Wawancara Dengan Peserta Didik SMKN 1 Denpasar Pkl. 09.30 WITA Di Halaman Utama Sekolah.”

¹¹³ Kurnia PS, “Wawancara Dengan M. Zaini Di Musholla SMK Negeri 2 Denpasar.”

¹¹⁴ Cokorda Gede Anom Wiratmaja, “Wawancara Dengan Kepala SMA Negeri 7 Denpasar” (Ruang Kepala SMA Negeri 7 Denpasar, February 21, 2022).

arena secara demografis berbeda. Athalla m
k hari raya Idul Fitri, kita diliburkan biasanya H
a menjelang Idul Adha, hanya diliburkan wa
telah tanggal merah yang bertepatan dengan 10
M seperti biasa. Dan juga diikuti dengan aktiviti
it respon sekolah mengenai pelaksanaan peribad
uri dengan mewawancarai kepala sekolah ma
uanya welcome (terbuka) dan memberikan aks
. Semuanya mencoba membuka pintu seleb
didik, guru hingga karyawan yang hendak
adah.
juga bersepakat akan berlanjutnya ucapan salam
ama Islam diucapkan secara lisan oleh war

arena secara demografis berbeda. Athalla m
k hari raya Idul Fitri, kita diliburkan biasanya H
a menjelang Idul Adha, hanya diliburkan wa
telah tanggal merah yang bertepatan dengan 10
M seperti biasa. Dan juga diikuti dengan aktiviti
it respon sekolah mengenai pelaksanaan peribad
uri dengan mewawancarai kepala sekolah ma
uanya welcome (terbuka) dan memberikan aks
. Semuanya mencoba membuka pintu seleb
didik, guru hingga karyawan yang hendak
adah.
juga bersepakat akan berlanjutnya ucapan salam
ama Islam diucapkan secara lisan oleh war

arena secara demografis berbeda. Athalla m
k hari raya Idul Fitri, kita diliburkan biasanya H
a menjelang Idul Adha, hanya diliburkan wa
telah tanggal merah yang bertepatan dengan 10
M seperti biasa. Dan juga diikuti dengan aktiviti
it respon sekolah mengenai pelaksanaan peribad
uri dengan mewawancarai kepala sekolah ma
uanya welcome (terbuka) dan memberikan aks
. Semuanya mencoba membuka pintu seleb
didik, guru hingga karyawan yang hendak
adah.
juga bersepakat akan berlanjutnya ucapan salam
ama Islam diucapkan secara lisan oleh war

arena secara demografis berbeda. Athalla m
k hari raya Idul Fitri, kita diliburkan biasanya H
a menjelang Idul Adha, hanya diliburkan wa
telah tanggal merah yang bertepatan dengan 10
M seperti biasa. Dan juga diikuti dengan aktiviti
it respon sekolah mengenai pelaksanaan peribad
uri dengan mewawancarai kepala sekolah ma
uanya welcome (terbuka) dan memberikan aks
. Semuanya mencoba membuka pintu seleb
didik, guru hingga karyawan yang hendak
adah.
juga bersepakat akan berlanjutnya ucapan salam
ama Islam diucapkan secara lisan oleh war

arena secara demografis berbeda. Athalla m
k hari raya Idul Fitri, kita diliburkan biasanya H
a menjelang Idul Adha, hanya diliburkan wa
telah tanggal merah yang bertepatan dengan 10
M seperti biasa. Dan juga diikuti dengan aktiviti
it respon sekolah mengenai pelaksanaan peribad
uri dengan mewawancarai kepala sekolah ma
uanya welcome (terbuka) dan memberikan aks
. Semuanya mencoba membuka pintu seleb
didik, guru hingga karyawan yang hendak
adah.
juga bersepakat akan berlanjutnya ucapan salam
ama Islam diucapkan secara lisan oleh war

Sebagai layanan peribadatan, ketiga sekolah yang menjadi lokus penelitian kami mengenai bagaimana kepala sekolah mempersilahkan peserta didik dan guru PAI untuk mengekspresikan penguatan dalam beribadah. Kami berargumen bahwa peran guru PAI di sekolah menjadi sangat sentral dalam menganut ritme kegiatan keagamaan Islam. Sebagaimana penuturan Zaini, “bahwasanya kita yang berada disini, masih bisa bertahan dengan solidaritas kami”¹¹⁷. Juga Margiyanto dalam pembicaraannya dengan tegas menerangkan,” kami selalu menanamkan untuk menjaga nama baik agama. Sehingga tidak sampai merusak fasilitas dan kegiatan yang sudah diizinkan oleh sekolah kepada kita”¹¹⁸.

Selain itu, peneliti melihat bagaimana kekuatan senioritas guru PAI di SMA Negeri 2 Denpasar dikarenakan masa kerjanya sudah lama, dan sudah membangun komunikasi, serta kekuatan hubungan kedinasan, segala bentuk aktivitas sekolah terkait keagamaan Islam diserahkan secara sepenuhnya oleh guru PAI¹¹⁹. Termasuk juga persoalan bagaimana kepala SMK Negeri 1 Denpasar menyatakan yang sama, yaitu segala bentuk aktivitas penunjang PAI akan diserahkan kepada guru PAI dengan sepenuhnya, yang juga sesuai dengan takaran dan kekuatannya.¹²⁰

¹¹⁷ Kurnia PS, “Wawancara Dengan M. Zaini Di Musholla SMK Negeri 2 Denpasar.”

¹¹⁸ Margiyanto, "Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar."

¹¹⁹ Alaiika M. Bagus Kurnia PS, “Observasi Di SMA Negeri 2 Denpasar Pkl. 12.00 WITA” (Hasil Observasi Penelitian Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya 2022, Pebruari 2022).

¹²⁰ Alaiika M. Bagus Kurnia PS, “Wawancara Dengan Kepala SMK Negeri 1 Denpasar Pkl. 10.00 WITA: I Ketut Suparsa” (Wawancara Penelitian Disertasi 2022, February 21, 2022).

BAB IV

AKTUALISASI LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI SISWA MUSLIM MINORITAS DI DENPASAR BALI

Beberapa item dalam sub bab analisis penelitian yang akan dibahas mengenai aktualisasi layanan Pendidikan Islam bagi peserta didik muslim di SMA/ SMK umum di Denpasar, Bali, peneliti akan memaparkan hasil analisis dari beberapa item dibawah ini. Namun perlu ada beberapa pengertian yang dijadikan pengantar dari pembahasan bab dibawah ini. Sebagaimana makna dari aktualisasi, secara sederhana Abraham Maslow mengartikan sebagai suatu kebutuhan dan pencapaian tertinggi manusia¹ sehingga bentuk ikhtiar dari layanan Pendidikan Islam yang ditujukan kepada pelanggan atau *customer* muslim yang berada ditengah-tengah mayoritas Hindu di lingkungan sekolah umum.

Demikian perlu adanya suatu gambaran bagaimana peserta didik nonmuslim yang melakukan proses pembelajaran agamanya ditengah-tengah mayoritas muslim, seperti di Jawa, Sumatera dan atau di Kalimantan. Mereka mencoba menyesuaikan diri, melakukan pembelajaran di ruang berbeda, dan atau bahkan berada pada jam non efektif sehingga perlu atas jawaban peraturan perundang-undangan yang tertuang pada pasal 31 tahun 1945² mengenai bagaimana negara memenuhi hak setiap warga untuk mendapatkan Pendidikan yang sesuai dengan keyakinan dalam keberagamaannya.

Dalam pemenuhan tersebut tentunya harus melalui upaya penyetaraan, meskipun secara kebutuhan disesuaikan dengan kuantitas berdasarkan agama atau keyakinan yang dianutnya. Sangat tidak seimbang apabila ditengah-tengah warga sekolah menganut agama Islam, akan tetapi sekolah membangun gereja atau tempat ibadah lain yang jumlahnya sangat sedikit sehingga perlu dalam hal ini bagaimana

¹ Siti Muazaroh and Subaidi Subaidi, “Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah),” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019): 17–33. Lihat juga Hendro Setiawan, “Manusia Utuh. Sebuah Kajian Atas Pemikiran Abraham Maslow.” (Penerbit PT Kanisius, 2014).

² Ahmad SYAUQI, “Analisa Implementasi Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 Tentang Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20 Persen” (PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2009).

A. Sistem Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai penanda aktualisasi layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim minoritas di Denpasar Bali di antaranya ketersediaan guru, layanan sarana prasarana, layanan administrasi, layanan waktu, dan layanan kurikulum (perencanaan hingga evaluasi).

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 1 dijelaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini

Dalam konteks Bali, harus diakui guru PAI masih sangat minim.⁴ Minimnya ketersediaan guru PAI di Bali dikonfirmasi oleh Mahmudi selaku kepala bidang (disebut: Kabid) Dirjen Pendis Kemenag Provinsi Bali. Ia menyebutkan bahwa jumlah guru di kota Denpasar perkiraan 480 guru yang menyebar di semua jenjang.⁵ Hal ini juga ditambahkan secara rigid melalui data yang diberikan oleh Ninik, dari 66 SMA/ SMK Umum⁶, tidak semua guru Pendidikan Islam di kota Denpasar terdata secara lengkap pada *database* daftar guru PAI SMA/ SMK yang dikelola oleh Kementerian Agama Kota Denpasar. Dari data yang penulis kumpulkan, terdapat 11 daftar guru PAI SMA/ SMK Umum, sehingga dapat dipastikan jumlah guru yang terdaftar dan ber-*homebase* sebagai guru SMA/ SMK terdapat 11 dan 55 guru belum terlacak pada *database*.

⁶ Denpasar Kota, "Identitas Sekolah SMA/ SMK Di Wilayah Kota Denpasar."

Selain itu, dari 66 SMA/ SMK yang tersebar di kota Denpasar, hanya terdapat 11 guru PAI saja. Ninik juga menerangkan, ada juga sekolah yang sudah mengusulkan untuk pengadaan guru PAI pada kita, namun sekolah yang mengusulkan (disebut: SMA/ SMK Negeri) tidak menganggarkan nya dan atau bahkan tidak adanya anggaran untuk pengadaan guru di lingkungan kementerian agama Denpasar. Juga demikian terkadang ada sekolah yang secara fakta dilapangan tidak ada sama sekali guru PAI sehingga yang mengisi waktu PAI di kelas adalah guru yang beragama Hindu dan peserta didik hanya ditugaskan untuk mengisi LKS.⁷ Demikian juga kondisi guru PAI SMA/ SMK di Denpasar, peneliti juga mendapatkan informasi dari M. Zaini, bahwasanya jumlah guru PAI terdapat 23 guru yang mengampu di SMA/ SMK. Namun juga tidak semuanya ber-Satminkal (*homebase*) di SMA/ SMK baik di swasta maupun negeri.

Dalam hal ini, Amin Haedari selaku Direktur PAI Sekolah Umum Kementerian Agama, berkomentar terkait kebutuhan akan pengangkatan PNS Guru Agama di Kementerian Agama. Berdasarkan data terbaru, saat ini guru PAI di seluruh Indonesia sekitar 198 ribu. Jauh dari itu, ternyata kebutuhan guru PAI jauh lebih banyak. Kalkulasinya, menurut Amin, sudah termasuk sekolah dengan lebih dari satu guru PAI. Selain itu, alokasi pengangkatan guru PAI menjadi kendala utama. Inilah yang merupakan penyebab utama kekurangan guru PAI di Indonesia.⁸

Dalam pada itu, beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama, tidak memiliki alokasi semacam itu. Karena itu, tidak mengherankan jika selama ini kekurangan guru PAI terbantuan dengan hadirnya guru honorer. Harus diakui, guru honorer sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Di sisi lain, hampir 90 persen guru PAI honorer

⁷ Surani, “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA.”

⁸ Fuji Pratiwi, “Jumlah Guru PAI Minim”, *Republika.com*, (29 Maret 2014), dalam <https://www.republika.co.id/berita/n2nmpu/jumlah-guru-pai-minim>, diakses 18 Oktober 2022.

mendapatkan SK tersebut.

in juga menyampaikan keprihatinannya atas innya dibayarkan sesuai kemampuan sekolah PBN. Tahun ini rencananya Kemenag akan atatan guru agama. Bali, Nusa Tenggara a provinsi yang sangat kekurangan guru Jawa pun masih kekurangan guru PAI. Se nan pendidikan agama bagi siswa, Amin yang ditimbulkan, termasuk kebingungan ng pelajaran agama. Dalam keadaan terse ormas keagamaan dan seluruh stakehold Mereka, menurut Amin, dapat menambal k sekolah formal¹¹

mendapatkan SK tersebut.

in juga menyampaikan keprihatinannya atas innya dibayarkan sesuai kemampuan sekolah PBN. Tahun ini rencananya Kemenag akan atatan guru agama. Bali, Nusa Tenggara a provinsi yang sangat kekurangan guru Jawa pun masih kekurangan guru PAI. Se nan pendidikan agama bagi siswa, Amin yang ditimbulkan, termasuk kebingungan ng pelajaran agama. Dalam keadaan terse ormas keagamaan dan seluruh stakehold Mereka, menurut Amin, dapat menambal k sekolah formal¹¹

mendapatkan SK tersebut.

n juga menyampaikan keprihatinannya atas
inya dibayarkan sesuai kemampuan sekolah
PBN. Tahun ini rencananya Kemenag aka
katan guru agama. Bali, Nusa Tenggara T
a provinsi yang sangat kekurangan guru P
Jawa pun masih kekurangan guru PAI. Se
nan pendidikan agama bagi siswa, Amin
yang ditimbulkan, termasuk kebingungan
ng pelajaran agama. Dalam keadaan terse
ormas keagamaan dan seluruh stakehold
Mereka, menurut Amin, dapat menambal k
sekolah formal¹¹

mendapatkan SK tersebut.

Peneliti juga menyampaikan keprihatinannya atas kenyataan ini dikarenakan sesuai kemampuan sekolah tersebut. PBN. Tahun ini rencananya Kemenag akan menambah guru agama. Bali, Nusa Tenggara Timur, dan provinsi yang sangat kekurangan guru PAI. Sedangkan Jawa pun masih kekurangan guru PAI. Sehingga pendidikan agama bagi siswa, Amin mengatakan, menimbulkan kebingungan bagi siswa dalam mempelajari pelajaran agama. Dalam keadaan tersebut, organisasi keagamaan dan seluruh stakeholder pendidikan, menurut Amin, dapat menambal kekurangan tersebut.

sekolah formal¹¹

mendapatkan SK tersebut.

in juga menyampaikan keprihatinannya atas innya dibayarkan sesuai kemampuan sekolah PBN. Tahun ini rencananya Kemenag akan atatan guru agama. Bali, Nusa Tenggara a provinsi yang sangat kekurangan guru Jawa pun masih kekurangan guru PAI. Se nan pendidikan agama bagi siswa, Amin yang ditimbulkan, termasuk kebingungan ng pelajaran agama. Dalam keadaan terse ormas keagamaan dan seluruh stakehold Mereka, menurut Amin, dapat menambal k sekolah formal¹¹

mendapatkan SK tersebut.

Peneliti juga menyampaikan keprihatinannya atas kenyataan ini dikarenakan sesuai kemampuan sekolah tersebut. PBN. Tahun ini rencananya Kemenag akan menambah guru agama. Bali, Nusa Tenggara Timur, dan provinsi yang sangat kekurangan guru PAI. Sedangkan Jawa pun masih kekurangan guru PAI. Sehingga pendidikan agama bagi siswa, Amin mengatakan, menimbulkan kebingungan bagi siswa dalam mempelajari pelajaran agama. Dalam keadaan tersebut, organisasi keagamaan dan seluruh stakeholder pendidikan, menurut Amin, dapat menambal kekurangan tersebut.

sekolah formal¹¹

Jadi, secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

¹⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, 2005.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di samping itu, tepat tahun 2019 (sebelum pandemi covid-19 merebak), penulis mendapati SMKN 1 Denpasar sudah memiliki tempat wudhu yang cukup layak, dengan 4 saluran air. Kemudian penunjang pembiasaan keagamaan tersebut juga didukung oleh pengadaan tempat sholat atau musholla. Yang berada diantara dua kelas, terdapat lorong sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan sholat, kajian dan ibadah lainnya.¹⁷ Sebagaimana pernyataan Margiyanto “kita wajib mensyukuri dengan jumlah kuantitas komunitas muslim di sekolah ini yang sangat banyak nomer dua setelah hindu, namun kita sudah diberikan tempat ibadah yang seperti ini”.¹⁸

Di sisi lain, dari keempat lokus sekolah yang peneliti teliti (SMKN 1 Denpasar, SMAN 7 Denpasar, SMKN 2 Denpasar, SMAN 2 Denpasar) terdapat beberapa kesamaan. SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2, dalam hal ini, memiliki kesamaan. Guru difasilitasi dan diberikan tempat yang memadai untuk mengajar di kelas dan dilaksanakan pada jam efektif mengingat jumlah ruang kelasnya banyak. Juga tempat ibadahnya seperti musholla juga didapati dalam kondisi ada dan layak, meskipun mengecil di dalamnya. Sedangkan tempat belajarnya sebagaimana di SMK Negeri 1 Denpasar, yaitu di satu kelas besar dan dilaksanakan di luar jam efektif.

Di lain sisi, terkait pelaksanaan pembelajaran, terdapat sekolah yang tetap melaksanakan kegiatan PBM dengan menempatkan jam mata pelajaran PAI didalam jam efektif. Moh. Zaini selaku guru PAI di lingkungan SMKN 2 Denpasar menambahkan, bahwasanya ia mengajar jam

¹⁷ Kurnia PS, “Observasi Penelitian Di SMKN 1 Denpasar.”

¹⁸ Margiyanto, “Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar.”

Ketiga, layanan administrasi. Administrasi Pendidikan memiliki tujuan di antaranya agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi banyak hal diantaranya komponen siswa, pegawai guru, sarana/prasarana, organisasi, pembiayaan, tatausaha dan hubungan sekolah dan masyarakat, agar terlaksananya proses pendidikan yang efektif yang menunjang tercapainya tujuan dan sasaran pendidikan di sekolah.²⁰ Dalam konteks ini, sebagaimana pengambilan data sebelumnya, guru PAI di SMK Negeri 2 Denpasar ketika dilakukan wawancara mengenai kesiapan mengajar, M. Zaini menunjukkan file dan persiapan pembelajaran dengan baik dan semua perangkat perencanaan pembelajaran sudah tersedia dengan lengkap, seperti silabus, program tahunan, program semester, RPP, hingga perangkat evaluasi. Namun, ketika pelaksanaan observasi, M. Zaini sebagai pengampu mata pelajaran tidak memunculkan tampilan tujuan pembelajaran hingga indikator ketercapaian peserta didik sehingga peneliti pada saat berada di kelas tidak menyaksikannya. Demikian dengan perangkat administratif yang biasanya dibawa oleh guru di setiap kelas, peneliti tidak mendapatinya.²¹

²¹ Muhammad Zaini, “Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X di SMK Negeri 2 Denpasar” (SMK Negeri 2 Denpasar, Mei 2022).

ipandu dengan tata cara agama Hindu sehingga m
n mencoba menyelesaikan doanya masing-masi
atnya, kemudian berdiri karena prosesi doa yang
u adalah dengan berdiri.²²
n perbedaannya adalah dinyatakan oleh Galih
muslim di SMA Negeri 7 Denpasar, ia mendapat
doa secara muslim, namun selepas berdoa, mereka
an diam, melainkan dengan duduk di tempat sa
instruksi untuk berdiri, maka selepas menyelesa
r, ia akan ikut berdiri dan diam sebagai pengh
sinya.²³ Di samping itu, peneliti mencoba m
h guru PAI juga memberikan tulisan berupa ca
duan doa sebelum belajar yang diberikan kepa

ipandu dengan tata cara agama Hindu sehingga m
n mencoba menyelesaikan doanya masing-masi
atnya, kemudian berdiri karena prosesi doa yang
u adalah dengan berdiri.²²
n perbedaannya adalah dinyatakan oleh Galih
muslim di SMA Negeri 7 Denpasar, ia mendapat
doa secara muslim, namun selepas berdoa, mereka
an diam, melainkan dengan duduk di tempat sa
instruksi untuk berdiri, maka selepas menyelesa
r, ia akan ikut berdiri dan diam sebagai pengh
sinya.²³ Di samping itu, peneliti mencoba m
h guru PAI juga memberikan tulisan berupa ca
duan doa sebelum belajar yang diberikan kepa

ipandu dengan tata cara agama Hindu sehingga m
n mencoba menyelesaikan doanya masing-masi
atnya, kemudian berdiri karena prosesi doa yang
u adalah dengan berdiri.²²
n perbedaannya adalah dinyatakan oleh Galih
muslim di SMA Negeri 7 Denpasar, ia mendapat
doa secara muslim, namun selepas berdoa, mereka
an diam, melainkan dengan duduk di tempat sa
instruksi untuk berdiri, maka selepas menyelesa
r, ia akan ikut berdiri dan diam sebagai pengh
sinya.²³ Di samping itu, peneliti mencoba m
h guru PAI juga memberikan tulisan berupa ca
duan doa sebelum belajar yang diberikan kepa

ipandu dengan tata cara agama Hindu sehingga m
n mencoba menyelesaikan doanya masing-masi
atnya, kemudian berdiri karena prosesi doa yang
u adalah dengan berdiri.²²
n perbedaannya adalah dinyatakan oleh Galih
muslim di SMA Negeri 7 Denpasar, ia mendapat
doa secara muslim, namun selepas berdoa, mereka
an diam, melainkan dengan duduk di tempat sa
instruksi untuk berdiri, maka selepas menyelesa
r, ia akan ikut berdiri dan diam sebagai pengh
sinya.²³ Di samping itu, peneliti mencoba m
h guru PAI juga memberikan tulisan berupa ca
duan doa sebelum belajar yang diberikan kepa

Selanjutnya, mengenai materi mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti yang diberikan oleh guru. Sebagaimana pada saat FGD, banyak peserta didik yang tidak mengetahui materi apa sajakah yang sudah diberikan dan disampaikan oleh guru sehingga pada proses pembelajaran nya, dapat dipastikan guru tidak menyampaikan maksud dan tujuan materi apa yang akan disampaikan dan tepatnya tema apa yang akan dipelajari oleh peserta didik.

Keempat, layanan waktu. Layanan waktu pembelajaran dalam hal ini adalah jam pelajaran PAI. PAI di dalam kurikulum Indonesia masuk pada kelompok mata pelajaran wajib. Dan oleh karena itu, alokasi jam pelajaran PAI setiap minggu nya adalah 3 jam di mana per jamnya berdurasi 45 menit. PAI sebagai bagian Kelompok Mata pelajaran Wajib merupakan bagian dari pendidikan umum yaitu pendidikan bagi semua warganegara bertujuan memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa.

²⁴ Kurnia PS, “Focus Group Discussion Bersama Peserta Didik SMA/ SMK Di Denpasar, Bali.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kelima, layanan kurikulum (perencanaan hingga evaluasi). Terkait layanan ini sekurangnya terdapat tiga paradigma; kurikulum sebagai substansi atau perencanaan mengajar, kurikulum sebagai sistem dan kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai substansi berarti kurikulum diposisikan sebagai ruh proses belajar mengajar (PBM). Tanpa kurikulum bagaimana mungkin PBM dapat diselenggarakan. Selanjutnya,

²⁶ Margiyanto, “Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar.” Hal tersebut juga terjadi pada Kholis, “Wawancara Dengan Nurkholis Sebagai Guru PAI Di SMA Negeri 4 Denpasar.”

Mengacu dari ketiga paradigma tersebut, maka kurikulum merupakan rancangan pendidikan, yang berisi serangkaian proses kegiatan belajar siswa. Dengan demikian secara implisit kurikulum memiliki tujuan yaitu tujuan pendidikan. Selain itu, terdapat banyak faktor yang berkelindan dengan pelaksanaan pendidikan, seperti halnya pendidik, peserta didik, orang tua/ wali peserta didik dan lingkungan masyarakat.

Sebagaimana aktivitas pembelajaran yang dilakukan sebagaimana mestinya, efektivitas pembelajaran agar terarah dan memiliki ukuran keberhasilan, maka perencanaan pembelajaran menjadi desain awal sebelum menjalankan aktivitas pembelajaran. Sebagaimana rumah tidak akan pernah tampak indah dan kokoh secara konstruksi, ketika ia tidak didesain dan direncanakan secara matang.²⁸ Demikian pula kemampuan mengatur dan menjaga lingkungan kelas yang baik. Sehingga dalam proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif, aktif, menyenangkan dan dapat terkenang dalam setiap aktivitas diluar kelasnya sehingga perlu diperhatikan, Ligia Fernanda, dkk²⁹ menetapkan tiga prinsip yang harus dipegang bagi para guru sebagai bentuk mengendalikan proses pembelajaran yang baik, yaitu persiapan pembelajaran (perencanaan); organisasi kelas antara lain; kontrak belajar, komitmen belajar, penyampaian materi, hingga penugasan sampai dengan refleksi materi; dan perlu menguasai manajemen waktu pembelajaran.

²⁸ Bararah, “Efektifitas Perencanaan Pembelajaran Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam Di Sekolah.”

[illegible]

Deskripsi aktivitas pembelajaran PAI di SMA/ SMK Negeri di wilayah Denpasar, pada saat penajakan FGD MGMP Guru PAI kota Denpasar, mereka mengungkapkan bagaimana kondisi aktivitas pembelajaran PAI di sekolahnya masing-masing, dimulai dari persiapan perangkat pembelajaran, nyaris semua guru PAI hanya mengandalkan perangkat pembelajaran seperti Silabus, RPP, Program Tahunan (Prota), Program Semester (Progmes) adalah hasil rumusan dari MGMP PAI Provinsi Bali sehingga tidak ada pengembangan perencanaan pembelajaran didalamnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah SDM guru PAI yang kurang.³¹ Namun terdapat salah satu guru PAI yang dituntut oleh sekolah untuk mengembangkan RPP nya dengan format yang berbeda. Karena menurutnya, sekolah tersebut adalah sekolah rujukan atau sekolah penggerak sebagaimana pada kurikulum Merdeka Belajar yang digagas oleh Kemendikbud,³² yaitu mewujudkan visi dan misi pendidikan di Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar secara holistik, yaitu mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi), nonkognitif (karakter), juga dibimbing oleh SDM yang unggul.³³

³³ fahrian Firdaus Syafi'i, "Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak," In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 2022.

dalam hal ini peneliti berkesimpulan bahwasannya penelitian ini dimulai dari Program Tahunan, Program Semester, dan Program oleh satu orang, dan dipakai untuk semua SMA/ S

dalam hal ini peneliti berkesimpulan bahwasannya penelitian ini dimulai dari Program Tahunan, Program Semester, dan Program oleh satu orang, dan dipakai untuk semua SMA/ S

³⁵ SMK Negeri 2 Denpasar, “Dokumentasi Perangkat Pembelajaran SMK Negeri 2 Denpasar.”

³⁷ Kurnia PS, "Wawancara Dengan M. Zaini Di Musholla SMK Negeri 2 Denpasar."

Terakhir yang menjadi pembahasan dalam aktivitas pembelajaran PAI adalah evaluasi. Peneliti dalam kesempatan FGD kemarin seluruh guru PAI menyepakati terkait soal PTS (Penilaian Tengah Semester) dan PAS (Penilaian Akhir Semester) adalah hasil dari pembuatan naskah evaluasi MGMP PAI Provinsi Bali. Sehingga, dapat dikatakan hampir jarang sekali guru PAI mengembangkan dengan kemampuannya sendiri. Di sisi lain, terdapat alat pengembangan evaluasi pembelajaran lainnya, yaitu dengan mengembangkan bank soal melalui evaluasi harian (ujian harian). Demikian juga semenjak diberlakukannya test CBT sebagai media perangkat evaluasi pembelajaran³⁹, semua sekolah negeri baik SMA ataupun SMK sudah melakukannya sejak sebelum pandemic covid-19 hingga saat ini.⁴⁰

³⁸ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

³⁹ Kholis, “Wawancara Dengan Nurkholis Sebagai Guru PAI Di SMA Negeri 4 Denpasar.”

⁴⁰ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

g Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa di Kota Denpasar Bali

g Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa ar Bali

na pun berbeda. Apalagi pada daerah ma
n sangat jauh berbeda.⁴² Masyarakat m
mayoritas, secara normatif, mereka akan d
ruh akan mendapatkan pelayanan yang
masih terdapat beberapa evaluasi. Juga
ada pada lingkungan minoritas, yang pasti
berekspektasi terhadap tidak maksimal
Islam.

ada sub bab ini penulis akan menguak
man layanan ideal PAI, apakah sam

da sub bab ini penulis akan menguak
man layanan ideal PAI, apakah sam

⁴¹ Saihu, Made. *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

⁴² Gultom, *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia*.

Pendidikan Islam minoritas di Bali dengan Jawa, seperti yang terlihat pada momentum peringatan hari besar Islam (PHBI) sebagai pembiasaan atau edukasi, layanan spiritual, dan lain sebagainya.

Istilah “minoritas” diartikan sebagai bagian dari penduduk yang beberapa ciricirinya berbeda dan umumnya mendapat perlakuan berbeda. Beberapa ciri-ciri yang berbeda tersebut bisa berupa bentuk fisik, seperti warna kulit dan bahasa. Menurut Theodorson & Theodorson, kelompok minoritas atau minority groups yaitu kelompok-kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau suku bangsa, yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka (prejudice) atau biasa dikenal dengan istilah diskriminasi.

Adapun pengertian minoritas menurut Pelapor Khusus PBB untuk perlindungan hak minoritas, Francesco Capotorti (Solikhin, 2016), yaitu: “*A group numerically inferior to the rest of the population of a state, in a non dominant position, whose members being nationals of the state-posses ethnic, religion or linguistic characteristic differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly a sense of solidarity, direct toward preserving their culture, traditions, religion, or language*”.⁴³ Minoritas dimaksudkan sebagai: *pertama*, secara numerik jumlahnya lebih kecil dari sisa populasi lainnya dalam suatu negara. *Kedua*, posisinya tidak dominan dalam konteks negara. *Ketiga*, adanya perbedaan etnik, agama, dan budaya dengan populasi lainnya. *Keempat*, memiliki solidaritas agama, bahasa, tradisi, budaya, dan kepentingan untuk meraih persamaan di muka umum dengan populasi di luarnya.⁴⁴

Dari beberapa studi menunjukkan betapa keberadaan minoritas selalu dihadapkan pada kondisi yang penuh dengan ketidakadilan sosial (*social*

⁴³ Solikhin, Ahmad. "Islam, Negara, Dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas." *Journal of Governance* 1.1 (2016).

⁴⁴ Agustin, Rizkika, Kasuwi Saiban, and Mufarrihul Hazin. "Problematika Pendidikan Islam di Daerah Minoritas Muslim." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21.02 (2021): 153-160.

Berkaitan dengan keadilan sosial, Cribb dan Gewirtz mengidentifikasi tiga jenis keadilan – distributif, budaya dan asosiasi.⁴⁷ Keadilan distributif sebagian besar berkaitan dengan bagaimana barang dan jasa didistribusikan diantara individu dan hanya akan mungkin jika tidak adanya eksploitasi, marginalisasi, dan perampasan dapat dipastikan. Definisi Rawls tentang keadilan sosial adalah salah satu konsep utama yang diklasifikasikan dalam jenis ini.⁴⁸ Keadilan budaya terjadi ketika setiap budaya dalam masyarakat dihargai dan diakui sejauh tidak ada dominasi budaya dan tidak ada rasa tidak hormat terhadap budaya manapun. Keadilan asosiasional dipandang sebagai: “tidak adanya pola pergaulan antar individu dan antar kelompok yang menghalangi sebagian orang untuk berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kondisi di mana mereka hidup dan bertindak”.⁴⁹

⁴⁹ Power, Sally, and Sharon Gewirtz. "Reading education action zones." *Journal of Education Policy* 16.1 (2001): 39-51.

berkaitan dengan hak-hak dasar setiap man
esenjangan ekonomi atau kelas, jenis kelamin,
an, agama, usia, orientasi seksual, kecac
onteks pendidikan agama, ketidakadilan sosia
imuti insan pelaku pendidikan itu sendiri. Misal
oritas mengalami diskriminasi dalam akses terha
perampasan dari praktik keagamaannya di seko
ni bukan jumlah penduduk beragama yang lebih
Indonesia, tetapi minoritas di tempat-tempat tert
mantan Tengah, Muslim di Bali, Muslim di Nus
di Papua atau bahkan dalam konteks sekolah
perbandingan, si sebuah sekolah negeri di Batam

berkaitan dengan hak-hak dasar setiap man
esenjangan ekonomi atau kelas, jenis kelamin,
an, agama, usia, orientasi seksual, kecac
onteks pendidikan agama, ketidakadilan sosia
imuti insan pelaku pendidikan itu sendiri. Misal
oritas mengalami diskriminasi dalam akses terha
perampasan dari praktik keagamaannya di seko
ni bukan jumlah penduduk beragama yang lebih
Indonesia, tetapi minoritas di tempat-tempat tert
mantan Tengah, Muslim di Bali, Muslim di Nus
di Papua atau bahkan dalam konteks sekolah
perbandingan, si sebuah sekolah negeri di Batam

⁵¹ M. Greene, Introduction: Teaching for Social Justice, in W. Ayers, J. A. Hunt & T. Quinn (eds.), *Teaching for Social Justice* (New York: Teachers College Press, 1998), pp. xxvii–xlvii.

⁵² Raihani, Raihani. "Islamic schools and social justice in Indonesia: A student perspective." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 50.2 (2012): 279-301.

...nya terjadi pada siswa dari agama minoritas yang berlatar belakang etnis yang berbeda dengan mayoritas. Pertanyaan “dari mana asalmu” kepada siswa merupakan praktik diskriminasi dalam layanan akademik. Hal ini berbeda dengan Raihani dan peneliti minoritas muslim di Bali, khususnya siswa minoritas muslim di SMA/SLB swasta, penulis menemukan bahwa siswa tersebut mendapatkan layanan Pendidikan Islam (Pendidikan Islam) secara memadai di sana sangatlah minim. Aktualisasi PAI di sekolah tersebut. Pendidikan Islam secara ekspresif dan konfektif meliputi kurikulum, guru, stakeholders terkait maupun kebijakan agama di Denpasar Bali itu sendiri. Penulis mengikuti bahasa Hendrik De Smet – secara

...nya terjadi pada siswa dari agama minoritas yang berlatar belakang etnis yang berbeda dengan mayoritas. Pertanyaan “dari mana asalmu” kepada siswa merupakan praktik diskriminasi dalam layanan akademik. Hal ini berbeda dengan Raihani dan peneliti minoritas lainnya yang berlatar belakang etnis mayoritas di Bali, khususnya siswa minoritas muslim di SMA/SLB swasta, penulis menemukan bahwa siswa tersebut mendapatkan layanan Pendidikan Islam (Pendidikan Islam) secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa akses PAI di sana sangatlah minim. Aktualisasi PAI di sekolah tersebut hanya sekedar Pendidikan Islam secara ekspresif dan konvensional. Untuk itu, perlu ada kajian tentang kurikulum, guru, stakeholders terkait maupun kebijakan agama di Denpasar Bali itu sendiri. Penulis mengikuti bahasa Hendrik De Smet – secara

...nya terjadi pada siswa dari agama minoritas yang berlatar belakang etnis yang berbeda dengan mayoritas. Pertanyaan “dari mana asalmu” kepada siswa merupakan praktik diskriminasi dalam layanan akademik. Hal ini berbeda dengan Raihani dan peneliti minoritas lainnya yang berlatar belakang etnis mayoritas di Bali, khususnya siswa minoritas muslim di SMA/SLB swasta, penulis menemukan bahwa siswa tersebut mendapatkan layanan Pendidikan Islam (Pendidikan Islam) secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa layanan PAI di sana sangatlah minim. Aktualisasi PAI di sekolah tersebut dapat dikatakan sebagai Pendidikan Islam secara ekspresif dan konfesis. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji kurikulum, guru, stakeholders terkait maupun kebijakan agama di Denpasar Bali itu sendiri. Secara metodologi, penelitian ini mengikuti bahasa Hendrik De Smet – secara

...nya terjadi pada siswa dari agama minoritas yang berlatar belakang etnis yang berbeda dengan mayoritas. Pertanyaan “dari mana asalmu” kepada siswa merupakan praktik diskriminasi dalam layanan akademik. Hal ini berbeda dengan Raihani dan peneliti minoritas muslim di Bali, khususnya siswa minoritas muslim di SMA/SLB swasta, penulis menemukan bahwa siswa tersebut mendapatkan layanan Pendidikan Islam (Pendidikan Islam) secara memadai di sana sangatlah minim. Aktualisasi PAI di sekolah tersebut. Pendidikan Islam secara ekspresif dan komprehensif dalam kurikulum, guru, stakeholders terkait maupun kebijakan agama di Denpasar Bali itu sendiri. Penulis mengikuti bahasa Hendrik De Smet – secara

...nya terjadi pada siswa dari agama minoritas yang berlatar belakang etnis yang berbeda dengan mayoritas. Pertanyaan “dari mana asalmu” kepada siswa merupakan praktik diskriminasi dalam layanan akademik. Hal ini berbeda dengan Raihani dan peneliti minoritas lainnya yang berlatar belakang etnis mayoritas di Bali, khususnya siswa minoritas muslim di SMA/SLB swasta, penulis menemukan bahwa siswa tersebut mendapatkan layanan Pendidikan Islam (Pendidikan Islam) secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa akses PAI di sana sangatlah minim. Aktualisasi PAI di sekolah tersebut hanya sekedar Pendidikan Islam secara ekspresif dan konvensional. Untuk itu, perlu ada kajian tentang kurikulum, guru, stakeholders terkait maupun kebijakan agama di Denpasar Bali itu sendiri. Penulis mengikuti bahasa Hendrik De Smet – secara

testimoni dari orang tua atau wali murid, maupun *stakeholders* terkait, dan ketersediaan guru PAI, serta perhatian dari dinas setempat.

Pertama, agenda program sekolah yang dinyatakan oleh para guru, mereka mengungkapkan mengenai agenda mingguan yang secara fakta dinyatakan mengenai kesempatan ibadah sholat Jum'at.⁵⁵ Kemudian kami menelusuri bagaimana jadwal pembelajaran peserta didik pada hari Jum'at. Sekolah pertama adalah SMK Negeri 1 Denpasar. Kami mewawancarai salah satu peserta didik muslim, Athalla mengungkapkan, "kami mengakhiri pembelajaran di dalam kelas pkl. 12.00 WITA, sedangkan sholat Jum'at biasanya berlangsung pukul 12.30 WITA. Kami rasa itu sudah mencukupi dalam melakukan persiapan sholat Jum'at".⁵⁶ Kemudian kami sebagai peneliti mencoba mengkonfirmasi kembali bagaimana jarak antara sekolah dengan masjid? Ia kembali mengungkapkan, bahwasanya radius antara sekolah dengan masjid adalah 1 km ke arah utara, kemudian 2 km ke arah kampung Jawa.

Kedua, layanan ibadah. Layanan ibadah adalah bentuk dukungan pembiasaan dalam peningkatan kompetensi afektif. Atau dapat dikatakan, pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah, akan menjadikan pembiasaan karakter sebagai pembiasaan yang dipraktikkan di luar sekolah⁵⁷. Pada paparan data yang didapat oleh peneliti, peneliti membagi pelayanan peribadatan yang dilakukan oleh peserta didik maupun warga sekolah muslim SMA/ SMK menjadi dua antara lain; tinjauan dari program pendukung lembaga dan regulasi lembaga.

⁵⁵ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

⁵⁶ "Wawancara Dengan Peserta Didik SMKN 1 Denpasar Pkl. 09.30 WITA Di Halaman Utama Sekolah."

⁵⁷ Mohammad Attaran, "Moral Education, Habituation, and Divine Assistance in View of Ghazali," *Journal of Research on Christian Education* 24, no. 1 (2015): 43–51; Lihat juga Suyatno et al., "Strategy of Values Education in the Indonesian Education System," *International Journal of Instruction* 12, no. 1 (January 2019): 607–624.

Bahkan di SMA Negeri 7 Denpasar, kepala sekolah sudah memberikan lampu hijau untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'at dan dhuhur secara berjamaah di aula sekolah.⁵⁹ Dan berbeda dengan lokus penelitian kami yang terakhir, yakni SMA Negeri 2 Denpasar. Di sana kita mendapati informasi bahwasanya ketika jam sholat jumat dimulai, pembelajaran masih diberlangsungkan sehingga peserta didik bisa menunaikan sholat Jum'at ketika mereka izin kepada guru kelas untuk menunaikannya.⁶⁰ Pertimbangan dari waka kurikulum adalah keputungan atau jam terakhir pembelajaran adalah pukul 14.00 WITA, sebagai ganti jam KBM hari sabtu yang diliburkan.

⁵⁸ Kurnia PS, “Wawancara Dengan M. Zaini Di Musholla SMK Negeri 2 Denpasar.”

⁵⁹ Wiratmaja, "Wawancara Dengan Kepala SMA Negeri 7 Denpasar."

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selain itu, guru PAI juga bersepakat akan berlanjutnya ucapan selamat hari raya kebesaran agama Islam diucapkan secara lisan oleh warga sekolah nonmuslim di dalamnya. Namun yang menjadi perbedaan di sini adalah mengenai regulasi, ada satu sekolah yang benar-benar memberikan regulasi larangan membangun dan melaksanakan aktivitas peribadatan lainnya kecuali dengan tujuannya adalah Pura⁶¹ sehingga dengan adanya regulasi tersebut, peserta didik diperkenankan untuk beribadah, namun dilakukan di luar kawasan sekolah. Juga demikian mengenai respon sekolah mengenai pelaksanaan peribadatan siswa. Semuanya mencoba membuka pintu selebar-lebarnya untuk peserta didik, guru hingga karyawan yang hendak melakukan aktivitas beribadah.

⁶¹ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

⁶³ Margiyanto, “Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar.”

Argumen Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

Pertama, Perumusan dan Persiapan Perangkat dan Perencanaan Pembelajaran. Temuan penulis menyatakan bahwa tidak semua guru SMA/SMK yang menjadi lokus penelitian ini lengkap administrasi pembelajaran nya. Hanya beberapa saja atau hitungan jari. M. Zaini, guru PAI di SMKN 2 Denpasar, misalnya, salah seorang guru PAI yang rajin, inisiatif, kreatif dan tertib administrasi pembelajaran nya. Hampir seluruh administrasi pembelajaran guru PAI di Denpasar berkiblat padanya. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Margiyanto dan H.M. Syamsuddin bahwa sejujurnya beliau hanya *copy paste* administrasi pembelajaran darinya. Zaini berhasil menunjukkan file dan persiapan pembelajaran dengan baik. Dan semua perangkat perencanaan pembelajaran sudah tersedia dengan lengkap, seperti silabus, program tahunan, program semester, RPP, hingga perangkat evaluasi.

⁶⁵ Kurnia PS, “Wawancara Dengan Kepala SMK Negeri 1 Denpasar Pkl. 10.00 WITA: I Ketut Suparsa.”

Kedua, Ketersediaan Bahan Ajar. Begitu juga dengan bahan ajar, peneliti hanya mendapati buku Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai pegangan pelajaran PAI, dan tidak menemukan buku paket. Juga demikian kondisi peserta didik pada saat pembelajaran hanya 6 peserta didik yang menunjukkan kesiapan belajar dengan mengeluarkan buku LKS dan buku tulis catatan di atas mejanya, dari 34 peserta didik yang hadir di dalam kelas.⁶⁷ Hal ini diakui sendiri oleh M. Zaini, guru PAI di SMKN 2 Denpasar. Ia menyebutkan bahwa tidak banyak peserta didik muslim yang menerima buku ajar mengingat pembelajaran dilakukan sepulang sekolah. Zaini bahkan menyediakan buku paket sendiri namun tidak banyak yang membeli.

Bisa dikatakan bahwa ketersediaan bahan ajar di empat sekolah tersebut kurang memadai. Hal ini bisa dimaklumi karena pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik di SMK Negeri 1 Denpasar, misalnya, memiliki inisiatif secara mandiri dari kepengurusan intra sekolah; yakni sie kerohanian Islam (Rohis) sehingga pengadaan buku paket mata pelajaran PAI dan pengadaan buku LKS dikoordinasi oleh pengurus Rohis sebagai pelayan pengadaan buku bahan ajar. Namun dalam praktik pembelajarannya, juga dilakukan dengan metode yang sama seperti SMA Negeri 7 Denpasar, yaitu melalui *google classroom*.

⁶⁷ Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar."

praktik pembelajarannya, sebagai salah satu indikator K4, guru lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai Islam melalui kegiatan Rohis yang diadakan di PHBI. Sebagaimana pada penilaian K4 dengan melihat kehalalan bi Halal yang diadakannya. Juga penilaian K4 diluar kompetensi SMA/ SMK, yaitu dengan n

praktik pembelajarannya, sebagai (K4), guru lebih menekankan melalui kegiatan Rohis yang di Islam (PHBI). Sebagaimana p penilaian K4 dengan melihat kebi Halal yang diadakannya. Juga penilaian K4 diluar kompetensi SMA/ SMK, yaitu dengan n

praktik pembelajarannya, sebagai salah satu indikator K4, guru lebih menekankan pada pembelajaran melalui kegiatan Rohis yang dilaksanakan di Madrasah Islam (PHBI). Sebagaimana pada penelitian sebelumnya, penilaian K4 dengan melihat kehalalan dan kebersihan Halal yang diadakannya. Juga pada penelitian sebelumnya, penilaian K4 diluar kompetensi SMA/ SMK, yaitu dengan men-

praktik pembelajarannya, sebagai (K4), guru lebih menekankan melalui kegiatan Rohis yang di Islam (PHBI). Sebagaimana p penilaian K4 dengan melihat kebi Halal yang diadakannya. Juga penilaian K4 diluar kompetensi SMA/ SMK, yaitu dengan n

praktik pembelajarannya, sebagai (K4), guru lebih menekankan melalui kegiatan Rohis yang di Islam (PHBI). Sebagaimana p penilaian K4 dengan melihat kebi Halal yang diadakannya. Juga penilaian K4 diluar kompetensi SMA/ SMK, yaitu dengan n

Sejauh ini, peneliti belum sampai menemukan guru PAI di sekolah yang dilakukan observasi tersebut secara mandiri menyusun bahan ajar. Selain internal sekolah yang tidak memungkinkan terbentuknya kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI, juga sangat tidak mungkin dengan keterbatasan secara kuantitas SDM guru PAI di sekolah sehingga tidak memungkinkan untuk menciptakan ruang diskusi, kelompok kerja guru, demikian juga kondisi secara umum di Denpasar, sebagaimana penyajian data sebelumnya yang menunjukkan kekurangan guru PAI dan Budi pekerti di beberapa sekolah.

Dengan kata lain, tidak mungkin untuk melakukan penyusunan hingga pengembangan bahan ajar PAI, terkecuali apabila guru PAI SMA/ SMK bersama-sama pada tingkatan MGMP kota/ kabupaten menyusun dan merumuskan secara bersama dengan membentuk kelompok kerja, dan produktif menghasilkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik muslim secara umum, baik tercipta secara digital maupun tertulis.

Ketiga, kondisi Pembelajaran di dalam kelas: Kegiatan Pembuka, Motivasi dan Penyampaian Tujuan Materi. Sebagaimana penjelasan di muka bahwa KBM ini dilakukan dua waktu, yaitu di dalam jam efektif dan di luar jam efektif. Kegiatan belajar mengajar (KBM) PAI dan Budi Pekerti dilaksanakan diluar jam efektif sehingga pelaksanaannya dilakukan setelah pulang sekolah.⁷⁰ Sebagaimana normalnya aktivitas KBM, kegiatan

⁷⁰ Kegiatan belajar non efektif dilaksanakan pk. 13.00 WITA dengan rincian kegiatan, shalat zuhur berjama'ah, kemudian dilanjutkan memasuki kelas masing-masing dengan juga membawa

Namun di sini guru tidak menyampaikan tujuan materi yang akan dijelaskan. Demikian juga guru tidak mengintruksikan untuk membuka buku LKS atau buku catatannya. Akan tetapi, lebih mengarah pada penguatan karakter keislaman, seperti, mengajak peserta didik agar terampil memandikan jenazah, minimal memandikan jenazah orang tuanya; mengajak untuk istiqomah membaca al-Qur'an, hingga beberapa karakter sosial lainnya sehingga pada saat kegiatan belajar mengajar, peneliti tidak menemukan materi apakah yang akan diajarkan.

Keempat, strategi dan metode pembelajaran yang dilaksanakan. Ketika peneliti mencermati kegiatan pembelajaran, peneliti hanya mendapatkan metode yang digunakan oleh guru dengan dua model. *Pertama*, metode drill yang dilakukan pada saat memimpin doa awal pembelajaran dan membaca beberapa surat-surat pendek secara terpimpin, yaitu guru dan peserta didik membaca secara Bersama-sama. *Kedua*, metode ceramah, yang dilakukan oleh guru baik dimulai pada saat awal pembelajaran, seperti pengantar penyampaian materi, hingga akhir. Namun metode tanya jawab dilaksanakan sekitar 5% dari durasi waktu yang dilaksanakan, dengan tidak terstruktur, yaitu ketika ditengah penyampaian, peserta didik boleh bertanya ketika tidak mengetahuinya. *Ketiga*, penugasan. Selama pelaksanaan pembelajaran PAI yang dilakukan oleh peserta didik kelas X, tidak ada penugasan sama sekali, baik secara mandiri, maupun berkelompok baik

⁷¹ Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar."

tugas secara terstruktur (dikerjakan di kelas), maupun tidak terstruktur (dikerjakan di rumah atau PR).⁷²

Kelima, Kegiatan Penutup Pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sebagaimana kegiatan penutup, guru mengajak peserta didik untuk merefleksi materi yang disampaikan, juga mengajak peserta didik melaksanakan kegiatan doa akhir pembelajaran secara bersama-sama.⁷³ Demikian penulis mendapati satu hingga dua peserta didik meninggalkan kelas sebelum jam pembelajaran berakhir. Padahal mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, normalnya dalam satu pekan sekitar 3 x 45 menit. Namun dalam praktiknya, hanya dilaksanakan pada pkl. 13.00 sampai 14. 00 WITA. Yang artinya hak belajar PAI bagi peserta didik kurang dari perspektif durasi waktu. Demikian juga dengan kejenuhan peserta didik dalam menjalani pembelajaran diluar jam KBM yang juga pada hakikatnya tidak efektif sehingga tidak memungkinkan secara maksimal dilaksanakan kegiatan KBM.

Keenam, Fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar PAI dan Budi Pekerti. Demikian juga dengan kurangnya referensi keagamaan Islam baik yang tersedia di perpustakaan, hingga beberapa fasilitas kelas. Sehingga mereka hanya mendapatkan pengalaman belajar pembiasaan shalat di ruangan khusus, kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) diluar agenda sekolah, hingga fasilitas wudhu untuk kebutuhan shalat warga sekolah.⁷⁴ Hal tersebut dengan disediakannya ruang kelas secara normal sebagaimana kelas belajar untuk keperluan KBM pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Meskipun secara ideal, saat ini pelaksanaan KBM dalam satu kelas maksimal 20 peserta didik. Karena setiap kelas hanya terdapat 4 sampai 5

⁷² Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar".

⁷³ Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar".

⁷⁴ Zaini, "Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar".

Sebagai catatan atas argumen layanan pendidikan Islam dalam penelitian ini adalah selama ini Kabid PAI Kanwil Kemenag, juga sama halnya dengan Kabid PAI Kemenag Kota Denpasar, belum pernah melayangkan surat resmi edaran mengenai kebutuhan guru PAI atau hal yang berkaitan dengan PAI kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Sehingga semuanya hanya berupa usulan melalui lisan, yang mana tidak ada bukti dan landasan kuat untuk mengadakan program baik pengadaan guru atau pendistribusian. Maka perlu ada riset berbentuk partisipatif dari kabid PAI agar ada perbaikan.⁷⁶

1. Dasar Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas

Dasar layanan Pendidikan Islam bagi siswa muslim minoritas di Denpasar Bali dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dari aspek pemerintah dan civil society. Namun, sebelum itu, patut kami uraikan terlebih dahulu bahwa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yang memuat amanat bahwa tujuan dibentuknya Negara Indonesia antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar Pancasila. Kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa ini menjadi tugas pokok negara dan pemerintah kepada seluruh entitas bangsa ini.

Kewajiban mengajarkan pendidikan agama bagi peserta didik pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan jauh sebelum lahir Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal

⁷⁵ Zaini, “Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar.”

⁷⁶ Wawancara dengan Jagra selaku Kabid SMA, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

ional Republik Indonesia tidak menyebutkan seko
1989, pendidikan agama diwajibkan di sekolah
mua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Bahkan
esia Tahun 2003 lebih jelas menyatakan dalam Pa
bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan
at pelajaran agama menurut agama yang dianut m
ri guru agama yang sama. Jika lembaga pendid
peraturan tersebut, maka lembaga pendid
melanggar undang-gundang” sistem pendidikan N
ihak, suasana harmonis juga didukung oleh
tutuk menjamin kebebasan setiap warga neg
na yang dianut nya sendiri. Komitmen Pemerint
nyatakan dalam Pasal 29 (2) UUD 1945 yang m

ional Republik Indonesia tidak menyebutkan seko
1989, pendidikan agama diwajibkan di sekolah
mua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Bahkan
esia Tahun 2003 lebih jelas menyatakan dalam Pa
bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan
at pelajaran agama menurut agama yang dianut m
ri guru agama yang sama. Jika lembaga pendid
peraturan tersebut, maka lembaga pendid
melanggar undang-gundang” sistem pendidikan N
ihak, suasana harmonis juga didukung oleh
tutuk menjamin kebebasan setiap warga neg
na yang dianut nya sendiri. Komitmen Pemerint
nyatakan dalam Pasal 29 (2) UUD 1945 yang m

ional Republik Indonesia tidak menyebutkan seko
1989, pendidikan agama diwajibkan di sekolah
mua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Bahkan
esia Tahun 2003 lebih jelas menyatakan dalam Pa
bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan
at pelajaran agama menurut agama yang dianut m
ri guru agama yang sama. Jika lembaga pendid
peraturan tersebut, maka lembaga pendid
melanggar undang-gundang” sistem pendidikan N
ihak, suasana harmonis juga didukung oleh
tutuk menjamin kebebasan setiap warga neg
na yang dianut nya sendiri. Komitmen Pemerint
nyatakan dalam Pasal 29 (2) UUD 1945 yang m

ional Republik Indonesia tidak menyebutkan seko
1989, pendidikan agama diwajibkan di sekolah
mua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Bahkan
esia Tahun 2003 lebih jelas menyatakan dalam Pa
bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan
at pelajaran agama menurut agama yang dianut m
ri guru agama yang sama. Jika lembaga pendid
peraturan tersebut, maka lembaga pendid
melanggar undang-gundang” sistem pendidikan N
ihak, suasana harmonis juga didukung oleh
tutuk menjamin kebebasan setiap warga neg
na yang dianut nya sendiri. Komitmen Pemerint
nyatakan dalam Pasal 29 (2) UUD 1945 yang m

ional Republik Indonesia tidak menyebutkan seko
1989, pendidikan agama diwajibkan di sekolah
mua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Bahkan
esia Tahun 2003 lebih jelas menyatakan dalam Pa
bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan
at pelajaran agama menurut agama yang dianut m
ri guru agama yang sama. Jika lembaga pendid
peraturan tersebut, maka lembaga pendid
melanggar undang-gundang” sistem pendidikan N
ihak, suasana harmonis juga didukung oleh
tutuk menjamin kebebasan setiap warga neg
na yang dianut nya sendiri. Komitmen Pemerint
nyatakan dalam Pasal 29 (2) UUD 1945 yang m

Salah satu Undang-Undang yang mengatur hak minoritas adalah UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU ini menjamin secara rinci berbagai hak-hak asasi warga negara, meskipun hak-hak minoritas tidak secara jelas dielaborasi. Selain itu, di era pasca reformasi, persisnya era Gus Dur, dikeluarkan Keppres No. 6 tahun 2000 untuk mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 yang melarang semua kegiatan dan bentuk ekspresi terkait Tionghoa termasuk perayaan Imlek dan aksara China. Kemudian tahun 2001, Kementerian Agama mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Hari Raya Imlek dijadikan sebagai hari raya [libur] nasional.

⁷⁸ Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal* (Jakarta; Komnas Ham, 2016), 17.

⁷⁹ Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal* (Jakarta; Komnas Ham, 2016), 29.

resmi menjadi Negara Pihak yang terikat pada mekanisme pelaporan pada Komite Kerja pada masing-masing Kovenan atau Konvensi. Pemerintah Indonesia juga wajib melaporkan kemajuan upaya perlindungan dalam Tinjauan Universal Berkala (*Universal Periodic Review*) di Dewan HAM PBB.⁸⁰

Dalam praksisnya, konsep kelompok minoritas juga dipahami dengan berbagai cara oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah. Kementerian Sosial, misalnya, memberikan definisi kelompok minoritas sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Seperti yang termaktub dalam Permensos No. 8 tahun 2012 menyebut, “[...] kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian. Kriteria kelompok minoritas sebagai berikut: a) gangguan keberfungsian sosial; b) diskriminasi; c) marginalisasi; dan d) berperilaku seks menyimpang.”⁸¹

Dalam konteks Bali, undang-undang tentang perlindungan minoritas sebetulnya sudah ada meski tidak secara implisit, misalnya, Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan⁸², salah satu isinya adalah peraturan ini bertujuan untuk menjamin PPDB dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai dengan Visi Pembangunan

⁸⁰ Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 18.

⁸¹ Komnars HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal* (Jakarta: Komnars Ham, 2016), 18.

⁸² Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, yang salah satu isinya adalah PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntable, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.⁸⁴ Selanjutnya, PPDB berasaskan lima hal, salah satunya adalah non diskriminatif. Diskriminatif yang dimaksud adalah persyaratan warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi dapat mengikuti proses pendaftaran sebagai calon peserta didik baru tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial.⁸⁵

⁸³ Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

⁸⁵ Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.

Jauh sebelum PMA di atas terbit, sebenarnya sudah ada keputusan bersama antara Mendikbud dan Menag yang tertuang dalam Nomor 4/U/Skb/1999, Dan No. 570 Tahun 1999, Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Dirjen Dikdasmen, pada Bab II Penyelenggaraan persisnya Pasal 2 (1) menjelaskan semua satuan pendidikan wajib diberikan pendidikan agama, sesuai dengan kurikulum yg berlaku. (2) Setiap siswa wajib mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yg dipeluknya. (3) Pendidikan agama diberikan oleh Guru Pendidikan Agama atau Guru Pendidikan Agama Tidak Tetap atau Pembina Agama yg seagama dengan siswa. Pasal 3 (1) Apabila terdapat sekurang-kurangnya 10 orang siswa pada suatu kelas yg menganut agama tertentu, maka pendidikan agama kepada 10 orang wajib diberikan di kelas itu. (2) Apabila terdapat siswa yg menganut agama tertentu kurang dari 10 orang dalam satu kelas, maka pendidikan agama di kelas itu wajib dilaksanakan dengan cara penggabungan beberapa kelas (kolektif) dengan mengatur waktu yg tidak merugikan hak siswa tersebut untuk mengikuti pelajaran lain. (3) Pelaksanaan Pendidikan Agama bagi siswa yang dikelasnya tidak diajarkan pendidikan agama yang dianutnya, dilakukan oleh Pembina Agama. (4) Apabila tidak ada Guru Pendidikan Agama pada satuan pendidikan maka

⁸⁶ Lihat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah

Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Senada dengan ini, Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 1 ayat (1) pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan agama merupakan sebuah proses pembentukan karakter manusia yang tidak pernah berhenti.⁸⁸ Karena itu, pendidikan agama harus ditumbuh-kembangkan dalam kerangka pembentukan karakter peserta didik yang taat menjalankan ajaran agamanya, sehingga program pendidikan agama dalam kurikulum yang diwajibkan bagi peserta didik harus diperdalam melalui kegiatan ekstrakurikuler, rohis dan berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid, pure, gereja dan vihara. Lebih jauh, pendidikan agama tidak hanya menjadi materi pelajaran yang harus dihafalkan dan diujikan. Tapi, pendidikan agama harus menjadi nilai sublimatif dan transformatif ke dalam pikiran, sikap dan perilaku peserta didik, sehingga mencetak manusia berakhlak mulia, mandiri, beramal kebaikan dan pada gilirannya

⁸⁸ M. Bambang Pranowo. 2009. Mereka Berbicara Pendidikan Islam Sebuah Bunga Rampai (Masa Depan Pendidikan Islam). Jakarta: RajaGrafi ndo Persada, 25.

membentuk insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, keberpihakan sekaligus komitmen negara dan pemerintah untuk menjamin hak-hak minoritas tidak perlu diragukan lagi, meskipun harus diakui dalam tataran implementasinya masih ditemui beberapa kendala, seperti ketidakadilan sosial. Raihani telah meriset tentang masalah ini di lingkungan sekolah yang berbeda dan menemukan bahwa tidak setiap siswa diperlakukan sama.⁸⁹

2. Tujuan Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

Sebagaimana tujuan pendidikan Islam pada umumnya, yaitu membimbing dan mendidik seseorang untuk memahami ajaran agama Islam secara komprehensif, baik dalam tataran konseptual maupun praksisnya. Diharapkan mereka memiliki kecerdasan berpikir (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan memiliki kecerdasan Spiritual (SQ) untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Menurut Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, pendidikan dan kebudayaan, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945.⁹⁰

Sedangkan menurut UU No. 2 tahun 1989 menjelaskan pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,

⁸⁹ Raihani Raihani, *Creating Multicultural Citizens: A Portrayal of Contemporary Indonesian Education* (Routledengane, 2014); Lyn Parker and Chang-Yau Hoon, "Secularity, Religion and the Possibilities for Religious Citizenship," *Asian Journal of Social Science* 41, no. 2 (2013): 150–74.

⁹⁰ Dalam TAP MRPS sebelumnya, menurut TAP.MPR.No.II/MPR/1993 tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Jika dikaitkan dengan tujuan utama Kemenag pada tahun 2022 ini, yaitu sesuai dengan Program Prioritas Kemenag yakni Penguatan Moderasi Beragama, Transformasi Digital, Revitalisasi KUA, *Cyber Islamic University*, Kemandirian Pesantren, *Religiosity Index*, dan Pencanangan Tahun Toleransi 2022.⁹¹

Dengan kata lain, pelayanan yang memenuhi standar pelayanan yang sesuai dengan harapan dan atau masyarakat. Pelayanan Prima (*Excellent Serv*

⁹¹ Itjen Kemenag, “"Kawal 7 (Tujuh) Program Prioritas Kemenag" Bahasan KIIS Seri 67”, itjen.kemenag.go.id, dalam <http://itjen.kemenag.go.id/web/kawal-7-tujuh-program-prioritas-kemenag-bahasan-kiis-seri-67#:~:text=Tugas%20utama%20Kemenag%20membangun%20masyarakat,Toleransi%202022%22%20C%20tandas%20Erman..> diakses 12 Oktober 2022.

kerja, melayani profesional pendidikan, dan me-
penih hati. Dalam arti, ketika pihak sekolah
ulan layanan maka ia harus berkomitmen untuk m-
ang kondusif bagi peserta didik dan pendidik da-
keyakinan bahwa anak-anak mereka menerima

**man Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas
mpasar, Bali**

na hasil penelitian, beberapa regulasi yang dikel-
jakan pendidikan, dalam hal ini terdapat tiga, y
Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi B
Mahmudi, Bidang PAI Kantor Kementerian A
ini dibawah pimpinan Ninik Surani, Bidang
pemudaan dan Olahraga Provinsi Bali oleh Jagra

kerja, melayani profesional pendidikan, dan me-
penih hati. Dalam arti, ketika pihak sekolah
ulan layanan maka ia harus berkomitmen untuk m-
ang kondusif bagi peserta didik dan pendidik da-
keyakinan bahwa anak-anak mereka menerima

**nan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas
mpasar, Bali**

na hasil penelitian, beberapa regulasi yang dikel-
jakan pendidikan, dalam hal ini terdapat tiga, y
Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi B
Mahmudi, Bidang PAI Kantor Kementerian A
ini dibawah pimpinan Ninik Surani, Bidang
pemudaan dan Olahraga Provinsi Bali oleh Jagra

kerja, melayani profesional pendidikan, dan me
penih hati. Dalam arti, ketika pihak sekolah
ulan layanan maka ia harus berkomitmen untuk m
ang kondusif bagi peserta didik dan pendidik da
keyakinan bahwa anak-anak mereka menerima

**man Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas
mpasar, Bali**

na hasil penelitian, beberapa regulasi yang dikel
jakan pendidikan, dalam hal ini terdapat tiga, y
Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi B
Mahmudi, Bidang PAI Kantor Kementerian A
ini dibawah pimpinan Ninik Surani, Bidang
pemudaan dan Olahraga Provinsi Bali oleh Jagra

kerja, melayani profesional pendidikan, dan me-
penih hati. Dalam arti, ketika pihak sekolah
ulan layanan maka ia harus berkomitmen untuk m-
ang kondusif bagi peserta didik dan pendidik da-
keyakinan bahwa anak-anak mereka menerima

**nan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas
mpasar, Bali**

na hasil penelitian, beberapa regulasi yang dikel-
jakan pendidikan, dalam hal ini terdapat tiga, y
Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi B
Mahmudi, Bidang PAI Kantor Kementerian A
ini dibawah pimpinan Ninik Surani, Bidang
pemudaan dan Olahraga Provinsi Bali oleh Jagra

kerja, melayani profesional pendidikan, dan me
penih hati. Dalam arti, ketika pihak sekolah
ulan layanan maka ia harus berkomitmen untuk m
ang kondusif bagi peserta didik dan pendidik da
keyakinan bahwa anak-anak mereka menerima

**man Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas
mpasar, Bali**

na hasil penelitian, beberapa regulasi yang dikel
jakan pendidikan, dalam hal ini terdapat tiga, y
Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi B
Mahmudi, Bidang PAI Kantor Kementerian A
ini dibawah pimpinan Ninik Surani, Bidang
pemudaan dan Olahraga Provinsi Bali oleh Jagra

Pengadaan guru PAI sendiri sejak tahun 2015 sudah tidak ada yang berhome base di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Sehingga kebanyakan status guru PAI di SMA/ SMK Negeri Denpasar berstatus Honorer. Yang memiliki status guru PAI PNS hanya dua orang, yaitu H. M. Zaini yang ditempatkan di SMK Negeri 2 Denpasar dan H. Syamsuddin di SMA Negeri 2 Denpasar sehingga dari sisi regulasi, bisa disimpulkan ada 1 dan rencana regulasi ada 2. Regulasi yang masih tersedia sampai saat ini adalah keberadaan nihilnya pengadaan guru PAI di masing-masing sekolah. sehingga fenomena tersebut dapat digambarkan bahwasanya satu guru bisa mengampu mata pelajaran PAI di dua sekolah atau tiga sekolah. begitupula guru PAI yang berstatus PNS, yang pada hari-hari weekend juga menyempatkan mengajar di SMA/ SMK Swasta.

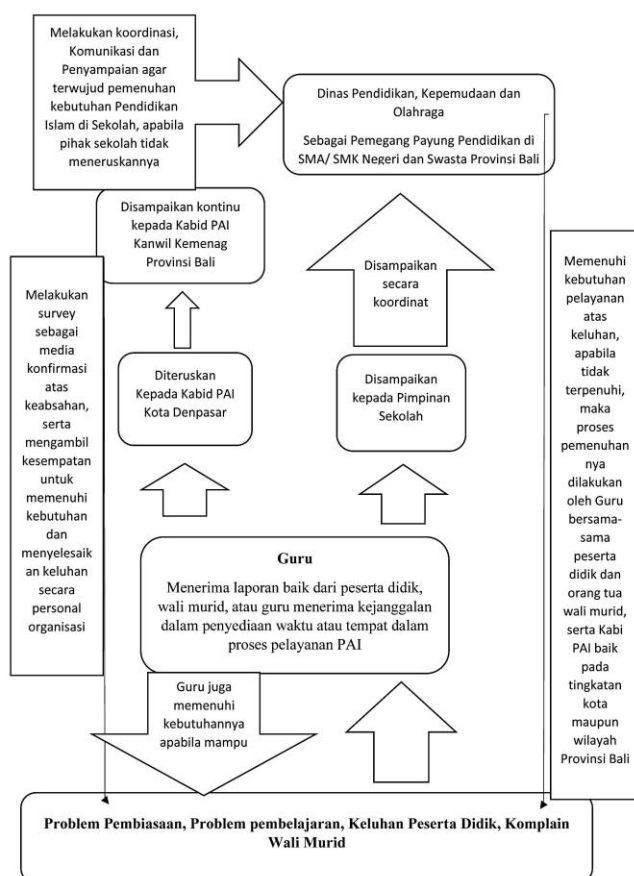
[illegible]

Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya, pemegang kebijakan atas PAI juga perlu memikirkan alternatif yang baik untuk pelayanan yang maksimal di lingkungan tersebut. Sebagai usulan juga apabila ada survey angket kebutuhan bahan ajar seperti buku paket, ketika ada kekurangan, juga butuh ada rencana anggaran pengadaan buku paket khusus untuk peserta didik yang sekolah di SMA/ SMK Negeri. Juga demikian survey kepuasan atas proses pembelajaran hingga evaluasi guru PAI dari unsur peserta didik hingga guru PAI, yang kedepannya dapat dijadikan evaluasi dan rencana program perbaikan. Mengingat Sumber Daya Manusia dari tenaga Pendidik PAI juga sangat dibutuhkan banyak. Sebagaimana teori pengaruh minoritas, maka siapa yang menjadi lawan komunikasi tersebut, maka hal tersebut menjadi posisi yang sangat strategis untuk melakukan Kontak.

Apabila Kabid PAI juga memiliki perhatian khusus melalui salah satu sub bagiannya, maka memerlukan koordinasi dengan baik mengenai kebutuhan dan perbaikan didalamnya. Hal tersebut juga dibutuhkan saran dan dialog khusus bagi mereka guru PAI sebagai pelaku utama yang bersentuhan dengan pelayanan Pendidikan Islam di unit sekolah.

Juga demikian menjadi temuan bagi peneliti mengenai bagaimana Kepala Sekolah yang hanya memasrahkan kepada guru PAI, juga demikian Waka Kurikulum atau Kesiswaan dari beberapa sekolah yang sudah diwawancarai oleh peneliti, mereka membuat kebijakan layanan waktu dari dua sekolah yang masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada waktu sholat Jum'at, hal tersebut juga membatasi ukuran toleransi dengan mempersilahkan peserta didik putra bisa menunaikan sholat Jumat, dan pembelajaran masih berlangsung. Ketika hal tersebut pernah disampaikan secara lisan oleh salah satu guru PAI di SMK Negeri 2, agar sekolah menyamakan dengan momentum Purnama (tradisi Hindu), agar diberhentikan kegiatan belajar mengajar, dan peserta didik serta para guru muslim dapat menunaikan sholat Jumat, ranah tersebut juga masih tidak direspon dan diamini dengan serius.

Artinya, asumsi penulis dengan kejadian tersebut, pada hakikatnya mereka yang memegang kendali manajemen sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah, bukan berarti mendapatkan label intoleransi, melainkan ketidak tahuan. Maka dari itu, perlu menjadi kiblat bagi para guru PAI yang sedang menjalani proses pelayanan prima di SMA/ SMK Negeri masing-masing unitnya dengan menunjukkan prestasi, melakukan komunikasi secara masif, hingga model komunikasi juga tidak melalui satu jalur, melainkan juga multi jalur, yang artinya juga mengajak para peserta didik, menjalin hubungan komunikasi yang baik kepada Wakil Kepala Sekolah, Kepala Sekolah dan kerabat lainnya.



Gambar 4.1 Skema Sistem Pelayanan Pendidikan Islam di SMA/ SMK
Negeri Denpasar

...n, skema untuk sistem p
nelalui jalur bawah, yaitu
kian selanjutnya kompl
secara baik dan kontinu k
...
...an peneliti, Kabid PAI
...ngkan usulan, keluhan a
...ranan PAI di SMA/ SM
...merah yang sangat erat

an peneliti, Kabid PAI
 angkan usulan, keluhan a
 ranan PAI di SMA/ SM
 merah yang sangat erat

atau surat keputusan secara

Regulasi Pelayanan			
		Pelayanan	

Pelayanan Guru PAI	Pelayanan Waktu Belajar dan Pembiasaan	Sarana Belajar (seperti buku, media, pelatihan metode dll)	Pe Sa P
Diserahkan kepada Kabid PAI Kemenag Kota Denpasar	Sebatas lisan dan wacana	Belum ada (tidak masuk dalam daftar program dan terealisasi)	S
Menempatkan (dua) Guru PAI berstatus PNS dan 9 Guru Non-PNS	Sebatas lisan dan wacana	Belum ada (tidak masuk dalam daftar program dan terealisasi)	S

Identitas Pejabat	Regulasi Pelayanan			
	Pelayanan Guru PAI	Pelayanan Waktu Belajar dan Pembiasaan	Pelayanan Sarana Belajar (seperti buku, media, pelatihan metode dll)	Pelayanan Sarana dan Prasarana
	baik di SMA/ SMK Negeri atau Swasta			
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	Tidak masuk anggaran	Ranah sekolah	Menyediakan buku Paket PAI dari Kemendikbud, tetapi tidak sesuai dengan pemerataan jumlah peserta didik di setiap tahunnya	Ranah sekolah
Kepala Sekolah	Mebutuhkan, dan pernah meminta kepada Kemenag Kota Denpasar, maupun Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Provinsi	2 (dua) sekolah menetapkan jam istirahat dan 2 sekolah tetap melaksanakan pembelajaran dengan batas toleransi mempersilahkan untuk menunaikan Sholat Jum'at di luar sekolah 1 (satu) sekolah memfasilitasi Aula untuk dijadikan tempat Sholat Jum'at	Menyediakan buku paket dan didistribusikan melalui bagian Perpustakaan Sekolah. Sumber bahan ajar dari Diknas terkait	2 (dua) sekolah merealisasikan musholla, 1 Sekolah direalisasikan di lorong kelas, dan 1 sekolah direalisasikan di Aula Sekolah. Semuanya atas usulan guru PAI terkait.

1. Praktik Layanan Kurikulum Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

Dalam konteks minoritas, ketiakhadiran sosial kerap kali dialami oleh warga minoritas. Salah satu bentuk ketiakhadiran sosial menurut Raihani adalah bahwa tidak setiap siswa diperlakukan sama.⁹³ Misalnya, siswa agama minoritas mengalami diskriminasi dalam akses terhadap ajaran agama mereka dan pengasingan dari praktik keagamaan mereka di sekolah. Di sebuah sekolah negeri di Batam, sebagaimana lokus riset Raihani, kepala sekolah dengan persetujuan guru mengeluarkan kebijakan untuk membatasi jumlah siswa dari suku dan agama tertentu. Contoh lain ketiakhadiran sosial yang ditemukan di sekolah adalah terciptanya citra pembeda aliran akademik tertentu. Jurusan IPA dinilai lebih bergengsi bagi peserta didik digambarkan lebih rajin dan cerdas. Sedangkan jurusan IPS dinilai tidak memiliki masa depan yang cerah dan lebih banyak diisi oleh peserta didik yang IQ-nya rendah, nakal, misalnya.⁹⁴

⁹³ Raihani telah membahas masalah ini di lingkungan sekolah yang berbeda dan menemukan bahwa tidak setiap siswa diperlakukan sama. Lihat Raihani, "A model of Islamic teacher education for social justice in Indonesia: A critical pedagogy perspective." *Journal of Indonesian Islam* 14.1 (2020): 163-186.

⁹⁴ Raihani, "A model of Islamic teacher education for social justice in Indonesia: A critical pedagogy perspective." *Journal of Indonesian Islam* 14.1 (2020): 163-186.

Pada gilirannya, ketidakadilan sosial tersebut menciptakan dan memperlebar – mengutip istilah *American Psychological Association* – ancaman stereotip (*stereotype threat*) — stigma yang memaksakan diri bagi siswa yang percaya bahwa mereka “inferior dalam bidang akademik” (*inferior in academics*.) Ancaman stereotip semacam ini dapat “meningkatkan keraguan yang menghambat dan kecemasan tekanan tinggi”, yang berpotensi memberatkan kinerja akademik siswa.

⁹⁵ Parker, "Intersections of gender/sex, multiculturalism and religion: Young Muslim minority women in contemporary Bali", 441-458.

⁹⁷ Shofiyah, Shofiyah. "Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran." *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Islam* 2.2 (2018): 122-130.

Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi (relevansi epistemologis), tuntutan dan potensi siswa (relevansi psikologis), serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat (relevansi sosiologis). Maka dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang.

Dalam konteks PAI di Bali, kebutuhan akan pengembangan kurikulum berbasis relevansi sangat penting untuk menunjang pemahaman siswa muslim dalam menyikapi kearifan lokal dan kultur Bali yang kental akan nuansa Hindu. Pemahaman semacam ini penting mengingat keberagaman penduduk Bali sangat kaya dan terkenal akan eksotisme kultur Bali yang telah mendunia. Sekaligus juga mempererat kohesi sosial yang selama ini telah terjalin berlangsung lama.

Lebih dari itu, pengembangan kurikulum tidak boleh asal-asalan dan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan peserta didik dan lokus tempat asal mereka. Dengan kata lain, kurikulum di wilayah minoritas dalam hal ini haruslah fleksibel dan akomodatif akan budaya lokal sebagai bagian daripada pendidikan ramah masyarakat. Selain itu, kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa dan kebutuhan bidang lingkungan mereka.⁹⁸

⁹⁸ Mansur, Rosichin. "Pengembangan kurikulum Pendidikan Islam multikultural (Suatu prinsip-prinsip pengembangan)." *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2016): 3; Shofiyah, Shofiyah. "Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran." *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Islam* 2.2 (2018): 122-130.

alah keterkaitan antara kurikulum dari be
tidak terjadi pengulangan atau disharm
berakibat jenuh atau membosankan
naupun yang belajar (peserta didik).
pentingnya, prinsip pengembangan
siensi. Di era disrupsi ini, kurikulum har
n atas meningkatnya teknologi dan arus
ah program pembelajaran dapat diadak
memenuhi semua tujuan yang ditetapkan

alah keterkaitan antara kurikulum dari be
tidak terjadi pengulangan atau disharm
berakibat jenuh atau membosankan
naupun yang belajar (peserta didik).
pentingnya, prinsip pengembangan
siensi. Di era disrupsi ini, kurikulum har
n atas meningkatnya teknologi dan arus
ah program pembelajaran dapat diadak
memenuhi semua tujuan yang ditetapkan

alah keterkaitan antara kurikulum dari be
tidak terjadi pengulangan atau disharm
berakibat jenuh atau membosankan
naupun yang belajar (peserta didik).
pentingnya, prinsip pengembangan
siensi. Di era disrupsi ini, kurikulum har
n atas meningkatnya teknologi dan arus
ah program pembelajaran dapat diadak
memenuhi semua tujuan yang ditetapkan

alah keterkaitan antara kurikulum dari be
tidak terjadi pengulangan atau disharm
berakibat jenuh atau membosankan
naupun yang belajar (peserta didik).
pentingnya, prinsip pengembangan
siensi. Di era disrupsi ini, kurikulum har
n atas meningkatnya teknologi dan arus
ah program pembelajaran dapat diadak
memenuhi semua tujuan yang ditetapkan

alah keterkaitan antara kurikulum dari be
tidak terjadi pengulangan atau disharm
berakibat jenuh atau membosankan
naupun yang belajar (peserta didik).
pentingnya, prinsip pengembangan
siensi. Di era disrupsi ini, kurikulum har
n atas meningkatnya teknologi dan arus
ah program pembelajaran dapat diadak
memenuhi semua tujuan yang ditetapkan

alah keterkaitan antara kurikulum dari be
tidak terjadi pengulangan atau disharm
berakibat jenuh atau membosankan
naupun yang belajar (peserta didik).
pentingnya, prinsip pengembangan
siensi. Di era disrupsi ini, kurikulum har
n atas meningkatnya teknologi dan arus
ah program pembelajaran dapat diadak
memenuhi semua tujuan yang ditetapkan

sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran.¹⁰¹

2. Praktik Layanan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim Minoritas di Denpasar Bali

Praktik layanan SDM pendidikan Islam bagi siswa muslim minoritas di Denpasar Bali ditunjukkan melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan intrakurikuler seperti yang tergambar dalam data di muka bahwa pelaksanaan pembelajaran PAI di keempat sekolah Denpasar Bali ada yang berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan dan ada yang tidak misalnya, SMKN 2 Denpasar yang pembelajaran PAI nya berlangsung di jam efektif.

Adapun kegiatan kokurikuler tercermin dari kegiatan di luar jam pembelajaran seperti kegiatan keagamaan. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), misalnya, berdasarkan pengakuan Margiyanto, ia kembali menjelaskan bagaimana ia mengemas kegiatan PHBI dengan dua model; *pertama*, adalah hari Besar Islam mingguan, yakni setiap hari Jum'at. Setiap Jum'at, Margiyanto mula-mula mencoba melakukan pendekatan secara parsial, baik dari para peserta didik Muslim, perangkat struktural sekolah, khususnya kepala sekolah, hingga mengajak kepada para guru dan karyawan muslim untuk mengadakan sholat Jum'at di Aula SMAN 7 Denpasar yang ada.

Pada akhirnya pada tahun 2018 (sebelum pandemi Covid-19 merebak), atas izin kepala sekolah, diadakannya sholat jumat secara berjamaah. Pertimbangan tersebut dikarenakan warga sekolah muslim memiliki jumlah terbesar kedua setelah Hindu. Namun pasca diberlakukannya belajar di rumah karena pandemi covid-19, aktivitas sholat Jum'at belum berlanjut kembali. Namun berbeda dengan SMK Negeri 1,

¹⁰¹ Shofiyah, Shofiyah. "Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran." *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Islam* 2.2 (2018): 129.

Secara waktu, SMK Negeri 1, SMK Negeri 2 dan SMA Negeri 7 ketika sholat Jum'at, segala jenis KBM dan aktivitas sekolah diistirahatkan. Sehingga banyak peserta didik yang izin untuk melaksanakan sholat Jum'at diluar sekolah, kecuali SMA Negeri 7 pada keterangan diatas. Berbeda dengan SMA Negeri 2 Denpasar, kegiatan pembelajaran dilaksanakan seperti biasa hingga pkl. 14.00 WITA, tanpa ada jam istirahat sehingga peserta didik yang muslim diperbolehkan izin untuk melaksanakan sholat Jum'at. I Nengah dalam FGD nya menuturkan, "Bagi peserta didik yang taat sholat jum'at, dia akan izin untuk melaksanakan sholat jum'at, namun berbeda dengan yang tidak taat, mereka akan tetap izin, namun tidak sholat jum'at dan atau tidak izin sama sekali".¹⁰³

Di 2 Denpasar. Di sana kita mendapatkan informasi bahwa sholat jumat dimulai, pembelajaran masih diberlakukan, serta didik bisa menunaikan sholat Jum'at ketika m

¹⁰³ Kurnia PS, “FGD Dengan Syamsuddin Dan I Nengah Mardana Di Ruang Tata Usaha SMA Negeri Denpasar.”

¹⁰⁵ Kurnia PS, “FGD Dengan Syamsuddin Dan I Nengah Mardana Di Ruang Tata Usaha SMA Negeri Denpasar.”

kegiatan PBM dengan mener
am jam efektif. Moh. Zaini s
Denpasar menambahkan, bahwas
ada jam efektif. Karena kondisi se
g untuk ditempati sebagai per
(m). Namun ada juga yang
uar jam efektif sekolah sebagai
asar, dan Nur Kholis yang juga

kegiatan PBM dengan mener
am jam efektif. Moh. Zaini s
Denpasar menambahkan, bahwas
ada jam efektif. Karena kondisi se
g untuk ditempati sebagai per
(m). Namun ada juga yang m
uar jam efektif sekolah sebagai
asar, dan Nur Kholis yang juga

ha, karena secara demografis
mendak hari raya Idul Fitri, kita di
juga menjelang Idul Adha, han
Setelah tanggal merah yang be
x PBM seperti biasa. Dan juga dii
ni, kami melihat bahwa guru mer
ika guru tidak begitu memiliki se
dalam artian selalu berinovasi

ika guru tidak begitu memiliki ser
dalam artian selalu berinovasi
kegiatan yang bersifat mendidik

di pada Kholis, "Wawancara Dengan

diakui, eksistensi guru PAI di
 bab secara kuantitas, jumlah guru
 dipaparkan Ninik, bahwasanya guru
 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
 atau P3K).¹⁰⁷ Peneliti mengamati s
 kantor kementerian agama Kota I
 g PNS berjumlah 2 orang.¹⁰⁸ Seda
 disebut P3K atau bahkan guru
 tetap (GTT)).

diakui, eksistensi guru PAI di
 bab secara kuantitas, jumlah guru
 dipaparkan Ninik, bahwasanya guru
 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
 atau P3K).¹⁰⁷ Peneliti mengamati s
 kantor kementerian agama Kota I
 g PNS berjumlah 2 orang.¹⁰⁸ Seda
 disebut P3K atau bahkan guru
 tetap (GTT)).

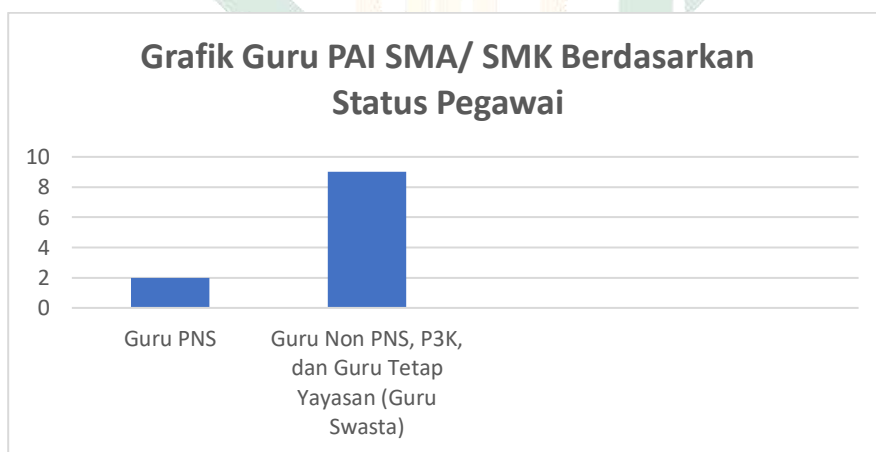
diakui, eksistensi guru PAI di
 bab secara kuantitas, jumlah guru
 dipaparkan Ninik, bahwasanya guru
 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
 atau P3K).¹⁰⁷ Peneliti mengamati s
 kantor kementerian agama Kota I
 g PNS berjumlah 2 orang.¹⁰⁸ Seda
 disebut P3K atau bahkan guru
 tetap (GTT)).

¹⁰⁸ Pendidikan Islam, "Data Guru PAI."

¹¹⁰ Pendidikan Islam, “Data Guru PAI.”

SMA/ SMK umum, sehingga terdapat 23 guru PAI SMA/ SMK yang tersebar di kota Denpasar.¹¹¹

Selain itu, Ninik menambahkan terkait fakta yang dilakukan peneliti dalam wawancaranya, peneliti menemukan data terkait permohonan bantuan SDM yang berasal dari luar kualifikasi sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) atau sejenisnya.¹¹² Dalam artian, mereka bukan dari lulusan Pendidikan Islam, namun mereka memiliki kompetensi bidang keagamaan.¹¹³ Demikian pula, terdapat juga guru PNS yang berasal dari Kementerian Agama, dan juga ada guru PAI yang diangkat PNS langsung dari Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Bali, sehingga pada saat itu peneliti masih perlu menelusuri data PNS guru PAI yang masuk dalam struktur kepegawaian Diknas Provinsi Bali.¹¹⁴ Sebagaimana grafik data sebagai berikut:



Grafik 4.1 Guru PAI berdasarkan status pegawai

Pada grafik 4.1 diatas jenis guru PAI PNS atau Non PNS yang terdaftar oleh Kementerian Agama Kota Denpasar. Data tersebut belum

¹¹¹ Kurnia PS, “Wawancara Data Statistik Guru PAI SMA/ SMK Bersama H. M. Zaini, M. Pd.”

¹¹² Surani, “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA.”

¹¹³ Surani, “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA.”

¹¹⁴ Surani, “Wawancara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Oleh Ninik Surani Pada Pkl. 13.00 Sampai 15.30 WITA.”

k. pengayaan dan pendalaman materi tersebut dapat dilihat prosentasenya yang memberikan materi tambahan. Sedangkan bagi guru, guru juga tidak jarang mengajarkan materi di luar kelas dan atau bahkan sekolah. Sedangkan bagi peserta didik sebanyak 50% materi belajar diluar sekolah.

...k pengayaan dan pendalaman materi tersebut dapat dilihat prosentasenya yang memberikan materi tambahan. Sedangkan bagi guru, guru juga tidak jarang mengajarkan materi diluar kelas dan atau bahkan sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh dari peserta didik sebanyak 50% menyatakan belajar diluar sekolah.

...buku ajar. Adapun peserta didik yang menyatakan bahwa buku ajar yang telah disediakan oleh sekolah, tetapi belum mendapatkannya. Artinya, masih banyak peserta didik yang belum mendapatkan jatah buku paket dari sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh, 14 peserta didik menyatakan bagaimana guru menyampaikan materi.

...k pengayaan dan pendalaman materi tersebut dapat dilihat prosentasenya yang memberikan materi tambahan. Sedangkan bagi guru, guru juga tidak jarang mengajarkan materi diluar kelas dan atau bahkan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, sebanyak 50% guru mengajarkan materi diluar sekolah.

...buku ajar. Adapun peserta didik yang menggunakan buku ajar yang telah disediakan oleh sekolah, tetapi belum mendapatkannya. Artinya, masih banyak peserta didik yang belum mendapatkan jatah buku paket dari sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, 14 peserta didik mengungkapkan bagaimana guru menyampaikan materi.

Uraian tersebut, diperkuat oleh realitas tentang layanan pendidikan agama di sekolah ini, misalnya, guru-guru pendidikan agama tersebut semuanya telah memiliki kualifikasi akademik dengan latar belakang pendidikan guru agama (*link and match*) yang didukung oleh pengalaman mengajar pendidikan agama yang sebagian besar telah memiliki pengalaman “memadai” sebagai pendidik dan pengajar. Dari segi usia, dapat disimpulkan bahwa GPA di sekolah ini sebagian besar masih berusia kurang dari 50 tahun. Artinya guru-guru tersebut masih tergolong usia produktif yang penuh inovatif, dinamis dan kreatif, sehingga proses pembelajaran pendidikan agama “sangat berpotensi” untuk mencetak peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹¹⁶

¹¹⁶ Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama di SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 432-433.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Waktu dan Pembiasaan Per

muhan penulis, sebetulnya siswa minoritas sekali. Bahkan, bisa dikatakan karena di dalam satu sekolah t. Hal ini senada dengan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) (GRI) yang mencatat penduduk di 2021. Rincian nya, mayoritas penduduk di Pulau Dewata beragama sar kedua dengan jumlah pemel n, sebanyak 69,03 ribu jiwa (1,6 sten, sebanyak 34,6 ribu jiwa (0 nyak 29,04 ribu jiwa (0,68% (0,01%) beragama Konghucu, cayaan.

Waktu dan Pembiasaan Per

muhan penulis, sebetulnya siswa minoritas sekali. Bahkan, bisa dikatakan karena di dalam satu sekolah t. Hal ini senada dengan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) (GRI) yang mencatat penduduk di 2021. Rincian nya, mayoritas penduduk di Pulau Dewata beragama sar kedua dengan jumlah pemel n, sebanyak 69,03 ribu jiwa (1,6 sten, sebanyak 34,6 ribu jiwa (0 nyak 29,04 ribu jiwa (0,68% (0,01%) beragama Konghucu, cayaan.

Waktu dan Pembiasaan Per

muhan penulis, sebetulnya siswa minoritas sekali. Bahkan, bisa dikatakan karena di dalam satu sekolah t. Hal ini senada dengan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) (GRI) yang mencatat penduduk di 2021. Rincian nya, mayoritas penduduk di Pulau Dewata beragama sar kedua dengan jumlah pemel n, sebanyak 69,03 ribu jiwa (1,6 sten, sebanyak 34,6 ribu jiwa (0 nyak 29,04 ribu jiwa (0,68% (0,01%) beragama Konghucu, cayaan.

Waktu dan Pembiasaan Per

muhan penulis, sebetulnya siswa minoritas sekali. Bahkan, bisa dikatakan karena di dalam satu sekolah t. Hal ini senada dengan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) (GRI) yang mencatat penduduk di 2021. Rincian nya, mayoritas penduduk di Pulau Dewata beragama sar kedua dengan jumlah pemel n, sebanyak 69,03 ribu jiwa (1,6 sten, sebanyak 34,6 ribu jiwa (0 nyak 29,04 ribu jiwa (0,68% (0,01%) beragama Konghucu, cayaan.

Waktu dan Pembiasaan Per

muhan penulis, sebetulnya siswa minoritas sekali. Bahkan, bisa dikatakan karena di dalam satu sekolah t. Hal ini senada dengan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) (GRI) yang mencatat penduduk di 2021. Rincian nya, mayoritas penduduk di Pulau Dewata beragama sar kedua dengan jumlah pemel n, sebanyak 69,03 ribu jiwa (1,6 sten, sebanyak 34,6 ribu jiwa (0 nyak 29,04 ribu jiwa (0,68% (0,01%) beragama Konghucu, cayaan.

Sedangkan letak perbedaannya adalah seperti yang dinyatakan oleh Galih dan Nur sebagai siswa muslim di SMA Negeri 7 Denpasar. Ia mendapati banyak siswa yang berdoa secara muslim, namun selepas berdoa, dia tidak ikut untuk berdiri dan diam, melainkan dengan duduk di tempat saja. Namun apabila ada intruksi untuk berdiri, maka selepas menyelesaikan doa sebelum belajar, ia akan ikut berdiri dan diam sebagai penghormatan dan bentuk toleransinya.¹¹⁹

Di samping itu, peneliti mencoba menelusuri kembali, apakah guru PAI juga memberikan tulisan berupa catatan kecil atau buku panduan doa sebelum belajar yang diberikan kepada peserta didiknya, untuk dibaca secara mandiri, namun ketika dikonfirmasi dikatakan belum ada. Guru PAI yang hadir pun juga menyatakan belum pernah memberikan amaliyah doa pagi sebelum pembelajaran dimulai kepada peserta didik. Namun, di sisi lain pada saat jam KBM yang dilaksanakan, maka akan dimulainya dengan membaca doa pagi dengan bacaan *raditu billahi rabba* sampai akhir, dan dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek pilihan.¹²⁰ Namun di SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 7 hanya melakukan doa pagi tanpa membaca surat-surat pendek.

Kedua, layanan Kurikulum. Untuk memotret layanan kurikulum yang ada, penulis melakukan pengambilan data melalui angket yang diberikan kepada siswa muslim tersebut. Dari hasil pengambilan data berupa angket, terdapat sekitar 1.600 peserta didik muslim dari 4 sekolah yang diambil oleh peneliti, terdapat 58 peserta didik yang mengisi kuesioner dan rata-rata

¹²⁰ Kurnia PS, "Focus Group Discussion Bersama Peserta Didik SMA/ SMK Di Denpasar, Bali."

diisi oleh peserta didik kelas X SMK. Mayoritas peserta didik yang mengisi kuesioner adalah peserta didik dari SMK Negeri 1 Denpasar.

Dari angket yang kami sebar, ternyata peserta didik yang mendapatkan buku paket atau buku ajar yang telah disediakan oleh sekolah, terdapat sekitar 71,4 %, dan 28,6 % belum mendapatkannya. Artinya, masih banyak peserta didik yang tidak mendapatkan jatah buku paket dari sekolah yaitu 35 peserta didik mendapatkan buku paket, dan 14 peserta didik belum mendapatkannya.

Demikian juga dengan bahan ajar yang digunakan dalam pelaksanaan KBM mata pelajaran PAI dan Budi pekerti. Dimulai dari SMA Negeri 2 Denpasar, mereka lebih cenderung menggunakan buku Lembar Kerja Siswa (baca: LKS), namun jarang digunakan sebagai acuan referensi dalam pembelajaran sehingga materi yang selalu disampaikan oleh guru PAI adalah dengan memanfaatkan ICT, seperti menonton video yang terkait dengan PAI, kemudian peserta didik ditugaskan untuk merangkum video tersebut, dan juga terkadang guru menjelaskan, terkadang juga tidak.

Selanjutnya, peserta didik SMA Negeri 7 Denpasar menyatakan mengenai bahan ajar yang digunakan, bahwa mereka menggunakan buku paket sebagai buku induk referensi pembelajaran. Namun jumlah buku paket dengan jumlah peserta didik tidak mencukupi untuk mendapatkan semuanya. Dengan kata lain, terdapat dua kemungkinan; peserta didik enggan mengambil buku paket tersebut di perpustakaan yang menyediakannya, atau perpustakaan hanya menyediakan buku paket mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan jumlah yang minim. Akan tetapi, di dalam praktek penyampaian materi pembelajaran sampai pada pertemuan tatap muka pada bulan Maret 2022 di minggu terakhir, guru masih menyampaikan dan memberikan penugasan melalui akun *google classroom*.

Selain itu, layanan kurikulum berikutnya tercermin dari bagaimana guru menyampaikan materi PAI yang sesuai dengan buku ajar atau kurikulum PAI saat ini. Dari data yang kami dapat, sebanyak 75,1%

pa yang akan disampaikan dan tepatnya tema apa peserta didik.

itu, durasi waktu pembelajaran PAI sebagaimana dituangkan oleh Mendikbudristek dalam salinan kulum dalam rangka pemulihan pembelajaran pelajaran (3JP), ternyata ada 42.1% peserta didik ng artinya adalah mereka mendapatkan jatah w tidak menentu. Ketika dikonfirmasi oleh beberapa ka melakukan observasi, semuanya dipraktikkan 5% menjawab tidak dan 40,4% menjawab iya. H asi oleh peneliti dari 35,4 % peserta didik. Apa patkan 3 JP pada mata pelajaran PAI, ternyata a yang menjawab asal, dan mereka adalah pes

pa yang akan disampaikan dan tepatnya tema apa peserta didik.

itu, durasi waktu pembelajaran PAI sebagaimana dituangkan oleh Mendikbudristek dalam salinan kulum dalam rangka pemulihan pembelajaran pelajaran (3JP), ternyata ada 42.1% peserta didik ng artinya adalah mereka mendapatkan jatah w tidak menentu. Ketika dikonfirmasi oleh beberapa ka melakukan observasi, semuanya dipraktikkan 5% menjawab tidak dan 40,4% menjawab iya. H asi oleh peneliti dari 35,4 % peserta didik. Apa patkan 3 JP pada mata pelajaran PAI, ternyata a yang menjawab asal, dan mereka adalah pes

pa yang akan disampaikan dan tepatnya tema apa peserta didik.

itu, durasi waktu pembelajaran PAI sebagaimana dituangkan oleh Mendikbudristek dalam salinan kulum dalam rangka pemulihan pembelajaran pelajaran (3JP), ternyata ada 42.1% peserta didik ng artinya adalah mereka mendapatkan jatah w tidak menentu. Ketika dikonfirmasi oleh beberapa ka melakukan observasi, semuanya dipraktikkan 5% menjawab tidak dan 40,4% menjawab iya. H asi oleh peneliti dari 35,4 % peserta didik. Apa patkan 3 JP pada mata pelajaran PAI, ternyata a yang menjawab asal, dan mereka adalah pes

pa yang akan disampaikan dan tepatnya tema apa peserta didik.

itu, durasi waktu pembelajaran PAI sebagaimana dituangkan oleh Mendikbudristek dalam salinan kulum dalam rangka pemulihan pembelajaran pelajaran (3JP), ternyata ada 42.1% peserta didik ng artinya adalah mereka mendapatkan jatah w tidak menentu. Ketika dikonfirmasi oleh beberapa ka melakukan observasi, semuanya dipraktikkan 5% menjawab tidak dan 40,4% menjawab iya. H asi oleh peneliti dari 35,4 % peserta didik. Apa patkan 3 JP pada mata pelajaran PAI, ternyata a yang menjawab asal, dan mereka adalah pes

menggunakannya. Ketika peneliti mengkonfirmasi kembali, mereka menjawabnya dengan alasan enggan untuk membeli buku LKS tersebut. Hal tersebut juga dialami sebagaimana SMA Negeri 7 Denpasar, yang mana perpustakaan SMK Negeri 2 Denpasar juga menyediakan buku paket PAI secara terbatas.

Sedangkan pada saat proses pembelajaran, biasanya guru juga menyampaikan tujuan materi yang akan diajarkan. Namun demikian, ada banyak materi yang disampaikan guru tidak sesuai dengan tujuan materi. Hal ini terkonfirmasi dari data yang kami dapatkan bahwa terdapat 63,2 % membenarkan atas penyampaian tujuan pembelajaran, dan sisanya sebanyak 36,8 % menjawab tidak. Yang artinya, hampir seperempat dari mereka (baca: siswa) tidak mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai tujuan pembelajaran. Ada beberapa kemungkinan yang didapat, *pertama* adalah mereka tidak mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, yang *kedua* guru benar-benar tidak memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum PAI.

Selanjutnya, mengenai penilaian belajar. Semestinya, peserta didik secara ideal mendapatkan penilaian harian, penilaian semester dan penilaian akhir. Dan hal tersebut dilakukan semua oleh guru PAI. Sebagaimana data yang kami dapatkan, menunjukkan bahwa 91,2 % peserta didik menjawab iya, dan 8,8% peserta didik menjawab tidak. Adapun dalam praktik pembelajarannya, sebagai pengembangan kompetensi keterampilan (K4), guru lebih menekankan pada pengambilan nilai keterampilan melalui kegiatan Rohis yang dilakukan pada saat Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Sebagaimana pada tanggal 22 Mei 2022, guru mengambil penilaian K4 dengan melihat kehadiran peserta didik dalam kegiatan Halal bi Halal yang diadakannya. Juga di SMK Negeri 1 dengan mengambil penilaian K4 diluar kompetensi inti yang tercantum pada kurikulum PAI SMA/ SMK, yaitu dengan menugaskan menulis kaligrafi.

selanjutnya adalah durasi jam pelajaran pada saat waktu non efektif. Sebagian peserta didik, yaitu 82,8 % mereka menjawab non efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan KBM mata pelajaran PAI dan Budi pekerti dilaksanakan pada jam non efektif.

19

tidak masuk dalam penjadwalan
menjadwalkan dan mengetahui
sendiri”.¹²² Perlu digaris ba
PAI dilaksanakan sebelum pelat
setelah jam efektif pemi
tidak dilaksanakan pagi hari s
pada jam selepas pulang se
dipasarkan pada jam pu
di SMA Negeri 2 Denpasar
masuk sekolah. Juga demikian

¹²² Wawancara dengan Syamsuddin, guru PAI SMAN 2 Denpasar.

Denpasar dan SMA Negeri 7 Denpasar yang melangsungkan pembelajarannya dengan jam kondisional. Tergantung dari kegunaan kelas yang digunakan atau keberadaan jadwal dan program sekolah.

Dengan banyaknya jumlah peserta didik yang beragama Islam disetiap sekolah, juga mempengaruhi jam pelajaran yang dilakukan oleh guru PAI yang mengampu didalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam satu sekolah hanya 1 guru PAI saja, sehingga tidak ada ruang diskusi atau musyawarah guru mata pelajaran didalamnya. Juga demikian jam belajar PAI yang ada diluar jam efektif sekolah. Idealnya mereka mendapatkan pelayanan pembelajaran PAI 3 x 45 menit atau 3 jam pelajaran dalam satu pekan.¹²³ Namun dalam praktiknya, lama pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa SMA/ SMK di Denpasar dalam satu pekan selama 30 – 60 menit. Sebagaimana di SMK Negeri 2 Denpasar selama 30 menit. SMK Negeri 1 Denpasar selama 45 menit, dan SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 7 Denpasar selama 60 menit.¹²⁴

Beberapa kendala juga dialami oleh beberapa guru dalam melangsungkan KBM. Salah satunya adalah tingkat kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran PAI. Beberapa peserta didik tidak hadir tanpa ada keterangan, ada juga yang berbenturan dengan program ekstrakurikuler sekolah yang dilaksanakan pada jam yang sama.

¹²³ Achmad Yusuf, “Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Multikultural (Perspektif Psikologi Pembelajaran),” *Jurnal Al-Murabbi* 4, no. 2 (2019): 251–274.

¹²⁴ Kurnia PS, “Focus Group Discussion Bersama Peserta Didik SMA/ SMK Di Denpasar, Bali.”

Tabel 4.2 Praktik Layanan Pendidikan Islam Di SMA/ SMK Negeri Denpasar, Bali

NAMA SEKOLAH	PRAKTIK LAYANAN									
	PEMBELAJARAN						Pembiasaan		Sarana dan Prasarana	
	Guru PAI	Waktu Pembelajaran	Administrasi Perencanaan Pembelajaran RPP, Silabus, Progtg dan Promes)	Buku dan Bahan Ajar	Proses Pembelajaran	Evaluasi Pembelaaran	Sholat Dhuhur berjamaah	Peringatan Hari Besar Islam/ Momentum Islami/ Agenda Kegiatan Penguatan Keagamaan	Musholla	Tempat Wudhu
SMA Negeri 2	Ada satu guru PAI berstatus PNS Kemenag	Dilakukan diluar jam efektif sekolah (tidak mengikuti jadwal pelajaran yang ditentukan sekolah). yaitu pagi hari sebelum bel masuk sekolah.	Belum menyetorkan administrasi perencanaan pembelajaran kepada Waka Kurikulum	Didistribusikan dengan tidak merata	Menyampaikan materi tidak secara sistematis (sesuai dengan runtutan kurikulum PAI)	Jarang dilaksanakan kecuali PTS dan PAS	Tidak ada	Dilakukan secara rutin sebelum covid-19 di luar sekolah bekerjasama dengan takmir masjid atau musholla diluar sekolah	Ada, yang pada mulanya adalah gudang	Ada, terdapat 1 unit kran air wudhu yang berfungsi. didepan Pura Sekolah, disebelah kanan Musholla
SMA Negeri 7	Ada satu guru PAI berstatus tetap non PNS (memiliki NUP di SMA tersebut)	Dilakukan diluar jam efektif sekolah (tidak mengikuti jadwal pelajaran yang ditentukan sekolah). dilaksanakan setelah pulang sekolah.	Tidak menunjukkan administrasi perencanaan pembelajaran	Didistribusikan dengan tidak merata dan dibantu oleh Sie Kerohanian Islam	Menyampaikan materi tidak secara sistematis (sesuai dengan runtutan kurikulum PAI)	Hanya penugasan rumah berupa project atau PR	Tidak, hanya melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Aula Sekolah	Dilaksanakan secara rutin sebelum covid-19 dan melaksanakan halal bi halal pada tahun 2022 di Aula Sekolah	Ditempatkan di Aula Sekolah	Tidak ada, wudhu difungsikan di kamar mandi sekolah
SMK Negeri 1	Ada satu guru PAI yang berasal dari guru	Dilakukan diluar jam efektif sekolah (tidak mengikuti	Tidak menunjukkan administrasi perencanaan pembelajaran	Didistribusikan dengan tidak merata dan dibantu oleh Sie Kerohanian	Menyampaikan materi tidak secara sistematis (sesuai dengan	Hanya penugasan rumah berupa project atau PR	Tidak ada	Dilakukan secara rutin sebelum covid-19	Ada, disetting pada lorong kelas (menghubungkan dua ruangan	Ada, terdapat di lantai 1, dan terdapat 4 unit kran air wudhu.

4. Praktik Layanan Sarpras Pendidikan Islam bagi Siswa Minoritas Muslim Denpasar Bali

Keberadaan siswa minoritas muslim cukup dilematis. Bagaimana tidak, sarana prasarana yang harusnya terpenuhi bagi mereka, namun faktanya kurang. Bahkan, tidak memadai. Misalnya, layanan pengadaan tempat ibadah. Dalam hal ini, terdapat 98,3 % peserta didik mengatakan ada tempat untuk sholat, sedangkan sisanya hanya 1,7 % menyatakan tidak adanya tempat ibadah. Demikian juga kembali kepada fasilitas ibadah yang disediakan oleh sekolah terhadap peserta didik, guru dan karyawan muslim. Beberapa teguran yang dilakukan oleh salah satu guru di sekolah, misalnya di SMK Negeri 1 Denpasar.

Beberapa guru memberikan teguran bagi peserta didik muslim yang memangkas waktu masuk kelas pasca jam istirahat dikarenakan mereka beralasan menunaikan shalat dhuhur. Ketika keterangan tersebut diteruskan kepada guru PAI, ternyata beberapa indikasi yang menyebabkan molornya jam masuk kelas bagi peserta didik muslim, yaitu minimnya kran air untuk melakukan wudhu. Sebagaimana keterangan Margiyanto, mereka yang beragama muslim berjumlah 250 – 300an, namun jumlah kran wudhu hanya tersedia satu saluran yang bisa digunakan dari empat saluran ideal. Hal tersebut juga menjadi indikasi utama. Juga demikian ruang shalat yang disediakan hanya berdiameter 3X5 meter di sudut lorong kelas. Hal tersebut juga menyebabkan pelaksanaan sholat dhuhur dilakukan secara bergantian. Maka menjadi permasalahan tersendiri atas kebutuhan ibadah peserta didik di dalamnya.¹

Demikian juga di SMA Negeri 7 Denpasar. Mereka boleh melakukan ritual shalat dhuhur dan Jum'at di Aula yang sudah ada. Namun juga tidak disediakan kran untuk wudhu. Sehingga mereka untuk mendapatkan air wudhu di kamar mandi sekolah. Dan begitu juga dirasakan oleh SMK

¹ Kurnia PS, "Focus Group Discussion Bersama Peserta Didik SMA/ SMK Di Denpasar, Bali."

Negeri 2 Denpasar, serta SMA Negeri 2 Denpasar yang mana kondisi tempat ibadahnya sama seperti SMK Negeri 1 Denpasar. Namun bedanya, mereka mendapatkan fasilitas ruang khusus untuk dijadikan sebagai mushalla. Misalnya di SMK Negeri 2 Denpasar secara geografis mushalla berada di depan perpustakaan dan berada di lantai 2, dan tempat wudhu berada di lantai 1 sehingga mereka yang hendak sholat harus mengambil air wudhu di lantai 1 terlebih dahulu, di depan taman sekolah.

Sedangkan di SMA Negeri 2 Denpasar posisi Mushalla bersinggungan dengan arah UKS. Juga tempat wudhu berada di depan Pura sekolah. Namun di SMA Negeri 2 Denpasar letak mushalla dan tempat wudhu beberadaannya di lantai 1 semuanya. Kedua sekolah tersebut memiliki luas mushalla kira-kira 15 m². Menjadi hal yang sama problemnya pada kala itu dengan SMK Negeri 1 Denpasar, yaitu jumlah saluran air wudhu yang berada di SMA Negeri 2 Denpasar hanya 1. Namun belum ada keterangan tertentu mengenai teguran dari personal warga sekolah sebagaimana di SMK Negeri 1 Denpasar.

Sarana pra sarana berikutnya adalah ruang belajar khusus untuk mata pelajaran PAI. Dari hasil kuesioner, terdapat 69% peserta didik mendapatkan ruang kelas khusus untuk mata pelajaran PAI. sedangkan 31% mereka menjawab tidak adanya ruang khusus untuk mata pelajaran PAI. Kemudian, ruang kelas. Untuk ruang kelas ini mayoritas mereka menjawab 100% tentang ketersediaan ruangan untuk mata pelajaran PAI yang disebutkan. Akan tetapi untuk pemilihan tempat pelaksanaan mata pelajaran sekolah sudah menyediakan kelas yang representatif untuk melangsungkan pembelajarannya. Sebagaimana di SMK Negeri 1 Denpasar, Aldi sebagai pengurus Rohis sekaligus peserta didik menyatakan bahwa mereka juga yang mengusahakan untuk mencari kelas kosong sebagai tempat KBM. Sedangkan di sekolah lain sudah disediakan kelas tetap untuk dijadikan KBM secara berkala.

a mengingat efektivitasnya. Dengan membagi rombongan belajar memperhatikan jumlah peserta didik 0 peserta didik. Hal tersebut juga ada di sekolah lain. Selain wudhu untuk pelengkap sarana tentang adanya tempat untuk beriswaan bagi Siswa Minoritas M

a mengingat efektivitasnya. Dengan membagi rombongan belajar memperhatikan jumlah peserta didik 0 peserta didik. Hal tersebut juga ada di sekolah lain. Selain wudhu untuk pelengkap sarana tentang adanya tempat untuk beriswaan bagi Siswa Minoritas M

a mengingat efektivitasnya. Dengan membagi rombongan belajar memperhatikan jumlah peserta didik 0 peserta didik. Hal tersebut juga ada di sekolah lain. Selain wudhu untuk pelengkap sarana tentang adanya tempat untuk beriswaan bagi Siswa Minoritas M

a mengingat efektivitasnya. Dengan membagi rombongan belajar memperhatikan jumlah peserta didik 0 peserta didik. Hal tersebut juga ada di sekolah lain. Selain wudhu untuk pelengkap sarana tentang adanya tempat untuk beriswaan bagi Siswa Minoritas M

ngati hari besar Islam itu sendiri.

ana dari hasil kuesioner, mereka menjawab

untuk legal izinnya sekolah atas kegiatan PHE

o mereka menyatakan tidak. Hal tersebut da

peserta didik kelas X yang sudah barang

aimana kemasan PHBI yang diadakan ole

Juga tempat pelaksanaannya, sekolah juga

ut dilaksanakan didalam sekolah. Sebag

takan, 92,6 % mereka menjawab iya dan s

ab tidak mendapatkan izin atau ketidaktahuan

juga dengan respon orang tua wali murid mengenai KBM mata pelajaran PAI. Peneliti hanya menemui wali SMA Negeri 7 Denpasar, dan Aldi dari SMK mereka menerangkan tidak ada keterangan ataupun respon adap mata pelajaran PAI di sekolahnya masing-masing. Menyakan kenapa ia pulanginya terlambat ketika di an. Ternyata dalam hal tersebut, sekolah dan guru keterangan atau pengumuman mengenai kon AI di sekolah masing-masing. Namun untuk re lainnya belum ada komplain ataupun hal yang wali murid.

tersebut juga ditambahkan oleh M. Zaini mengenai SMA/ SMK Negeri. Padahal secara kuantitas, n

[A/ SMK Negeri. Padahal secara kuantita

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tunjukkan, 75% peserta didik cakap melaksanakan
 melaksanakan ritual peribadatan dengan baik. Dengan
 dalam membaca al-Qur'an, 80,4 % mereka
 AI dalam mendalami tata cara membaca al-Qur'
 erwujudan keberhasilan pelayanan pembelajaran
 meminta pendapat atau melakukan sharing kepada
 namun perlu dilihat bagaimana intensitas komunikasi
 tua wali murid, 46,4 % guru tidak pernah s
 gan wali murid, dan 21,4 % guru jarang melakuk
 jukkan kesenjangan komunikasi antar kedua a
 stomer. Dan sisanya 32,1% guru sudah melak
 menjadi perhatian dan evaluasi tersendiri, agar

tunjukkan, 75% peserta didik cakap melaksanakan
 melaksanakan ritual peribadatan dengan baik. Dengan
 dalam membaca al-Qur'an, 80,4 % mereka
 AI dalam mendalami tata cara membaca al-Qur'
 erwujudan keberhasilan pelayanan pembelajaran
 meminta pendapat atau melakukan sharing kepada
 namun perlu dilihat bagaimana intensitas komunikasi
 tua wali murid, 46,4 % guru tidak pernah s
 gan wali murid, dan 21,4 % guru jarang melakuk
 jukkan kesenjangan komunikasi antar kedua a
 stomer. Dan sisanya 32,1% guru sudah melak
 menjadi perhatian dan evaluasi tersendiri, agar

tunjukkan, 75% peserta didik cakap melaksanakan
 melaksanakan ritual peribadatan dengan baik. Dengan
 dalam membaca al-Qur'an, 80,4 % mereka
 AI dalam mendalami tata cara membaca al-Qur'
 erwujudan keberhasilan pelayanan pembelajaran
 meminta pendapat atau melakukan sharing kepada
 namun perlu dilihat bagaimana intensitas komunikasi
 tua wali murid, 46,4 % guru tidak pernah s
 gan wali murid, dan 21,4 % guru jarang melakuk
 jukkan kesenjangan komunikasi antar kedua a
 stomer. Dan sisanya 32,1% guru sudah melak
 menjadi perhatian dan evaluasi tersendiri, agar

tunjukkan, 75% peserta didik cakap melaksanakan
 melaksanakan ritual peribadatan dengan baik. Dengan
 dalam membaca al-Qur'an, 80,4 % mereka
 AI dalam mendalami tata cara membaca al-Qur'
 erwujudan keberhasilan pelayanan pembelajaran
 meminta pendapat atau melakukan sharing kepada
 namun perlu dilihat bagaimana intensitas komunikasi
 tua wali murid, 46,4 % guru tidak pernah s
 gan wali murid, dan 21,4 % guru jarang melakuk
 jukkan kesenjangan komunikasi antar kedua a
 stomer. Dan sisanya 32,1% guru sudah melak
 menjadi perhatian dan evaluasi tersendiri, agar

tunjukkan, 75% peserta didik cakap melaksanakan
 melaksanakan ritual peribadatan dengan baik. Dengan
 dalam membaca al-Qur'an, 80,4 % mereka
 AI dalam mendalami tata cara membaca al-Qur'
 erwujudan keberhasilan pelayanan pembelajaran
 meminta pendapat atau melakukan sharing kepada
 namun perlu dilihat bagaimana intensitas komunikasi
 tua wali murid, 46,4 % guru tidak pernah s
 gan wali murid, dan 21,4 % guru jarang melakuk
 jukkan kesenjangan komunikasi antar kedua a
 stomer. Dan sisanya 32,1% guru sudah melak
 menjadi perhatian dan evaluasi tersendiri, agar

Di samping itu, untuk memperdalam materi pelajaran yang telah diterima melalui intra kurikuler, dilanjutkan di luar kelas dan di luar jam pelajaran, kegiatan ini berupa pengayaan. Kegiatan ini dilakukan oleh siswa dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, seperti pembiasaan mengaji, penyelenggaraan PHBI, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran pendidikan agama berikutnya dilakukan melalui kegiatan co-kurikuler, seperti; latihan membaca dan menulis Qur'an, menyimpulkan khotbah Jum'at tempat siswa shalat Jum'at yang diserahkan hari Sabtu kepada GPA Islam, menghafal surat dan ayat-ayat tertentu.

Proses pembelajaran melalui ekstrakurikuler dan kurikuler dimaksudkan untuk lebih memantapkan pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap suatu materi pembelajaran yang telah diserap melalui pembelajaran intra kurikuler. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberian tugas-tugas oleh guru kepada peserta didik. Namun demikian, pada dasarnya kegiatan intra kurikuler, ekstrakurikuler maupun kurikuler merupakan satu kesatuan yang saling mendukung, melengkapi dan menyempurnakan, sehingga antara satu dengan lainnya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Dengan demikian, secara administratif, dapat disimpulkan bahwa frekuensi pelaksanaan pendidikan agama baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun co-kurikuler sebagaimana terurai di atas, ternyata lebih cenderung disebabkan oleh faktor ketersediaan sarana/fasilitas pendidikan agama yang memadai di sekolah tersebut. Dari hasil observasi yang

⁴ Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 434-437.

Sejalan dengan data di atas, menurut Krathwohl dan Bloom kemampuan manusia dibagi ke dalam tiga bidang, yaitu: kognitif, afektif dan psychomotor. Bidang kognitif menitikberatkan kepada pengetahuan dan kemampuan mengingat atau memahami dan kemampuan intelektual. Bidang afektif berkaitan dengan minat, sikap dan nilai. Bidang psychomotor berkaitan dengan kemampuan memanipulasi gerakan.⁷ Ini berarti, bahwa pembelajaran pendidikan agama, harus mencakup tiga bidang tersebut.

Peran Lembaga Pendidikan Islam Bagi Siswa Muslim

⁶ Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015):435.

Apalagi, sebelum kerangka nasional diletakkan di atasnya, berbagai daerah mengalami sejarah politik dan ekonomi yang terpisah yang masih terlihat dalam dinamika daerah saat ini. Semboyan nasional Indonesia Bhineka Tunggal Ika (Persatuan dalam Keanekaragaman) mengacu pada keanekaragaman dalam komposisi internal negara tetapi juga menunjukkan bahwa - terlepas dari semua perbedaan dalam masyarakat multikulturalnya - ada rasa persatuan (keindonesiaan) yang sebenarnya di antara masyarakat Indonesia.

Konstitusi Indonesia memberikan beberapa derajat kebebasan beragama. Pemerintah menghormati kebebasan beragama untuk enam agama yang diakui secara resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) dan/atau agama rakyat. Semua agama memiliki hak yang sama menurut hukum Indonesia. Menurut sensus 2018, 86,7% persen populasi adalah Muslim, 7,6% Protestan, 3,12% Katolik, 2% Hindu, 1% Budha, <1% Konghucu, <1% lainnya, dan <1% tidak disebutkan atau tidak ditanyakan.⁸ Sebagian besar Muslim di negara ini adalah Sunni. Dua ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, masing-masing memiliki basis massa atau pengikut sebanyak 108 juta (NU) dan 30 juta

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasal 29 UUD 1945 mengatur kebebasan beragama, memberikan "setiap orang hak untuk beribadat menurut agama atau kepercayaannya masing-masing", dan menyatakan bahwa "bangsa berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila pertama ideologi nasional negara, Pancasila, juga menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah tidak mengizinkan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Pegawai pemerintah harus bersumpah setia kepada negara dan ideologi Pancasila. Kebijakan lain membatasi jenis kegiatan keagamaan tertentu, terutama di antara kelompok agama yang tidak diakui dan sekte "menyimpang" dari kelompok agama yang diakui.

Aceh tetap menjadi satu-satunya provinsi yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam, dan non-Muslim di provinsi tersebut tetap dibebaskan dari syariat. Aceh mengadopsi hukum pidana berbasis Syariah yang memberlakukan hukuman fisik bagi pelanggaran.¹⁰

Kementerian Agama memperluas status resmi menjadi enam kelompok agama: Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu. Kelompok yang tidak dikenal dapat mendaftar ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai organisasi sosial. Meskipun kelompok-kelompok ini memiliki hak untuk mendirikan rumah ibadah, memperoleh KTP, dan mencatatkan perkawinan dan kelahiran, terkadang mereka menghadapi kesulitan administratif untuk melakukannya. Dalam beberapa kasus,

¹⁰ Lihat lebih lanjut Arskal Salim, "'Shari'a from below' in ACEH (1930s–1960s): Islamic identity and the right to self-determination with comparative reference to the Moro Islamic Liberation Front (MILF)." *Indonesia and the Malay World* 32.92 (2004): 80-99; Arskal Salim, "Dynamic legal pluralism in Indonesia: Contested legal orders in contemporary Aceh." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 42.61 (2010): 1-29; Arskal Salim, *Contemporary Islamic law in Indonesia: Sharia and legal pluralism* (Edinburgh University Press, 2015).

Larangan selama tiga dekade atas kebebasan berorganisasi dicabut dari Keyakinan Bahá'í¹¹ pada tahun 2000, tetapi penganut Bahá'í tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan penjangkauan dan harus mengatur pertemuan mereka hanya dalam komunitas Bahá'í. Bahá'í ditoleransi, tetapi dipahami bahwa itu mungkin tidak berkembang. Kegiatan seperti transmisi dari pintu ke pintu, acara terbuka untuk non-Bahá'í dan penyebaran brosur dilarang. Situs tersebut telah berulang kali dimatikan, dan pusat Bahá'í di Jakarta ditinggalkan selama sebagian besar tahun 2013 dan 2014.¹²

Dalam konteks yang lebih luas, kebebasan beragama berangsur-angsur harus ternodai dengan sejumlah ulah oknum, misalnya, kesepakatan akan larangan pendirian Gereja di Cilegon. Sulitnya pendirian gereja di Cilegon baru-baru ini menunjukkan aparaturnegara yang seharusnya mengayomi, justru sebaliknya.¹³ Lebih spesifik dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan Islam di daerah Muslim minoritas, tentu juga tidak luput diterpa berbagai permasalahan. Misalnya, fasilitas ibadah seperti masjid di sekolah kurang belum ada, ketika pelaksanaan shalat Jumat, siswa muslim terkadang tidak diberi ruang atau kesempatan dikarenakan proses belajar mengajar (PBM) masih berlangsung. Bahkan ruang kelas khusus bagi siswa untuk mata pelajaran Pendidikan Islam juga tidak tersedia. Selain itu,

¹² Selengkapnya di Hendri F. Isaeni, "Riwayat Baha'i di Indonesia", *Historia.id*, dalam <https://historia.id/agama/articles/riwayat-baha-i-di-indonesia-DbdqP>, diakses 8 Desember 2022; lihat juga CRCS UGM, "Baha'i dan Perjuangan Hak-Hak Sipil di Indonesia", *CRCS UGM*, dalam <https://crccs.ugm.ac.id/bahai-dan-perjuangan-hak-hak-sipil-di-indonesia/>, diakses 8 Desember 2022.

¹³ Lihat Wawan Wahyudin, “Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon”, kemenag.go.id, dalam <https://www.kemenag.go.id/read/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-doyyy>, diakses 12 Oktober 2022; lihat juga Masdar Hilmy, “Kebebasan Agama yang terluka”, Opini Kompas, 4 Oktober 2022.

Selain itu, para guru PAI di daerah minoritas Muslim itu sendiri juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menjerat mereka. Wahib, misalnya, meriset tentang pergulatan Pendidikan Islam yang ada di Bali bahwa ditemukan sekurangnya tiga; masih didapati ketidakleluasaan guru PAI dalam menyelenggarakan pembelajaran di sekolah misalnya di kelas tidak mendapatkan meja kerja sendiri, tidak pernah mendapatkan posisi struktural yang berarti, dilibatkan sebagai panitia hanya sekedar untuk peran-peran kecil; input siswa yang berkualitas rendah dan situasi lingkungan yang kurang mendukung seperti tidak memadai tempat belajar bagi siswa muslim, mengajar di luar jam efektif, proses belajar mengajar mata pelajaran PAI yang bersamaan dengan latihan kesenian yang menggunakan musik dengan suara keras, dan lain-lain. Selain itu, guru PAI di Bali masih dihantui dengan realitas sosial yang sedikit banyak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan di sekolah, lingkungan masyarakat dan tokoh adat Bali setempat, dan sebagainya.¹⁵

Mayani, Rusmayani. "The Potrait of PAI and Budi Pekerti's Learning in Public School on Minority." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 3. No. 1. 2019.

Shih, "Pergulatan Pendidikan Islam di Kawasan Minoritas Muslim", *Walisongo*, 19(2) 2011.

Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokrasi* (Penerbit Kompas, 2002).

Azyumardi. *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Media, 2019.

¹⁷ Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Prenada Media, 2019.

tidak diskriminasi manakala Pemerintah dalam memahami peraturan Mendagri yang perintah daerah memberikan bantuan kepada Islam (madrasah). Di lain itu, Kementerian yang membawahi madrasah itu sendiri memadai bagi penyelenggaraan madrasah realisasi anggaran berdasarkan asas menjadi perlakuan yang berbeda antara madrasah perkotaan dan madrasah pedesaan mayoritas Muslim dan madrasah di daerah

tidak diskriminasi manakala Pemerintah dalam memahami peraturan Mendagri yang perintah daerah memberikan bantuan kepada Islam (madrasah). Di lain itu, Kementerian yang membawahi madrasah itu sendiri memadai bagi penyelenggaraan madrasah realisasi anggaran berdasarkan asas menjadi perlakuan yang berbeda antara madrasah perkotaan dan madrasah pedesaan mayoritas Muslim dan madrasah di daerah

tidak diskriminasi manakala Pemerintah dalam memahami peraturan Mendagri yang perintah daerah memberikan bantuan kepada Islam (madrasah). Di lain itu, Kementerian yang membawahi madrasah itu sendiri memadai bagi penyelenggaraan madrasah realisasi anggaran berdasarkan asas menjadi perlakuan yang berbeda antara madrasah perkotaan dan madrasah pedesaan mayoritas Muslim dan madrasah di daerah

¹⁹ B Arifin. 2019. Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Daerah Minoritas Muslim dan Kawasan Elite. *Falasifa*, 10(2).

Bagi sekolah-sekolah negeri yang berada di daerah marginal khususnya di daerah minoritas muslim, tentu memiliki permasalahan yang jauh lebih kompleks dan rumit, tidak hanya terbatas pada kondisi fisik, tetapi juga kondisi non fisik seperti rendahnya daya dukung masyarakat dan pemerintah. Diberlakukannya peraturan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengatur anggaran termasuk mengatur anggaran pendidikan. Menurut Azyumardi Azra, pemberlakuan otonomisasi/desentralisasi pendidikan telah menimbulkan implikasi mendasar bagi pendidikan Islam (termasuk madrasah), karena desentralisasi pendidikan tidak melibatkan lembaga-lembaga pendidikan Islam termasuk madrasah, namun ia harus mengikuti perubahan tersebut.²⁰ Kebijakan yang diskriminatif ini semakin menguat, tatkala Pemerintah Daerah masih salah tafsir dalam memahami peraturan Mendagri yang sebenarnya tidak melarang Pemda memberikan bantuan pada madrasah.²¹

Problematika yang tak kalah mendasar adalah pihak kementerian agama terkesan cukup lamban dalam realisasi anggaran pendidikan Islam. Dalam hal ini Komisi VIII DPR RI mengkritisi pemangkasan anggaran Pendidikan Islam yang semula 46.9 triliun menjadi 45.5 triliun atau mengalami efisiensi sebesar 1.389 triliun atau 2.96 % dari total anggaran Program Pendidikan Islam tahun 2017.²²Selain itu, Kemenag terkesan

²⁰ Azyumardi Azra. 2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Rekonstruksi dan Demokratisasi), Kompas, Jakarta. h. 3; Hidayati, Umul. "Penyelenggaraan Madrasah di Daerah Minoritas Muslim." *Edukasi* 13.2 (2015): 271-272.

²¹ Surat Keputusan Mendagri Nomor 903/2429/ SJ Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD, yang ditafsirkan SK tersebut tidak memperkenankan pengalokasian anggaran untuk membantu institusi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Padahal tahun berikutnya Mendagri telah merubah kebijakannya dengan memperbolehkan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran APBD-nya untuk kegiatan pendidikan keagamaan (madrasah), yang penyalurannya dilakukan melalui Dinas Pendidikan setempat yang dituangkan dalam Rancana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Perangkat Kerja Daerah. Lihat Hidayati, Umul. "Penyelenggaraan Madrasah di Daerah Minoritas Muslim." *Edukasi* 13.2 (2015): 271.

²² DPR RI, “Jangan Ada Pemotongan Anggaran Pendidikan Pendidikan Islam”, *DPR RI*, dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16925/t/Jangan+Ada+Pemotongan+Anggaran+Pendidikan+Agama+Islam>, diakses 9 Desember 2022.

verifikasi berbasis data pada SIMPATIKA (Sistem Informasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) Kemenag masih kurang *up to date*. Oleh karena itu, Zain menekankan pentingnya pembaharuan (*updating*) data guru PAI maupun guru Agama di seluruh Indonesia di SIMPATIKA, sekaligus sebagai upaya mitigasi atas pencairan TPG (Tunjangan Profesi Guru) yang dinilai lamban, agar tidak terulang kembali.

Namun, perkembangan saat ini, Yaqut C. Qoumas, Menteri Agama RI bersama Komisi VIII DPR RI telah menyepakati peningkatan RAPBN Kementerian Agama pada tahun 2023 mendatang. Berdasarkan pagu indikatif, anggaran Kementerian Agama mengalami peningkatan sebesar Rp69.010.639.547.000. Besaran pagu indikatif ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.234.987.330.000 atau bertambah 3,82%, bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran tahun 2022, yaitu sebesar Rp66.453.208.486.000.²³ Artinya, peningkatan anggaran ini harus disambut dengan baik, yang sudah barang tentu diperlukan pengawalan bersama agar kesejahteraan para guru PAI di wilayah minoritas dapat terjaga secara berkala.

enterian Agama RI, “Kemenag dan DPR Bahas Pendalaman Pagu Indikatif 2023 “, *g.go.id*, dalam <https://kemenag.go.id/read/kemenag-dan-dpr-bahas-pendalaman-pagu-2023-01>ar, diakses 9 Desember 2022.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Problem selanjutnya ialah terkait pembiasaan. Pembiasaan disini dapat berupa kebutuhan, juga dapat berupa hal yang bersangkutan dengan kewajiban agama. Sebagaimana contohnya ialah *ṣalāt*, menutup aurat, doa pagi, dsb.

Dalam konteks pendidikan Islam di Bali, beberapa pelayanan tersebut juga menjadi perhatian serius. Beberapa pengakuan peserta didik secara tidak langsung mengalami pengalaman religius dan menyentuh pada kondisi jiwa nya. Yaitu doa pagi di sekolah yang diisi oleh puja *Tri Sandya*²⁴. Beberapa peserta didik muslim mengaku sampai pada tingkatan hafal²⁵ dari mantra *Tri Sandya*. Namun ketika ditanya mengenai terkait keyakinannya, apakah mereka pernah terbesit tentang pengaruh kepercayaannya atau tidak, mereka menjawab tidak, dan beberapa diam. Makna diam tersebut masih belum dilakukan konfirmasi ulang mengenai jawabannya.

Kondisi tersebut apabila dikaitkan dengan teori konstruksi sosial, secara eksternalisasi, mereka menyesuaikan ritual adat dari kelompok mayoritas. Sehingga memiliki sisi positif dan negatif. Melihat sisi positif, nilai toleransi dapat dimunculkan didalamnya. Meskipun sebenarnya, mengantisipasi beberapa efek negatif membutuhkan durasi waktu yang cukup padat bagi guru PAI. Misalnya, mereka mendampingi secara khusus

²⁴ Alaika M. Bagus Kurnia PS, “Observasi Penelitian Di SMA/ SMK Negeri Denpasar, Bali” (Penelitian Disertasi, February 2022). Mantra puja *tri sandya* ialah ritual doa yang dimiliki oleh umat Hindu dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat di Meghan Hynson, “A Balinese ‘Call to Prayer’: Sounding Religious Nationalism and Local Identity in the Puja Tri Sandhya,” *Religions* 12, no. 8 (2021): 668.

²⁵ “Wawancara Dengan Peserta Didik SMKN 1 Denpasar Pkl. 09.30 WITA Di Halaman Utama Sekolah.”

Larangan secara adat oleh pimpinan atau manajemen sekolah di salah satu SMA Negeri Denpasar (SMA Negeri 4 Denpasar) untuk membangun tempat ibadah di dalam lingkungannya, kecuali pura.

Larangan memakai jilbab bagi peserta didik muslim. Namun tidak secara sistematis secara terbuka oleh sekolah, atau hingga ranah aturan pemerintah provinsi. Melainkan secara personal. Misalnya, para guru yang beragama Hindu. Ketika dikonfirmasi, mereka memeluk keyakinan Hindu sekte Hendra Krisna atau Kama Sutra.

Denpasar Bali

Peningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan agama sangat tergantung kepada kualitas layanan pendidikan. Hal ini berarti kualitas layanan dapat dijadikan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat umumnya dan peserta didik khususnya. Kualitas layanan pendidikan berpusat pada upaya pemenuhan keinginan dan kebutuhan peserta didik serta ketepatan penyampainnya. Karena itu, kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pemakai.²⁶

Kualitas layanan pendidikan diketahui dengan cara membandingkan harapan/kepentingan pelanggan atas layanan yang ideal dengan layanan yang benar-benar mereka terima.²⁷ Menurut Feigenbaum, kualitas layanan merupakan kekuatan penting yang dapat membuahkan keberhasilan baik di dalam organisasi maupun pada pertumbuhan lembaga pendidikan, juga bisa

²⁷ Tjiptono F. dan Diana A., *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003, 57; Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 425-426.

Uraian di atas, jika dikaitkan dengan fokus masalah penelitian ini, maka layanan yang kami maksud adalah meliputi semua aspek seperti dari aspek kurikulum PAI dan kebijakan pendidikan agama, sarana prasarana, peran stakeholders terkait (kepala sekolah, kepala dinas, dan sebagainya), guru, peserta didik, dan peran wali siswa/ orang tua yang di mana ikut berperan aktif dalam memberikan layanan pendidikan PAI yang memadai bagi siswa. Juga, menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.

man yang diinginkan (*desired service*), layanan yang telah diterima (*received service*) dan layanan yang diprediksi (*predicted service*).³⁰ Terdapat dua layanan yaitu layanan prima dan layanan ma

1. *Desired Service* (layanan Yang Diinginkan)

Menurut Zeithaml dan Bitner, *Desired Service* merupakan suatu ekspektasi konsumen dimana konsumen ingin mendapatkan pelayanan yang

²⁸ Fiegenbaum, A., V. 1996. Total Quality Control. New York: McGraw-Hill Book, 103; Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 425-426.

²⁹ Edward Sallis, *Total Quality Mngement in Education*, Manajemen Mutu Pendidikan. Alih Bahasa Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi. Yogyakarta: IRCiSoD, 2006, 86; Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015): 425-426.

³⁰ Zeithaml, Valerie A., Leonard L. Berry, and Arantharanthan Parasuraman. "The nature and determinants of customer expectations of service." *Journal of the academy of Marketing Science* 21.1 (1993): 1-12.

Di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *desired service* adalah (1) faktor penguat pemilihan jasa (*enduring service intensifiers*) yaitu faktor-faktor individu atau kelompok yang mempengaruhi harapan konsumen secara stabil dalam meningkatkan sensitivitasnya terhadap jasa. Misalnya ekspektasi dasar terhadap jasa (*desired service expectation*), yang dapat terjadi bila ekspektasi konsumen dikendalikan oleh orang lain atau sekelompok orang. Faktor penguat lain adalah *personal service philosophy*, yaitu sikap dasar dari konsumen tentang arti jasa dan sikap yang pantas dari penyedia jasa. Dan (2) keinginan pribadi (*personal needs*), yaitu faktor yang sangat penting untuk membentuk tingkat *desired service*. Keinginan pribadi dapat masuk pada banyak kategori termasuk fisik, sosial, dan psikologi.

Jo Bitner, Valarie A Zeithaml, *Services Marketing*, Edisi 1, (Boston: McGraw-Hill, 1996),
 Christopher Loveock, Jochen Wirtz dan Jacky Mussry, *Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Erlangga,
 2000), 50.
 L. A. Kotler, Freddy. *Measuring Customer Satisfaction Teknik Mengukur Strategi Meningkatkan
 Kepuasan Pelanggan, serta Analisis PLN JP*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, 36.

³³ Rangkuti, Freddy. *Measuring Customer Satisfaction Teknik Mengukur Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan, serta Analisis PLN JP*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, 36.

Perorangan Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena kebutuhan pelayanan tersebut bersifat mendasar dan terkait dengan kesejahteraan pelanggan. 3. Janji secara langsung Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan dijanjikan mendapatkan pelayanan seperti itu secara langsung oleh pemberi/organisasi pemberi pelayanan. 4. Janji secara tidak langsung Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan memperoleh petunjuk yang berkaitan dengan pelayanan tersebut sehingga pelanggan menarik kesimpulan tentang pelayanan seperti apa yang seharusnya diberikan. Petunjuk tersebut meliputi harga serta peralatan pendukung pelayanan. 5. Komunikasi dari mulut ke mulut Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan menerima informasi atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak (bukan organisasi penyedia jasa), misalnya individu, orang ahli, laporan pelanggan, serta publisitas. 6. Pengalaman masa lalu Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan telah memiliki pengalaman yang meliputi hal-hal yang telah dipelajarinya atau diketahui.

Dalam konteks penelitian ini, merujuk pada persepsi dan ekspektasi peserta didik, guru dan orang tua di Bali, mereka menginginkan layanan Pendidikan Islam yang memadai tanpa memandang sekat-sekat ras. Selain itu, mereka ingin pembelajaran agama Islam (PAI) bisa dilangsungkan secara normal layaknya pembelajaran agama Hindu, baik dalam hal pembelajaran maupun pembiasaan. Tentu hal tersebut merupakan hal yang wajar. Namun, harus diakui fakta yang terjadi berkata lain. Indonesia dengan keragaman suku, *bahasa*, agama dan budaya di dalam proses akulturasi dan asimilasi tidak bisa meninggalkan etnisitas sehingga proses perumusan kebijakan beserta eksekusinya tidak lepas dari persoalan ini, termasuk layanan Pendidikan Islam di Bali yang notabene adalah minoritas.

Hal tersebut jauh berbeda dengan penyesuaian dan strategi bertahan bagi lingkungan guru PAI dan siswa muslim di daerah yang menjadi wilayah minoritas secara kuantitas. Sebagaimana di Denpasar, Bali

Keempat lokus sekolah yang peneliti teliti (SMKN 1 Denpasar, SMAN 7 Denpasar, SMKN 2 Denpasar, SMAN 2 Denpasar) terdapat beberapa kesamaan. SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2, dalam hal ini, memiliki kesamaan. Guru difasilitasi dan diberikan tempat yang memadai untuk mengajar di kelas dan dilaksanakan pada jam efektif mengingat jumlah ruang kelasnya banyak. Juga tempat ibadahnya seperti musholla juga didapati dalam kondisi ada dan layak, meskipun mengecil di dalamnya. Sedangkan tempat belajarnya sebagaimana di SMK Negeri 1 Denpasar, yaitu di satu kelas besar dan dilaksanakan di luar jam efektif.

³⁴ Margiyanto, “Wawancara Dengan Margiyanto Selaku Guru SMKN 1 Denpasar Dan SMAN 7 Denpasar.” Hal tersebut juga terjadi pada Kholis, “Wawancara Dengan Nurkholis Sebagai Guru PAI Di SMA Negeri 4 Denpasar.”

an dipenuhi oleh perusahaan.³⁷

nginginkan.³⁶ Jadi, *Adequate Service* adalah suatu an menerima pelayanan sesuai dengan kemamp m memenuhi permintaan pelayanan dari pelanggan l ini, klien memiliki tingkat layanan yang diinginkan n untuk diterima dan yang terdiri dari apa yang arus dipenuhi. Mereka juga memiliki tingkat laya setelah mereka mengakui bahwa suatu layanan ti i tingkat yang diinginkan, yaitu layanan yang ce). Di antara dua tingkat layanan ini ada zona diterima oleh klien. Dan akhirnya klien memiliki prediksi (*a predicted service level*), yang mewak an dipenuhi oleh perusahaan.³⁷

an dipenuhi oleh perusahaan.³⁷

an dipenuhi oleh perusahaan.³⁷

³⁶ Christopher Loveock, Jochen Wirtz dan Jacky Mussry, *Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 50.

³⁸ Zeithaml, Valerie A., Leonard L. Berry, and Arantharathan Parasuraman. "The nature and determinants of customer expectations of service." *Journal of the academy of Marketing Science* 21.1 (1993): 1-12.

Cetin et al. (2009) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harapan klien adalah: komunikasi verbal (verbal communications), urgensi pribadi (personal exigencies), pengalaman masa lalu (past experience) dan pengaruh eksternal (external influences).⁴² Faktanya, melebihi harapan pelanggan adalah elemen kejutan dan kesempatan terbaik untuk mengejutkan pelanggan adalah selama proses penyampaian layanan, ketika penyedia layanan bertemu dengan pelanggan, dalam kasus kami, selama proses pendidikan offline dan online. Foroughi Abari dkk. (2011) percaya bahwa spesialis yang secara khusus meneliti cara untuk mengevaluasi kualitas layanan sangat tertarik dengan kenyataan bahwa harapan klien telah terpenuhi, tetapi korespondensi antara layanan yang ditawarkan (*offered services*) dan harapan klien hanya dianggap sebagai kriteria.⁴³

³⁹ Hill, Frances M. "Managing service quality in higher education: the role of the student as primary consumer." *Quality assurance in education*, 3.3 (1995): 10-21.

⁴¹ Voss, Roediger, Thorsten Gruber, and Isabelle Szmigin. "Service quality in higher education: The role of student expectations." *Journal of Business Research* 60.9 (2007): 949-959.

⁴³ Abari, Ahmad Ali Foroughi, Mohammad Hossein Yarmohammadian, and Mina Esteki. "Assessment of quality of education a non-governmental university via SERVQUAL model." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 15 (2011): 2299-2304.

si, terkait pelaksanaan pembelajaran, terdapat se
nakan kegiatan PBM dengan menempatkan
didalam jam efektif. Moh. Zaini selaku gu
KN 2 Denpasar menambahkan, bahwasanya ia me
PAI pada jam efektif dikarenakan kondisi sekolah
kelas kosong untuk ditempati sebagai perpindahan
system). Namun ada juga yang melaksana
AI di luar jam efektif sekolah sebagaimana yang
SMA Negeri 7 Denpasar, dan Nur Kholis
MA Negeri 4 Denpasar⁴⁴.

si, terkait pelaksanaan pembelajaran, terdapat se
nakan kegiatan PBM dengan menempatkan
didalam jam efektif. Moh. Zaini selaku gu
KN 2 Denpasar menambahkan, bahwasanya ia me
PAI pada jam efektif dikarenakan kondisi sekolah
kelas kosong untuk ditempati sebagai perpindahan
system). Namun ada juga yang melaksana
AI di luar jam efektif sekolah sebagaimana yang
SMA Negeri 7 Denpasar, dan Nur Kholis
MA Negeri 4 Denpasar⁴⁴.

si, terkait pelaksanaan pembelajaran, terdapat se
nakan kegiatan PBM dengan menempatkan
didalam jam efektif. Moh. Zaini selaku gu
KN 2 Denpasar menambahkan, bahwasanya ia me
PAI pada jam efektif dikarenakan kondisi sekolah
kelas kosong untuk ditempati sebagai perpindahan
system). Namun ada juga yang melaksana
AI di luar jam efektif sekolah sebagaimana yang
SMA Negeri 7 Denpasar, dan Nur Kholis
MA Negeri 4 Denpasar⁴⁴.

si, terkait pelaksanaan pembelajaran, terdapat se
nakan kegiatan PBM dengan menempatkan
didalam jam efektif. Moh. Zaini selaku gu
KN 2 Denpasar menambahkan, bahwasanya ia me
PAI pada jam efektif dikarenakan kondisi sekolah
kelas kosong untuk ditempati sebagai perpindahan
system). Namun ada juga yang melaksana
AI di luar jam efektif sekolah sebagaimana yang
SMA Negeri 7 Denpasar, dan Nur Kholis
MA Negeri 4 Denpasar⁴⁴.

Namun demikian, poin penting kami adalah bahwa orang tua siswa muslim menaruh kepedulian terhadap layanan Pendidikan Islam yang memang sangat kurang memadai. Dalam hal ini, pendidikan agama tetap menempati peran sentral kehidupan manusia, tidak terkecuali di wilayah minoritas muslim di Bali.

Predicted service adalah layanan yang benar-benar diantisipasi pelanggan untuk diterima dikenal sebagai layanan yang diprediksi. Jika layanan yang baik diprediksi, tingkat yang memadai akan lebih tinggi daripada jika layanan yang lebih buruk diprediksi. Harapan pelanggan atas layanan mungkin spesifik situasi. Jika dikontekstualisasikan dalam penelitian ini, maka *predicted service* lebih kepada prediksi peserta didik, guru, dan orang tua siswa perihal pelayanan pendidikan Islam di sekolah umum negeri. Prediksi tersebut dapat bernilai positif atau negatif tergantung bagaimana seluruh komponen sekolah bekerja keras dalam hal memberikan pelayanan terbaiknya (*quality service*).

Dari data di atas, bahwa dalam proses belajar-mengajar yang dilakukan oleh SMAN 2, SMAN 7, SMKN 1, SMKN 2 Denpasar melalui

Untuk menopang layanan Pendidikan Islam tersebut mutlak diperlukan layanan yang prima sebagai bagian daripada penerjemahan program tersebut. Dalam hal Bali, pelayanan prima ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali wilayah minoritas. Pemerataan ini adalah wujud realisasi dari amanat undang-undang bahwa negara wajib mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui pendidikan dan ekonomi. Pemerataan pendidikan ini yang dimaksud adalah kesempatan bagi anak bangsa untuk dapat mengenyam pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam ruang lingkup masyarakat. Hal tersebut harus diperoleh agar tidak ada perbedaan atau kecemburuan dalam aspek pemerataan pendidikan.

Layanan prima ini, misalnya, ditunjukkan oleh SMAN 7 Denpasar Bali. Hal itu ditunjukkan dengan pemberian apresiasi kepada peserta didik yang meraih prestasi. Dalam teori kontak dan pengaruh minoritas, prestasi tersebut akan menjadi motivasi bagi guru PAI lain yang mengampu di sekolah lain. Sekaligus hal ini menjadi *high bargaining* kepada stakeholders terkait bahwa mereka benar-benar mampu menunjukkan prestasinya di segala keterbatasan yang ada. Kepala sekolah beserta jajarannya yang responsif atas prestasi tersebut, juga dengan memberikan penghargaan dan apresiasi di depan warga sekolah. Hal tersebut merupakan bentuk toleransi yang tinggi dari pendidikan dan nilai-nilai masyarakat Bali yang beragama, yang biasa disebut dengan '*menyame braye*' atau hidup dalam kebersamaan⁴⁷. Hal ini juga dikuatkan oleh kepala sekolah, "Bahwasanya kita mendukung segala prestasi yang diraih. Sebagaimana kemarin kita

⁴⁷ I. Ketut Sunarya, "The Concept of Rwa Bhineda Kriya on the Island of Bali towards Jagadhita.," *Wacana Seni Journal of Arts Discourse* 19 (2020): 47–60.

mendapatkan informasi dari guru PAI terkait prestasi yang didapatnya baik pada kancah nasional maupun Internasional.⁴⁸

Pendidikan di Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Hak warga negara Indonesia seperti yang tertuang didalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan tentang setiap warga negara berhak menerima pendidikan yang sama. Adanya pasal tersebut dapat mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan di wilayah wilayah saudara kita yang kurang dalam fasilitas pendidikan. Dengan pemerataan pendidikan yang baik, maka nasib dari suatu negara akan dapat terjamin dikarenakan memiliki kualitas generasi yang cemerlang. Maka negara kita akan dapat maju seperti negara lainnya.

Dengan begitu bangsa ini dapat maju dan berkembang melalui sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk menciptakan SDM yang berkualitas semuanya berawal dari pendidikan yang didapatkan. Semakin baik pendidikan yang didapatkan maka, sudah menjadi jaminan akan kualitas yang dapat diberikan. Dengan begitu dapat meningkatkan kesejahteraan umum warga negara. Pendidikan yang didapatkan dari setiap daerah haruslah sama. Inilah yang menjadi tujuan dari pemerataan pendidikan tidak ada pelosok daerah yang mendapatkan pendidikan berbeda. Atau bahkan yang tidak tersentuh sama sekali oleh sistem pendidikan di daerahnya.

5. *Self Service* (Layanan Mandiri)

Layanan mandiri adalah layanan yang sebagian besar dikerjakan dan diinisiasi oleh seseorang atau sebagian kelompok dalam hal memenuhi kebutuhannya. Kami melihat, layanan Pendidikan Islam yang ada dalam lingkup penelitian ini, dan bahkan mayoritas di Bali adalah layanan

⁴⁸ Wiratmaja, “Wawancara Dengan Kepala SMA Negeri 7 Denpasar.”

Tidak dapat dipungkiri, karena guru PAI menyiapkan segala sesuatunya secara mandiri. Misalnya, menggabungkan kelas. Karena secara normal sebagaimana kelas belajar untuk keperluan KBM pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, terbatas. Meskipun secara ideal, saat ini pelaksanaan KBM dalam satu kelas maksimal 20 peserta didik. Karena setiap kelas hanya terdapat 4 sampai 5 peserta didik, maka inisiatif digabungkan nya dalam satu kelas, menjadi kelas besar dalam setiap jenjangnya.⁵⁰ Hal-hal semacam itu akan menjadi penghambat demi terwujudnya layanan yang prima atau memadai. Namun, itulah faktanya. Oleh karena itu, layanan mandiri cukup tepat disematkan kepada guru PAI di SMAN/SMKN Denpasar karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran, sarpras dan lain sebagainya dilakukan secara mandiri, meskipun ada beberapa dukungan itupun tidak mengurangi kemandirian di dalam memberikan layanan Pendidikan Islam.

⁴⁹ Zaini, “Observasi Mata Pelajaran PAI Kelas X Di SMK Negeri 2 Denpasar.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

”Kami pernah mengirimkan delegasi dari peserta didik, antusiasnya luar biasa ketika sekolah mengetahui mereka mendapatkan prestasi juara. Misalnya juara 2 Olimpiade Halal tingkat Nasional, dan bahkan pernah berprestasi pada olimpiade PAI tingkat Nasional. Ia juga menambahkan, bahwasanya pejabat sekolah bersama pimpinan MUI Provinsi Bali di depan warga sekolah memberikan apresiasi yang sangat luar dengan mendokumentasikan penghargaanannya”.

Prestasi tersebut diraih oleh peserta didik SMA Negeri 7 Denpasar. Menurutnya, prestasi tersebut akan menjadi motivasi bagi guru PAI lain yang mengampu di sekolah lain. Kepala sekolah beserta jajarannya yang responsif atas prestasi tersebut, juga dapat memberikan penghargaan dan apresiasi di depan warga sekolah. Hal tersebut merupakan bentuk toleransi yang tinggi dari pendidikan dan nilai-nilai masyarakat Bali yang beragama, yang biasa disebut dengan '*menyame braye*' atau hidup dalam kebersamaan.⁵² Hal ini juga dikuatkan oleh kepala sekolah, "Bahwasanya kita mendukung segala prestasi yang diraih. Sebagaimana kemarin kita mendapatkan informasi dari guru PAI terkait prestasi yang didapatnya baik pada kancah nasional maupun Internasional".⁵³

⁵¹ Surani et al., “Focus Group Discussion (FGD) Dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI Kota Denpasar Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022 Di Ruang Bidang Pendidikan Islam Bersama Kepala Bidang Pendidikan Islam Kota Denpasar.”

⁵³ Cokorda Gede Anom Wiratmaja, “Wawancara Dengan Kepala SMA Negeri 7 Denpasar” (Ruang Kepala SMA Negeri 7 Denpasar, February 21, 2022).

sar yang ada, sehingga pada akhirnya (Covid-19), atas izin kepala sekolah, dan bukan tanpa alasan kepala sekolah. Bukan tanpa alasan kepala sekolah warga sekolah yang beragama Islam setelah agama Hindu. Namun pasca pandemi covid-19, aktivitas shalat menjadi problem tersendiri terkait dengan menyangkut pertanggungjawabannya diikut peserta didik yang menyalahgunakan waktu sholat jum'at. M. Zaini dalam wawancara dengan saya selaku guru untuk melakukan tindakan dan hukuman

sar yang ada, sehingga pada akhirnya (disebabkan oleh covid-19), atas izin kepala sekolah, dan dengan persetujuan orang tua/warga sekolah yang beragama Islam, maka kegiatan ini telah agama Hindu. Namun pasca terjadinya pandemi covid-19, aktivitas shalat berjamaah menjadi problem tersendiri terkait dengan protokol kesehatan menyangkut pertanggungjawabannya apabila terdapat peserta didik yang menyalahgunakan kesempatan untuk sholat jum'at. M. Zaini dalam wawancara dengan saya selaku guru kelas menyatakan bahwa untuk melakukan tindakan dan hukuman

sar yang ada, sehingga pada akhirnya (Covid-19), atas izin kepala sekolah, orang tua siswa. Bukan tanpa alasan kepala sekolah karena guru agama Islam dan beberapa wali murid telah agama Hindu. Namun pasca pandemi covid-19, aktivitas shalat berjamaah menjadi problem tersendiri terkait dengan masalah ini karena menyangkut pertanggungjawaban moralitas di lingkungan sekitar akibat perilaku peserta didik yang menyalahgunakan kebebasan beragama dalam melaksanakan sholat jum'at.

M. Zaini dalam wawancara mengatakan bahwa sebagai kepala sekolah dengan saya selaku guru agama harus melakukan tindakan dan hukuman

[illegible]

muslim sebagai minoritas dan menyesuaikan ritual adat Hindu Bali. Dari hal tersebut, muncul dua sisi, yaitu positif dan negatif. Melihat sisi positif, guru PAI dapat lebih mandiri dalam mengembangkan kreativitasnya karena dihadapkan pada persoalan yang menuntut mereka mau tidak mau harus kreatif. Persoalan yang dimaksud adalah kondisi Bali yang sarat akan nuansa Hindu membuat guru PAI dalam melakukan proses KBM harus lebih adaptif tanpa menimbulkan gesekan yang berarti terhadap sisw/i Hindu Bali.

Adapun sisi negatif lainnya, jika persoalan ini tidak segera ditangani oleh stakeholders terkait, pimpinan sekolah, kepala dinas pendidikan dan agama wilayah Bali, misalnya, bukan tidak mungkin kesulitan yang dialami guru PAI di lapangan dapat menjadi bom waktu karena keluhan mereka yang tidak terakomodir dalam proses KBM. Tentu saja, kasak-kusuk di antara guru PAI menjadi kepelikan yang tak terbantahkan. Solusi yang harus diambil dari para stakeholders terkait adalah merumuskan formula terbaik bagaimana mengemas pembelajaran PAI di tingkat dasar, menengah hingga atas tanpa harus melunturkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa sub bab yang telah diuraikan dan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti kemudian dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, sistem aktualisasi layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas muslim di Denpasar Bali tercermin dari ketersediaan guru, layanan sarana pra sarana, layanan administrasi, layanan waktu, dan layanan kurikulum. Ketersediaan guru PAI di provinsi Bali tidak sebanyak guru agama Hindu yang pada dasarnya adalah mayoritas secara populasi. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan adanya sarana pra sarana di masing-masing sekolah, misalnya, perbedaan ruang kelas, tempat ibadah, dan sebagainya. Selain itu, layanan administrasi pembelajaran, mayoritas guru PAI mengandalkan salah satu guru yang dianggap mumpuni untuk dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun administrasi pembelajaran.

Kedua, praktik layanan pendidikan Islam kepada siswa muslim di SMA/ SMK di Denpasar tercermin dalam dua hal; praktik pembelajaran dan praktik pembiasaan kegiatan keagamaan. Terkait praktik pembelajaran, guru PAI telah berusaha memberikan pengajaran yang optimal layaknya pembelajaran pada umumnya, namun memang masih ada kendala baik dari sisi kebijakan, kultur masyarakat Bali, kurikulum maupun sarana pra-sarana. Di lain itu, guna menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), layanan Pendidikan Islam dikemas dalam praktik pembiasaan kegiatan keagamaan, baik skala kecil maupun besar, misalnya shalat Jumat, kegiatan PHBI, peduli sosial, dan sebagainya.

Ketiga, model layanan pendidikan Islam bagi siswa muslim minoritas di Denpasar Bali adalah layanan mandiri (*self service*). Layanan mandiri ini sekaligus mengonfirmasi asumsi penulis di latar belakang bahwa layanan

Implikasi Teoritik dan Praktik

Dari disertasi ini, peneliti mengkategorikan dua implikasi dari akibat pelayanan Pendidikan Islam di lingkungan minoritas muslim di SMA/ SMK Denpasar, bali, antara lain sebagai berikut:

1. Implikasi teoritik

1. Implikasi teoritik

Sesara teoritik, model penelitian ini memunculkan satu paradigma

Secara teoritik, model penelitian ini memunculkan satu paradigma bahwa layanan pendidikan di wilayah minoritas tidak bisa disamakan dengan wilayah mayoritas. Dalam konteks demikian, diperlukan layanan terpadu (*integrated service*) sebagai solusi atas problematika tersebut. Keterpaduan layanan tersebut harus berangkat dari kesadaran diri (*self awareness*) dari masing-masing insan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Selain itu, secara geografis dan sosiologis, Bali memiliki keunikan tersendiri dalam hal kearifan lokal dan pendidikan berbasis tradisi. Dua hal ini penting untuk dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam, dalam hal ini, di wilayah minoritas layaknya Bali. Prinsip itu meliputi fleksibilitas, kontinuitas, efektif dan efisiensi, dan pendidikan seumur hidup, di samping mempertimbangkan heterogenitas, multikultural dan kearifan lokal di wilayah masing-masing.

Lebih dari itu, penelitian ini menguatkan tiga teori yang ada (teori kontak, pengaruh minoritas dan konstruksi sosial) bahwa tidak selamanya minoritas hanya mengekor pada mayoritas. Temuan kami justru minoritas Muslim Bali dalam hal ini siswa dan guru muslim dapat menjadi agen

privasi) *ketimbang* konkrit. Mereka mempengaruhi proses kognitif pesan mereka (dipicu oleh situasi yang berbeda dari situasi pengaruh). Terbukti secara faktual bahwa di bawah payung mayoritas nonmuslim, sekolah dapat menunjukkan kepada pihak eksternal, dapat memengaruhi nonmuslim, dan dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Pendidikan Islam di lingkungan sekolah, dalam tataran tertentu, bisa memobilisasi potensi yang implikasinya akan menimbulkan kontak antara empiris, terdapat satu sekolah yang bisa dijadikan acuan pelayanan Pendidikan Islam secara mandiri. Sekolah tersebut PAI di sekolah tersebut, ia memanfaatkan kecerdasan put siswa yang memiliki kualitas SDM yang baik.

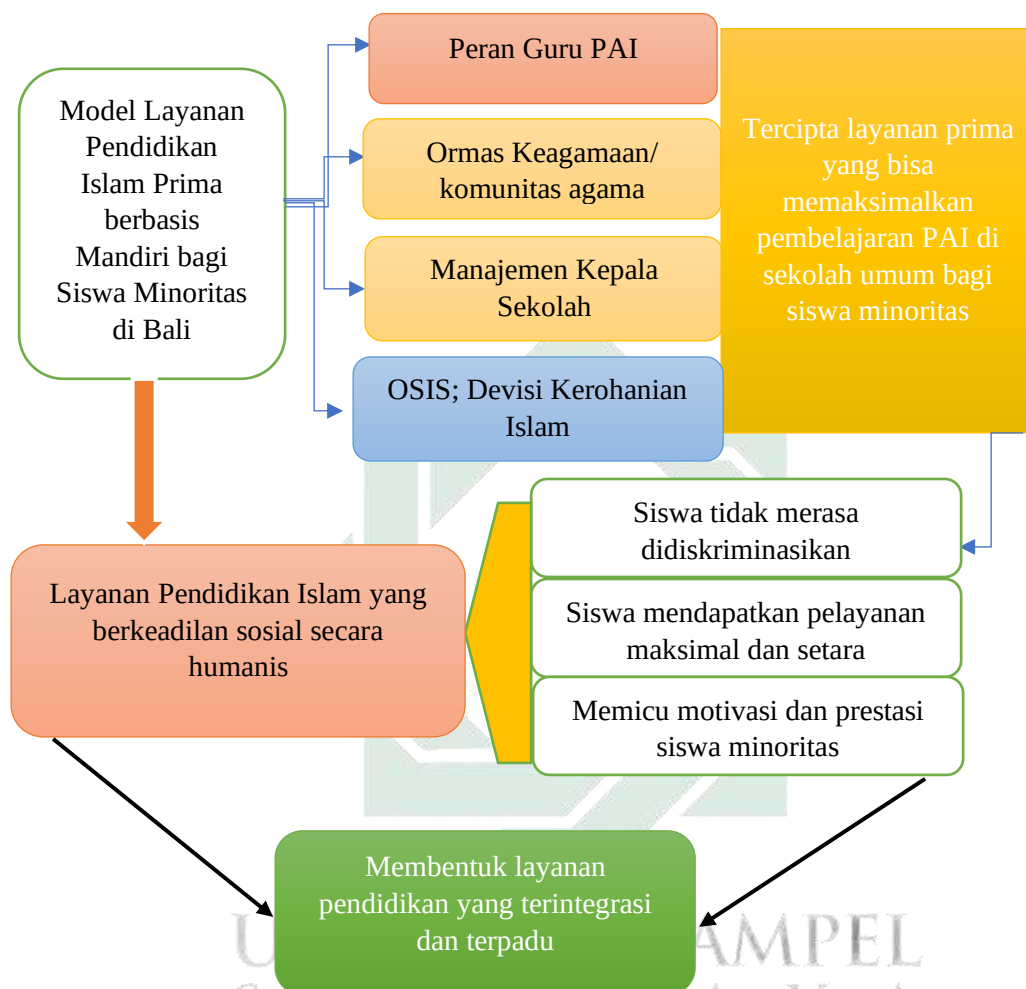
privasi) *ketimbang* konkrit. Mereka mempengaruhi proses kognitif pesan mereka (dipicu oleh situasi yang berbeda dari situasi pengaruh). Terbukti secara faktual bahwa di bawah payung mayoritas nonmuslim, sekolah dapat menunjukkan kepada pihak eksternal, dapat memengaruhi nonmuslim, dan dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat pendidikan Islam di lingkungan sekolah.

Salah satu faktor yang dalam tataran tertentu, bisa memobilisasi sumber daya yang implikasinya akan menimbulkan kontak langsung antara empiris, terdapat satu sekolah yang bisa dijadikan sebagai pelayanan Pendidikan Islam secara mandiri. Sekolah tersebut PAI di sekolah tersebut, ia memanfaatkan kecerdasan put siswa yang memiliki kualitas SDM yang baik.

Asumsinya, jikalau individu terlibat di dalamnya maka akan terjadi kontak dan interaksi sehingga gradasi prasangka yang mulanya tinggi menjadi berkurang, yang pada gilirannya akan terbina sebuah jalinan yang positif – atau dalam bahasa Durkheim, kohesi sosial. Dalam hal ini, siswa dan guru muslim adalah orang-orang dan kelompok-kelompok yang berinteraksi dalam suatu sistem sosial yang menciptakan, dari waktu ke waktu, konsep-konsep atau representasi mental dari tindakan masing-masing, dan menjadi *habitus* dalam peran timbal balik yang dimainkan oleh para aktor dalam hubungannya satu sama lain.

Ketika peran-peran ini tersedia bagi anggota masyarakat lainnya untuk masuk dan bermain, interaksi timbal balik terlembagakan atau terinstitusionalisasi secara teratur. Dalam prosesnya, proses ini berjalan *embedded* dalam relung masyarakat Muslim minoritas di Bali dan berjaln kelindan dengan pengetahuan dan konsepsi (dan keyakinan) masyarakat tentang realitas apa yang menjadi tertanam dalam struktur kelembagaan masyarakat. Oleh karena itu, realitas dapat dikatakan dikonstruksi secara sosial.

Dari penjelasan di atas maka dapat disusun sebuah desain tentang model layanan Pendidikan Islam bagi siswa minoritas di SMA/SMK Bali sebagai berikut:



Gambar 5.1 Aktualisasi Layanan Terpadu Pendidikan Islam di Denpasar, Bali

Berdasarkan model di atas, dapat disimpulkan bahwa desain model layanan Pendidikan Islam terpadu bagi siswa minoritas di Bali berdasarkan nilai kebersamaan dan keadilan yang didukung oleh peran guru PAI, ormas keagamaan, manajemen kepala sekolah dan organisasi intra sekolah sehingga dapat melahirkan layanan yang prima bagi siswa minoritas yang pada akhirnya menjadikan siswa minoritas merasa tidak didiskriminasikan, siswa dapat pelayanan maksimal dan motivasi serta prestasi mereka bisa

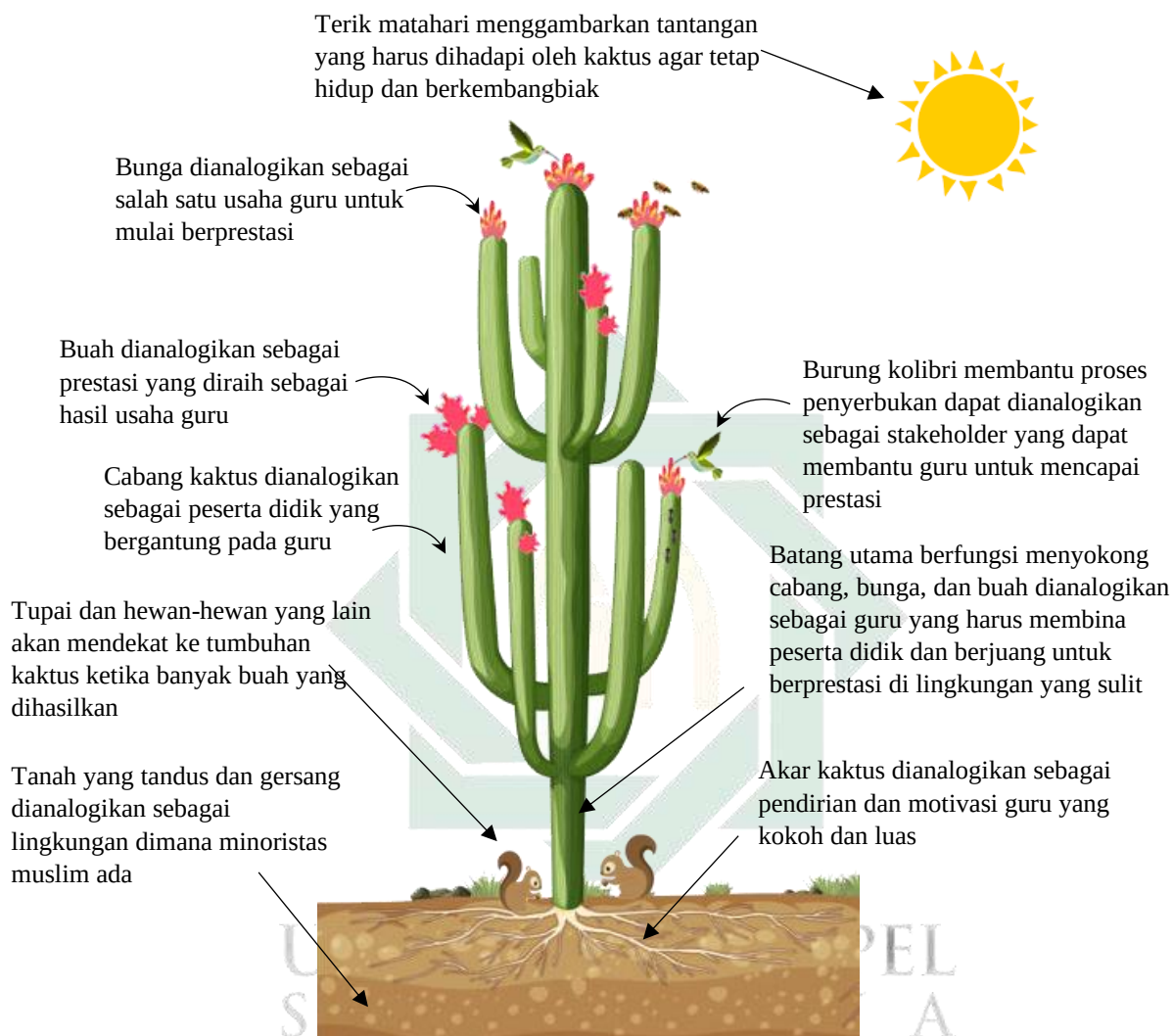
ajaran yang berupa tidak habis pakai seperti (patun perlengkapan *ṣalāt*, buku paket, hingga ruang kelas). Ruang belajar, mendapatkan tempat untuk ibadah. membutuhkan beberapa argumentasi mengenai saat pengadaan, juga bagaimana mengenai pengalokasian, perlengkapan *ṣalāt* juga berasal dari anggaran sekolah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Layanan pembelajaran pun juga menjadi perhatian utama. Sebab tolak ukur keberhasilan belajar juga dilakukan didalam aktivitas pembelajaran. Sehingga kegiatan pembelajaran juga perlu disiapkan secara matang mengenai bahan ajar, media pembelajaran secara maksimal dan sesuai dengan keadaan, hingga perangkat pembelajaran. Maka kekuatan dan keseriusan guru juga dilihat dari hal tersebut.

Sebagai kesimpulan, selama guru mampu mengatasi pelayanan tersebut dan menjalin hubungan komunikasi dan eksekusi dengan baik kepada peserta didik, mengajak mereka memahami posisi dirinya, juga mewujudkan beberapa kebutuhan dan proses pendidikan Islam yang baik didalamnya, maka pelayanan pendidikan Islam akan dapat berjalan dan berkembang dengan baik.

Layanan pendidikan Islam pada setting minoritas tersebut dapat dianalogikan seperti model pelayanan tumbuhan kaktus. Kaktus merupakan tumbuhan yang mampu hidup, tumbuh, dan berkembang di gurun yang kering dan tandus. Agar dapat terus hidup, tumbuhan kaktus harus beradaptasi dengan lingkungannya yaitu dengan menumbuhkan sistem perakaran yang kuat, panjang, namun dangkal dengan tujuan agar dapat menyerap air yang ada dipermukaan seefektif mungkin saat hujan turun.



Gambar 5.2 Analogi Tumbuhan Kaktus pada Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim di Denpasar Bali

Air yang sudah diserap harus disimpan dengan baik dalam tubuhnya. Kaktus juga harus berjuang untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis sehingga mampu memenuhi kebutuhan makanan tubuh utama beserta cabang-cabangnya. Fotosintesis pada kaktus tidak terjadi sekaligus ketika siang hari seperti pada tumbuhan pada umumnya, tetapi kaktus harus melakukan proses fotosintesis malam hari dan siang hari. Ketika malam hari

, sehingga proses penyerbukan agar kak
buah dan biji untuk berkembangbiak harus dilakul
arena itu kaktus harus mampu menghasilkan m
k perhatian burung kolibri atau lebah yang akan
ukan. Setelah proses penyerbukan terjadi, akan b
han dan kaktus akan menghasilkan buah ya
semakin besar. Kaktus yang berbuah, akan menari
ain seperti semut, tupai, iguana, dan unta untuk
buah tersebut. Buah yang berkualitas di dalam
tutus yang berkualitas pula, sehingga nantinya ketika
gersang dan tandus akan tetap mampu bertahan d
eturunan kaktus yang baru.
ama kaktus berfungsi menyokong cabang, bunga
kaktus dapat dianalogikan sebagai satu-satunya

, sehingga proses penyerbukan agar kak
buah dan biji untuk berkembangbiak harus dilakuk
arena itu kaktus harus mampu menghasilkan m
k perhatian burung kolibri atau lebah yang akan
ukan. Setelah proses penyerbukan terjadi, akan b
han dan kaktus akan menghasilkan buah ya
semakin besar. Kaktus yang berbuah, akan menari
ain seperti semut, tupai, iguana, dan unta untuk
buah tersebut. Buah yang berkualitas di dalam
tutus yang berkualitas pula, sehingga nantinya ketika
gersang dan tandus akan tetap mampu bertahan d
eturunan kaktus yang baru.
ama kaktus berfungsi menyokong cabang, bunga
kaktus dapat dianalogikan sebagai satu-satunya

, sehingga proses penyerbukan agar kak
buah dan biji untuk berkembangbiak harus dilakuk
arena itu kaktus harus mampu menghasilkan m
k perhatian burung kolibri atau lebah yang akan
ukan. Setelah proses penyerbukan terjadi, akan b
han dan kaktus akan menghasilkan buah ya
semakin besar. Kaktus yang berbuah, akan menari
ain seperti semut, tupai, iguana, dan unta untuk
buah tersebut. Buah yang berkualitas di dalam
tutus yang berkualitas pula, sehingga nantinya ketika
gersang dan tandus akan tetap mampu bertahan d
eturunan kaktus yang baru.
ama kaktus berfungsi menyokong cabang, bunga
kaktus dapat dianalogikan sebagai satu-satunya

Burung kolibri merupakan burung kecil yang membantu proses penyerbukan dapat dianalogikan sebagai beberapa pihak yang dapat membantu guru untuk mencapai prestasi meskipun jumlah pihak yang dapat membantu hanya sedikit. Bunga dianalogikan sebagai salah satu usaha guru untuk mulai menunjukkan prestasi. Adanya kaktus yang mulai berbunga akan banyak hewan yang akan datang pada kaktus tersebut. Hal ini dapat dianalogikan ketika guru dan peserta didik sudah mulai mendapatkan prestasi, maka pihak sekolah dan pemerintah akan mulai memperhatikannya. Buah dianalogikan sebagai banyak prestasi yang diraih sebagai hasil usaha guru. Tupai, semut, unta, iguana, dan hewan-hewan yang lain akan mendekat ke tumbuhan kaktus ketika banyak buah yang dihasilkan. Hal ini dapat dianalogikan ketika guru dan peserta didik mendapatkan banyak prestasi, maka akan banyak pihak yang mendekati dan menjadikannya sebagai komponen yang penting dalam menjalankan layanan pendidikan.

Implikasi Praktik

Secara praktik, aktivitas layanan pada pendidikan Islam di SMA/SMK Negeri di Denpasar, perlu adanya perhatian dari eksternal maupun internal. Dikatakan eksternal ketika beberapa *stakeholder* yang terkait maupun tidak terkait, namun memiliki nafas kepedulian, seperti ormas

Secara praktik, aktivitas layanan pada pendidikan Islam di SMA/SMK Negeri di Denpasar, perlu adanya perhatian dari eksternal maupun internal. Dikatakan eksternal ketika beberapa *stakeholder* yang terkait maupun tidak terkait, namun memiliki nafas kepedulian, seperti ormas

Sebagaimana guru memaksimalkan pembelajaran diluar jam efektif sekolah dan atau bahkan diluar hari efektif sekolah. pembiasaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, baik melalui pendampingan ibadah hingga kegiatan keagamaan. Hal tersebut juga dibuktikan oleh SMA Negeri 7 Denpasar, mereka mendapatkan perhatian lebih dari sekolah, karena mereka menjawab keberadaan kualitas kelompoknya dengan prestasi. Sehingga pelayanan keagamaan secara waktu dan tempat diberikan hal yang berbeda dengan sekolah lain, yaitu adanya *ṣalāt* Jum'at berjama'ah. Praktik pelayanan ini yang dianggap sebagai praktik pelayanan produktif dan mampu memberikan contoh moral bagi sekolah lain untuk menduplikatnya, yaitu terkhusus pada pelayanan pendidikan Islam pada setting minoritas.

yang disusun oleh peneliti, peneliti memberikan rekomendasi kepada elemen masyarakat sebagai berikut:

yang disusun oleh peneliti, peneliti memberikan rekomendasi kepada elemen masyarakat sebagai berikut:

- aku pendidikan atau praktisi pendidikan, seharusnya m
masif terhadap siswa, orang tua wali murid dan sta
bagai cara konsultasi, penyampaian materi, hingga eval
akan semakin memberikan layanan yang berbentu
guru yang bersentuhan langsung dengan pelaya
n penguatan aqidah, bimbingan, pendampingan sec
ra.
- tar pendidikan, perlu adanya penelitian yang lebih ba
macam tema dan model, yang berkaitan dengan layan
minoritas muslim, sehingga dapat memberikan us
egang regulasi atau kebijakan, kepala sekolah sebagai

unit, hingga para pelaku pelayanan Pendidikan Islam dalam hal ini adalah guru dan komunitas sekolah di lingkungan SMA/ SMK.

3. Kepada Perguruan Tinggi, agar mengadakan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) secara khusus terhadap pelayanan Pendidikan Islam di lingkungan sekolah umum Denpasar, Bali. Bagi mahasiswa, perguruan tinggi juga lebih masif menjalin kerjasama secara khusus kepada pemerintah dalam hal ini kepala bidang PAI di dalam naungan kementerian agama terkait kebutuhan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan sebagai tenaga pendidik (guru) di Denpasar, Bali. Dalam hal ini memerlukan alih-alih lulusan sarjana baru, yaitu mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi pada program studi PAI dibawah naungan PTKIN atau PTKIS.
4. Kepada Komunitas Muslim, disertasi ini dapat menjadi referensi untuk melakukan sinergi dengan unit pendidikan yang terhubung dengannya. Seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII dan sejenisnya, atau Rumah Tahfidz, Lembaga Bimbingan Membaca Al-Qur'an juga bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran PAI di sekolah maupun di luar sekolah.

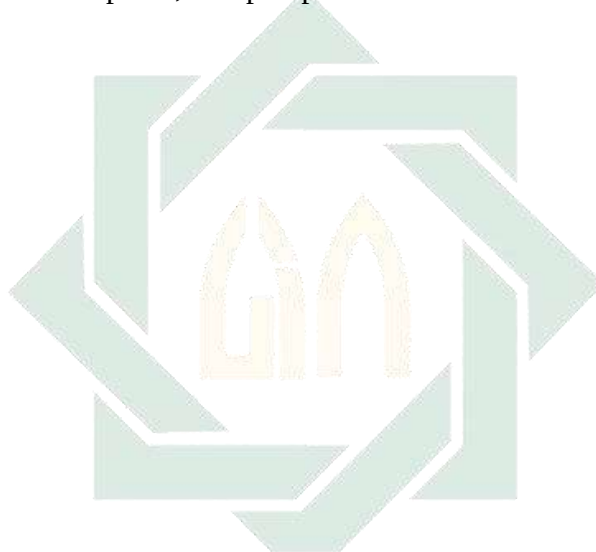
Dengan demikian, rekomendasi ini dapat dijadikan bentuk penguatan teori tentang pengaruh minoritas yang memerlukan sinergi antar komunitas muslim di Denpasar, Bali.

D. Keterbatasan Studi

Model pelayanan Pendidikan Islam yang dijadikan subjek mayor pada penelitian ini tidak bisa dilakukan oleh semua pelaksana pendidikan secara acak. Sehingga Batasan penelitian ini hanya bisa dilakukan oleh kelompok minoritas muslim, dengan cara bagaimana pelayanan Pendidikan Islam di lingkungan pendidikan formal atau nonformal dapat terealisasi secara optimal yang lahir dari populasi muslim itu sendiri. Sehingga studi ini hanya terbatas pada Pelayanan Pendidikan Islam di lingkungan mayoritas nonmuslim, juga diperuntukkan bagi lembaga pendidikan formal. Karena beberapa komponen

pelayanan juga memberikan telaah pada sub pelayanan di lingkungan pendidikan formal yang umum. Bukan khusus atau bisa disebut lembaga pendidikan Islam.

Demikian juga studi ini diberlakukan bagi warga muslim yang tidak memiliki pengaruh secara kuat baik secara regulasi atau kebijakan umum, hingga secara kuantitas tidak berada pada cakupan paling banyak baik di lingkungan kota atau kabupaten, maupun provinsi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Abari, Ahmad Ali Foroughi, Mohammad Hossein Yarmohammadian, and Mina Esteki. "Assessment of quality of education a non-governmental university via SERVQUAL model." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 15 (2011): 2299-2304.

Afandi, Ichlas Nanang, Faturachman Faturachman, and Rahmat Hidayat. "Teori Kontak: Konsep dan Perkembangannya." *Buletin Psikologi* 29.2 (2021): 178-186.

Agustin, Rizkika, Kasuwi Saiban, and Mufarrihul Hazin. "Problematika Pendidikan Islam di Daerah Minoritas Muslim." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21.02 (2021): 153-160.

Al Ramiah, Ananthi, and Miles Hewstone. "Intergroup contact as a tool for reducing, resolving, and preventing intergroup conflict: Evidence, limitations, and potential." *American Psychologist* 68.7 (2013): 527.

Allen, V. L. (1965). Situational factors in conformity. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 2, pp. 133–175). New York: Academic Press.

Allen, Vernon L. "Situational factors in conformity." *Advances in experimental social psychology*. Vol. 2. Academic Press, 1965. 133-175.

AlRamiah, Ananthi, and Miles Hewstone. "Intergroup contact as a tool for reducing, resolving, and preventing intergroup conflict: Evidence, limitations, and potential." *American Psychologist* 68.7 (2013): 527.

Ananda, Dina, Muhammad Thohir, and Rusmawati Rusmawati. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Pendidikan di MAN 1 Hulu Sungai Utara." *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 4.1 (2022): 114-123.

Araragi, Chitoshi. "The effect of the jigsaw learning method on children's academic performance and learning attitude." *Japanese Journal of Educational Psychology* (1983): 102-12.

- Arifin, Bustanul. "Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Daerah Minoritas Muslim dan Kawasan Elite." *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 10.2 (2019): 1-9.
- Arifin, Syamsul, et al. "Minority Muslims and freedom of religion: learning from Australian Muslims' experiences." *Indonesia Journal of Islam and Muslim Societies* 8.2 (2019).
- Arifin, Zaenal. 'Metodologi Penelitian Pendidikan'. *Jurnal Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020).
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arjawa, I. G. P., and Bagus Suka. "The Social Integration of Hindu and Muslim Communities: The Practice of *menyama-Braya* in Contemporary Bali." *Studia Islamika* 28.1 (2021): 149-178.
- Aronson, Elliot, and Ruth Thibodeau. "The jigsaw classroom: A cooperative strategy for reducing prejudice." *Cultural diversity and the schools*. Routledge, 2006. 231-255.
- Asch, Solomon E. "Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments." *Organizational influence processes* 58 (1951): 295-303.
- Attaran, Mohammad. "Moral Education, Habituation, and Divine Assistance in View of Ghazali," *Journal of Research on Christian Education* 24, no. 1 (2015): 43–51.
- Azra, Azyumardi. "Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap pendidikan Islam." *Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah* 4.1 (2000).
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Rekontruksi dan Demokratisasi)*. Jakarta; Kompas, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Badan Pusat Statistik. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*. Jakarta: BPS Indonesia, 2010.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: BPS Indonesia, 2020.
- Baker, Sara M., and Richard E. Petty. "Majority and minority influence: Source-position imbalance as a determinant of message scrutiny." *Journal of personality and social psychology* 67.1 (1994): 5.

- Bandana, I. G. W. S. "Sistem Nama Orang Bali: Kajian Struktur dan Makna." *Aksara* 27.1 (2015): 1-11.
- Bararah, Isnawardatul. "Efektifitas Perencanaan Pembelajaran Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam Di Sekolah." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2017): 131–147.
- Barata, Atep Adya. *Dasar-dasar pelayanan prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Basyir, Kunawi. "Membangun kerukunan antarumat beragama berbasis budaya lokal Menyama Braya di Denpasar Bali." *Religio Jurnal Studi Agama-agama* 6.2 (2016): 186-206.
- Basyir, Kunawi. "Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2013): 15-16.
- Basyir, Kunawi. "The 'Acculturative Islam' as a Type of Home-Grown Islamic Tradition: Religion and Local Culture in Bali." *Journal of Indonesian Islam* 13.2 (2019): 326-349.
- Basyir, Kunawi. *Harmoni Sosial Keagamaan Masyarakat Multikultural: Studi Tentang Konstruksi Sosial Kerukunan Umat Beragama Islam-Hindu Di Denpasar Bali*. Disertasi - Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Berger, Peter L. and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Uk, 1991.
- Berglund, Jenny. "The Study of Islamic Education, A Litmus Test on State Relations to Muslim Minorities." *Method and Theory in the Study of Religion: Working Papers from Hannover*. Brill, 2017. 232-258.
- Bimas Islam Kemenag. *Islam di Bali; Sejarah Masuknya Agama Islam ke Bali*. Denpasar: Dirjen Bimas Islam Provinsi Bali, 2009.
- Brewer, M. B. "Beyond the Contact Hypothesis: Theoretical Perspectives on Desegregation in N. Miller and M. Brewer (eds.) *Groups in Contact: The Psychology of Desegregation*. Orlando: Academic Press, 1984: 281-302.
- Brewer, Marilynn B., and Roderick M. Kramer. "The psychology of intergroup attitudes and behavior." *Annual review of psychology* 36.1 (1985): 219-243.
- Bristol, Lucius Moody. *Social adaptation: A study in the development of doctrine of adaptation as a theory of social progress*. Cambridge: Havard University Press, 1930.

- Bullons, Stephen, et. all (eds.), *Collins Build Learner's Dictionary*. London: Harper Collins Publishers, 1996.
- Burgess, Robert G. *In the Field: An Introduction to Field Research*. Routledge, 2002.
- Burhani, Ahmad Najib. "Torn between Muhammadiyah and Ahmadiyah in Indonesia: Discussing Erfaan Dahlan's religious affiliation and self-exile." *Indonesia and the Malay World* 48.140 (2020): 60-77.
- Burhani, Ahmad Najib. "Treating minorities with fatwas: a study of the Ahmadiyya community in Indonesia." *Contemporary Islam* 8.3 (2014): 285-301.
- Burhani, Ahmad Najib. *Dilema Minoritas Indonesia; Ragam, Dinamika dan Kontroversi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Burhani, Ahmad Najib. *Menemani Minoritas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Cetina, Iuliana, Marketingul serviciilor. *Fundamente și domenii de specializare*. București: Editura Uranus, 2009.
- Cevallos, Ligia Fernanda Espinosa and Sandy T. Soto. "EFL Classroom Management," *MEXTESOL Journal* 44, no. 2 (2020): 1–11.
- Chu, Donald, and David Griffey. "The contact theory of racial integration: The case of sport." *Sociology of Sport Journal* 2.4 (1985): 323-333.
- Clark III, Russell D., and Anne Maass. "Social categorization in minority influence: The case of homosexuality." *European Journal of Social Psychology* 18.4 (1988): 347-364.
- Cohen, Elizabeth G. "Expectation states and interracial interaction in school settings." *Annual review of sociology* (1982): 209-235.
- Condorelli, Rosalia. "Cultural differentiation and social integration in complex modern societies reflections on cultural diversity management strategies from a sociological point of view." *Sociology Mind* 8.4 (2018): 261.
- Cribb, Alan, and Sharon Gewirtz. "Towards a sociology of just practices." *Soc Justice Educ Identity* 15 (2003).
- Daryanto, Ismanto Setyobudi. *Konsumen dan pelayanan prima*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- De Smet, Hendrik. "The course of actualization." *Language* (2012): 601-633.

3. *Total Quality Control*. New York: McGraw-Hill Books.

- Greene, M. "Introduction: Teaching for social justice. A. William, JA Hunt and T. Quinn (Eds.) *Teaching for social justice*. New York: Teachers College Press, 1998.
- Groenewald, Thomas. "A phenomenological research design illustrated." *International journal of qualitative methods* 3.1 (2004): 42-55.
- Guermonprez, Jean-François. "La religion balinaise dans le miroir de l'hindouisme." *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient* (2001): 271-293.
- Gultom, Fadly Mart. *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Hacker, Helen Mayer. "Women as a minority group." *Social forces* (1951): 60-69.
- Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hamilton, Sue, et al. "Phenomenology in practice: Towards a methodology for a 'subjective' approach." *European Journal of Archaeology* 9.1 (2006): 31-71.
- Hauser-Schäublin, Brigitta and David D Harnish. 'Introduction: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok', in *Between Harmony and Discrimination: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok*. Brill, 2014. 1–32.
- Hauser-Schäublin, Brigitta. "" Bali Aga" and Islam: Ethnicity, Ritual Practice, and" Old-Balinese" as an Anthropological Construct." *Indonesia* 77 (2004): 30.
- Heisenberg, W. *Across the frontiers*. New York: Harper Torchbooks, 1975, 157.
- Hemamalini, Kadek, and Untung Suhardi. "Dinamika Perkawinan Adat Bali." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 14.27 (2016): 36-47.
- Hennink, Monique, Inge Hutter, and Ajay Bailey. *Qualitative research methods*. Sage, 2020.
- Hidayat, Tatang and Abas Asyafah. "Konsep Dasar Evaluasi Dan Implikasinya Dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Islam Di Sekolah," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2019): 159–181.
- Hidayat, Tatang, and Abas Asyafah. "Konsep Dasar Evaluasi Dan Implikasinya Dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Islam Di Sekolah." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10.1 (2019): 159-181.

- elenggaraan Madrasah
2 (2015): 294629.
- g service quality in high
consumer." *Quality assurance*
- Agama yang terluka", *Op*
- etik: *Substansiasi Nilai*
Kanisius, 2008.
- manajemen sarana
ish, 2015.
- elitian Pendidikan Dan
Gaung Persada Press, 2009
- . Cambridge MA: Harvar
- arifan Lokal Sebagai Re
elitian Sosial Keagama
- tar Penyampaian Data G
Dan SMK Di SMA/ SMI
- urat Pengantar Penyamp
Jenjang SMA Dan S
nas Pendidikan, Kepemu
(22).
- ger Johnson, and G
interpersonal attraction i
aps in contact. Academic
- & social adaptation: A
evier, 2013.
- a Kehidupan Minoritas M
(): 115-145.
- bud Dan Menag No. 4/U
aksanaan Pendidikan Agar
di Lingkungan Pembinaa

- Kern, H. "Oudjavaansche eedformulieren op Bali gebruikelijk." *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* 20.3/4de Afl (1874): 211-228.
- Kestenbergh-Amighi, Janet. "Contact and Connection: A Cross-Cultural Look at Parenting Styles in Bali and the United States." *Zero to Three* (J) 24.5 (2004): 32-39.
- Killian, Lewis M. "WHAT OR WHO IS A MINORITY?". *Michigan Sociological Review* (1996): 18-31.
- Komnas HAM. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal*. Jakarta; Komnas HAM, 2016.
- Krathwohl, David R. and Benjamin S. Bloom. *Taxonomy of Educational Obyektives, The Classification of Educational Goals, Handbook II Affective Domain*. London: Longman Group, 1973.
- Larsen, Knud S. "The Asch conformity experiment: Replication and transhistorical comparison." *Journal of Social Behavior and Personality* 5.4 (1990): 163.
- Laursen, Finn. *Eu enlargement*. Bruxelles, Belgium, Peter Lang Verlag, 2013.
- Liana, Nurul Agustin. *Analisis faktor yang mempengaruhi kepuasan orang tua peserta didik terhadap layanan pendidikan di SDN Model Terpadu Kabupaten Bojonegoro*. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang, 2015.
- Lovelock, Christopher, Jochen Wirtz dan Jacky Mussry. *Pemasaran Jasa, Manusia, Teknologi, Strategi, Perpektif Indonesia*. Jakarta: Penerbit Airlangga, 2012.
- Lusch, Robert F., and Stephen L. Vargo. *Service-dominant logic: Premises, perspectives, possibilities*. New York: Cambridge University Press, 2014.
- Maass, Anne, and Russell D. Clark. "Hidden impact of minorities: Fifteen years of minority influence research." *Psychological Bulletin* 95.3 (1984): 428.
- Madasari, Okky. *The Outcast*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Makarim, Nadiem Anwar. "Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/ M/ 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran" (KEMENDIKBUDRISTEK, February 10, 2022).

- Mansur, Rosichin. "Pengembangan kurikulum Pendidikan Islam multikultural (Suatu prinsip-prinsip pengembangan)." *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2016).
- Marshall, Catherine and Gretchen B Rossman. *Designing Qualitative Research*. Sage publications, 2014.
- Maslow, Abraham H. "Critique of self-actualization theory," *The Journal of Humanistic Education and Development* 29.3 (1991): 103-108.
- Maslow, Abraham Harold. *Self-actualization*. Big Sur Recordings, 1971.
- Maslow, Abraham. "Some educational implications of the humanistic psychologies." *Harvard Educational Review* 38.4 (1968): 685-696, 155.
- Maslow, Abraham. *Self-actualization and beyond*. Boston: The Center for the Study of Liberal Education for Adults, Boston University, 1965.
- Mawardi, Ahmad Imam. *FIQH MINORITAS Fiqh Al-Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- McKean, Philip Frick. "Tourism, culture change, and culture conservation in Bali." *Changing identities in modern Southeast Asia* (1976): 237-248.
- Mead, George Herbert. *Mind, self and society*. Vol. 111. University of Chicago Press.: Chicago, 1934.
- Meyers, Barton. "Minority group: An ideological formulation." *Social Problems* 32.1 (1984): 1-15.
- Miles, Matthew B. A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. California: SAGE Publications, 2014.
- Moscovici, Serge Ed, Angelica Ed Mucchi-Faina, and Anne Ed Maass. *Minority influence*. Nelson-Hall Publishers, 1994, 46.
- Moscovici, Serge, and Claude Faucheux. "Social influence, conformity bias, and the study of active minorities." *Advances in experimental social psychology*. Vol. 6. Academic Press, 1972. 149-202.
- Moscovici, Serge, and Gabriel Mugny. "Minority influence." *Basic group processes*. Springer, New York, NY, 1983. 41-64.
- Moscovici, Serge, Elisabeth Lage, and Martine Naffrechoux. "Influence of a consistent minority on the responses of a majority in a color perception task." *Sociometry* (1969): 365-380.

- Moser, Albine, and Irene Korstjens. "Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis." *European journal of general practice* 24.1 (2018): 9-18.
- Muazaroh, Siti and Subaidi Subaidi. "Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019): 17–33.
- Mudhofir, Ali. *Pendidik profesional: konsep, strategi, dan aplikasinya dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mudlofir, Ali. *Desain Pembelajaran Inovatif: dari Teori ke Praktik-Rajawali Pers*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Mugny, Gabriel, and Stamos Papastamou. "When rigidity does not fail: Individualization and psychologization as resistances to the diffusion of minority innovations." *European Journal of Social Psychology* 10.1 (1980): 43-61.
- Muin, Abdul. "Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2015).
- Munthiu, Maria-Cristiana, et al. "Characteristics of educational services in the virtual environment." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 109 (2014): 1237-1241.
- Murtadho, Muhamad. "WISATA RELIGI DI BALI." *Dialog* 38.1 (2015): 13-28.
- Musfah, Jejen. *Analisis Kebijakan Pendidikan Mengurai Krisis Karakter Bangsa*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Nemeth, Charlan J., et al. "The liberating role of conflict in group creativity: A study in two countries." *European journal of social psychology* 34.4 (2004): 365-374.
- Nemeth, Charlan, and John Rogers. "Dissent and the search for information." *British Journal of Social Psychology* 35.1 (1996): 67-76.
- Noble, Helen, and Joanna Smith. "Issues of validity and reliability in qualitative research." *Evidence-based nursing* 18.2 (2015): 34-35.
- Noppeney, Uta. "Kurt Goldstein—a philosophical scientist." *Journal of the History of the Neurosciences* 10.1 (2001): 67-78.

- Agenda Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010
Pendidikan Agama Pada Sekolah

- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Bab II tentang Tujuan dan Azas, Pasal 2.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.
- Perez, Juan A., Stamos Papastamou, and Gabriel Mugny. "'Zeitgeist' and minority influence—where is the causality: A comment on Clark (1990)." *European Journal of Social Psychology* 25.6 (1995): 703-710.
- Peters, Jan Hendrik. *Tri Hita Karana*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.
- Peterson, Randall S., and Charlan J. Nemeth. "Focus versus flexibility majority and minority influence can both improve performance." *Personality and Social Psychology Bulletin* 22.1 (1996): 14-27.
- Pettigrew, Thomas F., and Linda R. Tropp. "A meta-analytic test of intergroup contact theory." *Journal of personality and social psychology* 90.5 (2006): 751.
- Picard, Michel. "The discourse of kebalian: transcultural constructions of Balinese identity." *Staying local in the global village: Bali in the twentieth century* (1999): 21-23.
- Power, Sally, and Sharon Gewirtz. "Reading education action zones." *Journal of Education Policy* 16.1 (2001): 39-51.
- Prasad, Sameer, and Sunil Babbar. "International operations management research." *Journal of operations management* 18.2 (2000): 209-247.
- Qureshi, Asma Asrar, and Usman Mahmood. "Impact of quality of service delivery in business education." *11th QMOD Conference. Quality Management and Organizational Development Attaining Sustainability From Organizational Excellence to Sustainable Excellence; 20-22 August; 2008 in Helsingborg; Sweden*. No. 033. Linköping University Electronic Press, 2008.
- Raihani Raihani. *Creating Multicultural Citizens: A Portrayal of Contemporary Indonesian Education*. Routledge, 2014.

- Raihani, Raihani. "Islamic schools and social justice in Indonesia: A student perspective." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 50.2 (2012): 279-301.
- Raihani. *Creating Multicultural Citizens: A Portrayal of Contemporary Indonesian Education*. Routledge, 2014.
- Ramdhani, Fajri Zulia, Busro Busro, and Abdul Wasik. "The Hindu-Muslim Interdependence: A Study of Balinese Local Wisdom." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 28.2 (2020): 195-218.
- Ramstedt, Martin. *Menafsirkan kembali tata norma Bali pasca-Orde Baru; Kegagalan identitas: agama, etnisitas dan kewarganegaraan pada masa pasca-Orde Baru*. Jakarta: Grasindo, 2011. 41-72.
- Rangkuti, Freddy. *Measuring Customer Satisfaction Teknik Mengukur Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan, serta Analisis PLN JP*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Riordan, Cornelius, and Josephine Ruggiero. "Producing equal-status interracial interaction: A replication." *Social Psychology Quarterly* (1980): 131-136.
- Riordan, Cornelius. "Equal-status interracial contact: A review and revision of the concept." *International Journal of Intercultural Relations* 2.2 (1978): 161-185.
- Robinson Jr, Jerry W., and James D. Preston. "Equal-status contact and modification of racial prejudice: A reexamination of the contact hypothesis." *Social Forces* 54.4 (1976): 911-924.
- Rogers, Everett M. *History of communication study*. New York: Free Press, 1994.
- Roth, Dik, dan Gede Sedana. "Reframing Tri Hita Karana: Dari 'Budaya Bali' Menjadi Politik." *Jurnal Antropologi Asia Pasifik* 16.2 (2015): 157-175.
- Rubin, Leon, and I. Nyoman Sedana. *Performance in Bali*. Routledge, 2007.
- Rusmayani, Rusmayani. "The Potrait of PAI and Budi Pekerti's Learning in Public School on Earth Minority." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 3. No. 1. 2019.
- Sagarin, Edward, ed. *The Other Minorities: Nonethnic Collectivities Conceptualized as Minority Groups*. Ginn, 1971.
- Saihu, Made. *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

- re contact and social change through tourism: Crossroad village on Bali (Indonesia)*. Unpublished Ph.D. dissertation, University of California, San Diego (1994).

- yan. "Tri Hita Karana theoretical basic of moral education". *Journal of linguistics, literature and culture* 2.3 (2018): 1-10.

in Islamic high schools." *Pegem Journal of Education and Instruction* 11.4 (2021): 282-289.

Supomo, Bambang and Nur Indriyanto, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Suprapti, Suprapti. "Analisis Kritis Manajemen Madrasah di Era Otonomi Daerah." *Religi: Jurnal Studi Islam* 5.1 (2014): 102-123.

Suprpto, Suprpto. "Layanan Pendidikan Islam Bagi Anak-Anak Buruh Migran Indonesia Di Kota Kinabalu Sabah Malaysia." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2017): 423-424.

Surat Keputusan Mendagri Nomor 903/2429/ SJ Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Suryadi, Rudi Ahmad and Aguslani Mushlih. *Desain Dan Perencanaan Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Suryawan, I Nyoman. 2016. "Adaptasi Etnik Bugis Mempertahankan Eksistensinya Dalam Era Globalisasi Di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Selatan." *Seminar Nasional Riset Inovatif* 4: 562–72.

Suryawan, Nyoman. 2017. "Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Integrasi Antara Etnik Bali dan Etnik Bugis di Desa Petang, Badung, Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 7(1): 17–32.

Suyatno et.al. "Strategy of Values Education in the Indonesian Education System." *International Journal of Instruction* 12, no. 1 (January 2019): 607–624.

Syafi'i, Fahrian Firdaus. "Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak," In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 2022.

Syauqi, Ahmad. *Analisa Implementasi Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 Tentang Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20 Persen*. PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2009.

TAP MRPS sebelumnya, menurut TAP.MPR No.II/MPR/1993 tentang GBHN.

Telford, Ronnie, and Ron Masson. "The congruence of quality values in higher education." *Quality assurance in education*, 13.2 (2005): 107-119.

Temaja, Gede Bagus Wisnu Bayu, and Gede Bagus Wisnu Bayu. "Sistem Penamaan Orang Bali." *Dalam Jurnal Humanika* 24.2 (2017).

- Theodorson, George A. "Minority peoples in the Union of Burma." *Journal of Southeast Asian History* 5.1 (1964): 1-16.
- Tjiptono F. dan Diana A. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- University of Oklahoma. Institute of Group Relations, and Muzafer Sherif. *Intergroup conflict and cooperation: The Robbers Cave experiment*. Vol. 10. Norman, OK: University Book Exchange, 1961.
- van Bloemen Waanders, P. L. *Aanteekeningen omtrent de zeden en gebruiken der Balinezen, inzonderheid die van Boeleleng*. Lange, 1859.
- Van Gennep, Arnold. *The Rites of Passage*. Routledge, 2013.
- Vargo, Stephen L., and Robert F. Lusch. "Evolving to a new dominant logic for marketing." *Journal of marketing* 68.1 (2004): 1-17.
- Vargo, Stephen L., Paul P. Maglio, and Melissa Archpru Akaka. "On value and value co-creation: A service systems and service logic perspective." *European management journal* 26.3 (2008): 145-152.
- Verma, Harsh V. *Services marketing: Text and cases, 2/e*. Pearson Education India, 2011.
- Vezzali, Loris, and Sofia Stathi, eds., *Intergroup contact theory: Recent developments and future directions*. Routledge, 2016.
- Voss, Roediger, Thorsten Gruber, and Isabelle Szmigin. "Service quality in higher education: The role of student expectations." *Journal of Business Research* 60.9 (2007): 949-959.
- Wahib, Abdul. "Pergulatan Pendidikan Islam di kawasan minoritas muslim." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19.2 (2011): 467-482.
- Wahyuningsih, Nurnajmi, Etty Nurbayani, and Wildan Saugi. "Pengaruh Rasio Jumlah Siswa Dalam Kelas Terhadap Efektivitas Pembelajaran PAI Di SMK Farmasi Samarinda." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 6, no. 1 (2019): 47-61.
- Walker, Iain, and Mary Crogan. "Academic performance, prejudice, and the jigsaw classroom: New pieces to the puzzle." *Journal of community & applied social Psychology* 8.6 (1998): 381-393.

- A., Mary Jo Bitner, and Dwayne D. Gremler. "Strategy." *Wiley International Encyclopedia of Market*

Adelistia, Praying

- <http://conference.um.ac.id/index.php/apfip/article/view/421>.

Itjen Kemenag, “"Kawal 7 (Tujuh) Program Prioritas Kemenag" Bahasan KIIS Seri 67”, *itjen.kemenag.go.id*, dalam <http://itjen.kemenag.go.id/web/kawal-7-tujuh-program-prioritas-kemenag-bahasan-kiis-seri-67#:~:text=Tugas%20utama%20Kemenag%20membangun%20masyarakat,Toleransi%202022%22%2C%20tandas%20Erman.>, diakses 12 Oktober 2022.

Kanwil Kemenag DIY. “Enam Program Unggulan Direktorat PAI Kemenag RI”, *DIY Kemenag*, dalam <https://diy.kemenag.go.id/21426-enam-program-unggulan-direktorat-pai-kemenag-ri.html>, diakses 15 November 2022.

Kemenag. "Dinilai Berdedikasi, Tiga Guru PAI ini Raih Penghargaan Nasional 2019", *Kemenag.go.id*, (14 Desember 2019), dalam <https://kemenag.go.id/read/dinilai-berdedikasi-tiga-guru-pai-ini-raih-penghargaan-nasional-2019-bgg1o>, diakses 23 Oktober 2022.

Kemenag. “Kemenag Rekonsiliasi Data Calon Penerima Tunjangan Profesi Guru”, *Kemenag.go.id*, dalam <https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-rekonsiliasi-data-calon-penerima-tunjangan-profesi-guru-01nqe>, diakses 12 Oktober 2022.

Kemendikbud, “JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) PER PROVINSI: Prov. Bali”, dalam <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=220000&level=1>, diakses 2 April 2022.

Kementerian Agama Denpasar Bali. “Jumlah Umat Beragama di Kota Denpasar”, *Balikemenag.go.id*, dalam <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/artikel/jumlah-umat-beragama-di-kota-denpasar>, diakses 25 Januari 2022.

Komisi VIII DPR RI, “Jangan Ada Pemotongan Anggaran Pendidikan Islam”, *DPR.go.id*, dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16925/t/javascript>, diakses 12 Oktober 2022.

- Kusnandar, Viva Budy. "Islam Agama Terbesar Kedua Di Bali | Databoks," accessed October 23, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/islam-agama-terbesar-kedua-di-bali>.
- Nugraheny, Dian Erika. Kompas Cyber Media, 'Menag Sebut Mayoritas Muslim Indonesia Setuju dengan Pancasila', *KOMPAS.com*, 13 March 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/11584391/menag-sebut-mayoritas-muslim-indonesia-setuju-dengan-pancasila>.
- Pratiwi, Fuji. "Jumlah Guru PAI Minim", *Republika.com*, (29 Maret 2014), dalam <https://www.republika.co.id/berita/n2nmpu/jumlah-guru-pai-minim>, diakses 18 Oktober 2022.
- Raihani Raihani, 'A Model of Islamic Teacher Education For Social Justice In Indonesia: A Critical Pedagogy Perspective', *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 14, no. 1 (1 June 2020): 164, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.163-186>.
- Raka, Anak Agung Gede. "Antara Desa Adat dan Desa Pakraman", *Balipost.com*, dalam <https://www.balipost.com/news/2019/01/29/67424/Antara-Desa-Adat-dan-Desa...html>, diakses 6 April 2022.
- SMAN 2 Denpasar, "Profil Sekolah", dalam https://www.sman2-denpasar.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53, diakses 27 Maret 2022.
- SMAN 2 Denpasar, "Profil", dalam <https://sman2denpasar.sch.id/>, diakses 2 April 2022.
- SMAN 7 Denpasar, "Sejarah Sekolah", dalam <https://www.sman7denpasar.sch.id/page/read/47/sejarah.html>, diakses 27 Maret 2022.
- Smith, Christine M., R. Scott Tindale, and Bernard L. Dugoni. "Minority and majority influence in freely interacting groups: Qualitative versus quantitative differences." *British Journal of Social Psychology* 35.1 (1996): 137-149.
- SMKN 1 Denpasar, "Visi Misi Sekolah", dalam <https://www.smkn1denpasar.sch.id/visimisi>, diakses 27 Maret 2022.
- SMKN 2 Denpasar, "Sejarah Sekolah", dalam <https://smkn2dps.sch.id/index.php/en/profil-sekolah/smkn-2-denpasar/sejarah-sekolah>, diakses 2 April 2022.

<https://smkn2dps.sch.id/index.php/en/profil-sekolah/smkn-2-denpasar/visi-misi>, diakses 27 Maret 2022.

<https://www.britannica.com/science/self-actualization>. Accessed 26 October 2021.

Syekh Subakir In Tawing Village, Trenggalek Perspective Of Living Qur'an', *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 2 (29 July 2020): 313–30, <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2102-04>.

Rights”, *OHCHR | SC Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights*, accessed 8 October 2021, <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/sc/pages/subcommission.aspx>.

kemenag.go.id, dalam <https://www.kemenag.go.id/read/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-doyyq>, diakses 12 Oktober 2022.

Sumber Penelitian

Di Halaman Utama Sekolah” (Sie Kerohanian Islam SMKN 1 Denpasar, February 18, 2022).

Negeri 2 Denpasar” (SMK Negeri 2 Denpasar, February 22, 2022).

(Humas SMK Negeri 1 Global Denpasar, Pebruari 2022).

Negeri 2 Denpasar, 2022).

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali” (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, February 18, 2022).

Denpasar” (SMA Negeri 4 Denpasar, February 22, 2022).

1. “FGD Dengan Syamsuddin Dan
SMA Negeri Denpasar” (W
ari 2022).
2. “FGD Dengan Syamsuddin Dan
SMA Negeri Denpasar” (W
ari 2022).
3. “FGD Dengan Syamsuddin Dan
SMA Negeri Denpasar” (W
ari 2022).
4. “Focus Group Discussion Ber
asar, Bali” (FGD Denpasar, Bali, M
agus. “Lampiran Absensi Focus
Aktualisasi Layanan Pendidikan
Denpasar Bali” (FGD Denpasar, E
bruary 18, 2022).
5. “Wawancara Data Statistik Gu

- da Gede Anom (Kepala Sekolah SMAN 7 Denpasar).
2022.